PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6901);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomoeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-861 tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 -2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026–2046 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 Nomor 01);
29. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan atas RKPD tahun berjalan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan atas Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
10. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.

12. Prioritas dan plafon anggaran yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN PERUBAHAN RKPD

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Perubahan RKPD Tahun 2026;
(2) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimkasud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai:
    a. Pedoman penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan
    b. Pedoman penyusunan rancangan Perubahan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun anggaran 2026
(2) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dmaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
    a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah
    b. Target sasaran pembangunan daerah
    c. Prioritas pembangunan daerah
    d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah: dan
    e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. Pendahuluan;
    b. Evaluasi Hasil Rkpd Sampai Dengan Triwulan Ii Tahun 2026;
    c. Kerangka Ekonomi Dan Keungan Daerah;
    d. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
    e. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
    f. Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
    g. Penutup.
(2) Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(3) Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD mencakup program, kegiatan, indicator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 27 Juli 2026

BUPATI BARITO KUALA,

H.BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026 NOMOR 25

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Perubahan RKPD merupakan tahapan dalam proses penyusunan RKPD yang memuat arah kebijakan, prioritas, serta kerangka pendanaan pembangunan daerah untuk satu tahun anggaran. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, dengan tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, serta RKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 mengusung tema **"Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia"**, yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing wilayah, serta memperkuat kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara teknokratis dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta penyesuaian nomenklatur perencanaan dan penganggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan ketentuan terbaru lainnya. Dokumen Rancangan Akhir RKPD ini memuat gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, permasalahan dan isu strategis daerah, arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026. Selanjutnya, dokumen ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta menjadi bahan pembahasan pada tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan bersama dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Barito Kuala yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Marabahan, 27 Juli 2026

BUPATI

H. BAHRUL ILMI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Perubahan RKPD	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Hubungan Antar Dokumen	5
1.5 Sistematika	5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TW II TAHUN 2026	7
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD	7
2.1.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah	7
2.1.2 Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah	112
2.1.3 Evaluasi Prioritas Pembangunan Daerah	125
2.1.4 Evaluasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan	156
2.2 Permasalahan dan Tantangan Pelaksanaan RKPD	215
2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	215
2.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	218
2.2.3 Rumusan Isu Strategis	223
2.2.4 Rekomendasi Tindak Lanjut dan Arah Perubahan RKPD	230
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	237
3.1 Kondisi Perekonomian Daerah	237
3.2 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah	243
3.3 Evaluasi Pendapatan Daerah	254
3.4 Proyeksi Kerangka Keuangan Daerah Semester II Tahun 2026	266
3.5 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	271
3.6 Isu Strategis dan Permasalahan yang Memerlukan Dukungan	275
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	279
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	279
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah	307
4.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah	339
4.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah	343
4.5 Proyek Prioritas Daerah Tahun 2026	350
4.6 Kerangka Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah	354
4.7 Indikator Kinerja Perubahan RKPD Tahun 2026	360
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	369
5.1 Kebijakan Umum Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	369
5.2 Rencana Kerja Berdasarkan Prioritas Pembangunan	371
5.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	378
5.4 Perubahan Pendanaan Daerah	389
5.5 Lokasi Prioritas Pembangunan	389
5.6 Indikasi Program Prioritas Perangkat Daerah	390
5.7 Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	390
BAB VI PENUTUP	392

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Barito Kuala Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 7
Tabel 2.2 Evaluasi Indikator Makro Pembangunan Daerah Semester I Tahun 2026 10
Tabel 2.3 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Selama 5 Tahun Terakhir (2021-2025) 12
Tabel 2.4 Tabel Nilai Inflasi Rata-Rata 5 Tahun Terakhir (2021 – 2025) Kota Banjarmasin/Kabupaten Barito Kuala 14
Tabel 2.5 Komponen Penyusun Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Kuala Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir (2021-2025) 18
Tabel 2.6 Perkembangan Indeks Gini / Gini Rasio di Kabupaten Barito Kuala 5 Tahun Terakhir (2021-2025) 20
Tabel 2.7 Perkembangan Hasil Penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Selama 5 Tahun Terakhir (2021-2025) 21
Tabel 2.8 Perkembangan Kontribusi PDRB antar Kabupaten Barito Kuala dengan Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 Tahun Terakhir (2021-2025) 24
Tabel 2.9 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Aspek Geografi dan Demografi 29
Tabel 2.10 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Kesejahteraan Masyarakat 30
Tabel 2.11 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Daya Saing Daerah 34
Tabel 2.12 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Pelayanan Umum 36
Tabel 2.13 Rekap Evaluasi Kinerja Pimpinan SKPD (Ess II/Camat) Kab. Barito Kuala sampai Triwulan II 2026 83
Tabel 2.14 Capaian Pendapatan Daerah Triwulan II Berdasar Jenis Pendapatan Tahun 2026 112
Tabel 2.15 Capaian Pendapatan Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah Penghasil Tahun 2026 115
Tabel 2.16 Evaluasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 119
Tabel 2.17 Analisis Penyesuaian Target Pajak Daerah Tahun 2026 120
Tabel 2.18 Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Tahun 2026 121
Tabel 2.19 Ringkasan Evaluasi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 126
Tabel 2.20 Evaluasi Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Semester I Tahun 2026 127
Tabel 2.21 Evaluasi Prioritas Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah Semester I Tahun 2026 133
Tabel 2.22 Potensi Pengembangan UMKM Unggulan Kabupaten Barito Kuala 137
Tabel 2.23 Evaluasi Prioritas Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah Semester I Tahun 2026 138
Tabel 2.24 Evaluasi Prioritas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik Berkualitas Semester I Tahun 2026 143
Tabel 2.25 Evaluasi Prioritas Ketahanan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Semester I Tahun 2026 148
Tabel 2.26 Proyek Strategis P-RKPD tahun 2026 154
Tabel 2.27 Hasil Evaluasi Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala s.d Triwulan I 2026 155
Tabel 2.28 Klasifikasi Capaian Berdasarkan Nilai Realisasi 158
Tabel 2.29 Hasil Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan SKPD s.d Triwulan II 2026 159
Tabel 2.30 Matriks Permasalahan Pelaksanaan RKPD Kabupaten Barito Kuala Semester I Tahun 2026 216
Tabel 2.31 Isu Strategis Terbaru Hasil Evaluasi Semester I Tahun 2026 224
Tabel 2.32 Keterkaitan Isu Strategis 225
Tabel 2.33 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Secara Holistik 226

Tabel 2.34 Matriks Integrasi Lintas Sektor Program Prioritas Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 228
Tabel 2.35 Rencana tindak lanjut hasil evaluasi semester 1 di perubahan RKPD 2026 234
Tabel 2.36 Perubahan Substansi Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 dibandingkan RKPD Tahun 2026 235
Tabel 3.1 Ringkasan Evaluasi Kondisi Perekonomian Semester I Tahun 2026 240
Tabel 3.2 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 241
Tabel 3.3 Peluang dan Prospek Perekonomian Semester II Tahun 2026 242
Tabel 3.4 Proyeksi R-APBD pada Perubahan RKPD 244
Tabel 3.5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala 246
Tabel 3.6 Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Tahun 2025 249
Tabel 3.7 Evaluasi Perkembangan Inflasi Daerah Tahun 2026 251
Tabel 3.8 Evaluasi Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala 252
Tabel 3.9 Evaluasi Ketenagakerjaan Tahun 2026 254
Tabel 3.10 Evaluasi Investasi Tahun 2026 255
Tabel 3.11 Evaluasi Pendapatan Daerah Semester I Tahun 2026 257
Tabel 3.12 Evaluasi Pendapatan Transfer Semester I Tahun 2026 259
Tabel 3.13 Evaluasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 261
Tabel 3.14 Perubahan Pendapatan Daerah 262
Tabel 3.15 Perubahan Belanja 263
Tabel 3.16 Perubahan Pembiayaan 267
Tabel 3.17 Proyeksi Pendapatan Daerah Semester II Tahun 2026 270
Tabel 3.18 Proyeksi Belanja Semester II Tahun 2026 270
Tabel 3.19 Analisis Fiskal 271
Tabel 4.1 Perubahan Target Indikator Makro 281
Tabel 4.2 Keterkaitan Tema Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 283
Tabel 4.3 Keterkaitan RPJMD dengan Perubahan RKPD Tahun 2026 284
Tabel 4.4 Tujuan Pembangunan daerah tahun 2026 284
Tabel 4.5 Sasaran Utama Pembangunan 290
Tabel 4.6 Arah kebijakan saran RPJMD 301
Tabel 4.7 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 305
Tabel 4.8 Keterkaitan Hasil Evaluasi IPM dengan Penyesuaian Program Prioritas Semester II Tahun 2026 312
Tabel 4.9 Program Prioritas I Semester II 313
Tabel 4.10 Program Prioritas II Semester II 319
Tabel 4.11 Strategi Penguatan UMKM Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 321
Tabel 4.12 Program Prioritas III Semester II 326
Tabel 4.13 Program Prioritas IV Semester II 336
Tabel 4.14 Program Prioritas V Semester II 339
Tabel 4.15 Keterkaitan Evaluasi Semester I dengan Prioritas Pembangunan 341
Tabel 4.16 Program Prioritas Bidang Sumber Daya Manusia 342
Tabel 4.17 Program Prioritas Bidang Ekonomi 343
Tabel 4.18 Program Prioritas Bidang Infrastruktur 344
Tabel 4.19 Program Prioritas Bidang Tata Kelola 344
Tabel 4.20 Program Prioritas Bidang Lingkungan Hidup 345
Tabel 4.21 Sinkronisasi RPJMD 2025-2029 dengan Perubahan RKPD Tahun 2026 346
Tabel 4.22 Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Perubahan RKPD 349
Tabel 4.23 Sinkronisasi Prioritas Provinsi dengan Kabupaten 350

Tabel 4.24 Dukungan Perubahan RKPD terhadap Asta Cita 350
Tabel 4.25 Program Strategis Nasional yang Didukung Kabupaten 351
Tabel 4.26 Proyek Prioritas Bidang SDM 353
Tabel 4.27 Proyek Prioritas Bidang Ekonomi 353
Tabel 4.28 Proyek Prioritas Infrastruktur 354
Tabel 4.29 Proyek Prioritas Tata Kelola 354
Tabel 4.30 Proyek Prioritas Lingkungan 355
Tabel 4.31 Kerangka Pendanaan Menurut Prioritas Pembangunan 357
Tabel 4.32 Kerangka Pendanaan Menurut Urusan Pemerintahan 360
Tabel 4.33 Sumber Pendanaan Pembangunan 360
Tabel 4.34 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 363
Tabel 4.35 Sebaran Lokus Prioritas Pembangunan Semester II Tahun 2026 Berdasarkan Pendekatan Spasial 368
Tabel 4.36 Penyelarasan Analisis Spasial dengan Lokasi Prioritas Intervensi Perubahan RKPD Tahun 2026 369
Tabel 5.1 Perubahan Kerangka Pendanaan Daerah 372
Tabel 5.2 Keterkaitan Program Prioritas dengan Kawasan Pengembangan 373
Tabel 5.3 Matriks Keterkaitan Sasaran Pembangunan, Target Kinerja, Program Prioritas dan Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2026 375
Tabel 5.4 Rencana Kerja Prioritas 377
Tabel 5.5 Keterkaitan Hasil Evaluasi dengan Perubahan Rencana Kerja Daerah 378
Tabel 5.6 Analisis Perubahan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan 379
Tabel 5.7 Rekap Perubahan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah 381
Tabel 5.8 Rekap Perubahan Anggaran SKPD dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 384
Tabel 5.9 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi terhadap Perubahan RKP 388
Tabel 5.10 Indikator Monitoring 391

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tren Pertumbuhan Ekonomi di Kab. Barito Kuala 2021-2025 11
Gambar 2.2 Pergerakan Tingkat Inflasi Rata-Rata 5 Tahun Terakhir 15
Gambar 2.3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala 2021-2025 16
Gambar 2.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Barito Kuala Selama 5 Tahun Terakhir (2021-2025) 17
Gambar 2.5 Perkembangan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Barito Kuala selama 5 Tahun Terakhir (2021-2025) 22
Gambar 2.6 PDRB per Kapita Kabupaten di Kab. Barito Kuala 2021-2025 23
Gambar 2.7 Perkembangan Nilai Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Barito Kuala Selama 3 Tahun Terakhir (2023-2025) 28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran. RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan APBD, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2025 dengan mengusung tema **"Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia"**. Penyusunannya mengacu pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, RPJMN Tahun 2025–2029, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, Prioritas Nasional, serta berbagai kebijakan strategis pemerintah yang menjadi arah pembangunan nasional dan daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan sampai dengan Semester I Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perkembangan kondisi daerah yang berbeda dengan asumsi yang digunakan pada saat penyusunan RKPD Tahun 2026, baik dari aspek kerangka ekonomi daerah, kemampuan keuangan daerah, maupun prioritas pembangunan. Perkembangan tersebut merupakan kondisi sebagaimana dimaksud dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025** yang menjadi dasar dilaksanakannya Perubahan RKPD.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa beberapa indikator makro daerah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian kebijakan dan target kinerja. Di antaranya adalah perkembangan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, investasi, kualitas lingkungan hidup, serta indikator pelayanan dasar. Selain itu, terdapat perubahan asumsi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang berdampak terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah dan kapasitas fiskal dalam mendanai prioritas pembangunan.

Evaluasi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan beberapa program prioritas masih memerlukan percepatan penyelesaian, penyesuaian target, perubahan lokasi pelaksanaan, penambahan maupun pengurangan pagu, serta realokasi anggaran agar sasaran pembangunan daerah tetap dapat dicapai secara optimal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026. Di sisi lain, terdapat perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang perlu diakomodasi dalam Perubahan RKPD, antara lain implementasi Asta Cita, Program Strategis Nasional (PSN), Proyek Strategis Nasional (ProSN), percepatan penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi daerah, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan, serta penguatan tata kelola pembangunan berbasis data.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu melakukan Perubahan RKPD Tahun 2026 agar dokumen perencanaan pembangunan tahunan tetap adaptif terhadap perkembangan kondisi aktual, mampu mengakomodasi perubahan asumsi pembangunan, menjaga konsistensi dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA, Perubahan PPAS, dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif, teknokratis, politis, transparan, akuntabel, berbasis data, dan berorientasi pada hasil (*result based planning*), dengan tetap mengedepankan sinkronisasi, integrasi, dan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran pada seluruh tingkatan pemerintahan.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menjadi dasar utama dalam melakukan penyesuaian substansi Perubahan RKPD Tahun 2026. Penyesuaian tersebut meliputi arah kebijakan pembangunan daerah, sasaran pembangunan, indikator kinerja daerah, target kinerja, prioritas pembangunan, program, kegiatan, subkegiatan, lokasi pelaksanaan, serta pendanaan daerah. Penyesuaian dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan indikator pembangunan, perubahan kemampuan keuangan daerah, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta dinamika kebijakan nasional dan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan pada Semester II Tahun 2026 tetap efektif, efisien, tepat sasaran, dan mampu mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi tersebut, kebijakan pembangunan pada Semester II Tahun 2026 diarahkan pada percepatan pencapaian indikator pembangunan yang masih memerlukan perhatian, optimalisasi pelaksanaan program prioritas, percepatan realisasi fisik dan keuangan, penguatan pelayanan dasar, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan

ketahanan pangan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Penyesuaian juga dilakukan terhadap sasaran pembangunan, indikator kinerja, target, program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan sesuai hasil evaluasi serta perkembangan kondisi aktual daerah.

Dalam aspek pendanaan, perubahan kemampuan keuangan daerah menjadi dasar penyesuaian alokasi anggaran melalui rasionalisasi, realokasi, maupun optimalisasi belanja antarprogram, kegiatan, subkegiatan, dan perangkat daerah. Penyesuaian pendanaan diprioritaskan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan program prioritas daerah, belanja wajib dan mengikat, serta program yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dengan demikian, Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 yang menunjukkan adanya perkembangan kondisi daerah yang tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kemampuan keuangan daerah, dan prioritas pembangunan. Perubahan ini dilaksanakan untuk menjaga konsistensi antara hasil evaluasi, arah kebijakan pembangunan, sasaran, indikator kinerja, target, program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan, sehingga pelaksanaan pembangunan pada Semester II Tahun 2026 tetap adaptif terhadap dinamika pembangunan dan mampu mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2045.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala nomor 9 tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.
16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan arah kebijakan, sasaran, prioritas pembangunan, program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, serta pendanaan pembangunan daerah terhadap perkembangan kondisi aktual sampai dengan Semester I Tahun 2026 sehingga pelaksanaan pembangunan tetap efektif, efisien, adaptif, dan tepat sasaran.

Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. menyesuaikan prioritas pembangunan daerah dengan perkembangan kondisi daerah;
2. menyesuaikan target indikator makro pembangunan;
3. menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;

4. meningkatkan konsistensi antara RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS Perubahan, dan Perubahan APBD;
5. mengakomodasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
6. meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas daerah;
7. mempercepat pencapaian sasaran pembangunan RPJMD;
8. menjadi pedoman penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
9. menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
10. meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memiliki keterkaitan secara vertikal maupun horizontal dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.

Secara vertikal, Perubahan RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 yang disusun dengan memperhatikan RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, RKP Tahun 2026, serta RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Secara horizontal, Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Selanjutnya, Perubahan Renja menjadi dasar penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah yang kemudian dihimpun dalam Perubahan KUA, Perubahan PPAS, dan Perubahan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026.

Hubungan tersebut membentuk satu siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang saling terkait sehingga menjamin konsistensi antara sasaran pembangunan daerah dengan pengalokasian anggaran.

1.5 Sistematika

Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 terdiri atas:

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika penyusunan.

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, memuat evaluasi indikator makro, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, perkembangan keuangan daerah, permasalahan pembangunan, dan isu strategis.

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, memuat perubahan asumsi ekonomi makro, arah kebijakan fiskal, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan kapasitas fiskal daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, memuat perubahan sasaran pembangunan, prioritas daerah, arah kebijakan, sinkronisasi dengan RPJMD, RPJMN, RKP, RKPD Provinsi, Program Strategis Nasional, dan Asta Cita.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, memuat perubahan program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, lokasi, perangkat daerah pelaksana, pagu indikatif, dan sumber pendanaan.

BAB VI Penutup, memuat penegasan mengenai fungsi Perubahan RKPD sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah sampai akhir Tahun Anggaran 2026.

Struktur ini mempertahankan kerangka RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 yang telah ditetapkan, dengan penyesuaian substansi pada bagian-bagian yang berubah sebagai akibat evaluasi pelaksanaan dan dinamika pembangunan daerah.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

Secara umum, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 pelaksanaan pembangunan menunjukkan arah yang positif, namun beberapa indikator masih memerlukan akselerasi pada Semester II agar target RKPD dapat tercapai secara optimal. Di sisi lain, realisasi fiskal daerah yang masih berada pada kisaran sepertiga dari target tahunan menunjukkan bahwa sebagian besar program pembangunan masih akan terkonsentrasi pada Semester II Tahun 2026.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa indikator kinerja daerah, sasaran pembangunan, program prioritas, serta realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang memerlukan percepatan maupun penyesuaian pada Semester II Tahun 2026. Oleh karena itu, hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 melalui penyesuaian target kinerja, arah kebijakan, prioritas pembangunan, program, kegiatan, subkegiatan, serta alokasi pendanaan agar tetap selaras dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 dan perkembangan kondisi aktual daerah.

2.1.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah

Evaluasi capapai indikator kinerja daerah secara singkat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Barito Kuala Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Indikator	Target RKPD 2026	Capaian 2025	Realisasi Triwulan II 2026	% Capaian	Status	Penyebab Deviasi	Implikasi terhadap Perubahan RKPD
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,10 %	5,27%	Dalam tren meningkat	On Progress	**On Track**	Aktivitas ekonomi, pertanian, perdagangan dan investasi meningkat, namun	Target disesuaikan menjadi 5,70%; percepatan belanja modal dan proyek strategis

						realisasi belanja pemerintah masih rendah	
Tingkat Kemiskinan	3,88 %	4,31%	Masih dibawah target	-	**Perlu Percepatan**	Dampak program pengentasan kemiskinan belum optimal dan masih terdapat kantong kemiskinan	Penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan program lintas sektor
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,38 %	3,23%	Lebih baik dari target	On Progress	**On Track**	Penyerapan tenaga kerja meningkat melalui sektor pertanian, konstruksi dan UMKM	Target disesuaikan menjadi 3,00%; penguatan program ketenagakerjaan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,70	72,05	Mendekati target	±99%	**On Track**	Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan berjalan sesuai rencana	Program pendidikan dan kesehatan dipertahankan serta diperkuat
Rasio Gini	0,242	0,269	Relatif stabil	-	**On Track**	Distribusi pendapatan relatif stabil	Target dipertahankan dan penguatan pemerataan ekonomi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,62	71,44	Masih memerlukan penyesuaian	-	**Perlu Perhatian**	Pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran dan rehabilitasi lingkung	Penyesuaian target menjadi 66,57; penguatan program lingkungan hidup

						an belum optimal	
Pendapatan Daerah	Sesuai APBD	Terealisasi 2025	Belum mencapai target Semester I	35,04 %*	**Perlu Percepatan**	Penyesuaian transfer pemerintah dan optimalisasi PAD	Penyesuaian proyeksi pendapatan dan kapasitas fiskal daerah
Belanja Daerah	Sesuai APBD	-	Realisasi Semester I	35,04 %	**Perlu Percepatan**	Sebagian besar pekerjaan fisik dilaksanakan pada Semester II	Percepatan pelaksanaan kegiatan dan realokasi anggaran
Pembiayaan Daerah	Sesuai APBD	-	Menyesuaikan perubahan fiskal	-	**Disesuaikan**	Penyesuaian SILPA dan perubahan kapasitas fiskal	Penyesuaian pembiayaan daerah pada Perubahan APBD
Realisasi Fisik Program	40,00 %	-	42,16%	105,40%	**On Track**	Pelaksanaan kegiatan prioritas berjalan sesuai jadwal	Fokus pada percepatan penyelesaian pekerjaan Semester II
Realisasi Keuangan Program	40,00 %	-	35,04%	87,60 %	**Perlu Percepatan**	Penyerapan belanja modal dan proses pengadaan masih berlangsung	Percepatan kontraktual, pembayaran, dan pengendalian pelaksanaan program

A. Evaluasi Indikator Kinerja Makro

Evaluasi indikator makro daerah bertujuan untuk mengetahui perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Kuala sampai dengan Semester I Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026. Evaluasi dilakukan terhadap indikator makro yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat

pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Ratio, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), nilai investasi, dan pendapatan per kapita.

Tabel 2.2 Evaluasi Indikator Makro Pembangunan Daerah Semester I Tahun 2026

Indikator Makro	Target Awal RKPD 2026	Target Perubahan RKPD 2026	Dasar Perubahan	Alasan Penyesuaian
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,10%	5,70%	Evaluasi Semester I, peningkatan produksi pertanian, percepatan investasi	Prospek pertumbuhan ekonomi lebih baik dibanding asumsi awal
Kemiskinan	3,88%	3,88%	Evaluasi Semester I	Target dipertahankan karena masih realistis dicapai
TPT	3,38%	3,00%	Penyerapan tenaga kerja meningkat	Proyeksi lebih baik dari target awal
IPM	72,70	72,70	Evaluasi indikator pendidikan dan kesehatan	Tidak terdapat perubahan target
Rasio Gini	0,242	0,242	Evaluasi Semester I	Distribusi pendapatan relatif stabil
IKLH	66,62	66,57	Hasil penghitungan DLH dan kondisi lingkungan	Penyesuaian berdasarkan perkembangan kualitas lingkungan
PDRB Per Kapita	Rp37 juta	Rp37 juta	Evaluasi Semester I	Tidak mengalami perubahan

Evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa **indikator makro ekonomi** berada pada kondisi yang relatif baik. **Laju Pertumbuhan Ekonomi** telah melampaui target tahunan, sedangkan **Tingkat Pengangguran Terbuka** menunjukkan kinerja yang lebih baik dari target. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi daerah mulai pulih dan mampu menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, **Tingkat Kemiskinan** masih berada di atas target RKPD sehingga memerlukan percepatan pelaksanaan program lintas sektor pada Semester II, khususnya melalui penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.

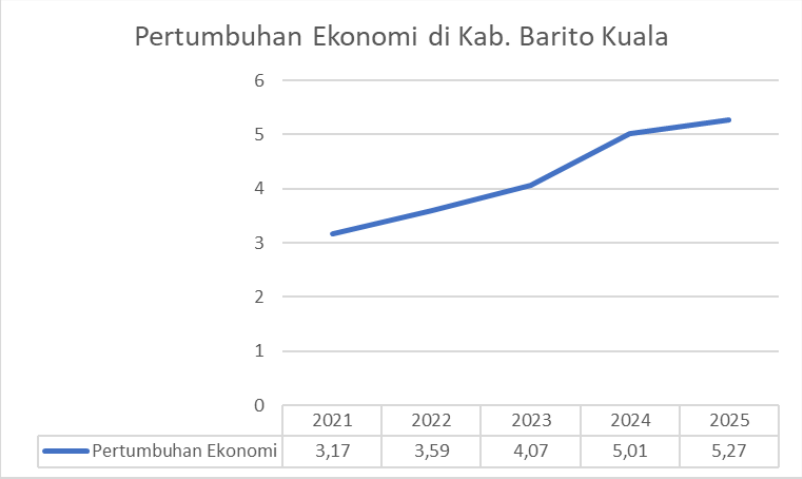
Untuk **Indeks Pembangunan Manusia**, capaian Semester I telah mendekati target sehingga program pendidikan dan kesehatan perlu dipertahankan dan dioptimalkan. Sementara itu, **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** masih memerlukan perhatian melalui percepatan rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, serta peningkatan

ketahanan terhadap banjir sebagai bagian dari penyesuaian program pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang menggambarkan kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah barang dan jasa melalui aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah umumnya diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang menggambarkan pertambahan nilai ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin besar pula aktivitas produksi dan distribusi barang serta jasa yang berlangsung dalam perekonomian daerah tersebut.

Data pertumbuhan ekonomi daerah umumnya bersumber dari publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, yang secara berkala menyajikan perkembangan indikator makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah karena berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan pendapatan daerah. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan dan penguatan aktivitas ekonomi daerah dari tahun ke tahun.



Gambar 2.1 Tren Pertumbuhan Ekonomi di Kab. Barito Kuala 2021-2025
Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan bertahap pada 2021 hingga 2025. Pemulihan perekonomian Kabupaten Barito Kuala pasca pandemi ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh ekspansif sebesar

3,59% pada 2022, dan ekonomi semakin menguat pada 2025 dengan pertumbuhan sebesar 5,27%. Secara umum, tren peningkatan pertumbuhan ekonomi selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Barito Kuala berada pada jalur yang positif dan stabil. Kondisi ini diharapkan dapat terus dipertahankan melalui penguatan sektor-sektor produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Selanjutnya berdasar dari BPS Kabupaten Barito Kuala, dapat dilihat perbandingan selama 5 tahun ke belakang (2021-2025) perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Selama 5 Tahun Terakhir (2021-2025)

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/*Regency*					
1 Tanah Laut	3,47	5,12	4,78	5,01	5,14
2 Kotabaru	3,35	4,58	4,29	5,30	5,34
3 Banjar	3,21	4,48	4,35	4,75	5,07
4 Barito Kuala	3,17	3,59	4,07	5,01	5,27
5 Tapin	3,43	4,91	4,88	4,87	4,24
6 Hulu Sungai Selatan	4,19	4,02	5,27	5,14	5,11
7 Hulu Sungai Tengah	3,01	3,92	4,11	4,95	5,01
8 Hulu Sungai Utara	3,21	4,08	4,51	4,41	5,02
9 Tabalong	3,27	5,29	4,90	4,87	4,69
10 Tanah Bumbu	4,23	5,45	4,84	4,82	5,52
11 Balangan	3,27	5,24	4,17	4,15	4,51
Kota/*Municipality*					
1 Banjarmasin	3,41	5,69	5,62	5,63	5,66
2 Banjarbaru	3,33	7,93	6,81	6,71	6,49

Sumber/*Source*: Badan Pusat Statistik dan sumber lain/*BPS-Statistics Indonesia and other sources*

https://baritokualakab.bps.go.id

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025, capaian tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala sedikit dibawah Kabupaten Kotabaru, dengan selisih sebesar 0,07%, menjadikan Kabupaten Barito Kuala berada pada peringkat ke-5 dari 13 Kabupaten/Kota dalam hal pertumbuhan ekonomi di tahun 2025.

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, kinerja pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang positif. Aktivitas ekonomi mulai meningkat seiring percepatan belanja pemerintah, peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, perdagangan, jasa, konstruksi, dan investasi daerah. Namun demikian, realisasi belanja daerah yang baru mencapai **35,04%** dari pagu APBD mengindikasikan bahwa dampak fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi masih akan

lebih besar pada Semester II. Berikut disampaikan beberapa hal yang mendorong maupun menghambat pertumubuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala, dan arah kebijakan untuk menyikapi kondisi tersebut.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.

1. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian sebagai sektor basis Kabupaten Barito Kuala. Produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, serta perikanan masih menjadi kontributor utama pembentukan PDRB daerah.
2. Aktivitas konstruksi seiring pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, permukiman serta pembangunan fasilitas pelayanan publik yang didanai melalui APBD maupun APBN.
3. Meningkatnya konsumsi rumah tangga yang masih menjadi komponen terbesar pembentuk PDRB menurut pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat relatif terjaga sehingga mampu mendorong aktivitas perdagangan dan jasa.
4. Mulai meningkatnya investasi swasta pada sektor perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang memberikan multiplier effect terhadap penciptaan lapangan kerja.
   Mmembaiknya mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi pasca pandemi sehingga hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif.

Walaupun menunjukkan perkembangan yang baik, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi.

- Struktur ekonomi masih bergantung pada sektor pertanian sehingga rentan terhadap perubahan iklim, banjir, serta fluktuasi harga komoditas.
- Kontribusi sektor industri pengolahan masih relatif rendah sehingga nilai tambah komoditas daerah belum optimal.
- Hilirisasi produk pertanian dan perikanan masih terbatas.
- Produktivitas UMKM belum merata.
- Penyerapan belanja modal pada Semester I masih relatif rendah sehingga dampak ekonomi pemerintah belum optimal.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas target RKPD, maka kebijakan pada Semester II diarahkan pada:

- Percepatan Realisasi Belanja Modal;
- Percepatan Penyelesaian Proyek Strategis Daerah;
- Peningkatan Investasi Melalui Penyederhanaan Pelayanan Perizinan;

- Penguatan Hilirisasi Komoditas Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan;
- Peningkatan Produktivitas UMKM;
- Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Potensi Lokal;
- Penguatan Konektivitas Antarwilayah untuk Menurunkan Biaya Logistik

2. Tingkat Inflasi

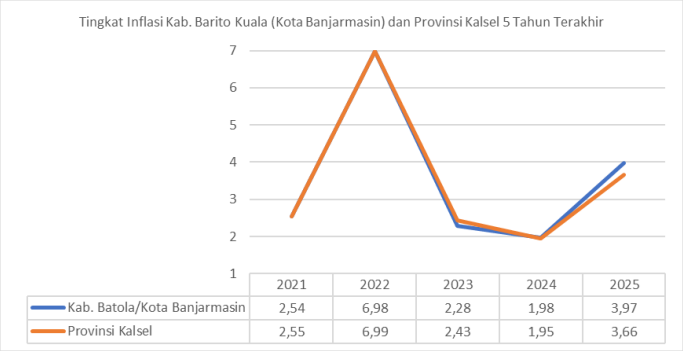
Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun, sedangkan inflasi adalah suatu keadaan dimana tingkat harga secara umum (*price level*) cenderung naik. Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Kecenderungan tingkat inflasi di Kabupaten Barito Kuala mengacu inflasi di Kota Banjarmasin. Berdasar pada data dari website publikasi data BPS Kalimantan Selatan di laman *kalsel.bps.go.id*, Tingkat Inflasi di Kota Banjarmasin selama 5 tahun terakhir mengalami naik-turun yang cukup signifikan yang dapat dilihat pada tabel dan infografis di bawah. mengacu pada Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Banjarmasin dan Perbandingannya dengan Provinsi Kalimantan Selatan antara Kab. Barito Kuala (Kota Banjarmasin)

Kabupaten Barito Kuala belum menjadi daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), sehingga perkembangan inflasi mengacu pada Kota Banjarmasin sebagai wilayah referensi BPS. Perkembangan inflasi selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan kembali stabil setelah sempat mengalami kenaikan akibat pemulihan ekonomi pascapandemi. Stabilitas inflasi menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.4 Tabel Nilai Inflasi Rata-Rata 5 Tahun Terakhir (2021 – 2025) Kota Banjarmasin/Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025***
Barito Kuala	2,54%	6,98%	2,28%	1,98%	3,97%
Kalimantan Selatan	**2,55%**	**6,99%**	**2,43%**	**1,95%**	**3,66%**

Sumber: BPS Kalimantan Selatan



Gambar 2.2 Pergerakan Tingkat Inflasi Rata-Rata 5 Tahun Terakhir
Sumber: kalsel.bps.go.id

Berdasar tabel dan gambar di atas, dapat dilihat bahwa Tingkat Inflasi antara Kota Banjarmasin yang menjadi acuan untuk tingkat inflasi di Kabupaten Barito Kuala selalu beriringan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi selama tahun 2021 hingga 2023 selalu berada dibawah sedikit dari Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan, kecuali pada tahun 2024 dan 2025 dimana Tingkat Inflasi Kota Banjarmasin berada di atas Provinsi Kalimantan Selatan. Secara perkembangannya selama 2021 hingga 2022 tingkat inflasi meningkat dengan puncak tertingginya berada di tahun 2022 dimana tingkat inflasi berada di atas 5%, namun kemudian mulai menurun dan hingga tahun 2024, sudah berada di level 1,98% untuk Kota Banjarmasin dan 1,95% untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2025 khususnya pada akhir tahun mengalami peningkatan menjadi 3,97% dimungkinkan karena pada bulan desember wilayah Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Barito Kuala mengalami bencana banjir yang cukup lama sehingga meningkatnya permintaan bahan makanan yang mngekibatnya meningkatnya inflasi seperti beras local dan ikan haruan yang biasanya mempengaruhi inflasi khsusnya di daerah Kabupaten Barito Kuala.

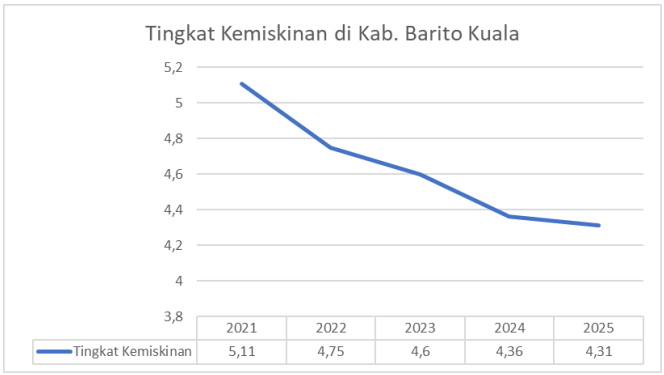
Sampai dengan Semester I Tahun 2026, inflasi masih berada dalam rentang sasaran nasional sehingga belum memberikan tekanan yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Beberapa pengendalian inflasi yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala diantaranya: Operasi pasar, Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Peningkatan distribusi pangan, dan Penguatan ketahanan pangan daerah.

3. Tingkat Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu sasaran utama RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala dihitung berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang berada di bawah garis

kemiskinan dengan total jumlah penduduk dikalikan 100 persen. Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik yang bersifat makanan dan non-makanan.

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren penurunan. Pada Tahun 2025 tercatat sebesar 4,31 persen, menurun dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 4,36 persen, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat serta dampak dari pelaksanaan program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di daerah.



Gambar 2.3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala 2021-2025
Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

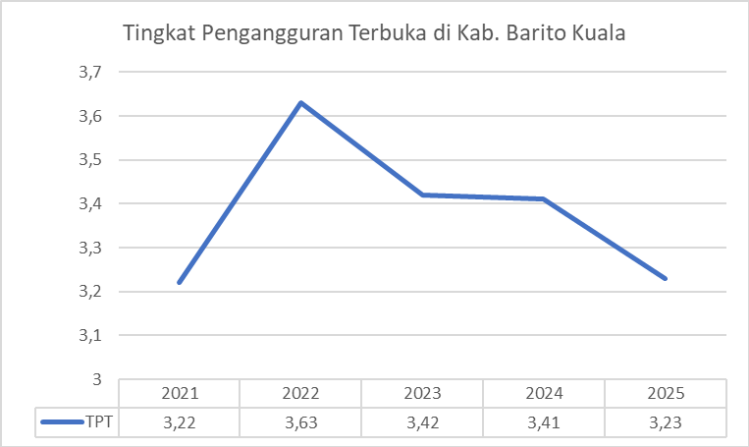
Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang menurun. Pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 5,11 persen, kemudian menurun menjadi 4,75 persen pada Tahun 2022 dan 4,60 persen pada Tahun 2023. Tren penurunan tersebut berlanjut pada Tahun 2024 dengan capaian sebesar 4,36 persen, serta kembali menurun pada Tahun 2025 menjadi 4,31 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat serta efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Penurunan kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala beberapanya dipengaruhi oleh:

- Peningkatan Kesempatan Kerja;
- Pemberian Bantuan Sosial;
- Penguatan Ekonomi Keluarga;
- Peningkatan Produktivitas Pertanian.

Namun demikian, masih terdapat kantong-kantong kemiskinan terutama pada wilayah perdesaan dan kawasan pasang surut yang memerlukan intervensi lebih terarah.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penduduk yang bekerja merupakan orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Barito Kuala Tahun 2025 termasuk Kabupaten dengan angka TPT yang rendah dan di bawah TPT Provinsi yaitu dengan nilai 3,23 persen. Hal ini juga sejalan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Barito Kuala dengan nilai diatas TPAK Kalimantan Selatan yaitu dengan nilai 71,98%. Data angkat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebagai berikut.



Gambar 2.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Barito Kuala Selama 5 Tahun Terakhir (2021-2025)
Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Kuala selama periode 2021-2022 menunjukkan adanya peningkatan, akan tetapi angka TPT ini mulai menurun pada 2023 hingga 2025 secara perlahan, mengambalikan kondisi pada 2025 hampi sama seperti di 2023. Secara umum, perkembangan ini mengindikasikan bahwa kesempatan kerja di Kabupaten Barito Kuala mengalami perbaikan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan berbagai upaya pemerintah daerah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja. Program yang berkontribusi dalam penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka antara lain:

- Pelatihan Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- Pembangunan Infrastruktur yang dilakukan lintas sektoral dengan *leading sector* berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- Investasi Sektor Riil yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut United Nations Development Programme (2024), IPM merupakan Indeks komposit yang mampu memberikan gambaran menyeluruh karena menangkap kemampuan manusia dari sisi keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, IPM kemudian disusun berdasarkan indikator Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan untuk mendapatkan kemampuan manusia dari sisi keuangan, Umur Harapan Hidup Saat Lahir untuk mendapatkan kemampuan manusia dari sisi kesehatan, serta Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah untuk mendapatkan kemampuan manusia dari sisi pendidikan, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Komponen Penyusun Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Barito Kuala Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir (2021-2025)

Tahun ***Years***	**Umur Harapan Hidup (Tahun)** ***Life Expectancy (Year)***	**Harapan LamaSekolah (Tahun)** ***Expectancy Years School (Year)***	**Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)** ***Mean Year School (Year)***	**Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Kapita/ Tahun)** ***Expenditure per Capita (Thousand Rupiah/ Capita/Year)***	**IPM** ***HDI***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021	71,56	12,40	7,55	9.868	69,08
2022	71,94	12,54	7,63	10.230	69,87
2023	72,28	12,55	7,74	10.750	70,67
2024	72,52	12,56	7,92	11.168	71,40
2025	72,85	12,69	7,99	11.469	72,05

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

Berdasarkan tabel di atas, Nilai IPM Kabupaten Barito Kuala selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dan mulai pada tahun 2023 telah memasuki range 70 ke atas dimana termasuk dalam kategori IPM “Tinggi”. Dari sisi kemampuan secara ekonomi sebagai salah satu komponen penyusun IPM, penduduk di Barito Kuala tahun 2025 memiliki rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar 11,47 juta Rupiah/Orang/Tahun. Nilai ini termasuk nilai terendah dan tentu di bawah nilai di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki nilai sebesar 13,76 juta Rupiah/Orang/Tahun. Semakin kecil rata-rata pengeluaran per kapita menunjukkan semakin kecil juga biaya yang dikeluarkan untuk melakukan konsumsi secara rata-rata oleh masyarakat Komponen IPM lainnya dilihat

berdasarkan dimensi kesehatan, penduduk di Barito Kuala tahun 2025 memiliki nilai Umur Harapan Hidup adalah 72,85 tahun yang merupakan nilai terendah se-Kalimantan Selatan. Artinya rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir adalah 72,85 tahun.

Komponen terakhir dari dimensi pendidikan, terdapat dua indikator di dalamnya yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kedua indikator ini digunakan karena RLS menggunakan data pada penduduk usia 25 tahun ke atas dan HLS menggunakan data penduduk 7-24 tahun. RLS di Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 merupakan daerah terendah kedua setelah Kabupaten Kotabaru dengan nilai 7,71 tahun. Indikator ini menginterpretasikan bahwa di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 memiliki penduduk di atas 25 tahun yang secara rata-rata telah menempuh pendidikan 7,71 tahun atau setara dengan kelas 1 (satu) SMP dan putus sekolah di kelas 2 (dua) SMP. Tentu angka ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Program Wajib Belajar 14 tahun yang disiapkan oleh pemerintah. Tetapi jika melihat HLS di Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala tidak menjadi yang terendah karena memiliki nilai HLS sebesar 12,69 tahun. Meski begitu ini masih berada di bawah HLS Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 13,12 tahun. HLS dengan nilai 12,69 tahun artinya penduduk di Kabupaten Barito Kuala diharapkan menamatkan pendidikan sampai 12,69 tahun atau kurang lebih lulus pendidikan SMA. Peningkatan IPM di Kabupaten Barito Kuala di dorong oleh:

- Peningkatan Akses Pendidikan;
- Peningkatan Layanan Kesehatan;
- peningkatan daya beli masyarakat.

Percepatan pencapaian target masih perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan dasar, penanganan stunting, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

6. Gini Rasio

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Barito Kuala menggunakan Indeks Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Kabupaten Barito Kuala. Nilai rasio gini berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu), dimana nilai yang semakin mendekati 1 (satu) mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, rasio gini yang semakin mendekati nilai 0 (nol), semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 (nol) pada rasio gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, rasio gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan yang sempurna, dimana satu orang dapat memiliki semua pendapatan, sementara

yang lainnya tidak memiliki apapun. Semakin besar atau melebar indeks rasio gini, berarti kelompok miskin lebih lambat untuk menjadi kaya, sedangkan yang sudah kaya justru lebih cepat untuk bertambah kaya. Nilai rasio gini yang dianggap tinggi jika berkisar pada angka 0,50 sampai 0,70, sedangkan nilai 0,20 sampai 0,35 tergolong yang distribusi pendapatannya relatif merata.

Tabel 2.6 Perkembangan Indeks Gini / Gini Rasio di Kabupaten Barito Kuala 5 Tahun Terakhir (2021-2025)

Tahun	Gini Rasio
2021	0,284
2022	0,289
2023	0,312
2024	0,272
2025	0,269

Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Barito Kuala selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif fluktuatif namun cenderung menurun pada dua tahun terakhir. Pada Tahun 2021 Indeks Gini Ratio tercatat sebesar 0,284, kemudian meningkat menjadi 0,289 pada Tahun 2022 dan 0,312 pada Tahun 2023. Selanjutnya pada Tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 0,272 dan kembali menurun pada Tahun 2025 menjadi 0,269. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala relatif rendah dan cenderung membaik, sehingga mencerminkan semakin meratanya hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat

7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) atau biasa disebut indeks kualitas pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKPLHD) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH merupakan gabungan dari beberapa indikator lingkungan hidup, seperti kualitas air, udara, dan lahan. Perhitungan IKLH mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, dengan Komponen-komponen yang diukur antara lain: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Adapun pergerakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala selama 5 (Lima) tahun terakhir (2021-2025) dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.7 Perkembangan Hasil Penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Selama 5 Tahun Terakhir (2021-2025)

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)	63,21	63,41	63,12	64,01	71,44

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala

Kondisi lingkungan hidup menunjukkan perbaikan yang dipengaruhi oleh:

- Rehabilitasi Kawasan;
- Pengendalian Pencemaran;
- Peningkatan Pengelolaan Persampahan;
- Konservasi Sumber Daya Air (SDA).

Tantangan utama dalam pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala masih berputar pada permasalahan banjir, perubahan penggunaan lahan/alih fungsi lahan; dan pengelolaan sampah yang masih perlu dioptimasi lebih lanjut.

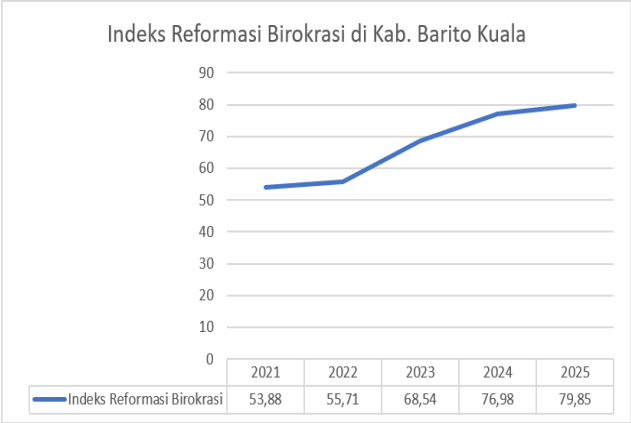
8. Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana reformasi birokrasi telah diterapkan di instansi daerah. Reformasi birokrasi sendiri merujuk pada upaya untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Indeks ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi proses perubahan dalam birokrasi pemerintah agar lebih profesional, bersih dari korupsi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Beberapa aspek yang dinilai dalam IRB antara lain:

1) Tata Kelola Pemerintahan. Menilai sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
2) Kualitas Pelayanan Publik. Mengukur kualitas dan aksesibilitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat.
3) Manajemen Sumber Daya Manusia. Menilai bagaimana pengelolaan SDM di pemerintahan, seperti rekrutmen, pelatihan, dan pemberdayaan pegawai.
4) Pengelolaan Anggaran. Mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah.
5) Pencegahan Korupsi. Menilai langkah-langkah yang diambil untuk mencegah korupsi dalam birokrasi, termasuk adanya sistem pengawasan dan penegakan hukum.

IRB digunakan oleh pemerintah untuk merencanakan dan memonitor perkembangan reformasi birokrasi di seluruh instansi, serta untuk mendorong perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil dari penilaian IRB dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kebijakan dan sistem dalam birokrasi pemerintah agar lebih baik dan lebih efisien.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dengan nomor surat B/94/RB.06/2026, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 adalah 79,85 dengan kategori "BB". Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun terakhir (2021-2025) dapat dilihat pada gambar infografis di bawah.



Gambar 2.5 Perkembangan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Barito Kuala selama 5 Tahun Terakhir (2021-2025)
Sumber: LHE Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025

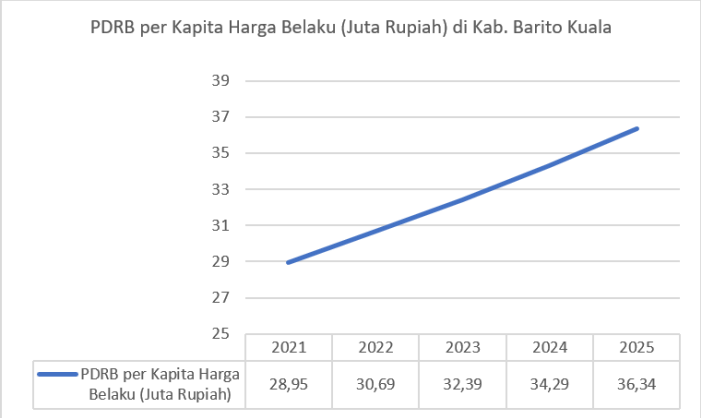
Melihat data pada gambar di atas, selama 5 tahun Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Barito Kuala mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan yang cukup besar terjadi pada tahun 2022 menuju 2023, namun sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam LHE Pelaksanaan RB di Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 bahwa hasil evaluasi tahun 2023 ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan berdasar Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot, dan kriteria penilaian yang signifikan, sehingga perbandingan baru bisa dilakukan kembali untuk tahun 2023 dan seterusnya.

9. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Indikator ini

dihitung berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk pada wilayah yang bersangkutan. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi setiap penduduk dalam suatu wilayah. Data yang digunakan untuk mengukur PDRB per kapita di Kabupaten Barito Kuala merupakan PDRB atas dasar harga berlaku.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, pada tahun 2025 nilai PDRB per kapita Kabupaten Barito Kuala tercatat sebesar 36,34 juta rupiah. Nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selama periode 2021–2025, PDRB per kapita Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren peningkatan yang konsisten.



Gambar 2.6 PDRB per Kapita Kabupaten di Kab. Barito Kuala 2021-2025
Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

Dari infografis di atas, dapat dilihat rata-rata peningkatan PDRB per Kapita dari tahun 2021 hingga 2025 adalah 1,87 Juta Rupiah. Peningkatan ini mencerminkan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi daerah serta meningkatnya produktivitas masyarakat Perbaikan pendapatan masyarakat dipengaruhi oleh:

- Meningkatnya Produksi Pertanian;
- Berkembangnya Sektor Perdagangan;
- Peningkatan Investasi;
- Pembangunan Infrastruktur.

Namun demikian, peningkatan pendapatan belum sepenuhnya merata sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota adalah salah satu indikator makro ekonomi daerah yang menunjukkan seberapa besar peran atau sumbangan suatu kabupaten/kota terhadap total PDRB wilayah yang lebih besar, biasanya provinsi atau nasional. Indikator ini sering

digunakan dalam analisis ekonomi wilayah untuk melihat pusat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah. Manfaat dari indikator Ini diantaranya: Mengetahui daerah pusat pertumbuhan ekonomi daerah dengan kontribusi besar biasanya menjadi motor penggerak ekonomi provinsi; sebagai alat analisis struktur ekonomi wilayah dan perencanaan pembangunan; sebagai alat untuk mengidentifikasi potensi ekonomi daerah; dan sebagai alat untuk evaluasi kinerja ekonomi daerah.

Sesuai namanya, perhitungan Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota di Kabupaten Barito Kuala membandingkan dengan PDRB pada Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2025, PDRB Kabupaten Barito Kuala (Atas Dasar Harga Berlaku/ADHB) adalah sebesar 12.199,11 miliar rupiah, dan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 adalah sebesar 305.126,93 miliar rupiah, yang darinya didapat bahwa Kontribusi PDRB Kabupaten Barito Kuala terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 4,00%. Berikut ditampilkan tabel perkembangan Kontribusi PDRB Kabuapten Barito Kuala terhadap Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 tahun terakhir (2021-2025), berdasar data dari Barito Kuala Dalam Angka 2026 dan Kalimantan Selatan Dalam Angka 2026.

Tabel 2.8 Perkembangan Kontribusi PDRB antar Kabupaten Barito Kuala dengan Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 Tahun Terakhir (2021-2025)

Tahun	PDRB Kabupaten Barito Kuala (dalam Miliar Rupiah)	PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (dalam Miliar Rupiah)	% Kontribusi
2021	9.174,92	197.882,42	4,64
2022	9.867,87	215.098,65	4,59
2023	10.567,88	269.192,02	3,93
2024	11.349,61	286.840,06	3,96
2025	12.199,11	305.126,93	4,00

Sumber: Kabupaten Barito Kuala dan Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Barito Kuala mengalami naik-turun dengan stabil dikisaran 4%. Mulai tahun 2021 hingga 2023, kontribusi tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun pada tahun-tahun selanjutnya kembali meningkat sampai pada tahun 2025 hingga kembali ke kisaran angka 4%.

10. Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)

Penurunan gas rumah kaca (GRK) tercapai adanya penggunaan peralatan rumah tangga dan industri yang lebih efisien, seperti lampu LED, AC berlabel hemat energi, dan Rehabilitasi hutan (reboisasi) dan pengurangan kebakaran hutan/lahan serta Pengurangan sampah melalui metode *reduce, reuse, recycle* (3R), penggunaan barang sekali pakai.

Kegiatan sudah dilaksanakan 100% pada tahun 2025 dan akan terus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang. Pembuatan dokumen IGRK adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi mengenai emisi gas rumah kaca dari berbagai sumber dan penyerapanya, kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi gas rumah kaca. Berdasarkan hasil ekspose terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Barito Kuala, profil emisi daerah ini terkonsentrasi pada beberapa sektor utama:

- Sektor Kehutanan & Lahan**:** Penyumbang emisi terbesar akibat perubahan penggunaan lahan dan pengelolaan lahan gambut.
- Sektor Pertanian**:** Mengingat Batola adalah lumbung padi, penggunaan pupuk kimia dan emisi metana (CH_4) dari sawah tergenang menjadi kontributor signifikan.
- Sektor Limbah**:** Pengelolaan sampah domestik dan limbah cair yang belum optimal.

Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi besar untuk menjadi model pengelolaan emisi di ekosistem lahan basah:

1) Restorasi dan Konservasi Mangrove Rambai
   Keberadaan kawasan konservasi seperti Pulau Bakut dan hutan mangrove rambai merupakan "penyerap karbon" (*carbon sink*) alami yang efektif. Perlindungan kawasan ini dapat menurunkan angka emisi bersih secara drastis dalam laporan IGRK.
2) Optimalisasi Pertanian Rendah Emisi
   Peralihan ke varietas padi hemat air atau penggunaan pupuk organik dapat mengurangi emisi gas metana. Peluang ini besar mengingat luasnya lahan pertanian di Barito Kuala.
3) Program Kampung Iklim (Proklim)
   Banyaknya desa di Kabupaten Barito Kuala yang mulai aktif dalam Proklim mempermudah verifikasi data aksi mitigasi di tingkat tapak, yang memperkuat validitas laporan IGRK.
4) Pemanfaatan Energi Terbarukan
   Potensi biomassa dari limbah pertanian (sekam padi) dan limbah perkebunan sawit dapat dikembangkan menjadi energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Kabupaten Barito Kuala menghadapi tantangan cukup kompleks karena berkaitan dengan karakteristik wilayah dan aktivitas ekonomi:

1) Pengelolaan Lahan Gambut

Lahan gambut di Kabupaten Barito Kuala menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Tantangannya adalah mencegah kekeringan lahan di musim kemarau yang memicu Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Satu kejadian karhutla besar dapat menghapus semua capaian penurunan emisi dalam setahun.

2) Akurasi Data Sektoral

Penyusunan IGRK memerlukan data yang detail dari berbagai SKPD dan sektor swasta (misalnya penggunaan energi di industri atau jumlah limbah). Seringkali, sinkronisasi data antar-lembaga masih menjadi kendala teknis.

3) Limbah Metana dari Persawahan

Sistem sawah pasang surut yang selalu tergenang secara alami memproduksi metana. Mencari keseimbangan antara menjaga ketahanan pangan (produksi padi) dan menekan emisi adalah tantangan kebijakan yang berat.

4) Alih Fungsi Lahan

Tekanan kebutuhan lahan untuk pemukiman dan perkebunan sawit skala besar berisiko mengurangi tutupan vegetasi permanen, yang secara otomatis meningkatkan angka emisi dalam perhitungan IGRK.

Pencapaian IGRK di Barito Kuala merupakan panduan untuk kebijakan pembangunan. Fokus utama harus tertuju pada Tata Kelola Air di Lahan Gambut untuk mencegah karhutla dan Modernisasi Sektor Pertanian agar lebih ramah lingkungan. Sampai pada penyusunan RKPD Perubahan 2026, Baik Kabupaten Barito Kuala maupun Provinsi Kalimantan Selatan, Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK masih tahap perhitungan, namun untuk capaian secara nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 165,31 juta ton CO_2e.

11. Indeks Infrastruktur Daerah

Indeks Infrastruktur adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas infrastruktur di suatu wilayah. Indeks ini biasanya dipakai dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mengetahui sejauh mana infrastruktur mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, indeks ini menggambarkan kondisi beberapa jenis infrastruktur utama, seperti:

- Infrastruktur transportasi: panjang dan kondisi jalan, jembatan, dan akses transportasi wilayah
- Infrastruktur dasar permukiman: air bersih, sanitasi, dan drainase
- Infrastruktur energi dan utilitas: listrik dan jaringan telekomunikasi
- Infrastruktur sosial: fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan

Indeks tersebut biasanya dihitung menggunakan metode penggabungan beberapa indikator (composite index) sehingga menghasilkan satu nilai yang menunjukkan tingkat perkembangan infrastruktur suatu daerah. Nilainya sering dinormalisasi dalam skala tertentu (misalnya 0 - 100 atau 0-1), di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kondisi infrastruktur yang lebih baik.

Pada Kabupaten Barito Kuala, sampai saat ini belum ada penilaian resmi yang dapat disebut langsung sebagai "Indeks Infrastruktur Daerah". Namun salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi pembangunan infrastruktur adalah *Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)*. Pada tahun 2025, nilai IKK Kabupaten Barito Kuala sebesar 107,09 poin. Maksud dari penilaian itu berarti IKK menunjukkan tingkat kemahalan pembangunan infrastruktur atau bangunan dibanding kota acuan terdekeat (Surabaya), dengan nilai 107,09 berarti biaya konstruksi di Barito Kuala sekitar 7% lebih mahal dibanding kota acuan tersebut. Angka ini juga merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun tersebut. Tingginya biaya pembangunan infrastruktur di Barito Kuala dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah yang didominasi rawa dan banyak dipisahkan sungai, sehingga pembangunan jalan atau jembatan membutuhkan struktur dan material lebih banyak daripada daerah lain.

12. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kondisi ketahanan pangan suatu wilayah (provinsi, kabupaten, atau kota). Indeks ini menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan pangan yang cukup, terjangkau, dan bergizi bagi masyarakatnya secara berkelanjutan. IKP disusun oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan biasanya digunakan untuk: Menilai kondisi ketahanan pangan suatu daerah, mengidentifikasi wilayah rawan pangan, dan membandingkan tingkat ketahanan pangan antar wilayah di Indonesia. Perhitungan IKP didasarkan pada 3 aspek utama dengan beberapa indikator pendukung, yaitu:

- Ketersediaan pangan: Menggambarkan kemampuan wilayah menyediakan pangan yang cukup. Contoh indikator: rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan.
- Keterjangkauan pangan: Menggambarkan kemampuan masyarakat memperoleh pangan. Contoh indikator: persentase penduduk miskin, proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan, akses listrik.
- Pemanfaatan pangan: Menggambarkan kualitas konsumsi dan kondisi gizi masyarakat. Contoh indikator: rata-rata lama sekolah perempuan, akses air bersih, tenaga kesehatan, prevalensi stunting, angka harapan hidup.

Nilai IKP biasanya berada pada skala 0–100. Semakin tinggi nilainya, semakin baik kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Berdasar rilis data dari Statitsik Konsumsi Pangan 2025 yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, pada tahun 2025 Nilai IKP Kabupaten Barito Kuala adalah 84,42. Perkembangan Nilai IKP selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada infografis berikut.



Gambar 2.7 Perkembangan Nilai Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Barito Kuala Selama 3 Tahun Terakhir (2023-2025)
Sumber: Statistik Konsumsi Pangan 2025 Kementerian Pertanian

Selama 3 tahun terakhir, nilai Indeks Ketahanan Pangan selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya secara signifikan. Berdasar informasi dari Statitsik Konsumsi Pangan 2025 juga didapat peningkatan yang bagus, dimana pada tahun 2023 masih berada di peringkat 143, kemudian di 2024 meningkat menjadi peringkat 106, dan kenaikan yang sangat tajam terjadi di tahun 2025 dimana berhasil masuk dalam 10 besar kabupaten se-Indonesia di peringkat ke-9, dan menjadi peringkat ke-4 dari 11 Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Sealatan.

B. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah dibagi menjadi 4 Aspek, yaitu Geografi dan Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing Daerah. dan Pelayanan Umum. Data Indikator Kinerja Daerah yang diambil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang kemudian diturunkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Adapun capaian di RKPD 2026 itu sendiri belum keluar dikarenakan nilai dari pencapaian masing-masing indikator akan diumumkan/dirilis setiap akhir tahun.

Tabel 2.9 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Aspek Geografi dan Demografi

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	64,02	66,36	71,44	66,57	-	Sudah melebihi target, perlu penyesuaian target kedepannya
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Angka	0,02	0,02	0,02	0.11	-	
Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	-	74,97	75,72	75,35	-	
Penurunan Emisi GRK (Ton CO2 eq) - Kumulatif	Ton CO_2e	-	1.104.809,10	1.115.857,19	1.203.112,98	-	
Penurunan Emisi GRK (Ton CO2 eq) - Tahunan	Ton CO_2e	-	96.847,25	97,815,72	98.323,66	-	
Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	156,15	129	67,6	125,25	-	Kemungkinan ada penyesuaian cara perhitungan
Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	-	215,88	n/a	224,02	-	Tidak ada data capaian 2025
Kapasitas Air Baku	m3/detik	-	5,79	5,65	5,81	-	

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Akses Air Siap Minum Perpipaan	Persen	-	25	0	29,69	-	
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	11,01	13	11,62	14,5	-	
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	86,35	94	67,17	94,5	-	Nilai sesuai dengan realisasi SIPN

Tabel 2.10 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Kesejahteraan Masyarakat

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,02	5,1	5.27	6,5		
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,41	3,39	3.23	3,3		
Indeks Gini	Angka	0,272	0,257	0.269	0,242		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,4	72	72.05	72.7		
Angka Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,07	74,4	72.85	74.75		
Prevalensi Stunting	Persen	10,39	9,5	8.53	8.5		
Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persen	-	28	n/a	31		Tidak ada data capaian 2025

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,92	8	7.99	8.13		
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,56	12,96	12.69	13.07		
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	73,53	74,26	n/a	74.76		Tidak ada data capaian 2025
Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,51	0,46	0.47	0.44		
Tingkat kemiskinan	Persen	4,36	4,00	4.31	3.88		
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	-	9,37	n/a	9.47		Tidak ada data capaian 2025
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	-	55,57	n/a	56.36		Tidak ada data capaian 2025
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	-	53,78	n/a	55.28		Tidak ada data capaian 2025
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	98,96	99	99.71	99,2		
Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	127	≤10	128	≤9		
Jumlah Kematian Balita	Per 1.000 kelahiran hidup	12	≤10	9	≤9		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	45,73	90	57	90.63		
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	81,5	90	84.5	90.63		
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	Persen	66,52	40,52	n/a	43.51		Tidak ada data capaian 2025
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	Persen	58,71	20,36	n/a	23.42		Tidak ada data capaian 2025
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	-	44,1	73,28	47.59		Kepesertaan tahun 2024 Target Sebanyak 1010 Orang Tercapai 530 Orang Kesepertaan Tahun 2025 Target Sebanyak 8.810 Orang Tercapai 6456 Orang (Program Perlindungan Berupa

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
							Jaminan Kematian Dan Jaminan Kecelakaan Kerja Pekerja Rentan)
Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal Kab/Kota	Persen	-	30	0	31.88		Selama Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025, jumlah pekerja formal penyandang disabilitas pada perusahaan di Kabupaten Barito Kuala tercatat sebanyak 0 (nol) orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terdapat penyerapan tenaga kerja disabilitas di sektor formal, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesempatan kerja yang lebih inklusif melalui pembinaan

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
							dan koordinasi dengan perusahaan

Tabel 2.11 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Daya Saing Daerah

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,46	73,5	71,98	73.6		
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	-	33,28	n/a	33.52		Tidak ada data capaian 2025
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	-	1,4	n/a	1.42		Tidak ada data capaian 2025
Tingkat Inflasi di Barito Kuala	Persen	1,98	1,9	3,97	1,82		Mengacu pada tingkat Inflasi di Kota Banjarmasin
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	35,19	35,49	n/a	35,8		Tidak ada data capaian 2025
Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	14,29	15,28	n/a	16.11		Tidak ada data capaian 2025
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	-	2,5	2,57	2.57		
Jumlah tamu wisatawan (hotel/Orang)	Orang	-	350.000	208.286	478.125		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Kab/Kota	Persen	-	4,8	n/a	4.88		Tidak ada data capaian 2025
Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kab/Kota	Persen	11,25	11,73	n/a	12.11		Tidak ada data capaian 2025
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota	Persen	1,07	1,3	n/a	1.53		Tidak ada data capaian 2025
Rasio Kewirausahaan Daerah Kab/Kota	Persen	1,82	2	n/a	2.19		Tidak ada data capaian 2025
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	0,93	1,26	n/a	1.59		Tidak ada data capaian 2025
Return on Asset (RoA) BUMD	Persen	-	0,1	n/a	0,25		Tidak ada data capaian 2025
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan)	Persen	57,66	58,12	n/a	58.44		Tidak ada data capaian 2025
Indeks Inovasi Daerah	Angka	39,4	40	51,38	41		
Kontribusi Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian	Persen	-	99,91	n/a	99.92		Tidak ada data capaian 2025
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	-	6,36	n/a	6.45		Tidak ada data capaian 2025

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Koefisien harga antar wilayah tingkat kabupaten	Angka	-	7,28	n/a	7.13		Tidak ada data capaian 2025
Ekspor barang dan jasa	Persen	-	-17,28	n/a	-16.92		Tidak ada data capaian 2025
Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap PDRB Kawasan Metropolitan Banjarbakula	Persen	-	12,52	n/a	17.69		Tidak ada data capaian 2025
Kredit UMKM ke bank umum/PDRB	Persen	-	14,36	n/a	15		Tidak ada data capaian 2025
Inklusi Keuangan	Persen	-	87,98	n/a	88.64		Tidak ada data capaian 2025
Indeks Daya Saing Daerah	Angka	-	3,54	n/a	3.59		Tidak ada data capaian 2025

Tabel 2.12 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Pelayanan Umum

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70,94	71,2	79,85	71,5		
Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	80,44	81,5		82,4		
Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,28	96,88	-	97,48		
Indeks SPBE	Angka	2,59	2,64	2,99	2,7		
Indeks PEMDI	Angka	-	-	-	-		Nilai Belum Keluar, Baru Berlaku di 2026
Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,28	4,35		4,42		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Indeks Integritas Nasional	Angka	73,2	76,36		77.34		
Maturitas SPIP	Nilai	3,29	3,3		3,35		
Nilai SPI	Nilai	73,2	75,22		76.15		
Persentase konflik sosial yang tertangani	Persen	-	90	90	90.63		
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	-	62,62		63.83		
INDIKATOR OUTCOME BERDASARKAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
A. PENDIDIKAN							
Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	92,91	93,2	92,75	94		
Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	97,41	98,65	97,05	98.8		
Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	85,81	86,2	83,82	87		
Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,01	68,5	62,01	75		
Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55,01	68,5	55,01	70		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	71,03	68,5	71,03	72		
Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,4	68,5	62,4	68		
Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	62,11	85	62,11	60		
Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	65,05	85	65,05	70		
Tingkat Implementasi Kurikulum Merdeka	%	100	90	100	80		
Persentase Pendidik Tersertifikasi	%	59,01	85	n/a	85		
Persentase Satuan Pendidikan Berizin	%	100	90	100	90		
Tingkat Literasi Bahasa dan Sastra	Nilai	66,52	68,5	n/a	75		
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	92,91	93,2	92.75	93.5		
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,6	98,65	98.76	98.7		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	95,16	95,4	95.34	95.65		
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	85,81	86,2	83.82	86.6		
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi	%	59,01	85	n/a	87		
Persentase satuan pendidikan berizin	%	100	90	100	92		
Nilai literasi membaca	Nilai	66,52	68,5	66.52	68.75		
B. KESEHATAN							
Jumlah Kematian Ibu	Jumlah	5	≤10	5	≤9		
Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	10,39	9,5	8.5	8.5		
Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	92,097	93	104.41	94		
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	99,113	99,2	107.6	99.3		
Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	98,677	98,8	107.91	98.9		
Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	85,2	87	82,9	89		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	86,194	87	101.95	88		
Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	97.739	98	100.45	98.2		
Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	84,71	85,5	93.45	86.5		
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90.013	90,5	103.57	91		
Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100	100	100.41	100		
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	100	100		
Cakupan penemuan pemeriksaan kesehatan ginjal	%	32,5	35	n/a	38		
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	100	100		
Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	100	106.53	100		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100	100	108.88	100		
Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar	%	98	80	94	82.5		
Persentase Ketersediaan Obat Esensial	%	99,68	100	99.56	100		
Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif	%	100	100	100	100		
Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,58	0,59	0,39	0.6		
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100		
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	92,1	92,3	104.41	92.5		
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,11	99,15	107.6	99.2		
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,68	98,75	107.91	98.8		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	86,19	86,5	101.95	86.8		
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97,74	97,8	100.45	97.85		
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	84,71	85	93.45	85.3		
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	90,01	90,2	103.57	90.4		
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100.41	100		
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100		
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100		
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	106.53	100		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	108.88	100		
Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	98	80	94	82		
Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan sesuai standar	%	100	85	68	87		Obat = 99.56 Alat Kesehatan = 36.41
C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	41,4	41,92	n/a	42,4		
Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	-	-	n/a	-		Tidak ada data mengenai indikator ini
Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	64,5	65,32	n/a	66,5		
Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	67,1	69,06	n/a	71,1		
Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum	%	73,17	74	n/a	75		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota							
Persentase Pengurangan Sampah Regional	%	2	15	n/a	20		
Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	78,76	79	n/a	80		
Persentase Genangan yang Tertangani	%	-	55	n/a	60		
Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	100	100	n/a	100		
Persentase Bangunan Gedung Hijau	%	-	10	n/a	15		
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	41,72	45,71	n/a	48,2		
Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analis	%	74.716	77	n/a	79		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	50	60	n/a	62		
Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	27,8	39,8	n/a	51,9		
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	54,28	55	n/a	56		
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi	%	0	2	n/a	4		
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	74,12	74,5	n/a	75		
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	%	67,2	67,8	n/a	68.4		
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	70,5	71	n/a	71.5		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	100	100	n/a	100		
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	67,86	68,2	n/a	68.6		
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	74,72	75,2	n/a	75.7		
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	n/a	100		
Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	75,33	75,7	n/a	76.1		
Cakupan layanan sistem drainase	%	-	65	n/a	67.5		
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	45,1	46	n/a	47		
Indeks Kualitas Lingkungan Permukiman	Indeks	-	60	n/a	62		
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	%	43,99	44,01	n/a	44,02		
D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	n/a	100		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	n/a	100		
persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	-	6,89	n/a	25.51		
Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	13,786	12,5	n/a	20		
Persentase Kawasan Kumuh yang Ditingkatkan	%	-	0,83	n/a	0.36		
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	57,996	59	n/a	62		
Persentase Pelaku Usaha Perumahan Tersertifikasi	%	-	70	n/a	75		
Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	n/a	100		
Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi	%	100	100	n/a	100		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani	%	-	6,89	n/a	25.51		
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	13,79	12,5	n/a	11.2		
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	58	59	n/a	60		
Indeks Kualitas Permukiman	Indeks	-	65	n/a	67		
Persentase bangunan perumahan berizin	%	-	75	n/a	78		
E. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100		
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100		
Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100		
Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	67,74	100		
Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan	%	100	100	100	100		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
penyelamatan dan evakuasi korban bencana							
Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	85	85	90		
Persentase penanganan pra bencana	%	100	80	100	85		
Persentase penanganan pasca bencana	%	100	80	100	85		
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100		
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100		
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100		
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100		
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0,31	0,4	1,57	0.5		
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	%	100	100	100	100		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
penyelamatan dan evakuasi korban bencana							
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100		
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	6,82	6,7	15	6.5		
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman	%	-	70	100	72		
Tingkat Kesiapsiagaan Bencana	Indeks	100	100	100	100		
F. SOSIAL							
Persentase PSKS yang Meningkat Kapasitasnya	%	60	65	70	70		
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100		
Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100		
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100		
Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	31,6	80	83	85		
Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	72	75	75	80		
Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	100		
Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	43,39	55	100	60		
Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100		
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100		
Persentase korban tindak kekerasan yang tertangani	%	100	100	100	100		
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	-	45		48		
Tingkat kelayakan taman makam pahlawan	%	85	85	85	87		
INDIKATOR OUTCOME BERDASARKAN URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
A. TENAGA KERJA							
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100		
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	4.354	4,7	5.2	6		
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	3.840.435.854	3.887.881.212	38,404,358.55	3.993.371.260		PDRB atas dasar Harga Konstan = 6.728.290.000 Penduduk yang bekerja = 175.196 Orang
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	87.669	87,8	87,91	89		Pencari Kerja Terdaftar = 571 Orang Pencari Kerja ditempatkan = 502 Orang

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	78.049	78,5	n/a	8000%		
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	78,05	78,5	n/a	7900%		
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja	%	87,67	87,8	87,91	88		Pencari Kerja Terdaftar = 571 Orang Pencari Kerja ditempatkan = 502 Orang
B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	n/a	100		
Indeks Kualitas Keluarga	Indeks	69	70	n/a	75		
Persentase Data Terpilah Gender	%	60	65	n/a	70		
Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	75	80	n/a	85		
Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	n/a	100		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	12,1	12,5	n/a	13		
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	n/a	100		
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000	18,44	18	n/a	17.5		
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	64	65	n/a	67		
Persentase pemenuhan hak anak	%	78	80	n/a	82.5		
C. PANGAN							
Tingkat Kemandirian Pangan Daerah	%	-	75	n/a	80		
Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	96.632	96,8	108.69	97		
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	11,94	10	18.91	9		
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	96,63	96,8	108.69	97		
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	4,69	4,2	5.58	4		
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,43	85	88.97	87		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	%	70	80	81.09	82.5		
D. PERTANAHAN							
Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	0	5	n/a	50		
Persentase Ganti Kerugian yang Diselesaikan	%	-	75	n/a	80		
Luas Tanah Ulayat yang Ditetapkan	%	-	70	n/a	80		
Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	-	70	n/a	75		
Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	-	80	n/a	85		
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	%	100	100	n/a	100		
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	96,38	96,5	n/a	96.7		
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	100	100	n/a	100		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan	%	100	100	n/a	100		
Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100	n/a	100		
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0	5	n/a	10		
Persentase ganti kerugian yang terealisasi	%	-	85	n/a	87.5		
Luas tanah ulayat (tanah bengkok) yang ditetapkan	Ha	-	50	n/a	75		
Jumlah izin pembukaan tanah	Izin	-	25	n/a	30		
Persentase bidang tanah bersertifikat	%	-	70	n/a	73		
Persentase tanah yang terpetakan	%	-	75	n/a	78		
Persentase SDM pertanahan yang kompeten	%	-	80	n/a	82.5		
Persentase wilayah pesisir yang tertata	%	-	60	n/a	65		
Persentase informasi pertanahan terintegrasi	%	-	70	n/a	75		
Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	%	-	75	n/a	78		
E. LINGKUNGAN HIDUP							

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase Dokumen Lingkungan yang Tersusun	%	70	75	100	80		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Indeks	64,02	66,36	71.44	66,57		
Indeks Keanekaragaman Hayati	Indeks	60	65	n/a	70		
Persentase Limbah B3 yang Dikelola	%	70	75	n/a	80		
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	100	100	100	100		
Persentase Masyarakat Peduli Lingkungan	%	100	100	100	100		
Jumlah Penghargaan Lingkungan yang Diberikan	Jumlah	0	1	1	2		
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100		
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	75.326	75,7	n/a	77		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - IKA (Indeks Kualitas Air)	Indeks	51,82	65,16	64.42	65,36		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - IKU (Indeks Kualitas Udara)	Indeks	96,63	71,48	84.69	71,78		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - IKL (Indeks Kualitas Lahan)	Indeks	24,64	58,96	59.01	59,03		
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	75,33	75,7	n/a	76.1		
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan	%	100	100	100	100		
Persentase pengendalian pencemaran air	%	68	70	n/a	73		
Persentase pengelolaan limbah B3	%	72	75	n/a	78		
Jumlah MHA yang terlindungi haknya	Jumlah	0	0	0	0		
Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan	Jumlah	2	2	2	4		
Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	Jumlah	0	1	1	2		
Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100		
F. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	6,5	28	52,62	30		Untuk baseline 2024 70%. Untuk target 2025 menjadi 81% dengan capaian 52,62%
Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	91,5	91,5	97,54	92		Untuk baseline 2024 94,33%. Untuk target 2025 menjadi 99% dengan capaian 97,54%
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	80	100	93,41	100		Untuk baseline 2024 91,95%. Untuk target 2025 menjadi 100% dengan capaian 93,41%
Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	95,93	100	6,95	100		Untuk baseline 2024 6,50%. Untuk target 2025 menjadi 68% dengan capaian 6,95%
Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	57,84	100	61,84	100		Untuk baseline 2024 58,12%. Untuk target 2025 menjadi 65% dengan capaian 61,84%
Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	34,90	100	39,00	100		Untuk baseline 2024 36,07%. Untuk target 2025 menjadi 43% dengan capaian 39%
Persentase Pemanfaatan SIAK	%	60	100	80	100		Untuk baseline 2024 60%. Untuk target 2025 menjadi 100% dengan capaian 80%

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	100	100	100	100		Untuk baseline 2024 100%. Untuk target 2025 menjadi 100% dengan capaian 100%
Perekaman KTP elektronik	%	99,28	99,35	98,86	99,4		Untuk baseline 2024 99,28%. Untuk target 2025 menjadi 100% dengan capaian 98,86%
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	91,93	92,2	93,41	92,5		Untuk baseline 2024 91,93%. Untuk target 2025 menjadi 92,2% dengan capaian 93,41%
Kepemilikan akta kelahiran	%	95,93	96,1	97,54	96,3		Untuk baseline 2024 95,93%. Untuk target 2025 menjadi 96,1% dengan capaian 97,54%
Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah memanfaatkan data kependudukan	%	13,33	100	80	100		Untuk baseline 2024 13,33%. Untuk target 2025 menjadi 100% dengan capaian 80%
Ketersediaan data penduduk yang akurat	%	-	100	100	100		Untuk baseline 2024 0%. Untuk target 2025 menjadi 100% dengan capaian 100%
G. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
Persentase peningkatan status desa mandiri	%	79.245	79,5	n/a	81		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	-	75	n/a	80		
Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	n/a	100		
Jumlah kerja sama antar desa	Jumlah	-	15	n/a	18		
Persentase desa dengan administrasi yang tertib	%	80	85	n/a	87.5		
Persentase lembaga masyarakat yang aktif	%	75	80	n/a	82.5		
H. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	2,35	2,3	n/a	2.25		
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	24,7	24,6	n/a	24,5		
Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	84.706	84,8	n/a	86		
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7.238	7,1	n/a	6.5		
TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,28	2,26	n/a	2.24		
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (mCPR)	%	84,71	84,8	n/a	85		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,24	7,1	n/a	6.95		
I. PERHUBUNGAN							
Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,89	0,9	n/a	0.92		
Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	-	65	n/a	70		
Tingkat Keselamatan Pelayaran	%	99,99	80	n/a	85		
Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,89	0,9	n/a	0.91		
Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota)	Rasio	0,37	0,36	n/a	0.36		
Jumlah trayek pelayaran yang terlayani	Jumlah	21	8	n/a	10		
J. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	97,87	100		
Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	-	80	100	85		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	10.127	11	16,67	20		
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet	%	100	100	100	100		
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	10,13	11	16,85	12		
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	%	64,04	64,5	100	65		
K. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
Persentase Koperasi Simpan Pinjam Berizin	%	100	75	n/a	80		
Persentase Koperasi yang Diawasi	%	100	70	n/a	75		
Persentase KSP/USP Sehat	%	62,5	63	n/a	65		
Persentase Pengurus Koperasi Terlatih	%	18	65	n/a	70		
Persentase Koperasi Aktif	%	45	65	n/a	70		
Persentase UMKM yang Diberdayakan	%	49	55	n/a	60		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	1,09	3	n/a	5		
Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	48.825	49,5	n/a	52		
Pertumbuhan Wirausaha	%	41,88	42	n/a	42,5		
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	62,5	63	n/a	63.5		
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	48,83	49,5	n/a	50		
Jumlah koperasi yang berizin	Jumlah	126	45	n/a	50		
Jumlah pengurus koperasi yang terlatih	Jumlah	30	150	n/a	175		
Tingkat Pengembangan UMKM	%	41,88	70	n/a	72.5		
Persentase koperasi berbadan hukum	%	100	85	n/a	87.5		
L. PENANAMAN MODAL							
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	6.373	6,6	n/a	8		
Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	33	75	n/a	80		
Jumlah Investor yang Tertarik	Jumlah	8	8	n/a	10		
Rata-rata Waktu Penyelesaian Izin Investasi	Hari	5	5	n/a	5		
Persentase Kepatuhan Investor	%	80	80	n/a	85		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase Data Investasi Terintegrasi	%	75	75	n/a	80		
Jumlah kegiatan promosi investasi	Jumlah	6	12	n/a	15		
Rata-rata waktu penyelesaian perizinan (hari)	Hari	5	5	n/a	5		
Persentase realisasi investasi terhadap komitmen	%	40	80	n/a	82.5		
Persentase keterpaduan data penanaman modal	%	70	75	n/a	80		
M. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	1.693	1,8	0,22	3		
Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	10	11	2.7	12		
Persentase Gugus Depan Aktif	%	4.459	25	100	50		
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,69	1,8	15.98	1.95		
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	4,46	4,6	1.21	4.8		
Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	10	11	6	12		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Jumlah anggota pramuka aktif	Orang	-	2,5	14.846	2,75		
N. STATISTIK							
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,31	2,6	2,31	100		
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	%	100	100	100	100		
Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100		
O. PERSANDIAN							
Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Indeks	60,93	61,5	60,93	65		
Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks	60,93	61,5	60,93	62		
P. KEBUDAYAAN							
Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100		
Persentase Situs Sejarah yang Terpelihara	%	70	75	100	80		
Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	65	70	80	75		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Jumlah Pengunjung Museum	Orang	-	-	-	-		Kab barito Kuala tidak memiliki Museum
Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	100		
Jumlah sanggar seni tradisional	Jumlah	20	25	468	30		
Jumlah situs sejarah yang terdata	Jumlah	14	15	15	18		
Jumlah kunjungan museum	Orang	-	-	-	-		Kab barito Kuala tidak memiliki Museum
Q. PERPUSTAKAAN							
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	68,24	68,5	n/a	70		
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	76,57	76,8	1.03	78		Ada penyesuaian perhitungan yang dilakukan oleh Perpusnas
Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	Jumlah	-	8	n/a	10		
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	68,24	68,5	59.29	68.8		
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	76,57	76,8	1.03	77.1		Ada penyesuaian perhitungan yang dilakukan oleh Perpusnas
Jumlah naskah kuno yang didigitalisasi	Jumlah	-	20	n/a	25		
R. KEARSIPAN							

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	75,43	75,8	88.2	78		
Persentase Arsip Vital yang Terlindungi	%	100	100	-	100		Untuk Arsip Vital yang dilindungi Dinas Perpustakanan dan Kearsipan Tidak Menyimpan adanya di Masing2 SKPD yang Menciptanya Contoh Sertifikat Tanah adanya di BPKAD
Persentase Layanan Arsip Tepat Waktu	%	-	85	80	90		
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%	75,43	75,8	75.97	76.2		
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	100	100	100	100		
Jumlah penggunaan arsip yang terdata	Jumlah	0	150	398	175		Sesuai Data Pengguna di Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
INDIKATOR OUTCOME BERDASARKAN URUSAN PILIHAN							
A. KELAUTAN DAN PERIKANAN							
Produksi Perikanan Tangkap	Ribu Ton	9,17	9,8	9850,152	10		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Produksi Perikanan Budi Daya	Ribu Ton	11,94	7,5	11,993	8		
Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	%	-	75	-	80		
Nilai Ekspor Hasil Perikanan	Kg/Kap/Tahun	67,86	67,93	-	67,99		Tidak ada Ekspor Hasil Perikanan
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	%	97,48	97,6	102	97.75		
Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	11,94	15	11,993	16,5		
Persentase penanganan pelanggaran	%	-	85	-	87.5		
Nilai ekspor produk perikanan (miliar)	Miliar Rupiah	-	50	-	60		Tidak ada Ekspor Hasil Perikanan
B. PARIWISATA							
Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	-	3	3,39	5		
Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	-32,5	-30	0	5		Untuk kabupaten Barito Kuala belum tersedia akomodasi hotel berbintang dan non bintang
Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	-	25	5	30		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tersertifikasi	Orang	-	80	30	100		Kegiatan ini bersifat partisipasif provinsi kalimantan selatan, Pemerintah kabupaten Barito Kuala melalui Disporbudpar belum menyelenggarakan karna masih bersifat pendataan
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-32,5	-28	70,90	-24		
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	1,85	2	5,93	2.2		
Tingkat hunian akomodasi	%	18,69	19	27,97	19.5		
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,57	2,6	2,57	2.65		
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,72	2,75	25,13	2.8		
Jumlah SDM pariwisata tersertifikasi	Orang	-	200	75	250		Kegiatan bersifat partisipatif, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Disporbudpar belum melaksanakan kegiatan ini karna masih tahapan pendataan

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
C. PERTANIAN							
Peningkatan produksi tanaman pangan	Ribu Ton	354674	356624	401958	358615		
Peningkatan Produksi Hortikultura	%	0,02	0,69	0.48	0.69		
Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	4	4,10	4.1	6.00		
Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	2,5	6	4.05	8		Target 5%
Persentase Prasarana Pertanian yang Berfungsi	Ha	115042	115574	120538.00	115.875		
Persentase Hewan Ternak yang Sehat	%	70	75	75.00	80		
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	85	87,5	87.5	90		
Persentase Usaha Pertanian Berizin	%	93	94	n/a	95		
Persentase Petani yang Terlayani Penyuluhan	%	70	75	75	80.00		
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha/Tahun	3,74	3,76	3.90	416,44		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-0,2	-0,15	35.83	100		
Tingkat ketersediaan prasarana pertanian	%	-	80	80	42.73		
Persentase penanganan bencana pertanian	%	-	85	85	-0.1		
Jumlah usaha pertanian berizin	Jumlah	-	300	n/a	82.5		
Jumlah petani yang mendapat penyuluhan	Orang	-	8000	1202	87.5		
D. KEHUTANAN							
Luas hutan adat yang ditetapkan (Ha)	Ha	-	100	-	350 1485		IKD PROVINSI
E. PERDAGANGAN							
Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	Rupiah	0	450.000.000	n/a	500.000.000		
Persentase Pasar Rakyat yang Revitalisasi	%	50	55	n/a	60		
Tingkat Stabilitas Harga Bahan Pokok	%	41.505	45	n/a	50		
Nilai Ekspor Daerah	Rupiah	0	80.000.000	n/a	100.000.000		
Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	100	n/a	100		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase Produk Dalam Negeri di Pasar Modern	%	100	100	n/a	70		
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	72,97	73,5	n/a	74		
Persentase kinerja realisasi pupuk	%	41,5	42,5	n/a	43.5		
Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	%	100	100	n/a	100		
Koefisien harga antar wilayah tingkat kabupaten	Angka	0	7,2	n/a	7		
Ekspor barang dan jasa	%	0	-16	n/a	-15		
Proporsi produk lokal di pasar	%	0	45	n/a	47.5		
F. PERINDUSTRIAN							
Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah	%	72,3	72,6	n/a	75		
Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	6.993	7,1	n/a	8		
Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	125	122	n/a	100		
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	6,99	7,1	n/a	7.25		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri	%	72,3	72,6	n/a	73		
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI)	%	100	100	n/a	100		
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI)	%	0	90	n/a	92		
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	%	0	85	n/a	87.5		
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	125	120	n/a	115		
G. TRANSMIGRASI							
Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direncanakan	Unit	100	1	0	1		Tidak ada rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi baru
Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibangun	Unit	-	0,5	0	1		Tidak ada pembangunan Kawasan Transmigrasi baru
Persentase Kawasan Transmigrasi Berkembang	%	-	55	0	60		Kawasan Transmigrasi saat ini berstatus Mandiri

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Jumlah unit permukiman transmigrasi yang dibangun	Unit	-	5	0	7		Tidak ada pembangunan Unit Permukiman Transmigrasi baru
Tingkat kemandirian kawasan transmigrasi	%	-	70	76.53	73		Status Kawasan Transmigrasi saat ini Mandiri
INDIKATOR OUTCOME BERDASARKAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
A. SEKRETARIAT DAERAH							
Indeks Kesejahteraan Masyarakat	Indeks	34,47	65	n/a	70		
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	5,1	5,27	5,2		
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,54	68,7	79,85	71,5		Target sudah cukup terlampaui pada tahun 2025
B. SEKRETARIAT DPRD							
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	71,5		
Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	n/a	100		
Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	n/a	100		
Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	%	80	85	n/a	87.5		
C. PERENCANAAN							
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	71,5		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	82,5	90,91	85		
Tingkat Sinkronisasi Perencanaan	%	100	87	100	90		
Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	%	-	90	n/a	92		
Tingkat keselarasan perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten	%	-	85	n/a	87.5		
D. KEUANGAN							
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	71,5		
Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	16,2	15,5	34	15		
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	5.882	6,5	7,67	7		
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	80	85	79,22	90		
Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	100	100	100	100		
Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	47,85	20	36,72	25		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Persentase Penurunan SILPA	%	2,7	5	11,73	10		
Persentase BMD yang Tersertifikasi	%	73	75	80,87	80		
Persentase Target Pendapatan yang Tercapai	%	72,3	72,6	95,87	75		
Opini BPK atas laporan keuangan	Status	WTP	WTP	WTP	WTP		
Persentase aset daerah yang terdokumentasi	%	90	90	100	92.5		
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	%	60,3	60,75	87,63	60,99		
Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD	%	16,87	19,62	12,37	22,37		
Deviasi realisasi PAD terhada PAD dalam APBD	%	24,96	28,64	3,08	31,92		
Manajemen Aset	Nilai	4	4	4	4		
Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	13,64	17,04	10,73	20,42		
E. KEPEGAWAIAN							
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	-	71,5		Indeks RB pada Bidang Organisasi Pemda
Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Nilai	3	3,2	-	3.5		Nilai Indeks NSPK 2025 sampai saat ini belum dikeluarkan BKN
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	66,5	70	78.52	72.5		Nilai Indeks dari BKN

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	%	70,23	72,61	73.55	74,98		
Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	%	22,25	23,64	21.69	25,03		
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	%	34,42	35,12	36.64	35,81		
F. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	125	80	49	80		
Persentase ASN yang telah mengikuti diklat	%	80	80	33	82.5		
G. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	-	55	n/a	60		
Jumlah penelitian yang dimanfaatkan	Jumlah	-	15	n/a	18		
H. INSPEKTORAT DAERAH							
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	76,99	71,5		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Angka	9	4	10	4		
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,29	3,3	2,423	3,35		
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	3,1	3	3,2		
Manajemen Risiko Indeks	Indeks	2,87	3,2	2,219	3.5		
Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	95,31	85	96,77	90		
Persentase OPD yang Difasilitasi	%	-	80	100	85		
Nilai SPI	Nilai	73,2	76	78,85	76.15		
I. KECAMATAN							
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	71,5		
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	75	n/a	80		
Persentase Desa/Kelurahan Berdaya	%	-	70	n/a	75		
Angka Gangguan Ketertiban Umum	Angka	-	6	n/a	5		
Persentase Penanganan Urusan Pemerintahan Umum	%	-	85	n/a	90		
Persentase Desa dengan Akuntabilitas Baik	%	-	75	n/a	80		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	-	3,9	n/a	4		
Persentase Desa Mandiri	%	-	25	n/a	30		
Indeks Transformasi Digital Pemerintahan	Indeks	-	2,5	n/a	2.75		
Indeks Pembangunan Desa (IPD)	Indeks	-	65	n/a	67.5		
J. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	71,5		
Indeks Karakter Pancasila	Indeks	74,3	75	75	80		
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	%	76	78	76	80		
Persentase Ormas yang Dibina	%	80	84	84	86		
Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks	75	70	70	75		
Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks	78,84	79	n/a	80		Nilai IKN Tahun 2026 belum di umumkan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Indeks Keharmonisan Kehidupan Beragama	Indeks	84,26	85	77,89	86,5		
Jumlah organisasi masyarakat yang aktif & terdaftar	Jumlah	40	150	39	165		
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	58,55	56	59,98	60		

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	CAPAIAN 2026/Tri II	KETERANGAN
K. PENGADAAN							
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	n/a	0		
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	83,15	89,86	n/a	96,57		
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	38,13	41,8	n/a	45,46		
Peningkatan penggunaan produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	%	27,18	31,37	n/a	35,56		
L. TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK							
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	97,22	97,68	n/a	98,15		
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	n/a	100		
INDIKATOR REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH (SEMUA URUSAN)							
Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Indeks	70,94	71,2	79,85	71,5		

C. Evaluasi Capaian Sasaran Kinerja SKPD

Setelah sebelumnya dibahas capaian Indikator Kinerja Daerah, berikut dijelaskan hasil evaluasi capaian kinerja Kepala SKPD/Camat sampai pada akhir Triwulan II 2026, berdasar pada Perjanjian Kinerja tahun 2026 yang ditandatangani pimpinan SKPD/Kecamatan dan Bupati Barito Kuala, yang mengarah/mendukung pada Indikator Kinerja Daerah.

Tabel 2.13 Rekap Evaluasi Kinerja Pimpinan SKPD (Ess II/Camat) Kab. Barito Kuala sampai Triwulan II 2026

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Meningkatnya Stabilitas Politik, Ketertiban Umum, serta Kesadaran Berbangsa dan Bernegara dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase Konflik Sosial yang Ditangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%	Persentase konflik sosial yang ditangani selalu mencapai 100% karena indikator ini dihitung berdasarkan jumlah konflik sosial yang terjadi dan seluruhnya ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai kewenangan, baik melalui langkah pencegahan, mediasi, koordinasi lintas sektor, maupun fasilitasi penyelesaian konflik. Dengan demikian, setiap kejadian konflik yang tercatat selalu mendapatkan penanganan, sehingga realisasi indikator menjadi 100%. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, meskipun angka 100% tersebut tidak selalu menggambarkan bahwa konflik selesai sepenuhnya, melainkan bahwa seluruh

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
									konflik yang muncul telah direspons dan diproses penanganannya sesuai mekanisme yang berlaku. Rumus Perhitungan : Persentase Konflik Sosial yang ditangani = Jumlah Konflik Sosial yang terjadi dibagi Jumlah Konflik Sosial yang ditangani x 100% 17/17 x 100% = 100%
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH									
1	Terwujudnya Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten	Nilai	24	24	0	0,00%	0,00%	Nilai kemungkinan akan dirilis oleh KemenpanRB pada September 2026 atau di Tri IV 2026. Saat ini sedang berlangsung penilaian dari Tim KemenpanRB
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Kabupaten	Nilai	21	21	0	0,00%	0,00%	Nilai kemungkinan akan dirilis oleh KemenpanRB pada September 2026 atau di Tri IV 2026. Saat ini sedang berlangsung penilaian dari Tim KemenpanRB
2	Terwujudnya Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks	41	41	0	0,00%	0,00%	Nilai kemungkinan akan dirilis pada Triwulan IV 2026

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
	Daerah yang Berkualitas	Persentase Hasil Riset yang Dijadikan Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%	Untuk Triwulan I Persentase Belum Terlihat Karena Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan Namun Bidang Litbang Telah Menyerahkan Hasil Penelitian Ke Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Meningkatnya manajemen kepegawaian yang berkualitas dan akuntabel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai terhadap Formasi Pegawai sesuai Kualifikasi	Persen	72,50	72,50	0,00	0,00%	0,00%	Kegiatan Belum Dilaksanakan, masih data Triwulan I
2	Meningkatnya Implementasi NSPK Manajemen ASN	Nilai Indeks Impelementasi NSPK Manajemen ASN	Nilai Indeks	67,50	67,50	0,00	0,00%	0,00%	Nilai Capaian Belum Dikeluarkan, masih data Triwulan I
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
1	Meningkatnya Penguatan Sistem Mitigasi Bencana dan Ketangguhan Masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai Indeks	0,55	0,55	0,00	0%	0,00%	Nilai keluar kemungkinan di Tri III
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Indeks	74,00	74,00	0,00	0%	0,00%	Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Kemendagri Tahun sebelumya dilaksanakan ditriwulan IV
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH									
1	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	Rupiah	93.108.175.325,00	37.243.270.130,00	28.228.111.620,00	75,79%	30,32%	
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	Rupiah	284.157.156.000,00	133.516.126.800,00	4.621.088.894,00	3,46%	1,63%	
DINAS KESEHATAN									
1	Meningkatnya Kualitas	Angka Kematian Ibu	Nilai	115	115	0	0,00%	0,00%	Nilai diperoleh pada akhir tahun

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
	Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Balita	Nilai	6,2	6,2	0	0,00%	0,00%	Nilai diperoleh pada akhir tahun
		Angka Kesakitan	Nilai	14,5	14,5	0	0,00%	0,00%	Nilai diperoleh pada akhir tahun
DINAS PENDIDIKAN									
1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Skor Literasi	Angka	68,32	66,52	63,64	95,67%	93,15%	Nilai diperoleh dari Hasil Raport Pendidikan yang Dilaporkan Pada Bulan Maret 2026
		Skor Numerasi	Angka	60,91	58,71	56,37	96,01%	92,55%	Nilai diperoleh dari Hasil Raport Pendidikan yang Dilaporkan Pada Bulan Maret 2026
		Harapan Lama Sekolah	Angka	12,58	12,59	12,69	100,79%	100,87%	Nilai diperoleh dari Hasil Raport Pendidikan yang Dilaporkan Pada Bulan Maret 2026
		Rata-Rata Lama Sekolah	Nilai	7,94	7,95	7,99	100,50%	100,63%	Nilai diperoleh dari Hasil Raport Pendidikan yang Dilaporkan Pada Bulan Maret 2026
DINAS PERHUBUNGAN									

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
1	Meningkatnya Keterhubungan Antar Simpul Transportasi dalam Kabupaten	Rasio Konektivitas Kabupaten	Nilai Rasio	0,64	0,64	0	0,00%	0,00%	Nilai diperoleh pada akhir tahun
2	Terwujudnya Layanan Trasnportasi yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau	Persentase Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Transportasi	Persen	6,95	6,95	0	0,00%	0,00%	Nilai diperoleh pada akhir tahun
		Persentase Peningkatan Angkutan Umum yang Layak Operasional Sesuai Ketentuan	Persen	8,99	8,99	0	0,00%	0,00%	Nilai diperoleh pada akhir tahun
DINAS SOSIAL									
1	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	Persen	100	50,00	53,62	107,24%	53,62%	

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
2	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	Persen	100	50,00	54,04	108,08%	54,04%	
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN									
1	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	Persen	4,2	2,10	0,62	29,52%	14,76%	Masih data Triwulan I 2026
		Persentase jenis produk olahan perkebunan yang diterima pasar	Persen	100	50,00	50,00	100,00%	50,00%	
2	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase peningkatan populasi ternak	Persen	2,58	1,29	1,29	100,00%	50,00%	
		Persentase peningkatan penyediaan daging ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Persen	14,50	7,25	3,66	50,48%	25,24%	Masih data Triwulan I 2026

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
		Persentase jenis produk olahan peternakan yang diterima pasar	Persen	100,00	50,00	50,00	100,00%	50,00%	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Dokumen Kependudukan	Nilai	96,00	95,85	95,84	99,99%	99,83%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Pencatatan Sipil	Nilai	96,00	95,85	95,84	99,99%	99,83%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pemadanan Data Kependudukan	Nilai	96,00	95,85	95,77	99,92%	99,76%	
		Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Indeks	100	49,98	49,98	100,00%	49,98%	

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Barito Kuala	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang Disampaikan Kepada Masyarakat	Persen	82	82	48,64	59,32%	59,32%	
		Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	20	20	0	0,00%	0,00%	Kegiatan Belum Dilaksanakan
2	Meningkatnya Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	13,79	13,79%	13,79%	Data berdasarkan hasil verifikasi DSSD pada e-Walidata

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
	Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100,00%	100,00%	Data berdasarkan Laporan IKU Urusan Statistik pada LPPD
3	Meningkatnya Kepatuhan Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Skor	70	70	0	0,00%	0,00%	Penilaian akan dikeluarkan pada akhir tahun
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan berdaya saing dan meningkatnya Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Persentase koperasi yang berkualitas dan berdaya saing	Persen	22	7	7,00	100,00%	31,82%	Revisi Target PK, masih data Triwulan I
		Persentase Peningkatan Usaha Mikor menjadi Usaha Kecil	Persen	4	0,99	0,99	100,00%	24,75%	Revisi Target PK, masih data Triwulan I

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
2	Meningkatnya produk IKM yang Berdaya saing	Persentase produk IKM yang Berdaya saing	Persen	4,33	0,80	0,80	100,00%	18,48%	Logistik dan keterbatasan ruang pameran yang menyebabkan belum semua produk IKM potensial dapat ditampilkan secara bersamaan, masih data Triwulan I
3	Peningkatan Daya Saing Produk Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen	Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya	Persen	98	24,5	24,48	99,92%	24,98%	1. Adanya perbedaan harga di tingkat eceran dan agen 2. Ada beberapa pedagang yang sulit memberikan informasi terkait harga (masih data Triwulan I)
		Persentase Pelaku Usaha yang Terlibat dalam Ekspor	Persen	0,11	0	0,00	#DIV/0!	0,00%	Belum dilaksanakannya kegiatan karena kegiatan pada Triwulan IV, masih data Triwulan I
		Persentase Pertumbuhan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	7	0	0,00	#DIV/0!	0,00%	Belum dilaksanakannya kegiatan karena kegiatan pada Triwulan IV, masih data Triwulan I

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja	Persentase Angkatan Kerja yang bekerja	Persen	96,70	40,00	60,80	152,00%	62,87%	
		Persentase Perusahaan yang Menerapkan Ketentuan Ketenagakerjaan	Persen	100,00	50,00	60,00	120,00%	60,00%	
2	Meningkatnya Status Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi	Nilai Indeks	80,05	78,26	79,66	101,79%	99,51%	
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	35,80	35,80	0,00	0,00%	0,00%	Triwulan III Baru Mulai Pekerjaan, Triwulan IV terlihat capaiannya
2	Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	5,61	5,61	0,00	0,00%	0,00%	Triwulan III Baru Mulai Pekerjaan, Triwulan IV terlihat capaiannya
3	Meningkatnya Perumahan dengan Prasarana	Persentase Pemenuhan PSU	Persen	100	100	0,00	0,00%	0,00%	Triwulan III Baru Mulai Pekerjaan, Triwulan IV terlihat capaiannya

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
	Sarana dan Utilitas yang Memadai	yang Memadai di Perumahan							
		Persentase Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persen	65,00	65,00	0,00	0,00%	0,00%	Nilai di tri 4 namun sudah ada proses kegiatan
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									
1	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)	Nilai	76	76	0	0,00%	0,00%	Nilai akan didapatkan pada akhir tahun anggaran karena penilaian dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
2	Meningkatkatnya Kinerja Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Tata Kelola Kearsipan	Nilai	81,5	81,5	0	0,00%	0,00%	Nilai akan didapatkan pada akhir tahun anggaran karena penilaian dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia melalui pengawasan Provinsi
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA									
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing	Pemuda yang Menerima Penghargaan di	Orang	56	6	0	0,00%	0,00%	

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat Lokal/Nasional							
		Perolehan Medali di Tingkat Lokal/Nasional/Internasional	Medali	61	27	14	51,85%	22,95%	
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Warisan Budaya Lokal	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persen	60	20	40	200,00%	66,67%	
3	Meningkatnya Pengembangan Objek Wisata	Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara)	Orang	197.355	97.562	108.685	111,40%	55,07%	
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA									
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura Utama	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen Peningkatan	0,57	0,01	0,05	500,00%	8,77%	1. Panen baru terjadi disebagian kecil Lahan Budidaya. Pada umumnya masih berada pada awal fase pematangan 2. Teridentifikasinya Serangan tungro dibeberapa kawasan pertanian tanaman pangan

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura Utama	Persen Peningkatan	0,3	0,02	0,03	150,00%	10,00%	1. Konversi Lahan Hotikultura 2. Pengumpulan Data belum Optimal
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN									
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83,25	83,25	0	0,00%	0,00%	Dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) akhir tahun
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	21.404	10.253	10.091,16	98,42%	47,15%	1.Adanya kenaikan harga bbm yang mengakibatkan naik nya harga pakan 2.Tidak terjadi musim penangkapan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai Indeks	65,36	65,36	0	0,00%	0,00%	Triwulan IV dikeluarkan oleh KLH
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai Indeks	84,99	84,99	0	0,00%	0,00%	Triwulan IV dikeluarkan oleh KLH

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Nilai Indeks	59,03	59,03	0	0,00%	0,00%	Triwulan IV dikeluarkan oleh KLH
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah yang Efektif dan Berkelanjutan	Persentase Sampah Terkelola	Persen	76	76	0	0,00%	0,00%	Triwulan IV dikeluarkan oleh KLH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Meningkatnya Desa yang Berstatus Mandiri	Persentase Desa yang Berstatus Mandiri	Persen	21,54	21,54	0	0,00%	0,00%	Nilai dikeluarkan antara Triwulan III/IV
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	92	92	94,05	102,23%	102,23%	Masih data Triwulan I
2	Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Nilai Investasi Daerah	Rupiah	120.000.000.000	30.000.000.000	35.853.869.094	119,51%	29,88%	Masih data Triwulan I
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase ARG Daerah*	Persen	57	0	0	#DIV/0!	0,00%	1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PUG, Penyusunan SK Pokja PUG, dan realisasi ARG diagendakan pada Triwulan II. 2. Penetapan target diindikasikan terlalu tinggi, dimana di 2025 tercapai sekitar 16 persen, jadi target di tahun 2026 ada di sekitaran 16 persen juga.
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	75	75	100	133,33%	133,33%	Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan Sebanyak 1 Kasus
		Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	80	80	100	125,00%	125,00%	Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Sebanyak 5 Kasus
2	Meningkatnya Kualitas	Angka Kelahiran Total (TFR) per	Persen	2,3	2,3	2,36	97,39%	97,39%	Pelaksanaan Kegaiatan Sosialisasi dan Implementasi Kependudukan. Semakin rendah

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
	Kesejahteraan Keluarga	WUS usia 15-49 Tahun							capaiannya semakin baik dengan angka ideal di 2,1
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)	Persen	24,6	24,6	20,5	116,67%	116,67%	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pendewasaan Usia Perkawianan (PUP). Semakin rendah capaiannya maka semakin baik
		Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Persen	70	70	73,97	105,67%	105,67%	Aseptor yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
		Persentase Kampung Keluarga Berencana (KB) Berstatus Berkembang Mandiri	Persen	70	20	28,57	142,85%	40,81%	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Kampung KB pada 41 Desa
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an, Infrastruktur Dasar dan	Persentase Infrastruktur kePU-an yang berkualitas	Persen	58,25	58,25	0	0,00%	0,00%	Nilai diperoleh pada akhir tahun
		Persentase Pelayanan Air Minum	Persen	75	75	0	0,00%	0,00%	Nilai diperoleh pada akhir tahun

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pelayanan Air Limbah	Persen	80	80	0	0,00%	0,00%	Nilai diperoleh pada akhir tahun
		Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Persen	80	80	0	0,00%	0,00%	Nilai diperoleh pada akhir tahun
INSPEKTORAT									
1	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI	Persen	85,05	83	92,85	111,87%	109,17%	Capaian Semester I
		Persentase Penyelesaian Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Persen	85,05	83	98,48	118,65%	115,79%	
		Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP Kabupaten	Nilai	14,5	0	0	#DIV/0!	0,00%	Nilai kemungkinan akan dirilis oleh KemenpanRB pada September 2026 atau di Tri IV 2026. Saat ini sedang berlangsung penilaian dari Tim KemenpanRB

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Selesai Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100,00%	100,00%	
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3	0	0	#DIV/0!	0,00%	Nilai final akan didapatkan pada akhir Triwulan IV
3	Meningkatnya Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang Mendapatkan Predikat WBK	Unit SKPD	1	0	0	#DIV/0!	0,00%	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
1	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100	100	100	100,00%	100,00%	Meskipun capaian sudah 100%, tetapi masih ada ditemui beberapa masalah, yang utamanya adalah masih ada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum tertib aturan berjualan, masih data Triwulan I

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
SEKRETARIAT DAERAH									
1	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	97,48	97,48	0	0,00%	0,00%	Belum ada relaisasi sampai dengan triwulan II dikarenakan Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia menerbitkan Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah pada Triwulan IV Tahun berjalan
		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Evaluasi	3,4687	3,4687	0	0,00%	0,00%	Sampai dengan tahun berjalan masih belum ada Keputusan Menteri Dalam Negeri perihal hasil evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2025
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Nilai Indeks	90,55	90,55	0	0,00%	0,00%	Indeks Tata Kelola Pengadaan semester I tahun 2026 belum diterbitkan dikarenakan ada perubahan atas Peraturan Kepala LKPP perihal Penilaian ITKP Tahun 2026-2029 yang diatur dalam Keputusan Kepala LKPP Nomor 74 Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	91	91	0	0,00%	0,00%	Penailaian Indeks kepuasan Masyarakat semester I belum dapat diterbitkan disebabkan sebagian besar Unit Kerja Pelayanan belum menyerahkan hasil penilaian Kepuasan Masayarakat pada semester I
4	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten pada Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	13,44	13,44	0	0,00%	0,00%	Nilai kemungkinan akan dirilis oleh KemenpanRB pada September 2026 atau di Tri IV 2026. Saat ini sedang berlangsung penilaian dari Tim KemenpanRB
SEKRETARIAT DPRD									
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Nilai Indeks	97,22	97,22	0	0,00%	0,00%	Penilaian di tri III/IV. Target ini perlu dikaji ulang karena dianggap tidak menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD
KECAMATAN ALALAK									
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	92,5	92,5	92,2	99,68%	99,68%	Hasil Penilaian Semester I

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
	Kecamatan Alalak								
KECAMATAN ANJIR MUARA									
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Anjir Muara	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	92,5	92,5	91,74	99,18%	99,18%	Hasil Penilaian Semester I
KECAMATAN ANJIR PASAR									
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Anjir Pasar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	92,5	92,5	92,02	99,48%	99,48%	Hasil Penilaian Semester I

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
KECAMATAN BAKUMPAI									
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Bakumpai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	92,5	92,5	0	0,00%	0,00%	Nilai IKM Belum Keluar untuk Semester I
KECAMATAN BARAMBAI									
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Barambai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	92,5	92,5	91,5	98,92%	98,92%	Hasil Penilaian Semester I
KECAMATAN BELAWANG									

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Belawang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	92,5	92,5	91	98,38%	98,38%	Hasil Penilaian Semester I
KECAMATAN CERBON									
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Cerbon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	92,5	92,5	0	0,00%	0,00%	Nilai IKM Belum Keluar untuk Semester I
KECAMATAN JEJANGKIT									
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	92,5	92,5	93	100,54%	100,54%	Hasil Penilaian Semester I

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
	Kecamatan Jejangkit								
KECAMATAN KURIPAN									
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Kuripan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	92,5	92,5	0	0,00%	0,00%	Nilai IKM Belum Keluar untuk Semester I
KECAMATAN MANDASTANA									
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Mandastana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	92,5	92,5	92,04	99,50%	99,50%	Hasil Penilaian Semester I

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
KECAMATAN MARABAHAN									
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Marabahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	92,5	92,5	92,25	99,73%	99,73%	Hasil Penilaian Semester I
KECAMATAN MEKARSARI									
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Mekarsari	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	92,5	92,5	93,35	100,92%	100,92%	Hasil Penilaian Semester I
KECAMATAN RANTAU BADAUH									
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Rantau Badauh	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	92,5	92,5	92,05	99,51%	99,51%	Hasil Penilaian Semester I

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
KECAMATAN TABUKAN									
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Tabukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	92,5	92,5	0	0,00%	0,00%	Nilai IKM Belum Keluar untuk Semester I
KECAMATAN TABUNGANEN									
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Tabunganen	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	92,5	92,5	92,52	100,02%	100,02%	Hasil Penilaian Semester I
KECAMATAN TAMBAN									

NO	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	2026 (Tri II)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
					TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Tamban	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	92,5	92,5	92,73	100,25%	100,25%	Hasil Penilaian Semester I
KECAMATAN WANARAYA									
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Wanaraya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	92,5	92,5	88,36	95,52%	95,52%	Hasil Penilaian Semester I

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD/Kecamatan 2026, Evaluasi Perjanjian Kinerja SKPD Triwulan II 2026

2.1.2 Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah

Evaluasi kinerja keuangan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian pendapatan, belanja, pembiayaan, serta realisasi fisik dan keuangan daerah sebagai dasar penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026. Evaluasi ini memberikan gambaran mengenai kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas sekaligus menjadi dasar penyesuaian kebijakan pendanaan pada Semester II Tahun 2026. Hasil evaluasi juga digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja keuangan serta merumuskan langkah percepatan agar sasaran pembangunan daerah tetap dapat dicapai sampai akhir Tahun Anggaran 2026.

A. Evaluasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar **Rp1.785.146.411.590,00** yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai **Rp615.032.670.416,77** atau **34,45 persen** dari target APBD. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan masih berada di bawah target yang direncanakan sehingga diperlukan optimalisasi penerimaan pada Semester II Tahun 2026.

Tabel 2.14 Capaian Pendapatan Daerah Triwulan II Berdasar Jenis Pendapatan Tahun 2026

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN/TARGET (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Pajak Daerah	**93.108.175.325,00**	**27.760.096.480,00**	**29,81**
Pajak Hotel	0,00	0,00	0
Pajak Restoran/Rumah Makan/Jasa Katering	0,00	0,00	0
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0
Pajak Reklame	400.000.000,00	64.406.923,00	16,10
Pajak Parkir	0,00	0,00	0
Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	2.700.000,00	2,70
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.500.000.000,00	1.578.290.413,00	28,69
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.000.000.000,00	3.105.356.524,00	25,87
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	22.510.000.000,00	11.071.439.620,00	49,18
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	29.000.000.000,00	6.233.267.400,00	21,49

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN/TARGET (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
(PKB)			
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	22.598.175.325,00	5.704.635.600,00	25,24
Retribusi Daerah	**284.157.156.000,00**	**3.597.140.160,00**	**1,26**
Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan	4.249.950.000,00	296.557.466,00	6,97
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	250.000.000,00	29.440.000,00	11,77
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.000.000,00	1.190.000,00	23,80
Retribusi Pelayanan Pasar	331.488.000,00	153.385.200,00	46,27
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	1.165.048.000,00	325.488.000,00	27,93
Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	4.200.000,00	2.795.000,00	66,54
Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhanan	340.672.000,00	266.864.000,00	78,33
Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	14.011.700.000,00	69.175.600,00	0,49
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	256.449.928.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	2.062.050.000,00	21.130.000,00	1,02
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.064.620.000,00	1.618.000,00	0,07
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	-	5.725.000,00	-
Retribusi Perizinan Tertentu Persetujuan Bangunan Gedung	3.125.000.000,00	1.768.606.039,00	56,59
Retribusi Perizinan Tertentu Penggunaan Tenaga Kerja Asing/TKA	97.500.000,00	84.128.400,00	86,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**12.080.814.259,00**	**9.810.326.168,35**	**81,20**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.880.814.259,00	9.810.326.168,35	90,16
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.200.000.000,00	0,00	0,00
Lain-Lain PAD yang Sah	**99.422.713.006,00**	**10.456.011.360,42**	**10,51**
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	37.381.925.000,00	224.000.000,00	0,59
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.032.400.000,00	2.500.000,00	0,12
Jasa Giro	7.000.000.000,00	2.772.498.475,76	39,60

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN/TARGET (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
Pendapatan Bunga	2.000.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00	1.726.875.811,35	345,37**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	815.631,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Gaji dan Tunjangan ASN	34.756.192,00	58.793.933,00	169,16
Pendapatan BLUD	50.399.247.049,00	5.547.359.510,31	11,00
Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	74.384.765,00	123.151.499,00	165,56**
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	***488.768.858.590,00***	***51.623.574.168,77***	***10,56***
PENDAPATAN TRANSFER			
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.190.178.901.000,00**	**486.305.310.819,00**	**40,85**
Dana Bagi Hasil (DBH) (Pajak, PBB, PPH Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN)	106.001.650.000,00	41.560.277.600,00	39,20
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	93.196.054.000,00	37.278.421.600,00	40,00
DBH Sawit	2.100.956.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	754.817.240.000,00	431.917.717.000,00	58,33
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2.147.000.000,00	536.750.000,00	25,00
DAK Non Fisik	195.005.234.000,00	12.290.566.219,00	6,30
Dana Desa	132.207.777.000,00	0	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**97.545.000.000,00**	**62.528.950.847,00**	**64,10**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	82.000.000.000,00	54.050.782.793,00	65,91
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	145.000.000,00	54.411.955,00	37,52
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.900.000.000,00	8.423.756.099,00	56,53
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	500.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	***1.287.723.901.000,00***	***548.834.261.666,00***	***42,62***
PENDAPATAN LAINNYA			
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**8.653.652.000,00**	**14.574.834.582,00**	**168,42****
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi	8.653.652.000,00	14.574.834.582,00	168,42**

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN/TARGET (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
JUMLAH PENDAPATAN LAINNYA YANG SAH	***8.653.652.000,00***	***14.574.834.582,00***	***168,42*****
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	***1.785.146.411.590,00***	***615.032.670.416,77***	***34,45%***

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Konsolidasi) Tahun Anggaran 2026 Periode 1 Januari 2026-30 Juni 2026; **Nilai capaian sudah melebihi target yang ditetapkan*

Berdasarkan Tabel 2.13 terlihat bahwa capaian masing-masing komponen pendapatan masih bervariasi. Pendapatan Transfer menunjukkan tingkat realisasi yang relatif lebih baik dibandingkan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan beberapa objek PAD, terutama retribusi daerah dan beberapa jenis pajak daerah, masih memiliki tingkat capaian yang rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi PAD.

Tabel 2.15 *Capaian Pendapatan Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah Penghasil Tahun 2026*

No	SKPD PENGHASIL	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	% Keu	Sisa Target (Rp)	Kategori Pendapatan Daerah
1	Dinas Pendidikan	120.000.000,00	52.405.000,00	43,67	67.595.000,00	Pendapatan Asli Daerah
2	Dinas Kesehatan	54.431.197.049,00	6.379.552.131,31	11,72	48.051.644.917,69	Pendapatan Asli Daerah
3	RSUD H.Abdul Aziz (BLUD)	30.986.950.000,00	6.124.121.965,31	19,76	24.862.828.034,69	Pendapatan Asli Daerah
4	FKTP Semangat Dalam (BLUD)	1.277.198.046,00	-	-	1.277.198.046,00	Pendapatan Asli Daerah
5	FKTP Tamban (BLUD)	1.462.484.346,00	-	-	1.462.484.346,00	Pendapatan Asli Daerah
6	FKTP Berangas (BLUD)	2.375.300.000,00	-	-	2.375.300.000,00	Pendapatan Asli Daerah
7	FKTP Jelapat (BLUD)	1.237.000.000,00	-	-	1.237.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah
8	FKTP Kuripan (BLUD)	462.000.000,00	-	-	462.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah

No	SKPD PENGHASIL	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	% Keu	Sisa Target (Rp)	Kategori Pendapatan Daerah
9	FKTP Tabukan (BLUD)	900.000.000,00	-	-	900.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah
10	FKTP Marabahan (BLUD)	1.181.626.648,00	-	-	1.181.626.648,00	Pendapatan Asli Daerah
11	FKTP Lepasan (BLUD)	808.366.601,00	-	-	808.366.601,00	Pendapatan Asli Daerah
12	FKTP Bantuil (BLUD)	722.006.179,00	-	-	722.006.179,00	Pendapatan Asli Daerah
12	FKTP Barambai (BLUD)	1.316.388.000,00	-	-	1.316.388.000,00	Pendapatan Asli Daerah
13	FKTP Mandastana (BLUD)	1.409.193.662,00	-	-	1.409.193.662,00	Pendapatan Asli Daerah
14	FKTP Belawang (BLUD)	901.148.922,00	-	-	901.148.922,00	Pendapatan Asli Daerah
15	FKTP Anjir Muara (BLUD)	1.675.500.000,00	-	-	1.675.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah
16	FKTP Anjir Pasar (BLUD)	1.272.827.570,00	-	-	1.272.827.570,00	Pendapatan Asli Daerah
17	FKTP Mekarsari (BLUD)	771.210.687,00	-	-	771.210.687,00	Pendapatan Asli Daerah
18	FKTP Tabunganen (BLUD)	1.819.526.029,00	-	-	1.819.526.029,00	Pendapatan Asli Daerah
19	FKTP Rantau Badauh (BLUD)	1.181.758.484,00	-	-	1.181.758.484,00	Pendapatan Asli Daerah
20	FKTP Wanaraya (BLUD)	1.303.410.000,00	-	-	1.303.410.000,00	Pendapatan Asli Daerah
21	FKTP Jejangkit (BLUD)	582.301.875,00	-	-	582.301.875,00	Pendapatan Asli Daerah
22	Klinik Utama Setara (BLUD)	640.000.000,00	-	-	640.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah
23	Dinas Pekerjaan Umum dan	3.125.000.000,00	1.768.606.039,00	56,60	1.356.393.961,00	Pendapatan Asli Daerah

No	SKPD PENGHASIL	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	% Keu	Sisa Target (Rp)	Kategori Pendapatan Daerah
	Penataan Ruang					
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	99.000.000,00	85.628.400,00	86,49	13.371.600,00	Pendapatan Asli Daerah
25	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.105.720.000,00	16.533.000,00	0,53	3.089.187.000,00	Pendapatan Asli Daerah
26	Dinas Lingkungan Hidup	605.000.000,00	54.215.000,00	8,96	550.785.000,00	Pendapatan Asli Daerah
27	Dinas Lingkungan Hidup (BLUD)	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.200.000,00	-	-	7.200.000,00	Pendapatan Asli Daerah
29	Dinas Perhubungan	256.896.200.000,00	316.104.000,00	0,12	256.580.096.000,00	Pendapatan Asli Daerah
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.000.000.000,00	-	-	2.000.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah
31	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	35.654.636.000,00	283.175.200,00	0,79	35.371.460.800,00	Pendapatan Asli Daerah
32	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata	2.062.050.000,00	21.130.000,00	1,02	2.040.920.000,00	Pendapatan Asli Daerah
33	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.986.675.000,00	24.600.000,00	0,82	2.962.075.000,00	Pendapatan Asli Daerah
34	Dinas Perkebunan dan Peternakan	12.275.650.000,00	308.245.600,00	2,51	11.967.404.400,00	Pendapatan Asli Daerah
35	Sekretariat Daerah	427.200.000,00	55.230.300,00	12,93	371.969.700,00	Pendapatan Asli Daerah

No	SKPD PENGHASIL	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	% Keu	Sisa Target (Rp)	Kategori Pendapatan Daerah
36	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	21.865.155.216,00	14.374.901.519,46	65,74	7.490.253.696,54	Pendapatan Asli Daerah
		1.057.971.124.000,00	486.305.310.819,00	45,97	571.665.813.181,00	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan
		132.207.777.000,00	-	-	132.207.777.000,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: Dana Desa dan Insentif Fiskal
		97.545.000.000,00	62.528.950.847,00	64,10	35.016.049.153,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
		8.653.652.000,00	14.574.834.582,00	168,42	*-5.921.182.582,00*	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
37	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	93.108.175.325,00	27.883.247.979,00	29,95	65.224.927.346,00	Pendapatan Asli Daerah

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah OPD Penghasil Tahun Anggaran 2026 Periode 1 Januari 2026-30 Juni 2026; **Nilai capaian sudah melebihi target yang ditetapkan*

Berdasarkan Tabel 2.14, capaian pendapatan antar perangkat daerah penghasil menunjukkan variasi yang cukup besar. Perbedaan capaian tersebut dipengaruhi oleh karakteristik sumber pendapatan, tingkat kepatuhan wajib pajak dan retribusi, kesiapan regulasi, serta efektivitas pengelolaan objek pendapatan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD pada Semester II Tahun 2026.

Selanjutnya, hasil penelaahan terhadap proyeksi pendapatan daerah dalam rangka penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 menunjukkan bahwa kemampuan pendapatan daerah diperkirakan menjadi sebesar **Rp1.449.213.912.909,35** atau mengalami penurunan sebesar **Rp335.932.498.680,65 (18,82 persen)** dibandingkan target APBD murni. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh koreksi terhadap target PAD, sedangkan Pendapatan Transfer diproyeksikan relatif tetap.

Tabel 2.16 Evaluasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026

Uraian	Target APBD 2026 (Rp)	Proyeksi Perubahan 2026 (Rp)	Selisih (Rp)	Perubahan (%)	Status
Pendapatan Asli Daerah	488.768.858.590,00	147.539.607.909,35	(341.229.250.680,65)	(69,81)	Perlu Penyesuaian Besar
Pendapatan Transfer	1.287.723.901.000,00	1.287.723.901.000,00	0,00	0,00	Tetap
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.653.652.000,00	13.950.404.000,00	5.296.752.000,00	61,21	Meningkat
Jumlah Pendapatan Daerah	**1.785.146.411.590,00**	**1.449.213.912.909,35**	**(335.932.498.680,65)**	**(18,82)**	**Menurun**

Penurunan proyeksi pendapatan tersebut berimplikasi langsung terhadap kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan pada penajaman prioritas pembangunan, rasionalisasi belanja, serta pengutamaan program dan kegiatan yang memberikan kontribusi langsung terhadap pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan pencapaian target RPJMD.

Tabel 2.17 Analisis Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026

Komponen PAD	Target APBD 2026 (Rp)	Proyeksi/Perkembangan	Evaluasi
Pajak Daerah	93.108.175.325,00	67.050.000.000,00	Turun Rp26,06 miliar
Retribusi Daerah	284.157.156.000,00	Mengalami koreksi sangat besar	Target awal tidak seluruhnya realistis
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.080.814.259,00	Disesuaikan berdasarkan dividen dan hasil usaha	Perlu kepastian hasil RUPS
Lain-lain PAD yang Sah	99.422.713.006,00	Disesuaikan dengan pendapatan BLUD, pemanfaatan aset, dan penerimaan lainnya	Sebagian tetap, sebagian dikoreksi
Jumlah PAD	**488.768.858.590,00**	**147.539.607.909,35**	**Turun 69,81%**

Evaluasi terhadap komponen PAD menunjukkan bahwa penurunan proyeksi terutama berasal dari retribusi daerah dan beberapa objek pajak yang realisasinya belum sesuai dengan potensi maupun target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas

ekonomi pada beberapa sektor, penyesuaian regulasi, serta masih terbatasnya optimalisasi pemungutan dan pengelolaan objek pendapatan.

Tabel 2.17 Analisis Penyesuaian Target Pajak Daerah Tahun 2026

Jenis Pajak	Target Awal (Rp)	Proyeksi Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
Pajak Reklame	400.000.000	300.000.000	(100.000.000)
Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000	30.000.000	(70.000.000)
PBB-P2	5.500.000.000	4.500.000.000	(1.000.000.000)
BPHTB	12.000.000.000	10.500.000.000	(1.500.000.000)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000	250.000.000	(750.000.000)
PBJT Makanan dan/atau Minuman	4.000.000.000	3.500.000.000	(500.000.000)
PBJT Tenaga Listrik	18.000.000.000	19.000.000.000	1.000.000.000
PBJT Jasa Perhotelan	150.000.000	100.000.000	(50.000.000)
PBJT Jasa Parkir	300.000.000	300.000.000	0
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	60.000.000	70.000.000	10.000.000
Opsen PKB	29.000.000.000	16.000.000.000	(13.000.000.000)
Opsen BBNKB	22.598.175.325	12.500.000.000	(10.098.175.325)
Jumlah	**93.108.175.325**	**67.050.000.000**	**(26.058.175.325)**

Penyesuaian target pajak daerah dilakukan untuk meningkatkan tingkat realistis proyeksi penerimaan sampai akhir tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah, pemutakhiran basis data wajib pajak, penguatan pengawasan, serta digitalisasi sistem pembayaran guna meningkatkan efektivitas penerimaan daerah.

Berdasarkan Tabel 2.17, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah diproyeksikan menurun menjadi sekitar **10,18 persen**, sedangkan kontribusi Pendapatan Transfer meningkat menjadi sekitar **88,86 persen**. Struktur tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Barito Kuala terhadap dana transfer masih cukup tinggi sehingga penguatan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD menjadi salah satu agenda penting pada Semester II Tahun 2026. Risiko utama yang dihadapi antara lain belum tercapainya target pajak daerah, keterlambatan penyaluran dana transfer, dan belum optimalnya integrasi data pendapatan antarperangkat daerah. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan melakukan rasionalisasi target pendapatan, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, peningkatan kinerja BLUD, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

B. Evaluasi Belanja Daerah

Belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD dan prioritas pembangunan daerah. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi belanja menunjukkan bahwa belanja operasi telah berjalan relatif baik dalam mendukung pelayanan dasar, sedangkan realisasi belanja modal masih memerlukan percepatan karena sebagian besar pekerjaan fisik berada pada tahap pengadaan dan pelaksanaan kontrak. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya penyerapan belanja modal pada Semester I dan menjadi fokus percepatan pada Semester II.

Tabel 2.18 Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Tahun 2026

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
BELANJA OPERASI	**1.340.076.463.245,00**	**557.731.214.715,00**	**41,61**
Belanja Pegawai	*794.662.698.340,00*	*404.466.474.439,00*	*50,89*
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	435.514.119.897,00	232.801.029.012,00	53,45
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	322.183.415.488,00	158.272.827.234,00	49,12
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.093.944.862,00	11.016.789.120,00	47,70
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	925.899.459,00	138.650.132,00	14,97
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	712.480.000,00	330.200.000,00	46,34
Belanja Pegawai BLUD	12.232.838.634,00	1.906.978.941,00	15,58
Belanja Barang dan Jasa	*461.393.285.921,00*	*122.017.156.292,00*	*26,44*
Belanja Barang Pakai Habis	78.230.933.558,01	18.664.251.812,00	23,85
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	4.204.423.280,00	1.085.780.500,00	25,82
Belanja Jasa Kantor	107.977.415.094,00	34.320.957.514,00	31,78
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	60.367.677.621,00	29.386.427.682,00	48,67
Belanja Sewa Tanah	1.005.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.453.257.880,00	2.266.625.663,00	41,56
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.175.223.000,00	339.840.000,00	15,62
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	60.035.000,00	43.820.000,00	72,99
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.926.342.292,00	111.936.451,00	5,81
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	95.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	124.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.637.693.000,00	498.614.003,00	10,75
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	12.074.000,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.363.704.556,00	918.516.048,00	21,04
Belanja Pemeliharaan Gedung dan	4.022.952.780,00	858.607.771,00	21,34

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
Bangunan			
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.702.779.271,00	3.211.476.608,00	16,29
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	274.050.000,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.419.954.407,99	19.457.264.667,00	31,17
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.857.873.160,00	3.797.532.448,00	19,12
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	247.180.000,00	28.550.000,00	11,55
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.605.469.000,00	224.600.000,00	13,98
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	269.450.000,00	0,00	0,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.859.135.000,00	661.248.500,00	17,13
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.394.478.500,00	424.153.500,00	30,41
Belanja Barang dan Jasa BOSP	39.488.050.000,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.619.134.521,00	5.716.953.125,00	15,19
Belanja Hibah	*83.640.330.984,00*	*31.247.583.984,00*	*37,35*
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	37.349.000,00	32.190.000,00	86,18
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	74.115.673.984,00	29.837.865.984,00	40,25
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.377.528.000,00	1.377.528.000,00	100,00
Belanja Hibah Dana BOSP	8.109.780.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	*380.148.000,00*	*0,00*	*0,00*
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	380.148.000,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	**357.067.640.712,00**	**25.973.498.964,00**	**7,27**
Belanja Modal Tanah	*2.937.352.853,00*	*146.004.199,00*	*4,97*
Belanja Modal Tanah Persil	2.937.352.853,00	146.004.199,00	4,97
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	*49.363.386.409,00*	*10.775.478.408,00*	*21,82*
Belanja Modal Alat Besar Darat	12.500.000.000,00	3.891.417.001,00	31,13
Belanja Modal Alat Besar Apung	5.000.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bantu	665.858.000,00	5.249.998,00	0,78
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.998.672.000,00	2.604.695.500,00	28,94
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	324.450.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.846.000.000,00	170.940.000,00	9,26
Belanja Modal Alat Angkutan Apung	12.783.000,00	3.560.000,00	27,84

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
Tak Bermotor			
Belanja Modal Alat Ukur	11.304.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	404.433.000,00	3.475.000,00	0,85
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.592.794.794,00	1.617.589.351,00	35,22
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	673.668.501,00	98.900.000,00	14,68
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.331.667.500,00	13.231.200,00	0,39
Belanja Modal Alat Laboratorium	1.584.708.000,00	862.905.000,00	54,45
Belanja Modal Komputer	4.558.424.720,00	1.226.056.396,00	26,89
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	422.900.000,00	252.021.560,00	59,59
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	4.599.000,00	4.595.000,00	99,91
Belanja Modal Rambu-Rambu	92.400.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.338.723.894,00	20.842.402,00	0,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	*129.842.743.398,00*	*2.235.679.084,00*	*1,72*
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	128.856.183.398,00	2.235.679.084,00	1,73
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	841.060.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	145.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	*169.759.076.362,00*	*12.497.281.510,00*	*7,36*
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	128.115.492.362,00	11.142.159.807,00	8,69
Belanja Modal Bangunan Air	1.600.000.000,00	99.396.000,00	6,21
Belanja Modal Instalasi Gas	1.350.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	23.300.000.000,00	294.386.766,00	1,26
Belanja Modal Jaringan Listrik	15.343.584.000,00	933.588.938,00	6,08
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	50.000.000,00	27.749.999,00	55,49
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	*1.181.579.000,00*	*300.113.197,00*	*25,39*
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.131.579.000,00	300.113.197,00	26,52
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	50.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	*3.983.502.690,00*	*18.942.566,00*	*0,47*
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud (Hak Cipta, Perangkat Lunak, Kajian)	3.983.502.690,00	18.942.566,00	0,47
BELANJA TIDAK TERDUGA	**9.717.650.000,00**	**302.268.000,00**	**3,11**
Belanja Tidak Terduga	*9.717.650.000,00*	*302.268.000,00*	*3,11*
Belanja Tidak Terduga	9.717.650.000,00	302.268.000,00	3,11

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
BELANJA TRANSFER	**278.284.657.633,00**	**59.476.216.080,00**	**21,37**
Belanja Bagi Hasil	*6.455.087.233,00*	*0,00*	*0,00*
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.641.302.733,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	813.784.500,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	*271.829.570.400,00*	*59.476.216.080,00*	*21,87*
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	5.000.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	266.829.570.400,00	59.476.216.080,00	22,28
JUMLAH BELANJA	**1.985.146.411.590,00**	**643.483.197.759,00**	**32,41**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD Konsolidasi Tahun Anggaran 2026 Periode 1 Januari 2026-30 Juni 2026

Berdasarkan Tabel 2.19, realisasi belanja operasi menjadi komponen dengan tingkat penyerapan tertinggi, sedangkan belanja modal menunjukkan tingkat realisasi yang lebih rendah. Oleh karena itu, Perubahan RKPD Tahun 2026 mengarahkan percepatan penyelesaian proyek infrastruktur strategis, penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, efisiensi belanja yang kurang produktif, serta penerapan prinsip *money follows program* dan *spending better* agar kualitas belanja daerah semakin meningkat.

C. Evaluasi Pembiayaan Daerah

Evaluasi pembiayaan daerah menunjukkan bahwa penyesuaian kemampuan keuangan daerah berdampak pada perubahan kebutuhan pembiayaan untuk menjaga keseimbangan APBD. Pembiayaan daerah tetap diarahkan untuk menutup defisit anggaran dan menjamin keberlanjutan pelaksanaan program prioritas tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Kebijakan pembiayaan dilaksanakan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah.

D. Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan

Evaluasi realisasi fisik dan keuangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 secara umum berjalan sesuai tahapan yang direncanakan, namun masih terdapat beberapa perangkat daerah yang memerlukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Dari 46 perangkat daerah, sebanyak **39 perangkat daerah**

(84,78 persen) telah memenuhi target Semester I, sedangkan **7 perangkat daerah (15,22 persen)** masih memerlukan percepatan. Pada tingkat program, **132 dari 251 program (52,59 persen)** telah mencapai target Semester I, sedangkan pada tingkat kegiatan **361 dari 643 kegiatan (56,14 persen)** telah memenuhi target. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, dan pendanaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

2.1.3 Evaluasi Prioritas Pembangunan Daerah

Evaluasi prioritas pembangunan daerah dilakukan untuk menilai tingkat ketercapaian pelaksanaan lima prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, yang merupakan penjabaran operasional dari tema pembangunan daerah, sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian prioritas pembangunan, efektivitas pelaksanaan program prioritas, kendala yang dihadapi, serta langkah percepatan yang perlu dilakukan pada Semester II Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan Perubahan RKPD.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, secara umum pelaksanaan lima prioritas pembangunan daerah telah berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026. Sebagian besar program prioritas telah memasuki tahap pelaksanaan, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan fisik strategis yang realisasinya relatif rendah karena proses pengadaan barang dan jasa, penyelesaian dokumen teknis, serta penyesuaian kemampuan keuangan daerah. Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa indikator pembangunan, seperti penurunan kemiskinan, percepatan penanganan stunting, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur strategis, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, masih memerlukan percepatan pelaksanaan pada Semester II Tahun 2026.

Hasil evaluasi terhadap masing-masing prioritas pembangunan menunjukkan bahwa:

Tabel 2.19 Ringkasan Evaluasi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Prioritas Pembangunan	Fokus Evaluasi Semester I	Status	Arah Percepatan Semester II
I. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul	Program pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, beasiswa, kompetensi guru, dan infrastruktur pendidikan berjalan sesuai tahapan, namun percepatan rehabilitasi sekolah, pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta penanganan stunting pada desa lokus masih diperlukan.	Berjalan Baik	Percepatan pelayanan dasar, rehabilitasi sarana pendidikan, penguatan intervensi stunting, dan peningkatan kualitas SDM.
II. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Sektor pertanian, perikanan, perdagangan, UMKM, dan investasi menunjukkan perkembangan positif, namun hilirisasi komoditas, akses pembiayaan UMKM, serta percepatan investasi strategis masih perlu diperkuat.	Berjalan	Penguatan hilirisasi, peningkatan produktivitas, pengembangan UMKM, dan percepatan investasi.
III. Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah	Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, permukiman, dan air minum telah dimulai, namun realisasi fisik masih dipengaruhi proses pengadaan dan karakteristik wilayah rawa.	Perlu Percepatan	Percepatan pekerjaan fisik, peningkatan kemantapan jalan, rehabilitasi irigasi, dan perluasan pelayanan air minum.
IV. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik Berkualitas	Implementasi SPBE, SAKIP, Reformasi Birokrasi, dan MCP KPK berjalan sesuai rencana, namun integrasi sistem informasi dan penguatan indikator berbasis outcome masih perlu ditingkatkan.	Berjalan	Penguatan tata kelola digital, peningkatan akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.
V. Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Program pengendalian banjir, pengelolaan persampahan, rehabilitasi DAS, dan pengendalian pencemaran telah berjalan, namun masih diperlukan percepatan pada kawasan rawan banjir dan peningkatan kualitas lingkungan.	Berjalan	Percepatan pengendalian banjir, rehabilitasi DAS, peningkatan pelayanan persampahan, dan pengendalian pencemaran.

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Barito Kuala sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, secara umum kelima prioritas pembangunan daerah masih relevan untuk dipertahankan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 karena tetap mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Namun demikian, dilakukan **penyesuaian strategi pelaksanaan, target kinerja, fokus intervensi, serta alokasi pendanaan** pada beberapa program prioritas sesuai hasil evaluasi Semester I, perubahan kemampuan keuangan daerah, serta perkembangan kondisi aktual daerah. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan memastikan target pembangunan daerah dapat dicapai sampai akhir Tahun Anggaran 2026.

Prioritas 1.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul

Prioritas pembangunan pertama diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas tenaga pendidik, peningkatan sarana prasarana pendidikan, serta perluasan akses pelayanan dasar. Pelaksanaan prioritas ini menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah karena kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan daya saing daerah dalam jangka panjang.

Tabel 2.20 Evaluasi Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Semester I Tahun 2026

Bidang Prioritas	Target RKPD	Realisasi Semester I	Status	Keterangan
Pendidikan	Meningkat	Berjalan	Baik	Program sesuai target
Kesehatan	Meningkat	Berjalan	Baik	Pelayanan meningkat
Penurunan Stunting	18,50%	Intervensi berjalan	Perlu Percepatan	Lokus prioritas masih memerlukan penguatan
Beasiswa	Meningkat	Sedang berjalan	Baik	Penyaluran sesuai jadwal
Peningkatan Kompetensi Guru	Meningkat	Berjalan	Baik	Pelatihan guru dilaksanakan
Infrastruktur Sekolah	Meningkat	Dalam pelaksanaan	Berjalan	Sebagian pekerjaan fisik Semester II

a. Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan pelayanan pendidikan sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan data **Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2026**, pada tahun ajaran **2025/2026** Kabupaten Barito Kuala memiliki **194 Sekolah Dasar**, **66 SMP**, **22 SMA**, dan **17 SMK**, yang tersebar pada seluruh kecamatan. Selain itu

masih terdapat satuan pendidikan RA, MI, MTs, dan MA yang dikelola Kementerian Agama sehingga akses pendidikan masyarakat semakin luas. Pelaksanaan program pendidikan pada Semester I Tahun 2026 difokuskan pada:

- Peningkatan Mutu Pembelajaran;
- Rehabilitasi Ruang Kelas;
- Pembangunan Sarana Pendidikan;
- Penyediaan Sarana TIK Sekolah;
- Peningkatan Kompetensi Guru;
- Bantuan Operasional Sekolah;
- Penguatan Pendidikan Karakter.

Secara umum pelaksanaan program pendidikan berjalan sesuai rencana. Aktivitas belajar mengajar berlangsung normal dan seluruh sekolah telah menerima dukungan operasional sesuai ketentuan. Namun demikian masih ditemukan beberapa permasalahan, antara lain:

- Masih terdapat ruang kelas yang memerlukan rehabilitasi;
- Distribusi guru belum merata antar kecamatan;
- Kebutuhan laboratorium dan perpustakaan masih cukup tinggi;
- Masih terdapat sekolah yang memerlukan peningkatan akses internet.

Sehingga pada Semester II, akan difokuskan pada:

- percepatan rehabilitasi sekolah;
- pemerataan guru;
- peningkatan sarana digital sekolah;
- peningkatan mutu pembelajaran.

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau. Berdasarkan **Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2026**, pada tahun 2025 Kabupaten Barito Kuala memiliki jaringan pelayanan kesehatan berupa **1 rumah sakit umum**, **17 puskesmas**, serta didukung oleh puskesmas pembantu, klinik, apotek, tenaga dokter, dokter gigi, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan. Program kesehatan Semester I Tahun 2026 meliputi:

- Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
- Peningkatan Cakupan Imunisasi;
- Peningkatan Pelayanan Puskesmas;
- Pengendalian Penyakit Menular;
- Peningkatan Gizi Masyarakat;
- Peningkatan Pelayanan JKN.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan berjalan cukup baik dengan meningkatnya cakupan pelayanan masyarakat serta semakin meningkatnya pemanfaatan fasilitas kesehatan. Namun demikian masih terdapat beberapa tantangan:

- Keterbatasan dokter spesialis;
- Pemerataan tenaga kesehatan;
- Tingginya penyakit tidak menular;
- Perlunya peningkatan kualitas pelayanan puskesmas.

Sehingga pada Semester II 2026 lebih diarahkan pada:

- Peningkatan sarana puskesmas;
- Pemenuhan tenaga kesehatan;
- Peningkatan pelayanan kesehatan primer;
- Penguatan pelayanan rujukan.

c. Penurunan Prevalensi Stunting

Penurunan stunting merupakan salah satu prioritas nasional sekaligus prioritas daerah. Pada Semester I Tahun 2026 pemerintah daerah melaksanakan berbagai intervensi yang dilaksanakan secara konvergen oleh TPPS Kabupaten yang didalamnya tergabung Dinas Kesehatan, DPPKBPPPA, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Pemerintah Desa, melalui beberapa program:

- Pemberian makanan tambahan;
- Peningkatan pelayanan Posyandu;
- Pemberian tablet tambah darah;
- Pemantauan berat badan dan tinggi balita;
- Peningkatan kualitas sanitasi masyarakat;
- Penyediaan air bersih;
- Edukasi keluarga.

Pelaksanaan intervensi berjalan sesuai rencana. Namun demikian masih diperlukan percepatan pada beberapa desa lokus stunting karena:

- Sanitasi belum memadai;
- Pola asuh masih perlu ditingkatkan;
- Masih terdapat balita berisiko stunting;
- Akses air minum layak belum merata.

Sehingga Semester II 2026 lebih difokuskan pada:

- Peningkatan intervensi spesifik;
- Peningkatan intervensi sensitif;
- Percepatan penentuan dan penanganan pada desa lokus;
- Penguatan monitoring dan evaluasi kegiatan TPPS.

d. Program Beasiswa

Program beasiswa bertujuan meningkatkan kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi sekaligus menekan angka putus sekolah. Program ini meliputi:

- Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa;
- Bantuan bagi siswa kurang mampu;
- Bantuan bagi siswa berprestasi;
- Bantuan untuk Pendidikan Vokasi.

Sampai Semester I penyaluran beasiswa berjalan sesuai jadwal. Permasalahan yang masih ditemukan yaitu:

- Usulan penerima cukup tinggi;
- Keterbatasan pagu anggaran;
- Perlunya peningkatan verifikasi penerima beasiswa.

Sehingga pada Semester II 2026 lebih dipusatkan pada:

- Pptimalisasi penyaluran;
- Sinkronisasi data penerima bantuan sosial (DTSEN) dan data pendidikan;
- Peningkatan transparansi penerima.

e. Peningkatan Kompetensi Guru

Program peningkatan kompetensi guru diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik melalui berbagai kegiatan pelatihan, workshop, implementasi kurikulum baru terutama Kurikulum Merdeka, dan peningkatan literasi digital. Pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kualitas guru telah berjalan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dioptimasi:

- Pemerataan pelatihan untuk guru;
- Peningkatan kemampuan operasional TIK;
- Peningkatan kompetensi guru daerah terpencil.

Sehingga pada Semester II difokuskan pada

- Pelatihan lanjutan;
- Coaching guru;
- Digitalisasi pembelajaran.

f. Infrastruktur Pendidikan

Program pembangunan infrastruktur sekolah bertujuan meningkatkan kualitas sarana pembelajaran di sekolah-sekolah daerah. Program ini meliputi:

- Rehabilitasi ruang kelas;
- Pembangunan ruang kelas baru;
- Pembangunan sanitasi sekolah;
- Pembangunan laboratorium;
- Pembangunan perpustakaan;
- Pembangunan UKS.

Sebagian besar pekerjaan fisik mulai dilaksanakan pada Semester II sesuai pola pengadaan barang dan jasa sehingga sampai Semester I realisasi fisik masih dalam tahap awal. Permasalahan yang dihadapi pada pembangunan infrastruktur pendidikan adalah:

- Proses pengadaan;
- Keterbatasan waktu pelaksanaan;
- kondisi cuaca;
- Akses menuju lokasi sekolah.

Sehingga pada semester II lebih diarahkan untuk:

- Percepatan kontrak pekerjaan;
- Percepatan pelaksanaan fisik;
- Penguatan pengawasan kualitas;
- Percepatan serah terima pekerjaan.

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, pelaksanaan Prioritas Daerah I menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Program pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia telah berjalan sesuai jadwal dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan dasar. Data **Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2026** menunjukkan tersedianya jaringan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang cukup luas sebagai modal dasar peningkatan kualitas SDM, meskipun masih diperlukan peningkatan mutu layanan, pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, rehabilitasi sarana pendidikan, serta percepatan penurunan stunting di wilayah prioritas. Oleh karena itu, Semester II Tahun 2026 akan difokuskan pada percepatan pelaksanaan kegiatan fisik, peningkatan kualitas pelayanan, dan optimalisasi pencapaian indikator prioritas agar target RKPD Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

Prioritas 2.
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah

Prioritas pembangunan kedua diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan Kabupaten Barito Kuala. Sebagai daerah agraris yang memiliki wilayah pasang surut terluas di Kalimantan Selatan, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, didukung oleh sektor perikanan, perdagangan, industri pengolahan, UMKM, serta investasi.

Berdasarkan struktur PDRB Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025, sektor **Pertanian, Kehutanan dan Perikanan** memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB sebesar **26,65 persen**, diikuti sektor **Konstruksi (14,70 persen)**, **Industri Pengolahan (14,06 persen)**, dan **Perdagangan Besar dan Eceran (13,77 persen)**. Komposisi ini menunjukkan bahwa penguatan sektor primer tetap menjadi prioritas, namun harus diiringi peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan pengembangan agroindustri.

Tabel 2.21 Evaluasi Prioritas Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah Semester I Tahun 2026

Bidang Prioritas	Target RKPD	Realisasi Semester I	Status	Keterangan
Pertanian	Produktivitas meningkat	Musim tanam berjalan, bantuan saprodi disalurkan	Baik	Perlu percepatan hilirisasi
Perikanan	Produksi meningkat	Budidaya dan penangkapan berjalan	Baik	Harga komoditas masih fluktuatif
Perdagangan	Nilai perdagangan meningkat	Aktivitas perdagangan stabil	Baik	Distribusi pangan terkendali
UMKM	Jumlah UMKM berkembang	Pendampingan dan pelatihan berjalan	Berjalan	Akses pembiayaan perlu diperluas
Investasi	Rp3,40 triliun	Tahap realisasi investasi berjalan	Berpotensi Tercapai	Perlu percepatan proyek strategis

a. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor basis perekonomian Kabupaten Barito Kuala. Selain menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB, sektor ini juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbesar dan berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah maupun nasional. Data PDRB menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi daerah mencapai **26,65 persen** pada tahun 2025, menjadikannya sektor dengan kontribusi terbesar dibandingkan lapangan usaha lainnya.

Selain itu, Kabupaten Barito Kuala memiliki luas baku sawah yang besar dengan komoditas utama berupa padi, didukung kawasan pertanian pasang surut yang menjadi salah satu sentra produksi pangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Program prioritas yang dilaksanakan pada Semester I Tahun 2026 meliputi:

- Intensifikasi pertanian modern;
- Bantuan benih unggul;
- Distribusi pupuk bersubsidi;
- Rehabilitasi jaringan irigasi;
- Mekanisasi pertanian;
- Pendampingan penyuluh pertanian.

Pelaksanaan musim tanam Semester I berlangsung sesuai jadwal dan didukung oleh penyaluran sarana produksi pertanian. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani juga

berjalan dengan baik sehingga memberikan optimisme terhadap peningkatan produktivitas pada musim panen Semester II. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Banjir pada sebagian wilayah pertanian;
- Fluktuasi harga gabah;
- Terbatasnya hilirisasi hasil pertanian;
- Keterbatasan alat dan mesin pertanian pada beberapa kecamatan.

Sehingga, pada Semester II Tahun 2026 akan lebih dititikberatkan pada:

- Percepatan intensifikasi pertanian modern;
- Peningkatan mekanisasi pertanian;
- Penguatan hilirisasi komoditas pangan;
- Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
- Penguatan kemitraan petani dengan sektor industri.

b. Sektor Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki potensi besar karena didukung oleh wilayah sungai, rawa, dan tambak yang luas. Produksi perikanan menjadi sumber pendapatan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Program yang dilaksanakan meliputi:

- Pengembangan budidaya ikan air tawar;
- Bantuan benih dan pakan;
- Peningkatan sarana budidaya;
- Pengembangan kelompok pembudidaya ikan;
- Peningkatan kualitas hasil perikanan.

Sampai Semester I Tahun 2026, kegiatan budidaya dan penangkapan ikan berjalan sesuai musim. Produksi perikanan relatif stabil meskipun dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan fluktuasi harga komoditas. Namun, ada beberapa kendala produksi yang ditemui, diantaranya:

- Produktivitas tambak belum optimal;
- Harga pakan yang relatif tinggi;
- Pemasaran hasil perikanan masih terbatas;
- Nilai tambah produk olahan ikan masih rendah.

Sehingga pada semester II tahun 2026 ini, lebih disarankan kepada:

- Pengembangan sentra budidaya;
- Peningkatan kualitas benih;
- Penguatan rantai dingin (cold chain);
- Pengembangan industri olahan hasil perikanan.

c. Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan berperan penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang, stabilitas harga, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Barito Kuala mencapai **13,77 persen**, menjadikannya salah satu sektor utama dalam pembentukan perekonomian daerah. Program yang telah dilaksanakan selama semester I meliputi:

- Pengendalian inflasi daerah;
- Operasi pasar;
- Pembinaan pasar rakyat;
- Pengembangan perdagangan digital;
- Fasilitasi distribusi pangan.

Aktivitas perdagangan menunjukkan perkembangan yang stabil. Distribusi kebutuhan pokok tetap terjaga dan inflasi relatif terkendali sehingga mendukung daya beli masyarakat. Namun, ada beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan, diantaranya:

- Fluktuasi harga beberapa komoditas pangan;
- Biaya distribusi antarwilayah;
- Keterbatasan sarana pasar tradisional.

Sehingga, pada Semester II 2026 difokuskan pada:

- Revitalisasi pasar rakyat;
- Digitalisasi perdagangan;
- Penguatan distribusi pangan;
- Pengembangan perdagangan antar wilayah.

d. Sektor UMKM

- UMKM merupakan salah satu penggerak utama ekonomi lokal karena berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi UMKM yang cukup beragam dan didominasi oleh usaha berbasis sumber daya lokal. Potensi tersebut meliputi pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, industri pangan lokal, kerajinan anyaman purun, usaha mikro berbasis perkebunan, serta berbagai usaha perdagangan dan jasa yang berkembang di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM telah memperoleh pendampingan usaha, namun masih menghadapi kendala pada aspek peningkatan kualitas produk, sertifikasi, akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi digital, serta jejaring pemasaran. Oleh karena itu, arah kebijakan Semester II Tahun 2026 difokuskan pada pengembangan UMKM berbasis komoditas unggulan daerah melalui penguatan daya saing produk, digitalisasi usaha, fasilitasi pembiayaan, pengembangan kemitraan usaha, serta hilirisasi komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pelaksanaan pendampingan UMKM berjalan sesuai rencana. Berbagai pelatihan dan fasilitasi pemasaran telah dilaksanakan, namun sebagian pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam akses permodalan, sertifikasi produk, perluasan pasar, skala usaha masih kecil, akses pembiayaan yang terbatas, daya saing produk belum optimal, dan literasi digital pelaku UMKM masih bervariasi. Sehingga, pada semester II lebih difokuskan pada:

1. memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan perbankan;
2. meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan manajemen usaha dan kewirausahaan;
3. memperkuat digitalisasi usaha melalui pemasaran digital dan pemanfaatan platform e-commerce;
4. meningkatkan kualitas produk melalui standardisasi, sertifikasi, dan inovasi kemasan;
5. mengembangkan kemitraan usaha antara UMKM dengan koperasi, BUM Desa, dunia usaha, dan industri pengolahan;
6. mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah berbasis pertanian, perikanan, dan perkebunan.

Tabel 2.22 Potensi Pengembangan UMKM Unggulan Kabupaten Barito Kuala

Potensi UMKM	Arah Pengembangan Semester II
Pengolahan hasil pertanian	Hilirisasi pangan lokal, peningkatan mutu produk
Pengolahan hasil perikanan	Diversifikasi produk, penguatan rantai pemasaran
Industri pangan lokal	Sertifikasi PIRT/Halal, peningkatan kemasan
Kerajinan anyaman purun	Pengembangan desain, promosi digital, perluasan pasar
Usaha mikro berbasis perkebunan	Pengolahan hasil dan penguatan kemitraan usaha

e. Sektor Investasi

Investasi merupakan instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Target investasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 diarahkan sebesar **Rp3,40 triliun** sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat basis ekonomi lokal. Sasaran ini didukung oleh penyederhanaan perizinan, pengembangan kawasan strategis, serta promosi potensi investasi daerah.

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, beberapa proyek investasi telah memasuki tahap pelaksanaan, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan. Perkembangan tersebut menunjukkan iklim investasi daerah yang semakin kondusif. Namun, ada beberapa kendala yang ditemui dalam pengembangan sektor investasi, diantaranya:

- Proses pembebasan lahan pada beberapa lokasi;
- Kesiapan infrastruktur penunjang;
- Perlunya peningkatan promosi investasi;
- Koordinasi lintas sektor dalam percepatan proyek strategis.

Sehingga, pada semester II lebih difokuskan kepada:

- Percepatan layanan perizinan berbasis digital;
- Promosi investasi unggulan daerah;
- Penyediaan data potensi investasi yang terintegrasi;
- Penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendukung investasi strategis.

Hasil evaluasi sampai dengan Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan Prioritas Daerah II berjalan sesuai arah kebijakan RPJMD. Dominasi sektor pertanian sebagai kontributor utama PDRB, didukung oleh perkembangan sektor perikanan, perdagangan, UMKM, dan investasi, menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi

daerah. Namun demikian, percepatan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan produktivitas usaha, penguatan akses pembiayaan UMKM, serta peningkatan realisasi investasi tetap menjadi fokus pada Semester II agar target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Prioritas 3. Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah

Prioritas pembangunan ketiga diarahkan untuk meningkatkan kualitas konektivitas wilayah dan penyediaan infrastruktur dasar guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini selaras dengan tema RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 yaitu **"Memantapkan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"**, dengan subprioritas berupa peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi, penguatan konektivitas antarwilayah, dan pengembangan moda transportasi.

Pelaksanaan Prioritas Daerah III sampai Semester I Tahun 2026 difokuskan pada pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, jaringan irigasi, kawasan permukiman, serta penyediaan air minum. Infrastruktur tersebut berfungsi sebagai pengungkit utama aktivitas ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim dan bencana.

Tabel 2.23 Evaluasi Prioritas Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah Semester I Tahun 2026

Bidang Infrastruktur	Target RKPD	Realisasi Semester I	Status	Keterangan
Jalan	Peningkatan kemantapan jalan	Pelaksanaan fisik dimulai	Berjalan	Fokus percepatan Semester II
Jembatan	Meningkatnya konektivitas	Tahap konstruksi	Berjalan	Mendukung akses antarwilayah
Irigasi	Meningkatnya layanan irigasi	Rehabilitasi jaringan berjalan	Berjalan	Mendukung produksi pertanian
Permukiman	Meningkatnya kualitas permukiman	Program berjalan	Berjalan	Infrastruktur dasar terus ditingkatkan
Air Minum	Meningkatnya akses air minum	Pengembangan SPAM berjalan	Berjalan	Perluasan cakupan pelayanan

a. Evaluasi Infrastruktur Jalan

Pembangunan jalan merupakan prioritas utama dalam mendukung konektivitas wilayah, menurunkan biaya logistik, memperlancar mobilitas masyarakat, dan meningkatkan akses terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan **Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2026**, panjang jaringan jalan di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025 mencapai **782,74 km**. Dari total tersebut:

- **279,66 km (35,72%)** berada dalam kondisi **baik**;
- **85,42 km (10,91%)** dalam kondisi **sedang**;
- **34,62 km (4,42%)** dalam kondisi **rusak**; dan
- **383,04 km (48,94%)** masih dalam kondisi **rusak berat**. Dengan demikian, sekitar **46,64%** jaringan jalan telah berada pada kondisi baik dan sedang, sedangkan lebih dari separuh masih memerlukan penanganan.

Selain itu, berdasarkan jenis permukaan jalan, komposisi jaringan jalan terdiri atas:

- Jalan beraspal sepanjang **430,39 km**;
- Jalan kerikil sepanjang **256,52 km**;
- Jalan tanah sepanjang **61,25 km**; dan
- Jalan dengan permukaan lainnya sepanjang **34,58 km**.

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jalan telah memasuki tahap pengadaan dan pelaksanaan konstruksi. Prioritas diarahkan pada ruas-ruas strategis yang menghubungkan sentra pertanian, kawasan permukiman, pusat pelayanan, serta kawasan ekonomi. Beberapa hal yang mendorong peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Barito Kuala adalah:

- Tersedianya jaringan jalan kabupaten yang telah terpetakan;
- Dukungan APBD dan Pendanaan dari Pemerintah Pusat;
- Sinergi pembangunan dengan prioritas nasional dan provinsi.

Namun, tentunya masih terdapat beberapa kendala yang ditemui, diantaranya:

- Masih tingginya panjang jalan rusak berat;
- Kondisi tanah rawa dan pasang surut yang meningkatkan biaya konstruksi dan pemeliharaan;
- Keterbatasan kapasitas fiskal untuk menangani seluruh ruas secara bersamaan.

Sehingga, pada semester II ini difokuskan pada:

- Percepatan rehabilitasi jalan ruas prioritas;
- Peningkatan kualitas konstruksi jalan pada kawasan rawa;
- Penguatan program pemeliharaan berkala untuk menjaga kemantapan jalan.

b. Evaluasi Infrastruktur Jembatan

Kabupaten Barito Kuala memiliki karakteristik wilayah yang didominasi sungai dan saluran air sehingga keberadaan jembatan merupakan infrastruktur vital yang menghubungkan antarkecamatan, desa, serta kawasan produksi. Pembangunan dan rehabilitasi jembatan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta memperkuat akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Dokumen RKPD juga menempatkan pembangunan jalan dan jembatan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi dan penguatan konektivitas antarwilayah.

Pada Semester I Tahun 2026, beberapa pekerjaan jembatan telah memasuki tahap konstruksi dan rehabilitasi. Prioritas diberikan pada jembatan yang menghubungkan sentra produksi pangan, kawasan permukiman, dan jaringan jalan kabupaten. Beberapa kendala yang ditemui pada pembangunan infrastruktur jembatan diantaranya:

- Kondisi geografis berupa sungai lebar dan lahan rawa;
- Biaya konstruksi yang relatif tinggi;
- Kebutuhan pemeliharaan jembatan yang sudah eksisting.

Sehingga, pada semester II ini difokuskan kepada:

- Percepatan penyelesaian pekerjaan konstruksi;
- Inspeksi berkala terhadap jembatan strategis;
- Peningkatan kapasitas struktur jembatan sesuai beban lalu lintas.

c. Evaluasi Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi merupakan infrastruktur strategis yang mendukung sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Barito Kuala. Kabupaten Barito Kuala memiliki lahan sawah sekitar **114.256 hektare**, yang seluruhnya merupakan lahan nonirigasi teknis dan didominasi lahan pasang surut. Pada tahun 2024, produksi padi mencapai **219.963 ton Gabah Kering Giling (GKG)** dengan luas panen **58.873 hektare**. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan irigasi dan tata air sangat menentukan keberlanjutan produksi pangan daerah.

Pada Semester I Tahun 2026 dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi, normalisasi saluran, dan peningkatan tata kelola air untuk mendukung musim tanam. Beberapa kondisi yang mendorong peningkatan jaringan irigasi di Kabupaten Barito Kuala berupa:

- Potensi lahan pertanian yang luas;
- Dukungan program ketahanan pangan nasional;
- Koordinasi lintas sektor antara pertanian dan pekerjaan umum.

Kendala yang ditemui selama di lapangan, diantaranya:

- Sedimentasi/penumpukan lumpur pada saluran irigasi;
- Banjir pasang dan genangan;
- Kerusakan pintu air pada beberapa lokasi.

Sehingga, pada semester II ini lebih difokuskan kepada:

- Rehabilitasi jaringan irigasi tersier;
- Normalisasi saluran primer dan sekunder;
- Penguatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

d. Evaluasi Infrastruktur Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian, penyediaan sanitasi, drainase, jalan lingkungan, serta prasarana dasar permukiman. Program Semester I Tahun 2026 meliputi:

- Peningkatan kualitas kawasan permukiman;
- Pembangunan drainase lingkungan;
- Peningkatan jalan lingkungan;
- Pengembangan sanitasi;
- Penataan kawasan kumuh.

Pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, terutama pada kawasan prioritas yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap infrastruktur dasar. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang ditemui selama di lapangan, diantaranya:

- Masih terdapat kawasan dengan kualitas lingkungan permukiman yang rendah;
- Keterbatasan pendanaan;
- Perlunya sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, provisni dan pusat.

Sehingga, pada semester II ini lebih difokuskan kepada:

- Percepatan penanganan kawasan kumuh;
- Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan;
- Integrasi pembangunan permukiman dengan penyediaan sanitasi dan air minum.

e. Evaluasi Infrastruktur Air Minum

Penyediaan air minum merupakan bagian dari pelayanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penurunan risiko penyakit berbasis lingkungan. Pelaksanaan program Semester I Tahun 2026 difokuskan pada:

- Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- Perluasan jaringan perpipaan;
- Peningkatan kapasitas instalasi air minum;
- Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak.

Program pengembangan SPAM berjalan sesuai tahapan, dengan fokus pada peningkatan cakupan pelayanan di wilayah yang belum terlayani secara optimal. Namun, masih ada beberapa kendala yang ditemui, diantaranya:

- Sebaran permukiman yang luas;
- Karakteristik wilayah rawa dan pasang surut;
- Kebutuhan investasi yang cukup besar untuk perluasan jaringan.

Sehingga, pada semester II ini lebih difokuskan kepada:

- Percepatan pembangunan SPAM;
- Peningkatan kapasitas jaringan distribusi;
- Kolaborasi pendanaan dengan pemerintah pusat dan provinsi;
- Penguatan operasi dan pemeliharaan sistem air minum.

Hasil evaluasi sampai dengan Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan Prioritas Daerah III berjalan sesuai arah kebijakan RKPD. Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, permukiman, dan air minum terus dilaksanakan untuk memperkuat

konektivitas wilayah dan meningkatkan pelayanan dasar. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa tingginya panjang jalan dalam kondisi rusak berat (**383,04 km**), karakteristik wilayah rawa yang meningkatkan biaya pembangunan, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, Semester II Tahun 2026 diarahkan pada percepatan penyelesaian pekerjaan fisik, peningkatan kemantapan infrastruktur strategis, rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan kawasan permukiman yang layak huni, serta perluasan akses air minum guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.

Prioritas 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik Berkualitas

Prioritas pembangunan keempat diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, transparan, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Prioritas ini merupakan salah satu prasyarat utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah karena kualitas tata kelola akan menentukan efektivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, prioritas ini didukung oleh berbagai strategi, antara lain peningkatan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), percepatan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan internal, serta optimalisasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaksanaan prioritas ini juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan berupa meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2.24 Evaluasi Prioritas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik Berkualitas Semester I Tahun 2026

Bidang Prioritas	Target RKPD	Realisasi Semester I	Status	Keterangan
SPBE	Peningkatan maturitas SPBE	Implementasi aplikasi dan integrasi layanan berjalan	Berjalan	Perlu integrasi data antar perangkat daerah
SAKIP	Peningkatan nilai SAKIP	Penyelarasan IKU dan PK berjalan	Berjalan	Fokus pada kualitas outcome
Reformasi Birokrasi	Peningkatan indeks RB	Implementasi area perubahan berjalan	Berjalan	Perlu percepatan digitalisasi layanan
MCP KPK	Peningkatan capaian MCP	Delapan area intervensi dilaksanakan	Berjalan	Penguatan pengendalian intern diperlukan

a. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan transformasi digital pemerintahan. Implementasi SPBE diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, meningkatkan interoperabilitas sistem informasi, serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. Sampai dengan Semester I Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus memperkuat implementasi SPBE melalui pengembangan aplikasi pemerintahan, digitalisasi layanan administrasi, pemanfaatan tanda tangan elektronik, penguatan infrastruktur jaringan, serta integrasi berbagai sistem informasi pemerintahan. Beberapa langkah yang telah dilaksanakan meliputi:

- Pengembangan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
- Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD;
- Penguatan portal layanan publik;
- Pengembangan sistem persuratan elektronik;
- Peningkatan keamanan informasi;
- Peningkatan kapasitas SDM bidang teknologi informasi.

Pelaksanaan SPBE menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dalam digitalisasi proses administrasi pemerintahan. Pemanfaatan layanan elektronik semakin meningkat sehingga mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat maupun koordinasi antarperangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Belum seluruh aplikasi pemerintahan terintegrasi secara penuh;
- Kualitas data antarperangkat daerah masih belum seragam;
- Keterbatasan kapasitas SDM teknologi informasi pada beberapa perangkat daerah;
- Infrastruktur jaringan pada beberapa wilayah masih memerlukan peningkatan.

Sehingga, pada Semester II Tahun 2026 akan lebih difokuskan kepada:

- Percepatan integrasi seluruh aplikasi pemerintahan;
- Penguatan arsitektur SPBE;
- Peningkatan interoperabilitas data;
- Penguatan keamanan siber;
- Peningkatan kompetensi aparatur bidang digital.

b. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan instrumen utama dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada hasil (result oriented government). Implementasi SAKIP diarahkan agar setiap perangkat daerah memiliki keterkaitan yang jelas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, evaluasi, dan pelaporan. Pada Semester I Tahun 2026, berbagai upaya peningkatan kualitas SAKIP telah dilaksanakan, antara lain:

- Penyelarasan RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja;
- Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
- Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja;
- Pembinaan kepada perangkat daerah.

Pelaksanaan SAKIP menunjukkan perbaikan terutama pada aspek penyelarasan dokumen perencanaan dengan indikator kinerja. Namun evaluasi internal masih menemukan beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan, yaitu:

- Masih terdapat indikator yang lebih berorientasi output daripada outcome;
- Kualitas cascading kinerja antarlevel organisasi belum sepenuhnya optimal;
- Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan perlu terus diperkuat.

Sehingga, pada semester II akan difokuskan pada:

- Penyempurnaan indikator outcome;
- Penguatan *quality assurance* dokumen perencanaan;
- Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi;
- Penguatan implementasi SIGAP Perencanaan sebagai instrumen sinkronisasi perencanaan dan pengendalian.

c. Evaluasi Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan proses perubahan secara sistematis dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, bersih, dan melayani. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Semester I Tahun 2026 diarahkan pada delapan area perubahan, yaitu:

- Manajemen perubahan;
- Penataan peraturan perundang-undangan;
- Penataan organisasi;
- Penataan tata laksana;
- Penataan sistem manajemen SDM aparatur;

- Penguatan akuntabilitas;
- Penguatan pengawasan;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan sesuai rencana dengan berbagai capaian yang telah diraih, antara lain:

- Meningkatnya digitalisasi proses pelayanan;
- Penyederhanaan prosedur administrasi;
- Peningkatan kompetensi aparatur;
- Penguatan budaya kerja berorientasi pelayanan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan berupa:

- Perlunya percepatan transformasi digital secara menyeluruh;
- Peningkatan budaya kerja berbasis kinerja;
- Pemerataan kompetensi ASN;
- Optimalisasi inovasi pelayanan publik.

Sehingga, pada semester II akan diarahkan pada:

- Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi Tematik;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Penguatan budaya kerja ASN;
- Peningkatan kompetensi ASN berbasis kebutuhan organisasi.

d. Evaluasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK

Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. Pelaksanaan MCP Kabupaten Barito Kuala difokuskan pada delapan area intervensi, yaitu:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD;
2. Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Pelayanan Publik;
4. Penguatan APIP;
5. Manajemen ASN;
6. Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Optimalisasi Pendapatan Daerah;
8. Perizinan.

Sampai Semester I Tahun 2026, seluruh area intervensi MCP telah dilaksanakan melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Berbagai upaya yang telah dilakukan meliputi:

- Peningkatan kepatuhan pelaporan;
- Penguatan pengendalian intern;
- Peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa;
- Digitalisasi pelayanan perizinan;
- Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah.

Beberapa kendala yang masih dihadapi meliputi:

- perlunya peningkatan kualitas data pendukung MCP;
- belum optimalnya integrasi beberapa sistem informasi;
- perlunya penguatan pengawasan berbasis risiko;
- peningkatan kapasitas aparatur dalam pemenuhan indikator MCP.

Sehingga, pada semester II Tahun 2026 akan diarahkan pada:

- Peningkatan capaian seluruh indikator MCP;
- Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- Penguatan koordinasi dengan KPK dan APIP.

Hasil evaluasi sampai dengan Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan Prioritas Daerah IV telah berjalan sesuai arah kebijakan RPJMD dan RKPD. Implementasi SPBE terus mendorong transformasi digital pemerintahan, penyelarasan SAKIP meningkatkan orientasi kinerja perangkat daerah, Reformasi Birokrasi memperkuat efektivitas organisasi dan kualitas pelayanan publik, sedangkan pelaksanaan MCP KPK mendukung penguatan integritas serta pencegahan korupsi.

Namun demikian, beberapa aspek masih memerlukan percepatan, terutama integrasi sistem informasi antarperangkat daerah, penguatan indikator kinerja berbasis outcome, peningkatan maturitas SPBE, pengembangan kompetensi ASN, serta optimalisasi implementasi MCP pada seluruh area intervensi. Oleh karena itu, Semester II Tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan tata kelola berbasis digital, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga sasaran

pembangunan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel dapat tercapai secara optimal.

Prioritas 5.
Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Prioritas pembangunan kelima diarahkan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan ketahanan terhadap bencana, pengendalian banjir, pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), serta peningkatan kualitas tata kelola sumber daya alam.

Kabupaten Barito Kuala memiliki karakteristik geografis berupa wilayah rawa pasang surut, dataran rendah, serta jaringan sungai yang sangat luas. Kondisi tersebut memberikan potensi besar bagi pengembangan sektor pertanian dan perikanan, namun di sisi lain juga meningkatkan kerentanan terhadap banjir, genangan, abrasi tebing sungai, sedimentasi saluran, pencemaran lingkungan, dan degradasi kawasan sempadan sungai. Oleh karena itu, pembangunan lingkungan hidup harus dilaksanakan secara terpadu dengan pembangunan infrastruktur, tata ruang, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas ini mendukung pencapaian sasaran RPJMD berupa meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana, serta meningkatnya keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

Tabel 2.25 Evaluasi Prioritas Ketahanan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Semester I Tahun 2026

Bidang Prioritas	Target RKPD	Realisasi Semester I	Status	Keterangan
Pengendalian Banjir	Berkurangnya wilayah terdampak	Normalisasi sungai dan drainase berjalan	Berjalan	Perlu percepatan di kawasan rawan
Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pelayanan persampahan	Pengangkutan dan pengelolaan sampah berjalan	Berjalan	Cakupan pelayanan perlu ditingkatkan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,57	Monitoring kualitas lingkungan berjalan	Berpotensi Tercapai	Pengendalian pencemaran terus dilakukan
Rehabilitasi DAS	Meningkatnya luas kawasan rehabilitasi	Penanaman dan rehabilitasi berjalan	Berjalan	Kolaborasi lintas sektor diperlukan

a. Evaluasi Pengendalian Banjir

Pengendalian banjir merupakan salah satu prioritas utama pembangunan Kabupaten Barito Kuala mengingat sebagian besar wilayah berada pada kawasan dataran rendah dan rawa

pasang surut yang dipengaruhi oleh pasang air laut serta curah hujan musiman. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kecamatan mengalami genangan pada musim hujan, terutama pada kawasan permukiman, lahan pertanian, dan ruas jalan kabupaten. Pada Semester I Tahun 2026, pemerintah daerah melaksanakan berbagai program pengendalian banjir melalui:

- Normalisasi sungai dan saluran drainase;
- Rehabilitasi saluran primer dan sekunder;
- Pembangunan serta perbaikan drainase perkotaan;
- Peningkatan kapasitas pintu air dan saluran pengendali;
- Koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan jaringan sungai.

Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal, terutama pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas. Normalisasi saluran dan pembersihan sedimentasi telah meningkatkan kapasitas aliran air pada beberapa titik. Beberapa Faktor Pendukung yang mempercepat pengendalian banjir, diantaranya:

- Tersedianya program pengendalian banjir pada APBD dan APBN;
- Koordinasi lintas sektor dengan instansi teknis;
- Partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong pembersihan saluran.

Namun demikian, efektivitas pengendalian banjir masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Sedimentasi sungai yang cukup tinggi;
- Keterbatasan kapasitas drainase pada kawasan perkotaan;
- Kebutuhan anggaran yang besar untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir;
- Karakteristik wilayah rawa yang memerlukan penanganan khusus.

Sehingga, pada Semester II Tahun 2026 akan diarahkan pada:

- Percepatan normalisasi sungai dan drainase;
- Rehabilitasi pintu air;
- Penyusunan sistem pengendalian banjir terpadu;
- Peningkatan kapasitas pompa dan saluran pada kawasan rawan banjir;
- Penguatan edukasi masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air.

b. Evaluasi Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan estetika kawasan permukiman. Peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi memerlukan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pada Semester I Tahun 2026, program persampahan difokuskan pada:

- Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah;
- Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R);
- Penguatan bank sampah;
- Edukasi masyarakat mengenai pengurangan sampah dari sumber;
- Peningkatan sarana dan prasarana persampahan.

Pelayanan pengangkutan sampah di kawasan perkotaan berjalan relatif baik. Beberapa kelompok masyarakat juga mulai mengembangkan pengelolaan sampah berbasis bank sampah dan ekonomi sirkular. Selain itu, juga ada beberapa hal yang mendukung pengelolaan sampah di masyarakat, diantaranya:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan;
- Dukungan pemerintah melalui penyediaan sarana persampahan;
- Berkembangnya pengelolaan bank sampah.

Namun, tentunya dalam pengelolaan sampah ini masih ada beberapa kendala yang ditemui, diantaranya:

- Keterbatasan armada pengangkut;
- Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- Rendahnya budaya pemilahan sampah;
- Meningkatnya volume sampah rumah tangga.

Sehingga, pada Semester II 2026 ini akan difokuskan kepada:

- Peningkatan cakupan pelayanan persampahan;
- Penguatan pengelolaan TPS3R;
- Pengembangan bank sampah pada tingkat desa dan kelurahan;
- Peningkatan edukasi masyarakat mengenai pengurangan sampah.

c. Evaluasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan lingkungan hidup yang mencakup kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Target IKLH Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 ditetapkan sebesar **66,57**, sebagai bagian dari upaya mempertahankan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sampai Semester I Tahun 2026, kegiatan pemantauan kualitas lingkungan dilakukan secara berkala melalui:

- Pemantauan kualitas air sungai;
- Pemantauan kualitas udara ambien;
- Pengawasan kegiatan usaha;
- Pengendalian pencemaran lingkungan;
- Peningkatan ruang terbuka hijau.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan secara umum masih berada dalam kategori baik, meskipun pada beberapa lokasi terdapat tekanan akibat aktivitas permukiman dan kegiatan ekonomi. Beberapa faktor yang mendukung pengendalian lingkungan hidup, diantaranya:

- Meningkatnya pengawasan lingkungan;
- Rehabilitasi kawasan terbuka;
- Penguatan koordinasi lintas sektor.

Namun, masih terdapat beberapa kendala yang ditemui, diantaranya:

- Pencemaran limbah domestik pada beberapa badan air;
- Perubahan penggunaan lahan;
- Tekanan terhadap kawasan sempadan sungai.

Sehingga, pada Semester II ini akan difokuskan kepada:

- Peningkatan frekuensi pemantauan kualitas lingkungan;
- Penguatan pengendalian pencemaran;
- Peningkatan rehabilitasi kawasan kritis;
- Pengembangan ruang terbuka hijau.

d. Evaluasi Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)

Rehabilitasi DAS bertujuan meningkatkan daya dukung lingkungan, mengurangi sedimentasi, menekan risiko banjir, serta menjaga keberlanjutan fungsi hidrologis kawasan sungai. Program Semester I Tahun 2026 meliputi:

- Rehabilitasi sempadan sungai;
- Penanaman pohon;
- Konservasi lahan;
- Pengendalian erosi;
- Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Pelaksanaan rehabilitasi DAS berjalan sesuai rencana dengan melibatkan perangkat daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan instansi vertikal. Kegiatan difokuskan pada kawasan yang memiliki tingkat kerusakan tinggi dan daerah yang berkontribusi terhadap sedimentasi sungai. Dukungan program rehabilitasi dari pemerintah pusat, partisipasi masyarakat, dan sinergi lintas perangkat daerah sangat mendukung kelancaran pelaksanaan rehabilitasi DAS terutama di DAS Barito, namun masih ditemui beberapa kendala diantaranya:

- Luas kawasan yang memerlukan rehabilitasi masih cukup besar;
- Tekanan perubahan penggunaan lahan;
- Keterbatasan anggaran pemeliharaan.

Sehingga, pada semester II 2026 ini akan difokuskan kepada:

- Perluasan rehabilitasi kawasan sempadan sungai;
- Peningkatan kegiatan penghijauan;
- Penguatan konservasi lahan berbasis masyarakat;
- Integrasi rehabilitasi DAS dengan pengendalian banjir dan perlindungan kawasan lindung.

Hasil evaluasi sampai dengan Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan Prioritas Daerah V telah berjalan sesuai arah kebijakan RPJMD dan RKPD. Berbagai program pengendalian banjir, pengelolaan persampahan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan rehabilitasi DAS telah dilaksanakan secara bertahap serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketahanan lingkungan daerah.

Namun demikian, tantangan masih dihadapi berupa tingginya kerentanan banjir akibat karakteristik wilayah rawa pasang surut, sedimentasi sungai, peningkatan volume sampah, tekanan terhadap kualitas lingkungan, serta perlunya rehabilitasi kawasan yang lebih luas. Oleh

karena itu, Semester II Tahun 2026 akan difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, peningkatan cakupan pelayanan persampahan, penguatan pengendalian pencemaran, rehabilitasi daerah aliran sungai secara terpadu, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup agar sasaran pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

B. Evaluasi Program Strategis Daerah

Proyek Strategis Kabupaten Barito Kuala pada Perubahan RKPD tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tabing Rimbah dengan pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pembangunan Booster Kecamatan Mekarsari dengan pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Peningkatan Jalan Tanggul Rejo – Semangat Baru dengan pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Anjir Pasar Kota II dengan pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Peningkatan Jalan Kabuau – Tabatan Baru dengan pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6. Peningkatan Jalan Semangat Baru – Tabunganen Muara dengan pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Peningkatan Jalan Tabunganen Kecil – Sei. Pisak dengan pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8. Peningkatan Jalan Lepasan – Banua Hanyar dengan pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9. Peningkatan Jalan Tebing Rimbah Ray 6 – Antasan Segera dengan pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10. Pembangunan Gedung Utama dan Penataan Bangunan Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dengan pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selanjutnya ditampilkan Tabel Proyek Strategis pada Perubahan RKPD tahun 2026 pada table berikut:

Tabel 2.26 Proyek Strategis P-RKPD tahun 2026

NO.	NAMA PAKET STRATEGIS	PAGU ANGGARAN (RP)	NILAI KONTRAK (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	% KEU	% FISIK	KETERANGAN
1	Pengembangan TPA Tabing Rimbah	34,048,670,000	-	-	0,00%	0,00%	Lelang Sudah Selesai, Proses SPPBJ
2	Pembangunan Booster Kecamatan Mekarsari	7,000,000,000	-	-	0,00%	0,00%	Proses Lelang
3	Peningkatan Jalan Tanggul Rejo - Semangat Baru Kecamatan Tabunganen	6,525,924,900	-	-	-	-	Dokumen Perencanaan sudah siap, persiapan lelang
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Anjir Pasar Kota II	2,312,500,000	-	-	-	-	-
5	Peningkatan Jalan Kabuau -Tabatan Baru Kecamatan Kuripan	3,986,159,000	-	-	-	-	Dokumen Perencanaan sudah siap, persiapan lelang
6	Peningkatan Jalan Semangat Baru – Tabunganen Muara	7,000,000,000.	-	-	-	-	Dokumen Perencanaan sudah siap, persiapan lelang
7	Peningkatan Jalan Tabunganen Kecil – Sei. Pisak	4,998,381,973	-	-	-	-	-
8	Peningkatan Jalan Lepasan – Banua Hanyar	5,000,000,000	-	-	-	-	-
9	Peningkatan Jalan Tebing Rimbah Ray 6 – Antasan Segera	7,497,563,700	-	-	-	-	-
10	Pembangunan Gedung Utama dan Penataan Bangunan Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala	16,000,000,000	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	**0,00%**	**0,00%**	

Sumber: Evaluasi Program Strategis Daerah Triwulan II 2026

C. Evaluasi Program Strategis Kepala Daerah

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi dan Herman Susilo telah mencanangkan 12 (Dua Belas) Program Strategis yang sebelumnya termasuk dalam janji kampanye beliau. 12 Program ini akan dilaksanakan secara serempak dan bersama-sama 22 SKPD dan Kecamatan yang akan dinilai secara bertahap sampai masa akhir jabatan beliau. 12 Program Strategis ini juga sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala periode 2025-2029. Adapun hasil evaluasi ke-12 Program Strategis tersebut sampai pada akhir triwulan II 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27 Hasil Evaluasi Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala s.d Triwulan I 2026

NO	NAMA PROGRAM STRATEGIS	TARGET AKHIR (2029)	TARGET TAHUN 2026	CAPAIAN TRIWULAN II 2026
1	Insentif Kaum Mesjid dan Guru TPA	201 Orang Kaum Mesjid dan 1500 Guru TPA setiap tahunnya	201 Orang Kaum Mesjid dan 1500 Guru TPA	-
2	Menciptakan Kawasan Industri Khusus	Revisi Perda RTRW dan Perbup RDTR	Revisi Perda RTRW dan Perbup RDTR	Masih dalam Proses Studi Kelayakan
3	Pupuk Subsidi dan ATM Beras	210 Gapoktan dan 50 unit ATM Beras	210 Gapoktan dan 8 Unit ATM Beras	210 Gapotan dan 2 Unit ATM Beras (ATM Beras terdapat di Kec. Belawang dan Kec. Jejangkit)
4	Jalanan Beton	1. Jalan Kabupaten (45,5 km) 2. Jalan Transmigrasi (10 km) 3. Jalan PSU/Lingkungan (56,5 km) 4. Jalan Desa (8 Km)	1. Jalan Kabupaten (10 km) 2. Jalan Transmigrasi (2 km) 3. Jalan PSU/Lingkungan (13 km) 4. Jalan Desa (2 Km)	2,5 Km
5	Layanan Mobil Keliling	500 Jenis Layanan Kesehatan dan 1329 Jenis Layanan Kependudukan	100 Jenis Layanan Kesehatan dan 256 Jenis Layanan Kependudukan	45 Jenis Layanan Kesehatan dan 81 Jenis Layanan Kependudukan
6	Kartu Beasiswa Batola	201 Orang Sarjana dan 17 Orang Da'i	201 Orang Sarjana dan 17 Orang Da'i, 1 Desa 1 Sarjana dan 1 Desa 1 Da'i	-
7	Kartu Siap Kerja Batola	512 Orang	48 Orang	-
8	Tanah Bengkok	5000 Ha	40 Ha	-
9	UMKM Baiman	168 Unit UMKM Informal menjadi Formal	102 Unit UMKM	Masih Proses Pendataan

NO	NAMA PROGRAM STRATEGIS	TARGET AKHIR (2029)	TARGET TAHUN 2026	CAPAIAN TRIWULAN II 2026
10	Batola Respon Cepat	1. 5800 Santunan Kematian 2. 6500 Santunan Perkawinan 3. 12951 Jasa Medis Obat Khitanan 4. 24437 Jasa Pendampingan Persalinan	1. 1944 Santunan Kematian 2. 1500 Santunan Perkawinan 3. 1781 Jasa Medis Obat Khitanan 4. 3543 Jasa Pendampingan Persalinan	1. 783 Santunan Kematian 2. 6630 Santunan Perkawinan 3. 531 Jasa Medis Obat Khitanan 4. 991 Jasa Pendampingan Persalinan
11	Desa Peduli Stunting	201 Desa dan Kelurahan	201 Desa dan Kelurahan	40 Desa dan Kelurahan
12	Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)	100% (Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak yang Ditangani, berdasar Laporan yang Masuk Dalam Sistem)	100%	20%

Sumber: Evaluasi Program Strategis Bupati-Wakil Bupati Barito Kuala 2025-2029 Periode Evaluasi Triwulan II 2026

2.1.4 Evaluasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Evaluasi program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Barito Kuala sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan realisasi fisik, realisasi keuangan, serta capaian indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam menentukan program yang dipertahankan, dipercepat, disesuaikan, maupun dilakukan pergeseran anggaran pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Penilaian capaian program, kegiatan, dan subkegiatan menggunakan klasifikasi tingkat capaian sebagaimana Tabel T-E.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut, capaian dengan nilai **66–100** dikategorikan memenuhi target, sedangkan capaian di bawah nilai tersebut memerlukan perhatian dan percepatan pelaksanaan. Mengingat evaluasi dilakukan sampai dengan Triwulan II (Semester I), maka capaian minimal sekitar **50 persen** dari target tahunan atau ekuivalen dengan **33 persen** terhadap klasifikasi penilaian telah dianggap berada pada jalur pencapaian (on track), dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing kegiatan, terutama kegiatan fisik yang sebagian besar baru memasuki tahap konstruksi pada Semester II.

Secara umum hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah telah berjalan sesuai tahapan. Program-program yang bersifat rutin, pelayanan dasar, belanja pegawai, serta pelayanan administrasi pemerintahan menunjukkan realisasi yang relatif baik. Sementara itu, beberapa program yang berkaitan dengan pembangunan fisik, pengadaan barang dan jasa, penelitian dan pengembangan, investasi, serta pembangunan infrastruktur strategis masih menunjukkan realisasi keuangan dan fisik yang relatif rendah karena dipengaruhi oleh proses pengadaan, penyelesaian dokumen teknis, pelaksanaan kontrak, kondisi geografis wilayah, serta penyesuaian kemampuan keuangan daerah.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang memiliki realisasi keuangan tinggi namun realisasi fisiknya masih rendah, terutama pada kegiatan yang bersifat multiyears atau pekerjaan konstruksi yang pembayaran termin dilaksanakan setelah progres pekerjaan tertentu tercapai. Sebaliknya, terdapat pula kegiatan yang realisasi fisiknya telah sesuai tahapan tetapi realisasi keuangannya masih rendah karena proses administrasi pencairan belum selesai. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan pada Semester II Tahun 2026 agar tidak mengganggu pencapaian target tahunan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan beberapa langkah tindak lanjut dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, yaitu:

1. mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang realisasinya masih di bawah target;
2. melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa pada kegiatan strategis;
3. melakukan penyesuaian target, lokasi, dan pagu pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai hasil evaluasi Semester I dan kemampuan keuangan daerah;
4. mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala;
5. melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan fisik agar target kinerja dan serapan anggaran dapat tercapai pada akhir Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, klasifikasi penilaian capaian program, kegiatan, dan subkegiatan disajikan pada **Tabel 2.28**, sedangkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan seluruh perangkat daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada **Tabel 2.29**.

Penilaian capaian program/kegiatan/sub kegiatan dapat diklasifikasikan menjadi 5 (Lima) Kategori dengan merujuk pada Permendagri 86 Tahun 2017 yang tertuang dalam Tabel T-E.1 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.28 Klasifikasi Capaian Berdasarkan Nilai Realisasi

Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian	Kategori Penilaian
91 – 100	Sangat Tinggi	Memenuhi Target
76 – 90	Tinggi	Memenuhi Target
66 – 75	Sedang	Memenuhi Target Minimal
51 – 65	Rendah	Belum Memenuhi Target
Dibawah 50	Sangat Rendah	Belum Memenuhi Target

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017, Tabel T.E-1

Dari kelima interval nilai tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa suatu program/kegiatan/sub kegiatan dapat dinyatakan mencapai target jika capaian program/kegiatan tersebut telah mencapai nilai *minimal* 66 dan naik seterusnya (maksimal 100). Sedangkan suatu program/kegiatan/sub kegiatan belum dinyatakan mencapai target jika capaian program/kegiatan masih bernilai 65 dan kebawahnya. Menggunakan asumsi capaian sampai Semester 1/Triwulan II adalah setengah dari target, maka dapat diambil kesimpulan bahwa minimal capaian untuk dikategorikan memenuhi target di Semester I/Triwulan II adalah 33 ataupun keatasnya. Sehingga, berdasar acuan ini, maka pengelompokkan capaian program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.29 Hasil Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan SKPD s.d Triwulan II 2026

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**4.788.370.900,00**	**1.846.176.755,00**	**38,56**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.795.000,00	3.400.000,00	38,66	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.894.527.090,00	1.720.860.363,00	44,19	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	69.886.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	339.203.550,00	68.910.227,00	20,32	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	39.004.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	74.045.760,00	30.433.265,00	41,10	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	362.909.500,00	22.572.900,00	6,22	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		**1.522.254.930,00**	**313.950.507,00**	**20,62**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.522.254.930,00	313.950.507,00	20,62	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		**2.197.636.668,00**	**1.437.228.341,00**	**65,40**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG	2.197.636.668,00	1.437.228.341,00	65,40	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK						
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		**397.234.000,00**	**11.285.000,00**	**2,84**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	397.234.000,00	11.285.000,00	2,84	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		**320.465.984,00**	**19.931.813,00**	**6,22**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	320.465.984,00	19.931.813,00	6,22	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		**1.994.025.600,00**	**309.109.495,00**	**15,50**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.994.025.600,00	309.109.495,00	15,50	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH							

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**5.994.460.732,00**	**2.175.389.468,00**	**36,29**	**33,17**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	130.007.140,00	11.303.829,00	8,69	52,94	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.534.651.204,00	1.993.113.670,00	43,95	57,14	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	132.870.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	317.736.800,00	86.175.980,00	27,12	17,07	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	157.438.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	214.829.280,00	64.308.399,00	29,93	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	506.928.308,00	20.487.590,00	4,04	55,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		**883.301.620,00**	**222.727.838,00**	**25,22**	**58,33**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	570.716.050,00	158.183.447,00	27,72	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	312.585.570,00	64.544.391,00	20,65	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		**445.972.610,00**	**38.697.710,00**	**8,68**	**42,86**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN	321.979.000,00	27.584.710,00	8,57	42,86	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PEMBANGUNAN MANUSIA						
	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	50.593.560,00	880.000,00	1,74	42,86	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	73.400.050,00	10.233.000,00	13,94	42,86	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		**386.921.840,00**	**39.414.398,00**	**10,19**	**8,33**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	124.162.000,00	20.868.154,00	16,81	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	109.832.190,00	6.599.042,00	6,01	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	152.927.650,00	11.947.202,00	7,81	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		**237.241.130,00**	**16.991.296,00**	**7,16**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	INVENSI DAN INOVASI	237.241.130,00	16.991.296,00	7,16	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**5.320.708.079,00**	**2.399.406.424,00**	**45,10**	**26,42**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	160.618.110,00	17.105.766,00	10,65	41,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.484.204.279,00	2.244.829.559,00	50,06	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	344.520.450,00	67.523.757,00	19,60	40,28	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	90.760.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	146.878.740,00	45.330.300,00	30,86	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	93.726.500,00	24.617.042,00	26,26	44,05	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		**1.288.011.720,00**	**367.520.889,00**	**28,53**	**24,50**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	182.995.640,00	69.283.032,00	37,86	54,17	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	MUTASI DAN PROMOSI ASN	595.132.800,00	228.398.063,00	38,38	41,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	281.125.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	228.758.280,00	69.839.794,00	30,53	47,18	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		**1.236.716.000,00**	**303.475.039,00**	**24,54**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	1.236.716.000,00	303.475.039,00	24,54	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**4.117.936.536,00**	**1.887.893.666,00**	**45,85**	**48,52**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.561.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.555.664.246,00	1.486.435.700,00	58,16	57,09	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	710.089.950,00	72.459.115,00	10,20	24,23	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	328.187.140,00	104.327.369,00	31,79	38,19	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	516.434.200,00	224.671.482,00	43,50	46,74	CAPAIAN KEUANGAN	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					KEGIATAN SANGAT BAIK	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		**508.434.700,00**	**96.631.117,00**	**19,01**	**5,65**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	18.895.000,00	11.170.000,00	59,12	55,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	266.571.000,00	25.139.700,00	9,43	10,41	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	116.758.000,00	42.516.000,00	36,41	43,48	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	106.210.700,00	17.805.417,00	16,76	31,39	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**9.692.129.765,00**	**4.233.797.775,00**	**43,68**	**42,38**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	81.551.000,00	9.380.178,00	11,50	55,56	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.511.825.734,00	3.649.223.210,00	48,58	78,57	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	116.980.000,00	16.713.128,00	14,29	23,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	987.230.580,00	445.031.427,00	45,08	34,92	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	474.127.720,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	243.551.860,00	67.072.815,00	27,54	40,91	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	276.862.871,00	46.377.017,00	16,75	21,02	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		**292.263.903.363,00**	**113.366.697.944**	**38,79**	**30,31**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH	2.215.285.200,00	649.442.207,00	29,32	10,42	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN	908.475.180,00	253.079.443,00	27,86	45,83	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	1.137.835.350,00	348.265.414,00	30,61	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENUNJANGAN URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAERAH	288.002.307.633,00	112.115.910.880,00	38,93	15,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		**1.601.593.820,00**	**413.996.818,00**	**25,85**	**29,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.601.593.820,00	413.996.818,00	25,85	29,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**9.689.691.350,00**	**4.060.699.844,00**	**41,91**	**44,78**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	100.429.810,00	38.193.783,00	38,03	58,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.802.581.414,00	2.319.346.307,00	34,10	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	148.570.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.002.429.166,00	1.350.795.499,00	67,46	43,41	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	211.592.960,00	119.353.064,00	56,41	55,81	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	424.088.000,00	233.011.191,00	54,94	22,96	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		**3.351.628.140,00**	**802.431.855,00**	**23,94**	**28,76**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.351.628.140,00	802.431.855,00	23,94	28,76	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
DINAS KESEHATAN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**188.957.655.645,00**	**86.901.119.514,00**	**45,99**	**43,85**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	437.573.190,00	95.928.453,00	21,92	40,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	124.496.335.933,00	65.563.431.860,00	52,66	31,58	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	331.905.000,00	18.967.590,00	5,71	10,60	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.742.429.568,00	126.611.491,00	7,27	35,73	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	527.264.800,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.776.974.794,00	887.276.886,00	15,36	49,79	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.358.975.311,00	247.415.309,00	18,21	51,02	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	54.286.197.049,00	19.961.487.925,00	36,77	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT		**100.932.655.231,00**	**33.360.193.031,00**	**33,05**	**41,20**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	25.219.742.126,00	1.293.763.905,00	5,13	53,97	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH	75.535.287.645,00	32.051.041.529,00	42,43	40,69	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI	15.404.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI						
	PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	162.221.460,00	15.387.597,00	9,49	30,23	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		**2.513.369.150,00**	**66.514.317,00**	**2,65**	**44,87**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	204.249.800,00	3.090.000,00	1,51	22,73	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.309.119.350,00	63.424.317,00	2,75	47,17	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		**296.403.116,00**	**30.568.000,00**	**10,31**	**48,57**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT	115.049.000,00	17.725.000,00	15,41	46,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	181.354.116,00	12.843.000,00	7,08	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		**1.177.042.629,00**	**197.360.886,00**	**16,77**	**54,78**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN,	**331.978.000,00**	81.125.000,00	24,44	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	103.375.000,00	18.099.840,00	17,51	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	741.689.629,00	98.136.046,00	13,23	57,89	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
DINAS SOSIAL							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**9.249.890.007,00**	**2.888.128.425,00**	**31,22**	**32,62**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	70.279.918,00	27.098.680,00	38,56	47,06	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.595.293.315,00	2.451.625.948,00	53,35	28,96	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	109.296.000,00	3.589.000,00	3,28	6,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.902.951.054,00	102.696.924,00	5,40	24,73	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	132.321.720,00	22.878.074,00	17,29	44,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.439.748.000,00	280.239.799,00	11,49	43,81	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		**1.270.453.577,00**	**66.272.852,00**	**5,22**	**15,17**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.032.120,00	3.525.000,00	14,67	20,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.246.421.457,00	62.747.852,00	5,03	10,34	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		**17.700.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL	17.700.000,00	-	0,00	-	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		**4.041.093.500,00**	**684.025.356,00**	**16,93**	**34,37**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	REHABILITASI DASAR SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	4.041.093.500,00	684.025.356,00	16,93	34,37	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		**1.002.919.200,00**	**111.004.560,00**	**11,07**	**15,42**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.002.919.200,00	111.004.560,00	11,07	15,42	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		**619.778.797,00**	**157.267.462,00**	**25,37**	**42,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	619.778.797,00	157.267.462,00	25,37	42,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		**17.279.900,00**	**2.760.000,00**	**15,97**	**21,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	17.279.900,00	2.760.000,00	15,97	21,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**5.704.439.239,00**	**2.542.138.171,00**	**44,56**	**41,67**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	33.445.840,00	7.537.040,00	22,54	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.048.375.569,00	2.358.641.090,00	46,72	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	24.246.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	230.894.630,00	79.130.524,00	34,27	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	143.367.800,00	44.640.435,00	31,14	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	224.109.400,00	52.189.082,00	23,29	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		**2.745.604.499,00**	**395.530.958,00**	**14,41**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	2.155.044.199,00	122.405.958,00	5,68	62,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME	231.122.300,00	10.405.000,00	4,50	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA						
	PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	359.438.000,00	262.720.000,00	73,09	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		**192.715.645,00**	**40.110.100,00**	**20,81**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	139.640.900,00	30.045.000,00	21,52	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.074.745,00	10.065.100,00	18,96	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN		**468.648.000,00**	**92.875.000,00**	**19,82**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
MASYARAKAT VETERINER							
	PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	290.125.000,00	39.985.000,00	13,78	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.439.000,00	8.400.000,00	9,95	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	94.084.000,00	44.490.000,00	47,29	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		**136.946.000,00**	**104.534.564,00**	**76,33**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN	136.946.000,00	104.534.564,00	76,33	50,00	CAPAIAN KEUANGAN	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA					KEGIATAN SANGAT BAIK	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		**69.466.320,00**	**6.648.420,00**	**9,57**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	69.466.320,00	6.648.420,00	9,57	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
DINAS PENDIDIKAN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**451.519.252.987**	**238.265.218.165**	**52,77**	**69,04**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	554.258.000	30.670.287,00	5,53	6,20	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	443.162.799.307	237.589.554.836,00	53,61	84,72	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	220.022.000	109.166.600,00	49,62	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.181.350.376	159.697.260,00	7,32	16,56	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH	1.250.868.000	160.950.000,00	12,87	16,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	545.646.660	181.498.744,00	33,26	33,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.604.308.644	33.680.438,00	0,93	24,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		**93.639.844.800**	**29.324.204.688,00**	**31,32**	**63,18**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	48.953.284.000	15.082.364.250,00	30,81	59,13	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	20.070.380.000	6.854.681.438,00	34,15	61,36	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	21.062.745.000	6.176.835.000,00	29,33	64,41	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL / KESETARAAN	3.553.435.800	1.210.324.000,00	34,06	67,80	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		**83.000.000**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	83.000.000	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**6.702.477.413,00**	**3.511.496.487,00**	**52,39**	**43,44**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.955.200,00	-	0,00	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.086.995.090,00	2.433.184.298,00	47,83	67,86	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	10.164.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	289.937.703,00	98.366.067,00	33,93	55,24	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH	902.660.000,00	862.000.000,00	95,50	33,33	CAPAIAN KEUANGAN	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					KEGIATAN SANGAT BAIK	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	247.091.420,00	68.529.688,00	27,73	51,01	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	163.674.000,00	49.416.434,00	30,19	46,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		**1.250.776.970,00**	**447.892.103,00**	**35,81**	**66,72**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	1.169.099.770,00	443.592.962,00	37,94	51,35	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYELENGGARAN PENDAFTARAN PENDUDUK	42.458.800,00	4.299.141,00	10,13	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	39.218.400,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		**100.212.250,00**	**50.244.861,00**	**50,14**	**67,50**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	91.358.400,00	48.972.801,00	53,61	66,90	CAPAIAN KEUANGAN	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
						KEGIATAN SANGAT BAIK	
	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	8.853.850,00	1.272.060,00	14,37	30,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		**113.874.170,00**	**15.615.662,00**	**13,71**	**80,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	35.702.270,00	2.735.000,00	7,66	40,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	78.171.900,00	12.880.662,00	16,48	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		**65.946.500,00**	**34.762.303,00**	**52,71**	**75,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	65.946.500,00	34.762.303,00	52,71	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
DINAS PERHUBUNGAN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**8.072.573.871,00**	**3.080.391.114,00**	**38,16**	**18,58**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	48.808.800,00	577.200,00	1,18	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.931.342.911,00	2.860.492.465,00	48,23	25,93	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	59.982.400,00	26.100.000,00	43,51	40,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	106.390.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	305.465.300,00	75.118.700,00	24,59	23,89	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	1.073.058.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	193.628.160,00	77.655.876,00	40,11	44,44	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	353.898.300,00	40.446.873,00	11,43	14,39	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS dan ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		**24.873.329.700,00**	**5.269.837.382,00**	**21,19**	**43,88**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	24.640.931.200,00	5.174.393.498,00	21,00	20,52	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGUJIAN BERKALA KENDARAN BERMOTOR	119.638.500,00	44.368.884,00	37,09	61,11	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/ KOTA	112.760.000,00	51.075.000,00	45,30	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		**31.566.651.611,00**	**1.580.070.323,00**	**5,01**	**41,35**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLETAK PADA JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA DAN /ATAU JARINGAN JALUR KERETA API KABUPATEN/KOTA	165.660.000,00	117.550.000,00	70,96	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	31.400.991.611,00	1.462.520.323,00	4,66	7,69	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**3.867.320.285,00**	**1.896.188.214,00**	**49,03**	**42,13**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.210.600,00	908.790,00	21,58	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.596.867.885,00	1.778.837.662,00	49,46	49,71	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	8.260.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	72.161.440,00	33.521.957,00	46,45	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	21.018.000,00	10.045.500,00	47,79	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	96.544.400,00	46.360.705,00	48,02	36,11	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	68.257.960,00	26.513.600,00	38,84	59,09	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		**963.188.200,00**	**315.251.270,00**	**32,73**	**6,48**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	963.188.200,00	315.251.270,00	32,73	36,13	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		**3.719.743.000,00**	**936.819.620,00**	**25,19**	**94,12**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.719.743.000,00	936.819.620,00	25,19	94,12	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		**130.007.000,00**	**4.800.000,00**	**3,69**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	130.007.000,00	4.800.000,00	3,69	42,12	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN		**127.526.000,00**	**1.770.000,00**	**1,39**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	72.099.500,00	1.770.000,00	2,45	33,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.426.500,00	-	0,00	63,83	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**7.717.008.237,00**	**3.558.544.613,00**	**46,11**	**49,18**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	86.530.890,00	6.351.892,00	7,34	71,43	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.988.666.977,00	2.961.116.476,00	49,45	88,69	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	452.141.430,00	121.976.675,00	26,98	35,61	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	35.475.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	481.131.340,00	209.710.870,00	43,59	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	673.062.600,00	259.388.700,00	38,54	49,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		**80.342.847,00**	**300.000,00**	**0,37**	**21,43**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.342.847,00	300.000,00	0,37	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		**548.377.600,00**	**4.920.000,00**	**0,90**	**33,33**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN	548.377.600,00	4.920.000,00	0,90	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN						
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		**550.252.400,00**	**73.128.000,00**	**13,29**	**34,36**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	550.252.400,00	73.128.000,00	13,29	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		**6.630.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DI TINGKAT DAERAH KABUAPTEN/ KOTA	6.630.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		**364.396.280,00**	**30.349.487,00**	**8,33**	**16,67**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	364.396.280,00	30.349.487,00	8,33	46,15	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		**289.261.780,00**	**207.142.400,00**	**71,61**	**100,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	289.261.780,00	207.142.400,00	71,61	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		**33.610.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU)	33.610.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	DAERAHKABUPATEN/KOTA						
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		**104.920.775,00**	**18.689.796,00**	**17,81**	**33,90**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	104.920.775,00	18.689.796,00	17,81	36,26	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		**824.769.500,00**	**407.381.530,00**	**49,39**	**100,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	824.769.500,00	407.381.530,00	49,39	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		**853.451.792,00**	**227.461.274,00**	**26,65**	**32,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	853.451.792,00	227.461.274,00	26,65	42,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		**11.799.970,00**	**-**	**0,00**	**44,76**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	11.799.970,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**4.542.158.485,00**	**2.087.155.587,00**	**45,95**	**47,87**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	98.794.950,00	41.821.240,00	42,33	42,86	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.616.206.700,00	1.806.580.365,00	49,96	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	62.696.000,00	30.153.100,00	48,09	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	223.457.240,00	68.026.687,00	30,44	40,32	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	292.427.035,00	112.618.102,00	38,51	44,65	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	248.576.560,00	27.956.093,00	11,25	17,75	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		**1.354.632.550,00**	**161.483.487,00**	**11,92**	**41,76**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	1.354.632.550,00	161.483.487,00	11,92	41,76	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		**124.967.730,00**	**51.231.000,00**	**41,00**	**44,44**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KAB/KOTA	124.967.730,00	51.231.000,00	41,00	44,44	CAPAIAN KEUANGAN	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
						KEGIATAN SANGAT BAIK	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		**172.068.920,00**	**66.841.966,00**	**38,85**	**41,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN PADA TAHAP KEMANDIRIAN	172.068.920,00	66.841.966,00	38,85	41,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		**1.789.809.770,00**	**825.361.549,00**	**46,11**	**38,33**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KAB/KOTA	1.721.688.770,00	800.761.549,00	46,51	60,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ,MOGOK	68.121.000,00	24.600.000,00	36,11	16,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA						
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**7.310.130.109,00**	**2.698.128.915,00**	**36,91**	**38,89**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	109.899.000,00	3.138.100,00	2,86	16,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.511.459.959,00	1.983.089.280,00	43,96	53,57	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	168.057.000,00	13.000.000,00	7,74	63,64	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	577.575.910,00	197.186.526,00	34,14	41,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	485.329.000,00	119.969.743,00	24,72	30,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.203.729.520,00	349.021.682,00	29,00	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	254.079.720,00	32.723.584,00	12,88	16,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		**2.390.336.000,00**	**110.078.692,00**	**4,61**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	190.058.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	2.200.278.000,00	110.078.692,00	5,00	6,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		**4.200.910.667,00**	**121.765.371,00**	**2,90**	**5,25**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.200.910.667,00	121.765.371,00	2,90	5,25	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA						
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		**1.478.142.000,00**	**99.943.011,00**	**6,76**	**8,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.478.142.000,00	99.943.011,00	6,76	8,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		**31.900.178.335,00**	**47.656.900,00**	**0,15**	**25,40**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	31.900.178.335,00	47.656.900,00	0,15	25,40	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN		**4.425.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
KAWASAN PERMUKIMAN							
	SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN KECIL	4.425.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		**88.687.770,00**	**2.325.000,00**	**2,62**	**35,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	88.687.770,00	2.325.000,00	2,62	35,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		**3.079.899.853,00**	**201.052.368,00**	**6,53**	**10,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.079.899.853,00	201.052.368,00	6,53	10,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		**103.899.900,00**	**225.000,00**	**0,22**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENETAPAN SUBJEK DAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	102.899.900,00	225.000,00	0,22	0,13	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENETAPAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1.000.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA						
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT		**3.690.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENETAPAN TANAH ULAYAT YANG LOKASINYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.690.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		**5.801.900,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.801.900,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**4.720.165.372,00**	**2.226.863.477,00**	**47,18**	**50,03**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN	85.064.000,00	24.245.358,00	28,50	58,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.770.153.332,00	1.933.525.191,00	51,29	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	50.810.000,00	740.000,00	1,46	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	246.630.840,00	64.465.539,00	26,14	54,52	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	118.843.500,00	74.741.410,00	62,89	78,57	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	159.477.700,00	49.962.373,00	31,33	58,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	289.186.000,00	79.183.606,00	27,38	50,48	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		**588.067.620,00**	**117.632.549,00**	**20,00**	**13,23**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN	291.812.620,00	74.200.369,00	25,43	36,88	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	296.255.000,00	43.432.180,00	14,66	13,21	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		**297.136.380,00**	**82.522.038,00**	**27,77**	**60,52**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	198.094.600,00	60.319.038,00	30,45	78,57	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.840.000,00	1.275.000,00	3,46	30,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	62.201.780,00	20.928.000,00	33,65	73,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		**90.795.800,00**	**7.690.000,00**	**8,47**	**27,78**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI	69.105.400,00	2.500.000,00	3,62	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN						
	PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA	5.117.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN	16.573.400,00	5.190.000,00	31,32	33,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**7.300.610.225,00**	**2.765.404.406,00**	**37,88**	**51,22**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	137.045.730,00	34.479.413,00	25,16	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.696.379.805,00	2.540.537.877,00	44,60	78,57	CAPAIAN KEUANGAN	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
						KEGIATAN SANGAT BAIK	
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	20.498.200,00	-	0,00	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	130.581.000,00	12.528.320,00	9,59	37,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	346.741.950,00	97.738.179,00	28,19	52,75	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	347.579.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	276.765.540,00	49.686.568,00	17,95	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	345.019.000,00	30.434.049,00	8,82	40,91	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		**525.376.700,00**	**12.536.750,00**	**2,39**	**37,18**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN	475.376.700,00	12.536.750,00	2,64	32,05	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA						
	PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	-	0,00	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		**6.540.713.660,00**	**4.509.998.955,00**	**68,95**	**65,46**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.320.600.000,00	54.000.000,00	4,09	34,38	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.425.713.870,00	891.519.055,00	62,53	81,13	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	219.399.790,00	89.479.900,00	40,78	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA	3.575.000.000,00	3.475.000.000,00	97,20	96,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		**220.000.000,00**	**-**	**0,00**	**25,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	220.000.000,00	-	0,00	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		**2.757.651.840,00**	**2.004.546.200,00**	**72,69**	**56,25**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM	2.658.126.840,00	1.999.746.200,00	75,23	62,49	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.525.000,00	4.800.000,00	4,82	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		**215.427.000,00**	**32.157.000,00**	**14,93**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	67.717.000,00	-	0,00	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	147.710.000,00	32.157.000,00	21,77	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		**1.599.930.000,00**	**90.189.493,00**	**5,64**	**51,67**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	1.599.930.000,00	90.189.493,00	5,64	51,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		**453.363.000,00**	**91.125.093,00**	**20,10**	**45,75**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	453.363.000,00	91.125.093,00	20,10	45,75	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		**59.870.700,00**	**12.071.000,00**	**20,16**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	59.870.700,00	12.071.000,00	20,16	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**8.254.933.781,00**	**4.231.921.859,00**	**51,27**	**49,80**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	58.724.000,00	18.023.767,00	30,69	60,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.339.375.001,00	3.912.250.466,00	53,30	53,97	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	16.175.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	369.002.580,00	106.364.259,00	28,82	38,83	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	39.600.720,00	30.366.550,00	76,68	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	278.375.880,00	105.810.415,00	38,01	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	153.680.600,00	59.106.402,00	38,46	45,76	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		**2.639.380.300,00**	**881.966.187,00**	**33,42**	**60,69**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	2.639.380.300,00	881.966.187,00	33,42	93,59	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		**2.230.399.400,00**	**61.930.161,00**	**2,78**	**17,96**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.230.399.400,00	61.930.161,00	2,78	17,96	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		**318.368.360,00**	**121.087.690,00**	**38,03**	**93,59**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	318.368.360,00	121.087.690,00	38,03	2,22	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		**1.054.833.920,00**	**79.474.640,00**	**7,53**	**53,56**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	1.054.833.920,00	79.474.640,00	7,53	53,56	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**6.248.779.928,00**	**2.913.284.735,00**	**46,62**	**52,90**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	77.178.400,00	7.664.000,00	9,93	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.477.710.128,00	2.764.571.898,00	50,47	78,57	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	24.978.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	351.815.120,00	80.067.765,00	22,76	46,74	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	56.919.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	134.945.280,00	36.461.800,00	27,02	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	125.234.000,00	24.519.272,00	19,58	51,43	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK		54.485.000,00	1.965.000,00	3,61	0,00	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN							
	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.485.000,00	1.965.000,00	3,61	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		**1.399.916.860,00**	**39.302.000,00**	**2,81**	**1,74**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	1.144.646.060,00	25.909.000,00	2,26	4,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	150.262.900,00	2.143.000,00	1,43	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	105.007.900,00	11.250.000,00	10,71	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		46.457.730,00	1.430.000,00	3,08	0,00	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	33.680.000,00	380.000,00	1,13	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	12.777.730,00	1.050.000,00	8,22	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		**79.998.500,00**	**14.574.900,00**	**18,22**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.998.500,00	14.574.900,00	18,22	10,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		**390.931.480,00**	**47.829.767,00**	**12,23**	**1,85**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	287.599.000,00	31.161.167,00	10,83	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	78.307.480,00	10.589.700,00	13,52	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.025.000,00	6.078.900,00	24,29	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		**957.758.860,00**	**131.826.221,00**	**13,76**	**35,71**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	77.443.000,00	15.727.000,00	20,31	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	880.315.860,00	116.099.221,00	13,19	56,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		165.045.260,00	23.407.000,00	14,18	65,75	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA	165.045.260,00	23.407.000,00	14,18	65,75	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		198.758.620,00	82.856.800,00	41,69	0,00	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL	198.758.620,00	82.856.800,00	41,69	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
DINAS LINGKUNGAN HIDUP							

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**10.142.862.287,00**	**4.381.382.067,00**	**43,20**	**37,59**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	42.016.000,00	14.676.750,00	34,93	62,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.166.135.107,00	4.131.281.226,00	50,59	57,11	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	20.389.600,00	-	0,00	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	32.176.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	476.095.300,00	89.249.297,00	18,75	29,70	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	158.762.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	801.700.280,00	114.583.085,00	14,29	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	445.588.000,00	31.591.709,00	7,09	25,49	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		**1.271.694.301,00**	**229.355.115,00**	**18,04**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	1.050.235.626,00	158.218.920,00	15,07	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	24.465.425,00	1.740.000,00	7,11	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	196.993.250,00	69.396.195,00	35,23	0,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		**2.045.623.455,00**	**418.200.521,00**	**20,44**	**100,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	2.045.623.455,00	418.200.521,00	20,44	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		**166.956.750,00**	**41.569.550,00**	**24,90**	**75,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	9.050.000,00	380.000,00	4,20	16,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.906.750,00	41.189.550,00	26,08	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
BLUD DLH	*PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA (BLUD)*	*100.000.000,00*	-	*0,00*	*0,00*		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN		**125.630.000,00**	**28.497.000,00**	**22,68**	**100,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	125.630.000,00	28.497.000,00	22,68	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		**187.828.360,00**	**28.772.795,00**	**15,32**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	187.828.360,00	28.772.795,00	15,32	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		**189.591.500,00**	**3.390.000,00**	**1,79**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.591.500,00	3.390.000,00	1,79	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		**23.193.320,00**	**6.094.500,00**	**26,28**	**100,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	23.193.320,00	6.094.500,00	26,28	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH		**14.908.040.360,00**	**5.577.935.004,00**	**37,42**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENGELOLAAN SAMPAH	14.908.040.360,00	5.577.935.004,00	37,42	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**4.740.472.921,00**	**1.873.091.460,00**	**39,51**	**26,91**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	35.049.760,00	6.043.200,00	17,24	45,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.205.558.741,00	1.600.978.209,00	49,94	43,77	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	105.000.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	806.814.980,00	184.589.706,00	22,88	35,59	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	38.971.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	243.818.040,00	55.031.153,00	22,57	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	305.260.400,00	26.449.192,00	8,66	14,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENATAAN DESA		**332.648.000,00**	**10.000.000,00**	**3,01**	**31,63**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	332.648.000,00	10.000.000,00	3,01	22,73	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		**5.156.338.430,00**	**2.095.893.956,00**	**40,65**	**45,74**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.156.338.430,00	2.095.893.956,00	40,65	2,45	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		**1.605.887.600,00**	**252.102.000,00**	**15,70**	**46,67**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	1.605.887.600,00	252.102.000,00	15,70	40,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DEA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA						
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**4.746.435.174,00**	**1.708.576.652,00**	**36,00**	**7,85**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.577.670,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.265.295.284,00	1.396.509.866,00	42,77	24,35	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	355.906.480,00	85.975.086,00	24,16	6,37	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	171.574.500,00	5.561.100,00	3,24	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	673.781.960,00	188.913.418,00	28,04	12,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	273.299.280,00	31.617.182,00	11,57	3,85	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		**108.873.000,00**	**4.790.000,00**	**4,40**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.649.000,00	2.870.000,00	12,67	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	86.224.000,00	1.920.000,00	2,23	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		**159.319.700,00**	**1.920.000,00**	**1,21**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	159.319.700,00	1.920.000,00	1,21	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		**187.856.000,00**	**16.125.000,00**	**8,58**	**32,98**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	187.856.000,00	16.125.000,00	8,58	32,98	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		**100.973.000,00**	**10.835.000,00**	**10,73**	**26,96**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.973.000,00	10.835.000,00	10,73	26,96	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		**26.158.000,00**	**910.000,00**	**3,48**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.158.000,00	910.000,00	3,48	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**4.094.883.677,00**	**1.846.219.304,00**	**45,09**	**17,98**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.665.344,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.422.119.437,00	1.606.106.688,00	46,93	19,05	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	145.958.140,00	61.256.800,00	41,97	46,55	CAPAIAN KEUANGAN	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
						KEGIATAN SANGAT BAIK	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	458.283.600,00	173.964.816,00	37,96	41,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	60.857.156,00	4.891.000,00	8,04	6,04	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		**240.567.880,00**	**3.140.000,00**	**1,31**	**90,91**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	40.567.880,00	3.140.000,00	7,74	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	200.000.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		**218.610.520,00**	**38.430.000,00**	**17,58**	**7,74**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.000.000,00	19.650.000,00	38,53	42,86	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	132.930.520,00	18.780.000,00	14,13	12,38	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.680.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		**326.249.750,00**	**21.449.320,00**	**6,57**	**40,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	291.250.000,00	10.800.000,00	3,71	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.999.750,00	10.649.320,00	30,43	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		**120.550.760,00**	**15.420.000,00**	**12,79**	**25,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	120.550.760,00	15.420.000,00	12,79	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		**245.946.000,00**	**16.445.000,00**	**6,69**	**4,28**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.000.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	145.066.000,00	11.245.000,00	7,75	8,86	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.880.000,00	5.200.000,00	10,43	0,99	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		**358.287.790,00**	**48.300.000,00**	**13,48**	**6,38**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	77.237.790,00	8.100.000,00	10,49	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	281.050.000,00	40.200.000,00	14,30	10,34	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		**1.997.209.940,00**	**907.758.560,00**	**45,45**	**19,63**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN	1.867.159.940,00	907.758.560,00	48,62	50,06	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	KESEJAHTERAAN KELUARGA						
	PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	130.050.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		**1.212.405.640,00**	**321.311.000,00**	**26,50**	**28,08**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	318.659.840,00	92.861.000,00	29,14	30,46	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	893.745.800,00	228.450.000,00	25,56	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB						
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**30.885.268.655,01**	**9.575.006.870,00**	**31,00**	**26,08**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	296.896.000,00	149.300.950,00	50,29	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.234.707.926,00	4.537.843.127,00	49,14	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	399.667.040,21	68.265.000,00	17,08	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	529.439.938,80	234.832.121,00	44,35	27,38	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	18.351.870.440,00	3.891.417.001,00	21,20	8,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	661.357.110,00	168.665.595,00	25,50	23,61	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.411.330.200,00	524.683.076,00	37,18	20,07	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		**27.617.913.091,00**	**3.758.697.728,00**	**13,61**	**11,87**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.591.140.000,00	930.921.600,00	25,92	49,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU)	24.026.773.091,00	2.827.776.128,00	11,77	5,63	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	DAERAH KABUPATEN/KOTA						
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		**24.810.213.694,00**	**423.286.766,00**	**1,71**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.810.213.694,00	423.286.766,00	1,71	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		**45.818.584.000,00**	**6.880.000,00**	**0,02**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.818.584.000,00	6.880.000,00	0,02	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		**6.091.670.800,00**	**1.976.628.000,00**	**32,45**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.091.670.800,00	1.976.628.000,00	32,45	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		**400.000.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	400.000.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		**30.717.200.334,00**	**3.873.068.826,00**	**12,61**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK	30.717.200.334,00	3.873.068.826,00	12,61	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG						
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		**1.000.000.000,00**	**261.743.998,00**	**26,17**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.000.000.000,00	261.743.998,00	26,17	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		**87.343.085.008,00**	**10.986.483.930,00**	**12,58**	**5,25**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	87.343.085.008,00	10.986.483.930,00	12,58	5,25	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		**569.733.800,00**	**23.803.363,00**	**4,18**	**18,75**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	380.478.600,00	18.213.363,00	4,79	20,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	116.982.000,00	3.690.000,00	3,15	16,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	72.273.200,00	1.900.000,00	2,63	20,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		**2.833.618.239,99**	**280.586.566,00**	**9,90**	**40,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	1.828.699.240,00	81.224.617,00	4,44	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	783.749.000,00	132.382.204,00	16,89	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	221.169.999,99	66.979.745,00	30,28	60,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
INSPEKTORAT							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**17.999.255.399,00**	**5.180.816.706,00**	**28,78**	**36,38**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	65.077.400,00	7.912.056,00	12,16	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13.201.354.392,00	4.420.558.761,00	33,49	19,47	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	15.376.000,00	1.624.330,00	10,56	1,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	637.215.000,00	118.834.566,00	18,65	84,52	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	335.624.140,00	163.104.002,00	48,60	28,36	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	729.346.000,00	299.322.600,00	41,04	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	182.411.400,00	26.490.955,00	14,52	20,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.832.851.067,00	142.969.436,00	5,05	51,95	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		**1.888.752.000,00**	**145.376.757,00**	**7,70**	**46,74**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	1.651.373.000,00	126.787.713,00	7,68	48,48	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	237.379.000,00	18.589.044,00	7,83	45,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		**1.656.458.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.656.458.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**15.643.545.924,00**	**5.353.363.581,00**	**34,22**	**43,09**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	216.190.000,00	15.524.700,00	7,18	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.444.037.924,00	4.754.644.993,00	50,35	57,14	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	634.214.800,00	71.835.167,00	11,33	16,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.524.824.404,00	222.570.767,00	14,60	22,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGADAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	880.053.500,00	166.611.000,00	18,93	33,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	109.546.900,00	23.967.754,00	21,88	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	2.834.678.396,00	98.209.200,00	3,46	22,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
ROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**8.270.193.772,00**	**830.617.235,00**	**10,04**	**25,10**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.384.862.472,00	508.637.257,00	7,97	23,13	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	1.885.331.300,00	321.979.978,00	17,08	27,08	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
ROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		**2.416.164.188,00**	**1.421.477.500,00**	**58,83**	**25,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN	2.416.164.188,00	1.421.477.500,00	58,83	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA						
SEKRETARIAT DAERAH							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**36.358.062.882,00**	**18.204.084.488,00**	**50,07**	**51,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	18.994.575.117,00	8.797.002.355,00	46,31	47,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	28.000.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.749.290.150,00	1.287.589.729,00	73,61	74,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	887.484.001,00	280.488.000,00	31,60	32,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.426.886.100,00	3.559.598.224,00	65,59	66,00	CAPAIAN KEUANGAN	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
						KEGIATAN SANGAT BAIK	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.396.895.844,00	1.668.557.203,00	49,12	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.512.207.459,00	547.620.132,00	36,21	37,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	1.439.000.000,00	851.840.500,00	59,20	60,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENATAAN ORGANISASI	374.136.000,00	128.183.230,00	34,26	35,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2.549.588.211,00	1.083.205.115,00	42,49	45,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		**47.215.315.160,00**	**22.159.984.164,00**	**46,93**	**47,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	1.131.912.100,00	904.103.505,00	79,87	80,00	CAPAIAN KEUANGAN	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
						KEGIATAN SANGAT BAIK	
	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	45.479.278.700,00	21.140.509.798,00	46,48	47,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	507.376.500,00	80.301.981,00	15,83	16,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	96.747.860,00	35.068.880,00	36,25	37,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		**1.880.085.500,00**	**995.551.113,00**	**52,95**	**53,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	327.454.000,00	223.859.174,00	68,36	69,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	491.412.400,00	188.051.882,00	38,27	40,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.061.219.100,00	583.640.057,00	55,00	55,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
SEKRETARIAT DPRD							

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**35.330.313.802,00**	**17.020.363.650,00**	**48,17**	**48,20**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	114.696.050,00	37.735.613,00	32,90	33,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.023.985.212,00	2.355.428.373,00	58,53	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	284.551.000,00	76.140.018,00	26,76	57,14	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.826.618.450,00	407.228.352,00	22,29	61,20	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.458.868.720,00	457.301.465,00	31,35	62,47	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.103.554.508,00	386.121.936,00	18,36	70,06	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	24.035.704.862,00	12.844.782.428,00	53,44	19,05	CAPAIAN KEUANGAN	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
						KEGIATAN SANGAT BAIK	
	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	1.482.335.000,00	455.625.465,00	30,74	65,69	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		**28.698.677.600,00**	**11.434.264.752,00**	**39,84**	**46,95**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	1.380.077.000,00	236.256.090,00	17,12	71,43	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	223.140.000,00	-	0,00	33,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	2.785.540.000,00	862.276.605,00	30,96	39,17	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	913.628.600,00	6.660.400,00	0,73	32,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	FASILITASI TUGAS DPRD	23.396.292.000,00	10.329.071.657,00	44,15	58,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
KECAMATAN							
KECAMATAN ALALAK							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		**8.385.226.774,00**	**4.002.499.520,00**	**47,73**	**44,47**	**CAPAIAN KEUANGAN**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
DAERAH KABUPATEN/KOTA						**PROGRAM SANGAT BAIK**	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.200.000,00	-	0,00	41,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.796.631.174,00	3.836.878.037,00	49,21	78,57	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	227.623.300,00	40.958.860,00	17,99	41,01	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	82.856.500,00	62.710.000,00	75,69	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	177.357.200,00	38.312.623,00	21,60	27,78	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	93.558.600,00	23.640.000,00	25,27	27,78	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**179.018.800,00**	**89.999.970,00**	**50,27**	**25,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	9.523.800,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	169.495.000,00	89.999.970,00	53,10	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**25.200.000,00**	**5.400.000,00**	**21,43**	**25,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.200.000,00	5.400.000,00	21,43	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**31.782.400,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.782.400,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBERDAYAAN		**1.964.023.000,00**	**593.198.300,00**	**30,20**	**68,75**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	84.073.000,00	3.075.000,00	3,66	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.879.950.000,00	590.123.300,00	31,39	87,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
KECAMATAN ANJIR MUARA							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**2.770.212.920,00**	**1.322.997.555,00**	**47,76**	**54,41**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	44.070.400,00	5.884.200,00	13,35	29,79	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.472.990.936,00	1.253.699.083,00	50,70	48,25	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	16.070.000,00	5.200.000,00	32,36	47,62	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	150.504.284,00	13.391.000,00	8,90	47,65	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENGADAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	27.439.500,00	27.350.001,00	99,67	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	15.808.000,00	4.580.068,00	28,97	37,04	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	43.329.800,00	12.893.203,00	29,76	60,74	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**16.376.800,00**	**2.370.800,00**	**14,48**	**75,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	966.000,00	966.000,00	100,00	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	11.810.800,00	954.800,00	8,08	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM	1.800.000,00	-	0,00	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	1.800.000,00	450.000,00	25,00	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**25.650.000,00**	**9.500.000,00**	**37,04**	**37,50**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.850.000,00	9.500.000,00	39,83	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	1.800.000,00	-	0,00	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**33.850.000,00**	**8.300.000,00**	**24,52**	**85,56**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI	33.850.000,00	8.300.000,00	24,52	85,56	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**72.100.000,00**	**7.320.000,00**	**10,15**	**38,89**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	59.520.000,00	5.820.000,00	9,78	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	1.800.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	10.780.000,00	1.500.000,00	13,91	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**148.529.000,00**	**90.000.000,00**	**60,59**	**26,61**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	148.529.000,00	90.000.000,00	60,59	26,61	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
KECAMATAN ANJIR PASAR							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**3.144.874.284,00**	**1.229.906.135,00**	**39,11**	**42,14**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.448.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.862.495.274,00	1.131.809.855,00	39,54	75,79	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.500.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	6.942.000,00	6.936.390,00	99,92	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	87.655.790,00	7.917.000,00	9,03	11,35	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	80.920.000,00	76.839.000,00	94,96	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	36.283.420,00	1.770.040,00	4,88	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	63.629.800,00	4.633.850,00	7,28	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**177.318.500,00**	**90.450.000,00**	**51,01**	**100,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	76.672.500,00	-	0,00	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	4.346.000,00	450.000,00	10,35	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM	2.250.000,00	-	0,00	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	94.050.000,00	90.000.000,00	95,69	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**28.950.000,00**	**7.200.000,00**	**24,87**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.300.000,00	7.200.000,00	26,37	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	1.650.000,00	-	0,00	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**31.500.000,00**	**450.000,00**	**1,43**	**66,67**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.500.000,00	450.000,00	1,43	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**33.652.500,00**	**1.875.000,00**	**5,57**	**16,67**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	15.932.500,00	375.000,00	2,35	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	1.500.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	16.220.000,00	1.500.000,00	9,25	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**93.300.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	93.300.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
KECAMATAN BAKUMPAI							

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**3.132.424.935,00**	**1.381.690.452,00**	**44,11**	**22,30**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	35.226.000,00	6.093.500,00	17,30	16,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.648.484.483,00	1.271.887.742,00	48,02	62,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	10.885.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	193.522.980,00	32.682.300,00	16,89	22,62	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	46.412.312,00	9.379.500,00	20,21	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	127.464.560,00	41.332.610,00	32,43	26,39	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	70.429.600,00	20.314.800,00	28,84	27,94	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**137.568.000,00**	**89.217.600,00**	**64,85**	**25,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	7.070.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	130.498.000,00	89.217.600,00	68,37	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**21.750.000,00**	**10.800.000,00**	**49,66**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.750.000,00	10.800.000,00	49,66	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**17.496.200,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI	17.496.200,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**691.795.000,00**	**63.290.000,00**	**9,15**	**24,07**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	59.595.000,00	3.375.000,00	5,66	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	625.000.000,00	59.915.000,00	9,59	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	7.200.000,00	-	0,00	22,22	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
KECAMATAN BARAMBAI							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**2.465.874.622,00**	**1.194.544.681,00**	**48,44**	**30,42**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	23.884.900,00	2.345.000,00	9,82	19,05	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.203.576.647,00	1.136.973.180,00	51,60	48,71	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	95.212.055,00	16.220.000,00	17,04	21,84	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	59.617.000,00	10.822.500,00	18,15	26,75	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	19.341.820,00	4.386.250,00	22,68	29,17	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	64.242.200,00	23.797.751,00	37,04	37,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**273.740.400,00**	**90.524.304,00**	**33,07**	**17,25**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	11.830.400,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	261.910.000,00	90.524.304,00	34,56	34,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**24.450.000,00**	**12.988.750,00**	**53,12**	**58,33**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.450.000,00	12.988.750,00	53,12	58,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**31.155.000,00**	**18.055.000,00**	**57,95**	**68,18**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.155.000,00	18.055.000,00	57,95	68,18	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**30.210.280,00**	**6.600.000,00**	**21,85**	**29,44**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	30.210.280,00	6.600.000,00	21,85	29,44	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
KECAMATAN BELAWANG							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**2.419.577.502,00**	**815.195.682,00**	**33,69**	**51,77**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	740.000,00	464.000,00	62,70	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.045.330.702,00	759.540.347,00	37,14	47,06	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	118.140.280,00	22.458.400,00	19,01	37,43	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	48.296.000,00	10.545.000,00	21,83	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	30.286.220,00	8.431.500,00	27,84	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	176.784.300,00	13.756.435,00	7,78	51,11	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**183.625.740,00**	**89.999.970,00**	**49,01**	**25,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	42.513.740,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	141.112.000,00	89.999.970,00	63,78	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**25.275.000,00**	**7.599.500,00**	**30,07**	**41,67**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.275.000,00	7.599.500,00	30,07	41,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**24.647.450,00**	**16.250.000,00**	**65,93**	**76,92**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN	24.647.450,00	16.250.000,00	65,93	76,92	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**13.026.470,00**	**4.117.000,00**	**31,60**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	13.026.470,00	4.117.000,00	31,60	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
KECAMATAN CERBON							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**2.258.563.596,00**	**1.014.147.547,00**	**44,90**	**32,33**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.277.000,00	450.000,00	13,73	16,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.916.560.011,00	973.725.652,00	50,81	56,25	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	127.165.215,00	14.449.810,00	11,36	19,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	135.543.670,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	24.252.580,00	10.144.026,00	41,83	63,89	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	51.765.120,00	15.378.059,00	29,71	37,83	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**209.788.900,00**	**89.999.970,00**	**42,90**	**15,96**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	55.341.300,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	12.070.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN	2.400.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	SARANA PELAYANAN UMUM						
	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	139.977.600,00	89.999.970,00	64,30	63,83	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**26.730.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.930.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	1.800.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**51.822.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	51.822.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**19.860.500,00**	**3.105.000,00**	**15,63**	**18,75**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	19.860.500,00	3.105.000,00	15,63	18,75	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
KECAMATAN JEJANGKIT							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**2.317.600.803,00**	**978.508.231,00**	**42,22**	**43,72**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.734.000,00	5.160.000,00	26,15	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.011.913.603,00	889.699.267,00	44,22	78,57	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	15.214.000,00	5.520.000,00	36,28	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	75.347.180,00	9.414.100,00	12,49	17,02	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	109.051.000,00	29.914.500,00	27,43	33,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	27.838.420,00	10.873.364,00	39,06	44,44	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	58.502.600,00	27.927.000,00	47,74	32,64	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**151.940.100,00**	**90.460.815,00**	**59,54**	**31,25**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	53.840.100,00	150.000,00	0,28	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	3.450.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM	1.800.000,00	600.000,00	33,33	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	92.850.000,00	89.710.815,00	96,62	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**24.750.000,00**	**5.775.000,00**	**23,33**	**21,43**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.850.000,00	5.775.000,00	24,21	42,86	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	900.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**26.010.000,00**	**10.310.000,00**	**39,64**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI	26.010.000,00	10.310.000,00	39,64	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**44.577.000,00**	**10.960.000,00**	**24,59**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	28.397.000,00	7.210.000,00	25,39	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASTARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	6.180.000,00	300.000,00	4,85	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	10.000.000,00	3.450.000,00	34,50	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**66.049.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	66.049.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
KECAMATAN KURIPAN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**2.623.403.136,00**	**924.952.360,00**	**35,26**	**25,98**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.315.416.466,00	876.227.710,00	37,84	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.894.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	117.347.570,00	36.108.700,00	30,77	39,23	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	20.929.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	41.059.000,00	2.638.050,00	6,43	16,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	120.757.100,00	9.977.900,00	8,26	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN		**304.411.000,00**	**89.470.000,00**	**29,39**	**45,24**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	16.821.000,00	-	0,00	57,14	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	287.590.000,00	89.470.000,00	31,11	33,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**24.600.000,00**	**5.200.000,00**	**21,14**	**25,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.600.000,00	5.200.000,00	21,14	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**18.910.000,00**	**6.250.000,00**	**33,05**	**100,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.910.000,00	6.250.000,00	33,05	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**50.789.700,00**	**1.200.000,00**	**2,36**	**75,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	50.789.700,00	1.200.000,00	2,36	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
KECAMATAN MANDASTANA							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**2.859.277.936,00**	**1.394.865.495,00**	**48,78**	**62,78**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.483.996.666,00	1.273.119.095,00	51,25	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	152.593.350,00	29.843.000,00	19,56	78,09	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	133.746.000,00	74.148.000,00	55,44	33,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	28.427.920,00	8.294.500,00	29,18	30,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	60.514.000,00	9.460.900,00	15,63	71,96	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**135.843.000,00**	**90.519.970,00**	**66,64**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	8.100.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	127.743.000,00	90.519.970,00	70,86	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**28.650.000,00**	**5.700.000,00**	**19,90**	**25,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.650.000,00	5.700.000,00	19,90	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**30.947.500,00**	**8.950.000,00**	**28,92**	**33,33**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.947.500,00	8.950.000,00	28,92	33,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**85.373.000,00**	**5.605.000,00**	**6,57**	**100,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	85.373.000,00	5.605.000,00	6,57	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
KECAMATAN MARABAHAN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**5.324.768.944,00**	**2.557.458.034,00**	**48,03**	**58,38**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.405.000,00	2.392.975,00	99,50	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.814.664.464,00	2.333.708.995,00	48,47	75,00	CAPAIAN KEUANGAN	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
						KEGIATAN SANGAT BAIK	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	258.243.980,00	74.564.691,00	28,87	33,73	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	156.312.000,00	121.781.100,00	77,91	94,44	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	41.495.100,00	14.604.348,00	35,20	19,75	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	51.648.400,00	10.405.925,00	20,15	27,38	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**65.200.100,00**	**1.020.770,00**	**1,57**	**25,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	65.200.100,00	1.020.770,00	1,57	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**28.645.000,00**	**12.600.000,00**	**43,99**	**37,50**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.945.000,00	12.000.000,00	46,25	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	2.700.000,00	600.000,00	22,22	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**48.785.730,00**	**13.625.000,00**	**27,93**	**31,25**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	48.785.730,00	13.625.000,00	27,93	31,25	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**1.155.705.500,00**	**170.888.588,00**	**14,79**	**32,08**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	16.344.200,00	3.220.000,00	19,70	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA	7.422.000,00	1.200.000,00	16,17	12,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	KEMASTARAKATAN TINGKAT KECAMATAN						
	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	10.000.000,00	1.810.900,00	18,11	20,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.121.939.300,00	164.657.688,00	14,68	45,83	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**140.580.400,00**	**96.308.640,00**	**68,51**	**69,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	140.580.400,00	96.308.640,00	68,51	69,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
KECAMATAN MEKARSARI							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**2.574.690.897,00**	**1.309.818.819,00**	**50,87**	**24,40**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.184.916.447,00	1.155.373.671,00	52,88	42,86	CAPAIAN KEUANGAN	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
						KEGIATAN SANGAT BAIK	
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	8.550.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	156.600.050,00	136.145.000,00	86,94	29,17	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	17.550.000,00	15.800.000,00	90,03	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	28.830.400,00	2.500.148,00	8,67	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	178.244.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**98.205.400,00**	**41.418.000,00**	**42,17**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	28.100.000,00	-	0,00	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	46.554.200,00	41.418.000,00	88,97	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	23.551.200,00	-	0,00	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**21.000.000,00**	**5.250.000,00**	**25,00**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.000.000,00	5.250.000,00	25,00	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**28.858.000,00**	**5.580.000,00**	**19,34**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.858.000,00	5.580.000,00	19,34	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**118.612.400,00**	**94.597.800,00**	**79,75**	**75,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	118.612.400,00	94.597.800,00	79,75	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
KECAMATAN RANTAU BADAUH							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**2.551.247.847,00**	**1.237.874.740,00**	**48,52**	**48,03**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.165.000,00	1.969.100,00	10,27	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.171.257.137,00	1.135.383.271,00	52,29	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	736.000,00	736.000,00	100,00	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	98.628.410,00	18.347.629,00	18,60	22,02	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100.088.500,00	56.916.350,00	56,87	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	47.320.300,00	15.238.390,00	32,20	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	114.052.500,00	9.284.000,00	8,14	30,83	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**107.521.200,00**	**91.950.000,00**	**85,52**	**33,33**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	3.707.200,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	11.114.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	92.700.000,00	91.950.000,00	99,19	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**26.325.060,00**	**5.850.000,00**	**22,22**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.325.060,00	5.850.000,00	22,22	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**24.510.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.510.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**76.445.000,00**	**5.425.000,00**	**7,10**	**22,92**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	59.975.000,00	525.000,00	0,88	12,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	16.470.000,00	4.900.000,00	29,75	33,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**29.374.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	29.374.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
KECAMATAN TABUKAN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**2.772.344.214,00**	**949.408.155,00**	**34,25**	**39,91**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.410.554.390,00	929.047.405,00	38,54	55,80	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	17.000.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	145.882.580,00	10.322.000,00	7,08	38,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	102.328.184,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	22.857.300,00	4.130.750,00	18,07	36,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	73.721.760,00	5.908.000,00	8,01	29,17	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**191.987.200,00**	**89.996.640,00**	**46,88**	**25,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	7.494.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	184.493.200,00	89.996.640,00	48,78	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**28.950.000,00**	**5.175.000,00**	**17,88**	**25,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.950.000,00	5.175.000,00	17,88	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**27.660.000,00**	**1.875.000,00**	**6,78**	**27,27**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.660.000,00	1.875.000,00	6,78	27,27	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**72.536.000,00**	**2.175.000,00**	**3,00**	**62,88**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	72.536.000,00	2.175.000,00	3,00	62,88	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
KECAMATAN TABUNGANEN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		**1.919.811.405,00**	**824.109.177,00**	**42,93**	**31,47**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.568.490.485,00	780.008.807,00	49,73	41,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	130.711.320,00	31.292.870,00	23,94	47,65	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	141.541.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	30.223.800,00	313.500,00	1,04	44,44	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	48.844.800,00	12.494.000,00	25,58	23,61	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**255.001.000,00**	**88.417.740,00**	**34,67**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	10.000.000,00	-	0,00	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	245.001.000,00	88.417.740,00	36,09	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**18.450.000,00**	**4.000.000,00**	**21,68**	**33,33**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.450.000,00	4.000.000,00	21,68	33,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**24.380.000,00**	**2.520.000,00**	**10,34**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.380.000,00	2.520.000,00	10,34	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**33.310.000,00**	**2.360.000,00**	**7,08**	**50,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	33.310.000,00	2.360.000,00	7,08	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
KECAMATAN TAMBAN							

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**2.671.561.751,00**	**1.117.993.729,00**	**41,85**	**14,58**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.247.747.871,00	1.117.993.729,00	49,74	58,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	188.666.620,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	90.465.600,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	144.681.660,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**178.531.000,00**	**90.000.000,00**	**50,41**	**33,33**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	7.500.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	171.031.000,00	90.000.000,00	52,62	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**3.000.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.000.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**17.476.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.476.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**3.460.000,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	3.460.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
KECAMATAN WANARAYA							

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**1.827.910.065,00**	**948.743.697,00**	**51,90**	**42,76**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.650.000,00	-	0,00	14,29	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.481.790.705,00	874.074.291,00	58,99	82,47	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	40.530.000,00	16.883.100,00	41,66	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	138.882.240,00	16.225.256,00	11,68	33,12	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	75.480.000,00	18.919.950,00	25,07	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	31.444.820,00	11.546.000,00	36,72	33,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	58.132.300,00	11.095.100,00	19,09	36,11	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**142.077.000,00**	**89.782.500,00**	**63,19**	**33,33**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK**	**PROGRAM MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	49.789.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	92.288.000,00	89.782.500,00	97,29	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**23.700.000,00**	**3.600.000,00**	**15,19**	**25,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.700.000,00	3.600.000,00	15,19	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**6.995.000,00**	**-**	**0,00**	**23,08**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
			RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.995.000,00	-	0,00	23,08	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**16.610.000,00**	**4.500.000,00**	**27,09**	**25,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	10.950.000,00	4.500.000,00	41,10	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	5.660.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**98.759.600,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH**	**PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET**
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	98.759.600,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

Sumber: Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2026 Kabupaten Barito Kuala Triwulan II

Dari tabel diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari 46 SKPD di Kabupaten Barito Kuala, hanya 7 SKPD atau 15,22% yang tidak memenuhi target sampai akhir Semester 1, sementara 39 SKPD lainnya atau 84,78% yang sudah memenuhi target sampai akhir Semester II. Selanjutnya pada Program yang eksisting pada APBD 2026, dari 251 Program yang eksisting (dengan menghitung masing-masing Program Penunjang pada masing-masing SKPD), sebanyak 132 Program yang sudah mencapai minimal target akhir Semester I 2026 atau sebesar 52,59%, dan untuk Kegiatan, dari 643 Kegiatan yang eksisting pada APBD 2026, sebanyak 361 Kegiatan yang sudah mencapai minimal target akhir Semester I 2026 atau sebesar 56,14%. Lebih mendetail mengenai evaluasi sampai pada sub kegiatan dapat dilihat pada tabel T.C-19 pada lampiran dokumen ini.

2.2 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN RKPD

2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Barito Kuala sampai dengan Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa program dan kegiatan pembangunan pada dasarnya telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan sesuai target waktu, target kinerja, dan rencana penyerapan anggaran. Permasalahan yang muncul bersifat saling berkaitan, mulai dari tekanan kapasitas fiskal, keterlambatan pengadaan dan penyaluran dana transfer, perubahan kebijakan, kondisi ekonomi dan lingkungan, hingga kelemahan pada aspek perencanaan, data, koordinasi, dan kapasitas aparatur.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,785 triliun dan belanja daerah sebesar Rp1,985 triliun. Struktur tersebut sejak awal membentuk defisit sebesar Rp200 miliar yang harus ditutup melalui pembiayaan neto. Perkembangan pelaksanaan anggaran serta koreksi terhadap potensi pendapatan menyebabkan ruang fiskal menjadi semakin terbatas dan memerlukan penyesuaian melalui Perubahan RKPD serta Perubahan APBD Tahun 2026.

Permasalahan pelaksanaan RKPD tidak hanya dilihat dari rendahnya realisasi keuangan, tetapi juga dari ketidaksesuaian antara target dan capaian, kesiapan teknis kegiatan, efektivitas program, ketepatan penerima manfaat, serta kontribusi kegiatan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap permasalahan dianalisis berdasarkan hubungan:

Penyebab → Dampak terhadap pencapaian RKPD → Upaya penyelesaian Semester II Tahun 2026.

Berdasarakan pada pola hubungan tersebut, maka dapat dilihat secara ringkas matriks hubungan permasalahan pembangunan pada RKPD 2026 per Semester I pada tabel dibawah.

Tabel 2.30 Matriks Permasalahan Pelaksanaan RKPD Kabupaten Barito Kuala Semester I Tahun 2026

No.	Permasalahan	Penyebab utama	Dampak terhadap RKPD	Upaya penyelesaian
1	Penurunan proyeksi pendapatan	Target PAD belum seluruhnya berbasis potensi riil; sejumlah objek retribusi dan pemanfaatan aset belum pasti	Ruang fiskal berkurang, kegiatan perlu dirasionalisasi	Koreksi target pendapatan, intensifikasi PAD, optimalisasi aset, penajaman belanja
2	Keterlambatan penyaluran transfer	Persyaratan penyaluran, kontrak, laporan, dan rekonsiliasi belum selesai	Pembayaran dan pelaksanaan kegiatan tertunda	Percepatan persyaratan, monitoring dana transfer, koordinasi pusat dan provinsi
3	Keterlambatan pengadaan	Dokumen teknis, HPS, lahan, desain, dan proses tender belum siap	Belanja modal rendah dan waktu konstruksi semakin pendek	Percepatan tender, evaluasi paket, penundaan kegiatan tidak siap
4	Perubahan regulasi	Kebijakan pusat, transfer, nomenklatur, dan sistem SIPD berubah	Dokumen perencanaan dan anggaran perlu disesuaikan	Harmonisasi regulasi, desk bersama, pembaruan SIPD
5	Tekanan inflasi	Harga pangan, bahan bangunan, dan biaya distribusi berfluktuasi	Daya beli turun dan biaya program meningkat	Penguatan TPID, operasi pasar, revisi HPS, perlindungan kelompok rentan
6	Banjir dan kondisi geografis	Wilayah rawa pasang surut, sedimentasi, curah hujan, dan drainase terbatas	Infrastruktur dan produksi pertanian terganggu	Normalisasi saluran, perbaikan pintu air, penyesuaian desain dan jadwal
7	Kapasitas SDM belum merata	Kekurangan tenaga teknis serta kompetensi perencanaan, pengadaan, dan data	Dokumen dan pelaksanaan kegiatan kurang berkualitas	Pelatihan, pendampingan, pemetaan kompetensi, penguatan pejabat fungsional
8	Kualitas data belum optimal	Data sektoral belum mutakhir dan berbeda antar dokumen	Target, lokasi, dan penerima manfaat kurang tepat	Satu Data, validasi, metadata, dan rekonsiliasi berkala
9	Koordinasi antar-OPD belum efektif	Perencanaan sektoral, pembagian peran tidak jelas, tindak lanjut rapat lemah	Program tumpang tindih atau terdapat kekosongan intervensi	Forum lintas sektor, penetapan leading sector, matriks pembagian peran
10	Investasi belum optimal	Infrastruktur, lahan, promosi, dan kepastian usaha belum memadai	Lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi tumbuh lambat	Percepatan perizinan, profil investasi, penyelesaian hambatan usaha

11	Kualitas perencanaan belum optimal	Target kurang realistis, indikator berorientasi output, kesiapan kegiatan rendah	Deviasi RKPD–APBD dan rendahnya penyerapan	Quality control, desk review, penerapan SIGAP Perencanaan
12	Realisasi fisik dan keuangan rendah	Kombinasi pengadaan, administrasi pembayaran, transfer, dan kesiapan kegiatan	Manfaat program terlambat dan risiko SiLPA meningkat	Rencana aksi percepatan, monitoring mingguan, rasionalisasi kegiatan
13	Pengendalian dan evaluasi belum kuat	Pelaporan terlambat, data fisik belum seragam, tindak lanjut tidak dipantau	Masalah terlambat diketahui dan berulang	Sistem peringatan dini, dashboard, dan laporan tindak lanjut
14	Ketepatan sasaran belum optimal	DTSEN, P3KE, dan data sektoral belum sepenuhnya terintegrasi	Inclusion error dan exclusion error	Pemutakhiran berbasis NIK, verifikasi desa, mekanisme usul-sanggah
15	Infrastruktur pendukung terbatas	Jalan, jaringan internet, air minum, sanitasi, dan irigasi belum merata	Pelayanan publik, investasi, dan produktivitas belum optimal	Penetapan lokasi prioritas dan integrasi sumber pendanaan

Berdasarkan tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap pencapaian RKPD, penanganan Semester II diarahkan pada beberapa agenda utama.

- *Pertama*, melakukan penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan agar APBD tetap seimbang dan realistis.
- *Kedua*, mempercepat paket kegiatan yang telah siap dan berkontrak, khususnya pelayanan dasar dan infrastruktur strategis.
- *Ketiga*, menghentikan atau menunda kegiatan yang belum memiliki kesiapan teknis, lahan, penerima, atau sumber pendanaan yang pasti.
- *Keempat*, menyelesaikan rekonsiliasi data fisik dan keuangan serta memperkuat Satu Data Kabupaten Barito Kuala.
- *Kelima*, meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah untuk penanganan kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, investasi, banjir, dan lingkungan hidup.
- *Keenam*, memperkuat pengendalian melalui laporan berkala, sistem peringatan dini, dan tindak lanjut yang memiliki batas waktu.

Permasalahan pelaksanaan RKPD Tahun 2026 tidak berdiri sendiri. Penurunan pendapatan menekan ruang fiskal; keterlambatan transfer dan pengadaan menghambat realisasi; perubahan regulasi meningkatkan kebutuhan penyesuaian; inflasi dan banjir memberikan tekanan eksternal; sedangkan keterbatasan SDM, kualitas data, koordinasi, dan perencanaan memengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

Perubahan RKPD harus berfungsi sebagai instrumen koreksi, bukan sekadar penyesuaian administratif. Program dan kegiatan yang siap, strategis, dan berdampak langsung perlu dipertahankan serta dipercepat. Kegiatan yang tidak realistis, belum siap, atau tidak mendukung sasaran pembangunan harus disesuaikan. Dengan demikian, keterbatasan fiskal dan waktu pelaksanaan dapat diarahkan untuk mencapai hasil pembangunan yang paling besar bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala.

2.2.2 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

A. Faktor Pendorong Capaian Kinerja

Faktor pendorong pencapaian kinerja adalah elemen-elemen yang memengaruhi organisasi dalam mencapai hasil kerja yang optimal. Faktor-faktor ini dapat bersifat internal maupun eksternal. Dengan memahami faktor-faktor ini, organisasi diharapkan dapat mengoptimalkan strategi untuk mencapai kinerja terbaik untuk periode perencanaan berikutnya. Berikut beberapa faktor pendorong capaian kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan dalam RKPD 2026, seperti yang dilapokan secara manual kepada bidang Evaluasi dan Pengendalian Bapperida Kabupaten Barito Kuala, maupun yang direkam dalam Aplikasi SIPD e-DALEV.

1. Kerjasama yang baik antara internal SKPD, lintas sectoral, maupun dengan pihak eksternal (di luar lingkungan pemerintah);
2. Kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal perencanaan, atau tetap terlaksana dengan baik dan semaksimal mungkin jika tidak sesuai perencanaan awal;
3. Evaluasi rutin yang dilaksanakan internal SKPD sehingga dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan SKPD dalam mencapai targetnya;
4. Pada Dinas Kesehatan, dukungan tenaga kesehatan yang memadai dan peran aktif masyarakat mendukung keberhasilan program-program kesehatan yang dilaksanakan;
5. Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Adanya peran aktif Enumerator Harga tingkat Produsen dan konsumen, serta adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan para pelaku usaha;
6. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemampuan/kompetensi pelaksana bidang pencatatan sipil dan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan terbilang sangat baik, serta validnya data kependudukan di aplikasi PDAK (Pusat Data dan Analitik Kependudukan)
7. Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Terdapat beberapa faktor pendorong yang menyebabkan kelancaran pencapaian target kinerja, yaitu:
   a. Terfasilitasinya pelaku UMKM di Pasar Ramadhan.

b. Terlaksananya Pemantauan Harga Bahan Pokok setiap hari dan setiap Minggu.
c. Pelaksanaan kegiatan pameran promosi produk IKM yang efektif meningkatkan paparan pasar dan pengakuan kualitas produk lokal di tingkat nasional;

8. Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kenaikan produksi perkebunan dipicu oleh peningkatan permintaan pada sektor tertentu terutama produksi kelapa untuk permintaan pasar dan komoditas sawit yang sudah memasuki Tahun Tanaman menghasilkan walaupun rata-rata produksi masih 4 ton/ha, tetapi jumlah lahan bertambah disamping alih fungsi komoditas dari karet ke Sawit;
9. Pada Sekretariat Daerah, rerlaksananya kegiatan pengkuran kinerja serta evaluasi kinerja internal oleh masing masing Asisten terhadap Bagian-Bagian lingkupnya dalam pencapaian sasaran kinerja secara berkala (bulanan) yang selanjutnya menjadi rencana aksi perbaikan kinerja pada periode selanjutnya;
10. Pada Beberapa Kecamatan, partisipasi masyarakat mengikuti musrenbang kecamatan mengalami kemajuan sehingga menyebabkan usulan yang masuk di desa banyak yang terakomodir dalam musrenbang kabupaten.

B. Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah berbagai hal yang dapat menghambat organisasi dalam mencapai hasil kerja yang optimal. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam diri individu, lingkungan kerja, maupun faktor eksternal. Diharapkan dengan mengenali faktor-faktor penghambat ini, organisasi dapat mencari solusi untuk mengatasinya dan meningkatkan produktivitas serta pencapaian kinerja untuk periode perencanaan berikutnya. Berikut beberapa faktor penghambat capaian kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan dalam RKPD 2026, seperti yang dilapokan secara manual kepada bidang Evaluasi dan Pengendalian Bapperida Kabupaten Barito Kuala, maupun yang direkam dalam Aplikasi SIPD e-DALEV.

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki beberapa permasalahan yang ditemui, diantaranya:
   a. Kondisi pasang surut pada sebagian sungai menyebabkan normalisasi terhambat akibat banjir pada saat air pasang;
   b. Kondisi geografis Barito Kuala yang mayoritas tanah rawa menyebabkan biaya pembangunan yang lebih besar;
   c. Proses rehabilitasi saluran terhambat akibat masa tanam padi oleh para petani;
   d. Drainase eksisting berupa saluran sehingga masih 2 arah, perlu perencanan untuk drainase perkotaan yang 1 arah;
   e. Kurangnya kualitas air baku di Barito Kuala menyebabkan pengolahan air minum menjadi lebih sulit;

f. Kesadaran masyarakat akan sanitasi yang sesuai standar masih kurang;
g. Sebagian paket pekerjaan masih dalam proses perencanaan dan audit APIP;
h. Kegiatan Jasa Konstruksi masih terkendala koordinasi dengan pihak pusat; dan
i. Masih banyak masyarakat yang tidak melakukan proses perizinan dalam pemanfaatan ruang.

2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki beberapa permasalahan yang dilaporkan, diantaranya:
   a. Sebagian kegiatan belum terlaksana karena masih dalam tahap persiapan administrasi;
   b. Proses administrasi dan pengadaan jasa konsultansi belum selesai.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki beberapa permasalahan, diantaranya:
   a. Dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan dampak bencana ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu sulitnya wilayah yang dijangkau sehingga perlu sarana dan prasarana yang memadai untuk mencapainya, serta kekurangan sdm yang dimiliki dan keterbatasan anggaran yang dimiliki;
   b. Masyarakat masih banyak yang kekurangan bantuan berupa logistik sebab bantuan yang tersedia di BPBD terbatas;
   c. Kondisi geografis alam, Waktu kejadian bencana alam tidak dapat di prediksi atau tidak mengenal waktu;
   d. Terbatasnya sumber daya manusia di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
   e. Peralatan penunjang kegiatan lapangan yang sudah kurang memadai
4. Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, diantaranya:
   a. Di pengaruhi oleh kondisi perairan yang tidak mendukung untuk melakukan kegiatan penangkapan dan kurangnya populasi ikan di perairan yang di sebabkan dari dampak terjadinya kondisi “air bangai” (fenomena penurunan kadar oksigen drastis yang menyebabkan air menjadi asam, berbau, dan berwarna keruh. Kondisi ini membuat ikan-ikan mabuk dan naik ke permukaan) di perairan sungai barito beberapa waktu lalu sebagai fenomena alam;
   b. Adanya Kenaikan harga BBM menyebabkan naiknya harga pakan untuk Perikanan Budidaya.
5. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, diantaranya:
   a. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Khususnya Peralatan, Perekaman, dan Pencetakan KTP-el;
   b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pencetakan Akta Pencatatan Sipil;
   c. Beberapa Data BPJS Kesehatan belum terpadu-padankan/tersinkronisasi.

6. Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, diantaranya:
    a. Adanya perbedaan harga di tingkat eceran dan agen;
    b. Ada beberapa pedagang yang sulit memberikan informasi terkait harga; dan
    c. Logistik dan keterbatasan ruang pameran yang menyebabkan belum semua produk IKM potensial dapat ditampilkan secara bersama.
7. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya:
    a. Kajian potensi investasi belum dilakukan karena dikhawatirkan akan adanya efisiensi anggaran;
    b. Pengelolaan data masih secara manual;
    c. Infrastruktur internet belum maksimal;
    d. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai alur, persyaratan, dan aplikasi perizinan; dan
    e. Pelaku Usaha yang ingin melakukan proses perizinan terkadang tidak memiliki alat komunikasi terkini (smartphone) sehingga verifikasi hak akses memerlukan kinerja ekstra
8. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya:
    a. Masih banyaknya arsip yang belum dikelola dengan baik di SKPD;
    b. SDM Arsiparis masih banyak belum mengerti tentang pengelolaan arsip;
    c. Kurangnya perhatian SKPD terhadap pentingnya arsip;
    d. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal SKPD Rendah;
    e. Kurang nya SKPD dalam penyusutan arsip/pemusnahan sehingga menyulitkan Lembaga kearsipan dalam mencari data arsip statis;
    f. Seringnya gangguan pada aplikasi SIKN dan JIKN sehingga menghambat dalam input data arsip statis;
    g. Belum ada kesempatan arsiparis untuk mengikuti pelatihan di Arsip Nasional Republik Indonesia; dan
    h. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan transpormasi perpustakaan berbasis inklusi sosial diantaranya minimnya minat masyarakat menjadi anggota saat terbentuknya beberapa komunitas literasi di beberapa sekolah dan desa/kelurahan;
9. Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan, ditemukan permasalahan yaitu terbatasnya akses Produksi dan ada peningkatan curah hujan yang cukup tinggi di bulan Januari dan Pebruari yang lalu sehingga mempengaruhi tingkat produktivitas;
10. Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya:

a. Kesibukan masing-masing SKPD mitra dengan aktivitas mereka masing-masing, sehingga koordinasi kegiatan sering terhambat;
b. Kurang pahamnya SKPD terhadap permintaan data yang diminta, danSering bergantinya pihak yang dapat dihubungi ketika diminta data, sehingga membuat pihak SKPD mitra kebingungan terhadap data yang diminta;
c. Keterlambatan sebagian kecil SKPD dalam mengumpulkan evaluasi yang diminta;
d. Beberapa SKPD agak sulit dihubungi karena faktor lokasi maupun faktor kesibukan pihak yang ingin dihubungi (Bagian PKA atau Pihak yang menangangi kegiatan tertentu);
e. Dokumen Rankhir Renja telah diterima, walaupun masih banyak SKPD belum menyerahkan dokumen perencanaan sehingga review belum maksimal. Hanya saja dalam hal keselarasan dengan program dan kegiatan prioritas provinsi maupun prioritas nasional belum bisa dipastikan sudah atau belum selaras; dan
f. Kendala yang cukup menggangu proses perencanaan karena dalam pengumpulan maupun input di SIPD seringkali melebihi dari waktu yang telah ditetapkan sedangkan tahapan perencanaan tetap berjalan sehingga banyak pekerjaan yang tumpang tindih yang mengakibatkan kualitas perencanaan masih belum sesuai yang diharapkan;

11. Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui, diantaranya:
    a. Wajib Pajak Daerah kurang disiplin dalam hal penyetoran pajak, maupun penyetoran PAD yang berlaku; dan
    b. Kurang optimalnya sarana yang mendukung dalam jalannya pelayanan pajak daerah khususnya pelayanan di Kecamatan Alalak yaitu tidak adanya Personal Computer dan Printer yang memfasilitasi;
12. Kecamatan Anjir Muara: Penilaian Pelayanan Publik sudah menggunakan perangkat elektronik untuk penilaian, namun sebagian besar masyarakat masih belum terbiasa menggunakan sarana tersebut.
13. Kecamatan Bakumpai: Lokasi kantor kecamatan yang baru jauh dari lokasi awal, dan masyarakat belum terbiasa menggunakan barcode kunjungan untuk tanda kehadiran maupun memberi masukan/saran pelayanan.
14. Kecamatan Barambai: Adanya permasalahan pada Aplikasi SKM Hybrid, yang diawal berfungsi baik sehingga nilai periode 1 mencapai target, namun kemudian terkendala di operator dan minat masyarakat yang menurun sehingga di periode 2 IKM tidak mencapai target.

15. Kecamatan Kuripan: Kurangnya SDM ASN di Kecamatan, saat ini ada inovasi berupa Sidapur Data Kecamatan (Sistem Data Cepat, Tepat dan Terpadu) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai IKM.
16. Kecamatan Mandastana: Terlambat pembaruan data untuk penilaian karena Kasi Kesra sedang sakit. Solusi yang diusahakan yaitu dari CPNS dan P3K akan membuat aplikasi yang menunjang untuk memaksimalkan pelayanan.
17. Kecamatan Wanaraya: Ruang dan Fasilitas Pelayanan belum memenuhi standar, Sarpras Perekaman Data Kependudukan sering mengalami gangguan sehingga operator perlu ke Marabahan untuk perbaikan sarpras.
18. Kecamatan Belawang: Penilaian Pelayanan Publik sudah menggunakan perangkat elektronik untuk penilaian, namun sebagian besar masyarakat masih belum terbiasa menggunakan sarana tersebut.
19. Permasalahan umum lainnya yang ditemui, diantaranya:
    a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
    b. Keterlambatan proses administrasi
    c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana
    d. Keterbatasan Anggaran yang tersedia karena adanya Efisiensi Anggaran yang cukup besar tahun ini;
    e. Masih terdapat target kinerja yang belum relevan terhadap sasaran kinerja strategis sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan dan efektivitas pencapaian kinerja serta evidence dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum akuntabel
    f. Anggaran kas yang tersedia di triwulan III dan IV menjadi salah satu faktor yang membuat realisasi kinerja dan keuangan belum sepenuhnya tercapai secara sempurna.

2.2.3 Rumusan Isu Strategis

Isu strategis terbaru merupakan kondisi, permasalahan, dan dinamika pembangunan yang mempunyai pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026. Isu tersebut dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi indikator makro, capaian sasaran pembangunan, pelaksanaan program prioritas, perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta realisasi fisik dan keuangan sampai dengan Semester I Tahun 2026. Penetapan isu strategis tidak hanya didasarkan pada besarnya permasalahan, tetapi juga memperhatikan tingkat urgensi, luasnya masyarakat yang terdampak, risiko apabila tidak segera ditangani, keterkaitan dengan prioritas nasional dan daerah, serta kemampuan pemerintah daerah melakukan intervensi sampai dengan akhir tahun anggaran.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan Tahun 2026 menghadapi tekanan dari sisi kapasitas fiskal, rendahnya realisasi belanja modal, ketergantungan ekonomi pada sektor primer, kerentanan banjir, kualitas pelayanan dasar, kemiskinan, stunting, investasi, dan tata kelola pemerintahan. Pada saat yang sama, Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, UMKM, serta posisi strategis sebagai wilayah penyangga Kota Banjarmasin yang dapat menjadi modal percepatan pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, isu strategis terbaru Kabupaten Barito Kuala pada Semester II Tahun 2026 meliputi hal-hal berikut.

Tabel 2.31 Isu Strategis Terbaru Hasil Evaluasi Semester I Tahun 2026

No.	Isu strategis	Kondisi utama	Risiko terhadap RKPD	Respons kebijakan Semester II
1	Perlambatan dan kerentanan pertumbuhan ekonomi sektor primer	Ekonomi masih bergantung pada pertanian, perikanan, dan komoditas primer	Pertumbuhan dan pendapatan masyarakat mudah terpengaruh cuaca dan harga	Produktivitas, diversifikasi, hilirisasi, dan penguatan pasar
2	Penurunan kapasitas fiskal daerah	Proyeksi PAD mengalami koreksi dan pembiayaan belum terealisasi	Program prioritas berisiko tidak terbiayai	Penyesuaian pendapatan, rasionalisasi belanja, dan perlindungan pelayanan dasar
3	Penguatan ketahanan pangan	Produksi pangan dipengaruhi banjir, tata air, pupuk, dan biaya produksi	Pasokan dan harga pangan tidak stabil	Intensifikasi, tata air, cadangan pangan, dan perlindungan petani
4	Pengendalian inflasi daerah	Harga pangan dan biaya distribusi berfluktuasi	Daya beli turun dan kemiskinan meningkat	TPID, operasi pasar, distribusi, dan pemantauan harga
5	Penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	Kemiskinan menurun, tetapi target 2026 masih membutuhkan akselerasi	Rumah tangga miskin tetap rentan terhadap inflasi dan bencana	Intervensi Desil 1–2, integrasi data, perlindungan sosial, dan pemberdayaan
6	Percepatan penanganan stunting	Masih terdapat keluarga berisiko dan desa prioritas	Kualitas SDM jangka panjang terganggu	Intervensi spesifik dan sensitif secara konvergen
7	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Akses tersedia tetapi mutu dan pemerataan belum optimal	IPM dan produktivitas SDM tumbuh lambat	Pemerataan tenaga, mutu layanan, beasiswa, sarana, dan digitalisasi
8	Percepatan infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar	Banyak jalan rusak serta realisasi belanja modal masih rendah	Mobilitas, investasi, dan pelayanan publik terhambat	Percepatan paket siap, prioritas ruas strategis, air minum, dan irigasi
9	Transformasi digital	Aplikasi dan data belum seluruhnya	Pelayanan dan pengambilan	Penguatan SPBE, interoperabilitas,

	pemerintahan	terintegrasi	keputusan kurang efektif	keamanan informasi, dan Satu Data
10	Mitigasi banjir dan perubahan iklim	Wilayah rawa pasang surut sangat rentan terhadap banjir	Infrastruktur, permukiman, dan produksi pertanian terganggu	Tata air terpadu, rehabilitasi DAS, drainase, dan kesiapsiagaan
11	Optimalisasi investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Nilai tambah lokal dan realisasi investasi belum maksimal	Lapangan kerja dan basis pendapatan daerah tidak berkembang optimal	Penyelesaian hambatan investasi, kawasan agroindustri, dan kemitraan
12	Peningkatan tata kelola berbasis kinerja	Perencanaan, data, koordinasi, dan pengendalian belum sepenuhnya terintegrasi	Program tidak efektif dan realisasi rendah	SAKIP, SIGAP Perencanaan, MCP, pengendalian risiko, dan evaluasi berkala

Isu strategis tersebut tidak berdiri sendiri. Penurunan kapasitas fiskal dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Infrastruktur yang terbatas dapat menekan investasi, meningkatkan biaya distribusi, dan memperbesar inflasi. Inflasi selanjutnya dapat memperlambat penurunan kemiskinan serta memengaruhi kualitas gizi dan stunting.

Banjir dapat menurunkan produksi pangan, merusak infrastruktur, menghambat kegiatan ekonomi, dan menambah beban fiskal. Sementara itu, kualitas data dan tata kelola menentukan apakah pemerintah daerah mampu merespons seluruh masalah tersebut secara tepat sasaran.

Tabel 2.32 Keterkaitan Isu Strategis

Isu pemicu	Isu yang dipengaruhi	Hubungan
Banjir dan perubahan iklim	Pangan, kemiskinan, infrastruktur, inflasi	Menurunkan produksi dan merusak akses
Penurunan kapasitas fiskal	Pendidikan, kesehatan, infrastruktur	Mengurangi kemampuan pembiayaan
Infrastruktur terbatas	Investasi, perdagangan, kemiskinan	Meningkatkan biaya dan menghambat akses
Inflasi	Kemiskinan dan stunting	Menurunkan daya beli dan kualitas konsumsi
Data dan tata kelola lemah	Seluruh prioritas	Mengurangi ketepatan kebijakan
Investasi dan hilirisasi rendah	Pertumbuhan dan tenaga kerja	Membatasi nilai tambah dan kesempatan kerja
Kualitas SDM rendah	Investasi dan produktivitas	Mengurangi daya saing daerah

a. Pendekatan Holistik dalam Penanganan Isu Strategis Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Barito Kuala sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa berbagai permasalahan pembangunan daerah memiliki keterkaitan antarurusan pemerintahan sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara sektoral oleh satu perangkat daerah saja. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 menggunakan **pendekatan holistik**, yaitu memandang permasalahan pembangunan secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitan antara aspek sosial, ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan.

Sebagai contoh, permasalahan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, akses terhadap air minum dan sanitasi, ketersediaan infrastruktur dasar, kesempatan kerja, produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif. Demikian pula penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi memerlukan dukungan penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan ketahanan pangan keluarga, perbaikan pola asuh, peningkatan pendidikan keluarga, serta penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Pendekatan holistik juga diterapkan dalam percepatan pembangunan infrastruktur, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, dan penguatan ketahanan pangan. Seluruh isu strategis tersebut dianalisis secara terpadu sehingga penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk menghasilkan dampak pembangunan yang lebih optimal melalui sinergi lintas urusan pemerintahan.

Tabel 2.33 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Secara Holistik

Permasalahan Strategis	Faktor Penyebab	Urusan/Perangkat Daerah Terkait	Arah Penanganan dalam Perubahan RKPD
Kemiskinan	Rendahnya pendapatan, akses pelayanan dasar, kualitas SDM	Sosial, Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Perkim, Pertanian, Perikanan, Tenaga Kerja, PMD	Perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan pelayanan dasar, penguatan UMKM dan sektor unggulan
Stunting	Gizi, sanitasi, air minum, pola asuh	Kesehatan, PUPR, Perkim, Pendidikan, PMD, DP3AKB	Intervensi gizi spesifik dan sensitif, sanitasi, air minum, edukasi keluarga
Ketahanan Pangan	Produktivitas pertanian, tata	Pertanian, PUPR, Perdagangan, Perikanan	Intensifikasi pertanian, rehabilitasi irigasi,

	air, distribusi		penguatan distribusi pangan
Pengangguran dan Pendapatan	Produktivitas tenaga kerja dan UMKM	Tenaga Kerja, Diskop UKM, Perdagangan, Pertanian	Pelatihan kerja, pengembangan UMKM, hilirisasi komoditas
Banjir	Tata air, drainase, DAS	PUPR, Perkim, DLH, BPBD	Pengendalian banjir, rehabilitasi DAS, normalisasi saluran

b. Pendekatan Integratif dalam Pelaksanaan Program Prioritas

Pelaksanaan program prioritas pada Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 dilaksanakan melalui **pendekatan integratif**, yaitu mengintegrasikan peran perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, serta monitoring dan evaluasi lintas sektor. Beberapa program unggulan daerah telah menerapkan pendekatan integratif, antara lain pengembangan kawasan budidaya perikanan rawa, pengembangan produk unggulan lokal, penguatan ketahanan pangan, percepatan penurunan stunting, dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Setiap perangkat daerah memiliki peran yang saling melengkapi sehingga intervensi pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

c. Pendekatan Integratif dalam Pelaksanaan Program Prioritas Daerah

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 disusun dengan menerapkan **pendekatan integratif**, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi pembangunan melalui sinergi lintas urusan pemerintahan, lintas perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat. Pendekatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap prioritas pembangunan tidak dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing perangkat daerah, tetapi melalui kolaborasi yang saling mendukung sehingga memberikan dampak pembangunan yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa berbagai isu strategis daerah, seperti ketahanan pangan, kemiskinan, stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat, memiliki keterkaitan yang erat antarurusan pemerintahan. Oleh karena itu, Perubahan RKPD Tahun 2026 mengarahkan pelaksanaan program prioritas melalui integrasi

lintas sektor agar setiap intervensi pembangunan saling memperkuat dan menghasilkan manfaat yang lebih optimal.

Tabel 2.34 Matriks Integrasi Lintas Sektor Program Prioritas Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026

Program Prioritas	Perangkat Daerah	Peran Integratif
Program Bioflok Terpadu	Dinas Perikanan	Penyediaan benih ikan, sarana bioflok, pendampingan teknis budidaya, peningkatan produktivitas perikanan.
	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Penguatan kelembagaan usaha, pengolahan hasil perikanan, pengemasan, sertifikasi produk, dan pemasaran.
	Dinas Ketahanan Pangan	Diversifikasi pangan berbasis ikan dan peningkatan konsumsi protein masyarakat.
	Dinas Kesehatan	Pemanfaatan hasil budidaya ikan sebagai bagian dari intervensi gizi keluarga dan percepatan penurunan stunting.
	DPMD	Penguatan peran pemerintah desa, BUM Desa, dan pemanfaatan Dana Desa untuk pengembangan usaha bioflok.
	Bapperida	Sinkronisasi perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi lintas perangkat daerah.
Program Sawit–Peternakan Terintegrasi	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Pengembangan integrasi usaha sawit dengan peternakan, peningkatan produktivitas ternak, dan pemanfaatan limbah sawit sebagai pakan.
	Dinas Pertanian	Penyediaan hijauan pakan, pengembangan lahan pertanian terpadu, dan dukungan teknologi budidaya.
	Dinas PUPR	Penyediaan infrastruktur jalan usaha tani, tata air, dan akses menuju kawasan produksi.
	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Pengembangan usaha peternakan, pemasaran produk, dan hilirisasi hasil ternak.
	DPMD	Penguatan kelembagaan ekonomi desa dan dukungan pendanaan desa.
	Bapperida	Koordinasi lintas sektor, sinkronisasi program, dan pengendalian pelaksanaan.
Program Percepatan Penurunan Stunting	Dinas Kesehatan	Intervensi gizi spesifik, pelayanan ibu hamil dan balita,

		pemantauan tumbuh kembang anak.
	DP3AKB	Pendampingan keluarga berisiko stunting, edukasi pola asuh, dan penguatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
	Dinas PUPR	Penyediaan akses air minum layak dan sanitasi.
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas rumah layak huni dan sanitasi permukiman.
	Dinas Pendidikan	Edukasi gizi, kesehatan, dan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah.
	DPMD	Konvergensi stunting melalui pemerintah desa dan pemanfaatan Dana Desa.
	Dinas Sosial	Perlindungan sosial bagi keluarga sasaran dan kelompok rentan.
	Bapperida	Koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan aksi konvergensi stunting.
Program Percepatan Penurunan Kemiskinan	Dinas Sosial	Perlindungan sosial, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat miskin.
	Dinas Tenaga Kerja	Pelatihan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan fasilitasi penempatan kerja.
	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Pengembangan UMKM, akses pembiayaan, dan peningkatan kapasitas usaha.
	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan	Peningkatan produktivitas sektor unggulan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan mata pencaharian.
	DPMD	Pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan BUM Desa.
	Dinas Pendidikan	Beasiswa dan peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
	Dinas Kesehatan	Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan jaminan kesehatan masyarakat miskin.
	Bapperida	Integrasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, koordinasi lintas OPD, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program.

Pelaksanaan program prioritas pada Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 dilaksanakan melalui **pendekatan integratif**, yaitu mengintegrasikan peran lintas perangkat daerah untuk menyelesaikan isu pembangunan yang bersifat multidimensi. Pendekatan ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 yang menunjukkan bahwa pencapaian sasaran pembangunan tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan kolaborasi antarpemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Program **Bioflok Terpadu** dikembangkan sebagai model integrasi antara peningkatan produksi perikanan, pengembangan usaha masyarakat, ketahanan pangan, dan peningkatan gizi keluarga. Program **Sawit–Peternakan Terintegrasi** menghubungkan sektor perkebunan, peternakan, pertanian, dan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas kawasan dan nilai tambah ekonomi masyarakat. Sementara itu, **Program Percepatan Penurunan Stunting** dilaksanakan melalui konvergensi lintas sektor yang melibatkan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, pemberdayaan masyarakat desa, serta perlindungan sosial. Adapun **Program Percepatan Penurunan Kemiskinan** mengintegrasikan intervensi perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pelayanan dasar sehingga penanganan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

Melalui pendekatan integratif tersebut, Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan, memperkuat sinergi lintas perangkat daerah, serta memastikan bahwa setiap intervensi memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Dengan demikian, perubahan program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, dan pendanaan pada Semester II Tahun 2026 dilaksanakan secara terpadu, terukur, dan berorientasi pada hasil pembangunan daerah.

2.2.4 Rekomendasi Tindak Lanjut dan Arah Perubahan RKPD

Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan fiskal, penanganan isu strategis pada Semester II dapat diberikan tindak lanjut ataupun arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menjaga produksi melalui penguatan tata air, sarana produksi, mekanisasi, pendampingan penyuluh, perlindungan tanaman, serta fasilitasi pemasaran.

2. Mendorong pengolahan hasil, kemitraan usaha, pengembangan sentra agroindustri, dan diversifikasi produk.
3. Menetapkan target pendapatan yang realistis, memisahkan SiLPA bebas dan terikat, memprioritaskan belanja wajib dan pelayanan dasar, menjaga kegiatan strategis yang telah berkontrak, serta merasionalisasi kegiatan yang belum siap dan tidak berdampak langsung terhadap sasaran pembangunan.
4. Penguatan pada beberapa sektor ketahanan pangan diantaranya: intensifikasi pertanian, rehabilitasi tata air, penyediaan benih dan sarana produksi, cadangan pangan pemerintah, perlindungan lahan pertanian, penguatan distribusi, diversifikasi pangan lokal, serta peningkatan pengolahan hasil.
5. Penguatan Pengendalian Inflasi Daerah, dimana oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) semakin dikuatkan pada pemantauan harga harian, operasi pasar, stabilisasi pasokan, kerja sama antar daerah, penguatan cadangan pangan, fasilitasi distribusi, serta pengendalian harga pada hari besar keagamaan dan periode rawan pasokan.
6. Kebijakan penanganan kemiskinan esktrem perlu menggabungkan antara beberapa strategi yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas rumah dan layanan dasar, jaminan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial adaptif.
7. Intervensi penurunan stunting difokuskan pada desa dan keluarga yang berisiko melalui beberapa langkah diantaranya layanan ibu hamil, pemberian makanan tambahan, posyandu, tablet tambah darah, imunisasi, air minum, sanitasi, edukasi pola asuh, serta penguatan Tim Penurunan Prevalensi Stunting (TPPS) dan monitoring berbasis keluarga.
8. Perlunya perlindungan atas belanja pendidikan dan kesehatan, percepatan rehabilitasi sarana, pemerataan tenaga, peningkatan kompetensi, beasiswa, pelayanan kesehatan primer, penguatan rujukan, dan digitalisasi pelayanan pada pendidikan maupun kesehatan.
9. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan paket yang telah siap dan berkontrak, ruas yang menghubungkan antar sentra produksi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, kawasan permukiman, serta jaringan irigasi, air minum, sanitasi, dan pengendalian banjir.
10. Memperkuat arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), interoperabilitas, pusat data, keamanan siber, Satu Data, integrasi layanan, peningkatan kompetensi aparatur, dan penggunaan data digital untuk monitoring pembangunan.
11. Penanganan harus terintegrasi melalui tata ruang, rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), normalisasi saluran sekunder dan tersier, pengelolaan drainase, pintu air, pengendalian sampah, perlindungan sempadan sungai, serta pembangunan

infrastruktur adaptif terhadap perubahan iklim. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem peringatan dini, peta risiko, kesiapsiagaan masyarakat, dan penganggaran berbasis risiko bencana.

12. Menyusun dan mempersiapkan proyek investasi yang siap ditawarkan, menyelesaikan hambatan lahan dan tata ruang, memperkuat layanan di DPMPTSP, mempromosikan agroindustri, memfasilitasi kemitraan investor dengan petani dan UMKM, serta mengembangkan kawasan produksi dan pengolahan.
13. Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui Implementasi SAKIP secara menyeluruh dan berbasis hasil, *quality control* dokumen perencanaan, rekonsiliasi fisik dan keuangan, penerapan manajemen berbasis resiko, penguatan Sistem Pengendalian Intra Pemerintah (SPIP) dan MCP, optimalisasi SPBE, pengembangan dan peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur, dan keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang prima.

Dari beberapa arah kebijakan diatas, dapat disimpulkan 10 Prioritas aksi yang perlu ditekankan pada Perubahan RKPD 2026:

1. Menjaga keseimbangan fiskal melalui penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Mempercepat program dan paket strategis yang telah siap;
3. Menjaga produksi pangan dan stabilitas harga;
4. Melindungi masyarakat miskin dan kelompok rentan;
5. Mempercepat penanganan dan intervensi prevalensi stunting;
6. Melindungi layanan pendidikan dan kesehatan;
7. Mempercepat infrastruktur konektivitas, tata air, air minum, dan sanitasi;
8. Meningkatkan kesiapsiagaan banjir;
9. Menyelesaikan hambatan investasi;
10. Memperkuat data, koordinasi, dan pengendalian berbasis kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan beberapa program prioritas lintas sektor sebagai fokus percepatan pembangunan pada Semester II Tahun 2026. Program-program tersebut dipilih sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil evaluasi capaian indikator pembangunan, realisasi fisik dan keuangan, dinamika kondisi daerah, serta kebutuhan percepatan pencapaian target RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Program prioritas dimaksud meliputi **Program Bioflok Terpadu**, yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan budidaya, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penerapan teknologi budidaya yang efisien dan berkelanjutan; **Program Sawit–Peternakan Terintegrasi**, yang dikembangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi perkebunan dan peternakan melalui integrasi usaha tani, penyediaan pakan, peningkatan produktivitas ternak, dan penguatan nilai tambah komoditas; **Program Percepatan Penurunan Stunting**, yang dilaksanakan melalui intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif secara terpadu oleh seluruh perangkat daerah terkait; serta **Program Percepatan Penurunan Kemiskinan**, yang diarahkan pada penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pelayanan dasar, dan pengembangan kesempatan kerja.

Keempat program prioritas tersebut menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan, sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah, serta rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan pada Semester II Tahun 2026 sebagaimana diuraikan pada Bab IV dan Bab V Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026.

Hasil evaluasi Semester I menunjukkan bahwa isu pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 didominasi oleh tekanan kapasitas fiskal, kerentanan ekonomi sektor primer, ketahanan pangan, inflasi, kemiskinan, stunting, mutu pelayanan dasar, rendahnya realisasi belanja modal, banjir, investasi, transformasi digital, dan tata kelola.

Perubahan RKPD perlu menjadikan isu-isu tersebut sebagai dasar penentuan program yang dipertahankan, dipercepat, disesuaikan, atau ditunda. Penanganannya harus dilaksanakan secara lintas sektor dengan dukungan data yang akurat, pembagian peran yang jelas, lokasi prioritas, target terukur, dan pengendalian berkala. Dengan pendekatan tersebut, Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat mengarahkan sumber daya yang terbatas kepada intervensi yang paling mendesak dan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala.

2.2.8 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026 terhadap Perubahan RKPD Tahun 2026

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dan evaluasi Semester I Tahun 2026 menjadi dasar utama dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026. Evaluasi menunjukkan bahwa sebagian indikator pembangunan telah berada pada jalur pencapaian target, sementara beberapa indikator strategis seperti tingkat kemiskinan, kualitas infrastruktur, kualitas lingkungan hidup, nilai SAKIP, serta rasio PDRB sektor unggulan masih memerlukan percepatan melalui penyesuaian kebijakan pembangunan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melakukan beberapa tindak lanjut dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, yaitu:

1. **penajaman sasaran pembangunan**, terutama pada sasaran yang indikator kinerjanya belum mencapai target Semester I;
2. **penyesuaian fokus prioritas pembangunan** Semester II tanpa mengubah lima prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD;
3. **penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan** pada perangkat daerah agar lebih berorientasi pada percepatan pencapaian indikator RPJMD dan RKPD;
4. **realokasi dan penyesuaian pagu pendanaan** berdasarkan hasil evaluasi realisasi fisik dan keuangan Semester I, perubahan kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan percepatan penyelesaian program prioritas;
5. **penguatan program lintas perangkat daerah** pada bidang penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor ekonomi unggulan, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan, dan pengendalian lingkungan hidup;
6. **penyesuaian target indikator tertentu** yang dipengaruhi perubahan metodologi pengukuran nasional maupun perkembangan kondisi daerah.

Dengan demikian, Perubahan RKPD Tahun 2026 tidak hanya merupakan penyesuaian terhadap perubahan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026 yang diwujudkan melalui perubahan sasaran pembangunan, prioritas daerah, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, serta pagu pendanaan agar target pembangunan daerah sampai akhir Tahun 2026 dapat dicapai secara lebih efektif dan akuntabel.

Tabel 2.35 Rencana tindak lanjut hasil evaluasi semester 1 di perubahan RKPD 2026

Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut dalam Perubahan RKPD
Kemiskinan masih di atas target	Penguatan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, penyesuaian pagu pada OPD terkait
Pilar Infrastruktur belum mencapai target	Percepatan program jalan, jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, serta penyesuaian alokasi belanja modal
Nilai SAKIP belum mencapai target	Penguatan program reformasi birokrasi, SPBE, dan SIGAP Perencanaan
Rasio PDRB sektor unggulan masih rendah	Penguatan program pertanian, perikanan, UMKM, investasi, dan hilirisasi
Status Lingkungan Hidup masih di bawah target	Penambahan fokus pada pengendalian banjir, rehabilitasi DAS, pengelolaan persampahan, dan pengendalian pencemaran
Realisasi pendapatan dan belanja Semester I belum	Penyesuaian pagu, rasionalisasi belanja, dan percepatan pelaksanaan program Semester II

optimal	

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Barito Kuala sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, dilakukan penyesuaian terhadap substansi Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai tindak lanjut atas perkembangan kondisi daerah, perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah, kemampuan keuangan daerah, hasil evaluasi capaian pembangunan, serta perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Penyesuaian tersebut tidak mengubah arah pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, namun diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan pada Semester II Tahun 2026 melalui penajaman sasaran, prioritas pembangunan, indikator kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, proyek prioritas, dan pendanaan daerah. Ringkasan perubahan substansi dimaksud disajikan pada Tabel 2.36 berikut.

Tabel 2.36 Perubahan Substansi Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 dibandingkan RKPD Tahun 2026

Aspek	RKPD Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026	Dasar Perubahan
Tema Pembangunan	Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	**Tetap**, dengan penajaman fokus pelaksanaan Semester II berdasarkan hasil evaluasi	Hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, perkembangan kondisi daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi
Sasaran Pembangunan	Mengacu pada target RPJMD Tahun 2025–2029	Beberapa sasaran disesuaikan melalui percepatan pencapaian indikator yang masih di bawah target, sedangkan sasaran yang telah sesuai tetap dipertahankan	Evaluasi capaian sasaran pembangunan Semester I Tahun 2026
Indikator Makro Daerah	Mengacu pada target RKPD Tahun 2026	Beberapa indikator mengalami penyesuaian target, antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sedangkan indikator lainnya dipertahankan	Perkembangan indikator makro, hasil evaluasi Semester I, dan perubahan asumsi ekonomi daerah
Indikator Kinerja Daerah	Target sesuai RKPD Tahun 2026	Dilakukan penyesuaian terhadap indikator yang dipengaruhi perubahan kondisi daerah, metode pengukuran, atau perkembangan kebijakan	Evaluasi capaian indikator kinerja daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
Prioritas Pembangunan	Lima prioritas pembangunan daerah sesuai RKPD Tahun 2026	**Tidak mengalami perubahan secara substantif**, namun dilakukan penajaman fokus pelaksanaan Semester II pada percepatan pencapaian target	Hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 dan perkembangan isu strategis

		pembangunan	
Program Prioritas	Program prioritas sesuai RKPD Tahun 2026	Dilakukan optimalisasi, penambahan, pengurangan, atau penyesuaian program yang mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan	Evaluasi pelaksanaan program prioritas dan perubahan kebutuhan pembangunan
Kegiatan dan Subkegiatan	Mengacu pada RKPD Tahun 2026	Dilakukan penyesuaian target, volume, lokasi, waktu pelaksanaan, serta pergeseran kegiatan dan subkegiatan sesuai hasil evaluasi	Evaluasi realisasi fisik dan keuangan serta perkembangan kondisi daerah
Proyek Prioritas Daerah	Proyek prioritas sesuai RKPD Tahun 2026	Dilakukan penyesuaian lokasi, tahapan pelaksanaan, dan pendanaan pada proyek tertentu sesuai tingkat urgensi dan kesiapan pelaksanaan	Evaluasi capaian proyek strategis dan kemampuan keuangan daerah
Pendanaan Daerah	Mengacu pada kemampuan keuangan daerah saat penyusunan RKPD	Dilakukan penyesuaian pagu pendanaan, rasionalisasi, realokasi, dan optimalisasi anggaran antarprogram, kegiatan, subkegiatan, serta urusan pemerintahan	Perubahan proyeksi pendapatan daerah, kapasitas fiskal, dan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026
Kebijakan Pembangunan	Mengacu pada arah kebijakan RKPD Tahun 2026	Dilakukan penyesuaian strategi pelaksanaan pembangunan tanpa mengubah arah kebijakan dan tujuan RPJMD	Hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 serta perkembangan kebijakan nasional dan provinsi

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 pada prinsipnya merupakan penyempurnaan pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sebagai tindak lanjut hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Penyesuaian dilakukan secara selektif terhadap substansi yang memerlukan perubahan akibat perkembangan kondisi aktual daerah, perubahan kemampuan keuangan daerah, serta dinamika kebijakan pembangunan, dengan tetap menjaga konsistensi terhadap sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 dan arah pembangunan nasional maupun Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kondisi Perekonomian Daerah

Perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana diuraikan pada Bab II. Penyesuaian dilakukan terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi, kemampuan pendapatan daerah, kapasitas fiskal, belanja daerah, serta pembiayaan guna menjaga kesinambungan pencapaian target RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Perekonomian Kabupaten Barito Kuala pada Semester I Tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang relatif stabil di tengah dinamika perekonomian nasional maupun global. Aktivitas ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi basis utama pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disusul sektor konstruksi, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta administrasi pemerintahan. Struktur ekonomi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik perekonomian Kabupaten Barito Kuala masih sangat dipengaruhi oleh aktivitas sektor primer yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan kondisi iklim, fluktuasi harga komoditas, dan dinamika pasar regional.

Selama Semester I Tahun 2026, aktivitas produksi pertanian tetap berlangsung sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Namun demikian, beberapa faktor eksternal seperti curah hujan yang relatif tinggi, potensi banjir pada wilayah pasang surut, kenaikan harga sarana produksi pertanian, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional memberikan tekanan terhadap produktivitas beberapa subsektor. Di sisi lain, peningkatan aktivitas konstruksi, perdagangan, dan jasa mulai memberikan kontribusi positif terhadap proses diversifikasi struktur ekonomi daerah sehingga ketergantungan terhadap sektor primer secara bertahap mulai berkurang.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Barito Kuala. Stabilitas konsumsi masyarakat didukung oleh pengeluaran pemerintah, penyaluran bantuan sosial, aktivitas perdagangan, serta meningkatnya mobilitas masyarakat. Sementara itu, investasi pemerintah melalui pembangunan infrastruktur dasar serta investasi swasta pada sektor perdagangan, jasa, dan agroindustri mulai menunjukkan

perkembangan yang cukup baik meskipun realisasinya masih berada di bawah target RKPD Tahun 2026.

Secara umum, evaluasi Semester I menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Barito Kuala masih berada pada jalur yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Akan tetapi, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi hingga akhir Tahun 2026 sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi belanja modal, menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperbaiki iklim investasi, dan memperkuat sinergi pembangunan lintas sektor.

3.1.1 Gambaran Umum Perekonomian Daerah

Kabupaten Barito Kuala memiliki karakteristik ekonomi yang khas sebagai wilayah agraris berbasis lahan rawa dan pasang surut. Keunggulan komparatif tersebut menjadikan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB daerah. Berdasarkan data PDRB Tahun 2025, sektor ini memberikan kontribusi sekitar **26,65 persen**, diikuti oleh sektor konstruksi sebesar **14,70 persen**, industri pengolahan sebesar **14,06 persen**, perdagangan besar dan eceran sebesar **13,77 persen**, serta administrasi pemerintahan sebesar **7,28 persen**. Struktur ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih didominasi oleh kegiatan produksi primer, namun telah mulai bergerak menuju peningkatan peran sektor sekunder dan tersier.

Peningkatan kontribusi sektor konstruksi mencerminkan semakin intensifnya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah daerah, baik melalui APBD, APBN, maupun dukungan pemerintah provinsi. Di sisi lain, sektor perdagangan menunjukkan perkembangan positif seiring meningkatnya aktivitas distribusi barang dan jasa, pertumbuhan UMKM, serta posisi strategis Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah penyangga Kota Banjarmasin.

Meskipun demikian, struktur ekonomi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Nilai tambah komoditas unggulan masih relatif rendah karena sebagian besar hasil pertanian dan perikanan dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Keterbatasan industri pengolahan menyebabkan manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat belum optimal. Selain itu, produktivitas sektor primer masih dipengaruhi oleh kondisi tata air, perubahan iklim, harga sarana produksi, dan keterbatasan akses terhadap teknologi modern.

Dalam konteks tersebut, arah pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala pada Semester II Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat transformasi struktural melalui

peningkatan produktivitas sektor unggulan, pengembangan agroindustri, hilirisasi komoditas, penguatan UMKM, peningkatan investasi, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas kawasan produksi dengan pusat distribusi dan pasar.

3.1.2 Evaluasi Kondisi Perekonomian Daerah Semester I Tahun 2026

Evaluasi kondisi perekonomian daerah merupakan tahapan penting dalam penyusunan Perubahan RKPD karena memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan sampai dengan Semester I Tahun 2026 sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan pada Semester II. Evaluasi tidak hanya menilai capaian indikator makro daerah, tetapi juga mengidentifikasi dinamika sektoral, perubahan lingkungan strategis, kemampuan fiskal daerah, serta berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian target pembangunan.

Secara umum, kondisi perekonomian Kabupaten Barito Kuala pada Semester I Tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup stabil di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. Aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan jasa. Konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, sementara belanja pemerintah mulai memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah meskipun realisasi belanja modal masih relatif rendah.

Di sisi lain, beberapa indikator pembangunan menunjukkan perlunya percepatan pada Semester II. Pertumbuhan ekonomi masih dipengaruhi oleh produktivitas sektor primer, investasi belum sepenuhnya mencapai target, penyerapan belanja modal masih memerlukan percepatan, dan kapasitas fiskal daerah mengalami tekanan akibat tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Kondisi tersebut menuntut penyesuaian kebijakan pembangunan agar target RKPD Tahun 2026 tetap dapat dicapai secara realistis.

Evaluasi Semester I juga menunjukkan bahwa pembangunan Kabupaten Barito Kuala menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan iklim, banjir pada wilayah pasang surut, kenaikan harga beberapa komoditas strategis, serta dinamika kebijakan pemerintah pusat memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, Perubahan RKPD tidak hanya berfungsi sebagai penyesuaian anggaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperbaiki efektivitas kebijakan pembangunan.

Tabel 3.1 Ringkasan Evaluasi Kondisi Perekonomian Semester I Tahun 2026

Aspek	Kondisi Semester I	Evaluasi	Kebijakan Semester II
Pertumbuhan ekonomi	Stabil	Perlu dijaga	Percepatan investasi dan belanja modal
Pertanian	Produksi cukup baik, dipengaruhi cuaca	Produktivitas perlu ditingkatkan	Intensifikasi dan rehabilitasi tata air
Perdagangan	Meningkat	Distribusi relatif lancar	Penguatan pasar rakyat dan UMKM
Investasi	Belum optimal	Perizinan dan promosi perlu diperkuat	Percepatan proyek investasi
Inflasi	Relatif terkendali	Tetap perlu diwaspadai	Penguatan TPID
Fiskal	Tertekan	Perlu penyesuaian pendapatan dan belanja	Rasionalisasi APBD

3.1.3 Perubahan Asumsi Dasar Perekonomian Daerah

Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan perkembangan terbaru berbagai indikator makro ekonomi yang digunakan sebagai asumsi dasar penyelenggaraan pembangunan daerah. Asumsi tersebut menjadi landasan dalam menyusun proyeksi pendapatan daerah, kebutuhan belanja, serta target pembangunan sampai akhir tahun anggaran.

Pada saat RKPD Tahun 2026 disusun, asumsi ekonomi didasarkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah yang relatif optimistis, stabilitas harga, peningkatan investasi, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Namun demikian, perkembangan Semester I menunjukkan adanya beberapa perubahan yang perlu diakomodasi dalam Perubahan RKPD.

Perubahan asumsi tersebut antara lain dipengaruhi oleh:

- penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah pusat;
- perkembangan penyaluran dana transfer ke daerah;
- perubahan harga komoditas pangan;
- kondisi iklim yang memengaruhi produksi pertanian;
- perkembangan investasi swasta;
- realisasi pendapatan asli daerah;
- percepatan pelaksanaan APBD;
- perubahan kondisi ekonomi nasional.

Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, asumsi dasar ekonomi Kabupaten Barito Kuala pada Semester II Tahun 2026 disesuaikan agar lebih realistis tanpa mengurangi optimisme pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel 3.2 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026

Indikator	RKPD Murni	Proyeksi Perubahan	Deviasi	Analisis
Pertumbuhan Ekonomi	5,20%	5,70%	+0,50	Aktivitas ekonomi meningkat, didukung sektor pertanian, perdagangan, dan percepatan belanja Semester II.
Kemiskinan	3,88%	3,88%	Tetap	Target dipertahankan melalui penguatan intervensi lintas sektor.
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,30%	3,00%	-0,30	Penyerapan tenaga kerja meningkat melalui pembangunan infrastruktur dan sektor riil.
IPM	72,70	72,70	Tetap	Program pendidikan dan kesehatan tetap diprioritaskan.
IKLH	66,57	66,57	Tetap	Pengelolaan lingkungan tetap berjalan sesuai target.

3.1.4 Tantangan Perekonomian Daerah Semester II Tahun 2026

Pelaksanaan pembangunan pada Semester II Tahun 2026 diperkirakan menghadapi beberapa tantangan strategis yang perlu diantisipasi melalui penyesuaian kebijakan pembangunan. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari kondisi internal daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional, perubahan kebijakan pemerintah pusat, serta kondisi global.

Tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Barito Kuala meliputi:

1. **Ketergantungan terhadap sektor primer**, sehingga pertumbuhan ekonomi masih sensitif terhadap perubahan cuaca dan harga komoditas.
2. **Kapasitas fiskal daerah yang terbatas**, akibat dominasi pendapatan transfer dan ruang fiskal yang semakin sempit.
3. **Realisasi belanja modal yang masih rendah**, sehingga manfaat pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
4. **Produktivitas pertanian yang dipengaruhi tata air dan perubahan iklim**, khususnya pada kawasan rawa pasang surut.
5. **Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan**, terutama melalui percepatan penurunan stunting dan peningkatan mutu pendidikan.

6. **Investasi yang belum berkembang optimal**, karena masih terdapat hambatan pada penyediaan infrastruktur pendukung, kepastian tata ruang, dan promosi potensi daerah.
7. **Transformasi digital pemerintahan** yang masih memerlukan integrasi data, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan implementasi SPBE.
8. **Risiko banjir** yang berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur.

Apabila tantangan tersebut tidak segera direspons melalui kebijakan yang tepat, maka pencapaian target pembangunan daerah pada akhir Tahun 2026 akan menghadapi risiko yang lebih besar.

3.1.5 Prospek Perekonomian Daerah Semester II Tahun 2026

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek perekonomian Kabupaten Barito Kuala pada Semester II Tahun 2026 masih cukup positif. Optimisme tersebut didukung oleh potensi sumber daya alam yang besar, posisi strategis sebagai wilayah penyangga Kota Banjarmasin, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan program prioritas pemerintah.

Prospek pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap terjaga apabila beberapa faktor pendorong dapat dioptimalkan, antara lain:

- percepatan realisasi belanja modal pemerintah daerah;
- peningkatan produksi pertanian melalui intensifikasi dan perbaikan tata air;
- pengembangan kawasan agroindustri dan hilirisasi komoditas unggulan;
- peningkatan investasi swasta;
- penguatan UMKM dan ekonomi desa;
- stabilisasi harga pangan melalui penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
- peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang mendorong produktivitas masyarakat.

Berdasarkan perkembangan Semester I dan proyeksi Semester II, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala diperkirakan tetap berada pada kisaran target RKPD, dengan catatan bahwa percepatan pelaksanaan APBD, stabilitas harga, serta kondisi iklim dapat dijaga sampai akhir tahun anggaran.

Tabel 3.3 Peluang dan Prospek Perekonomian Semester II Tahun 2026

Faktor Pendorong	Peluang	Dampak terhadap Pembangunan
Pertanian pasang	Produksi pangan meningkat	Menjaga pertumbuhan ekonomi dan

surut		ketahanan pangan
Investasi	Pengembangan kawasan agroindustri	Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PDRB
Infrastruktur	Konektivitas wilayah meningkat	Menurunkan biaya logistik
UMKM	Digitalisasi pemasaran	Peningkatan pendapatan masyarakat
Belanja pemerintah	Percepatan proyek strategis	Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal
Hilirisasi komoditas	Nilai tambah meningkat	Peningkatan daya saing daerah

3.2 PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Semester I Tahun 2026 yang menunjukkan adanya perubahan pada beberapa asumsi dasar ekonomi daerah dibandingkan dengan asumsi yang digunakan pada saat penyusunan RKPD Tahun 2026. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kondisi ekonomi nasional dan daerah, kebijakan fiskal Pemerintah Pusat, perubahan kemampuan keuangan daerah, serta capaian pelaksanaan program pembangunan selama Semester I.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Barito Kuala pada Semester I Tahun 2026 berkembang lebih baik dibandingkan proyeksi awal. Hal tersebut didukung oleh meningkatnya produksi sektor pertanian sebagai sektor basis daerah, membaiknya aktivitas perdagangan dan jasa, meningkatnya investasi pada sektor konstruksi dan industri pengolahan, serta mulai meningkatnya realisasi pembangunan infrastruktur pada Semester II.

Meskipun demikian, kondisi fiskal daerah mengalami tekanan akibat penyesuaian Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat serta penyesuaian proyeksi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan realisasi Semester I. Kondisi tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah agar tetap menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan sampai akhir Tahun Anggaran 2026.

Perbandingan asumsi makro antara RKPD Murni dan Perubahan RKPD disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.4 Proyeksi R-APBD pada Perubahan RKPD

REKENING	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	Proyeksi R-APBDP 2026	KETERANGAN (TAMBAH/KURANG)
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**135.005.388.190,53**	**488.768.858.590,00**	**148.942.436.452,00**	**-339.826.422.138,00**
Pajak Daerah	58.349.464.853,00	93.108.175.325,00	67.050.000.000,00	-26.058.175.325,00
Retribusi Daerah	5.925.507.107,00	284.157.156.000,00	13.760.426.000,00	-270.396.730.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.050.047.152,00	12.080.814.259,00	11.010.326.168,00	-1.070.488.091,00
Lain-lain PAD yang Sah	60.680.369.078,53	99.422.713.006,00	57.121.684.284,00	-42.301.028.722,00
PENDAPATAN TRANSFER	**1.583.197.274.779,00**	**1.287.723.901.000,00**	**1.287.723.901.000,00**	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1.467.231.251.248,00	1.190.178.901.000,00	1.190.178.901.000,00	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	115.966.023.531,00	97.545.000.000,00	97.545.000.000,00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**45.456.668.315,00**	**8.653.652.000,00**	**13.950.404.000,00**	**5.296.752.000,00**
Pendapatan Hibah				
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.456.668.315,00	8.653.652.000	13.950.404.000	5.296.752.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	**1.763.659.331.284,53**	**1.785.146.411.590,00**	**1.450.616.741.452,00**	-334.529.670.138,00
BELANJA				
BELANJA OPERASI	**1.201.112.915.566,55**	**1.339.794.113.245,00**	**1.207.324.431.340,00**	**-132.469.681.905,00**
Belanja Pegawai	751.250.372.759,00	794.662.698.340,00	757.606.717.481,00	-37.055.980.859,00
Belanja Barang dan Jasa	397.006.262.950,55	461.110.935.921,00	*380.531.661.659,00*	-80.579.274.262,00
Belanja Hibah	48.933.424.354,00	83.640.330.984,00	*68.786.052.200,00*	-14.854.278.784,00
Belanja Bantuan Sosial	3.922.855.503,00	380.148.000,00	*400.000.000,00*	19.852.000,00
BELANJA MODAL	**283.467.980.075,00**	**357.067.640.712,00**	**214.365.516.353,00**	**-142.702.124.359,00**

Belanja Modal Tanah	2.907.548.340	2.937.352.853	291.004.199	-2.646.348.654,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.636.683.235	50.563.386.409	28.289.098.398	-22.274.288.011,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.442.359.320	128.642.743.398	62.955.716.216	-65.687.027.182,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144.945.475.856	169.759.076.362	119.052.629.540	-50.706.446.822,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	396.579.000	1.181.579.000	933.568.000	-248.011.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	3.282.700.000	3.983.502.690	2.843.500.000	-1.140.002.690,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**2.382.325.900,00**	**10.000.000.000**	**5.000.000.000**	**-5.000.000.000,00**
Belanja Tidak Terduga	2.382.325.900,00	10.000.000.000	5.000.000.000	-5.000.000.000,00
BELANJA TRANSFER	**228.940.314.866,00**	**278.284.657.633**	**264.908.353.259**	**-13.376.304.374,00**
Belanja Bagi Hasil	6.823.810.137	6.455.087.233	6.427.497.196	-27.590.037,00
Belanja Bantuan Keuangan	252.770.702.200	271.829.570.400	258.480.856.063	-13.348.714.337,00
Jumlah Belanja	**1.715.903.536.407,55**	**1.985.146.411.590,00**	**1.686.598.300.952,00**	**-298.548.110.638,00**
Total Surplus/(Defisit)	**47.755.794.876,98**	**-200.000.000.000,00**	**-235.981.559.500,00**	
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**194.598.438.289,53**	**208.000.000.000,00**	**244.418.377.047,00**	**36.418.377.047,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	186.598.438.289,53	200.000.000.000,00	236.418.377.047,00	36.418.377.047,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**8.000.000.000**	**8.000.000.000**	**0,00**
Penyertaan Modal Daerah				0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	0,00
Pembiayaan Netto		**200.000.000.000,00**	**236.418.377.047,00**	**36.418.377.047,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**242.354.233.166,51**	**0**		

Berdasarkan perkembangan tersebut, perubahan asumsi ekonomi tidak mengubah arah pembangunan daerah, namun menjadi dasar penyesuaian kebijakan fiskal dan pengalokasian anggaran agar target pembangunan tetap dapat dicapai secara optimal.

Perubahan kerangka ekonomi daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 meliputi:

1. perkembangan pertumbuhan ekonomi;
2. perubahan struktur ekonomi daerah;
3. perkembangan inflasi;
4. perkembangan kemiskinan;
5. perkembangan ketenagakerjaan;
6. perkembangan investasi;
7. perkembangan pendapatan per kapita;
8. prospek ekonomi Semester II Tahun 2026.

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa selama periode tertentu. Bagi Kabupaten Barito Kuala, pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencerminkan peningkatan aktivitas produksi, tetapi juga menunjukkan keberhasilan pembangunan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan berusaha, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan perkembangan beberapa tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap. Setelah mengalami perlambatan pada masa pandemi, perekonomian daerah kembali tumbuh secara positif seiring meningkatnya aktivitas pertanian, perdagangan, konstruksi, dan jasa.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Barito Kuala semakin mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi nasional. Namun demikian, dominasi sektor primer menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi masih sangat dipengaruhi oleh produktivitas pertanian, kondisi cuaca, serta fluktuasi harga komoditas.

Tabel 3.5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2021	3,17%

2022	3,59%
2023	4,07%
2024	5,01%
2025	5,27%
Target RKPD 2026	5,20%

Analisis Tren

Selama periode 2021–2025, pertumbuhan ekonomi meningkat secara konsisten. Kenaikan tersebut didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pertanian, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan sektor perdagangan, serta meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pembangunan mulai memberikan hasil yang positif. Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih didominasi oleh sektor primer sehingga ketahanannya terhadap guncangan eksternal relatif terbatas.

Faktor Pendorong

Beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi sampai Semester I Tahun 2026 antara lain:

- meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan;
- pembangunan jalan dan infrastruktur dasar;
- meningkatnya aktivitas perdagangan;
- bertambahnya investasi pada sektor jasa dan perdagangan;
- meningkatnya konsumsi masyarakat;
- berjalannya program ketahanan pangan nasional;
- pembangunan kawasan permukiman.

Faktor Penghambat

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi masih menghadapi beberapa kendala, yaitu:

- banjir pada beberapa kawasan pertanian;
- fluktuasi harga gabah dan komoditas perkebunan;
- kenaikan harga pupuk dan sarana produksi;
- keterlambatan realisasi belanja modal;

- rendahnya nilai tambah produk lokal;
- belum berkembangnya industri pengolahan;
- investasi yang masih terkonsentrasi pada sektor tertentu.

Dampak terhadap Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi yang stabil memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan konsumsi rumah tangga, dan penguatan aktivitas perdagangan. Namun apabila tidak diikuti oleh pemerataan manfaat pembangunan, pertumbuhan ekonomi belum tentu mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan.

Kebijakan Semester II

Untuk menjaga pencapaian target pertumbuhan ekonomi Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengarahkan kebijakan pada:

- percepatan realisasi belanja modal;
- peningkatan produktivitas pertanian;
- pengembangan hilirisasi komoditas unggulan;
- peningkatan investasi swasta;
- penguatan UMKM;
- peningkatan konektivitas kawasan produksi;
- digitalisasi perdagangan dan pemasaran.

3.2.2 Struktur Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kondisi tersebut sesuai dengan karakteristik wilayah yang sebagian besar merupakan kawasan rawa pasang surut dengan aktivitas utama masyarakat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Meskipun demikian, perkembangan beberapa tahun terakhir menunjukkan mulai meningkatnya kontribusi sektor konstruksi, perdagangan, industri pengolahan, transportasi, serta jasa lainnya.

Diversifikasi struktur ekonomi tersebut menjadi indikator positif karena dapat meningkatkan ketahanan ekonomi daerah terhadap guncangan pada sektor primer.

Tabel 3.6 Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Tahun 2025

Lapangan Usaha	Kontribusi
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	26,65%
Konstruksi	14,70%
Industri Pengolahan	14,06%
Perdagangan Besar dan Eceran	13,77%
Administrasi Pemerintahan	7,28%
Pendidikan	6,14%
Real Estate	3,94%
Transportasi	3,57%
Akomodasi dan Makan Minum	2,64%
Informasi dan Komunikasi	2,24%
Keuangan	1,81%
Kesehatan	1,63%
Lainnya	1,57%

Analisis Struktur Ekonomi

Kontribusi sektor pertanian yang mencapai lebih dari seperempat PDRB menunjukkan bahwa sektor tersebut masih menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Barito Kuala. Di satu sisi kondisi ini merupakan kekuatan karena daerah memiliki keunggulan komparatif pada sektor pangan. Namun di sisi lain, ketergantungan yang tinggi terhadap sektor primer menyebabkan perekonomian daerah rentan terhadap perubahan iklim, banjir, dan fluktuasi harga komoditas.

Kontribusi sektor konstruksi yang relatif besar menunjukkan meningkatnya pembangunan infrastruktur pemerintah. Hal ini diharapkan mampu memberikan efek berganda terhadap sektor perdagangan, industri, jasa, dan investasi.

Sementara itu, industri pengolahan telah memberikan kontribusi yang cukup besar, tetapi sebagian besar masih berupa pengolahan sederhana. Hilirisasi produk pertanian dan perikanan masih perlu diperkuat agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat lokal.

Permasalahan Struktur Ekonomi

Permasalahan utama yang masih dihadapi antara lain:

- dominasi sektor primer;

- nilai tambah produk masih rendah;
- hilirisasi belum berkembang optimal;
- keterbatasan kawasan industri;
- produktivitas UMKM belum merata;
- keterbatasan akses pasar modern;
- infrastruktur logistik belum sepenuhnya memadai.

Strategi Penguatan Struktur Ekonomi

Perubahan RKPD Tahun 2026 mengarahkan transformasi struktur ekonomi melalui:

1. pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan;
2. penguatan sentra UMKM;
3. pengembangan kawasan ekonomi lokal;
4. peningkatan investasi sektor pengolahan;
5. pembangunan infrastruktur logistik;
6. digitalisasi pemasaran produk daerah;
7. peningkatan kualitas SDM pelaku usaha;
8. penguatan kemitraan petani, nelayan, koperasi, dan industri.

3. Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang sangat memengaruhi stabilitas perekonomian daerah karena berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat, tingkat kemiskinan, biaya produksi, investasi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Inflasi yang terkendali mencerminkan kondisi ekonomi yang sehat, sedangkan inflasi yang tinggi berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Kabupaten Barito Kuala tidak memiliki perhitungan inflasi sendiri oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga perkembangan inflasi daerah mengacu pada **inflasi Kota Banjarmasin** sebagai kota acuan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kalimantan Selatan. Pola konsumsi masyarakat Kabupaten Barito Kuala memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Kota Banjarmasin karena sebagian besar distribusi barang kebutuhan pokok, jasa, dan komoditas perdagangan berasal dari wilayah tersebut.

Evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa inflasi masih berada pada kisaran yang terkendali. Namun demikian, tekanan inflasi masih terjadi pada kelompok **volatile food**,

terutama beras, cabai, bawang merah, telur ayam ras, minyak goreng, gula pasir, dan beberapa komoditas hortikultura yang dipengaruhi oleh musim panen, kondisi cuaca, serta distribusi barang.

Tabel 3.7 Evaluasi Perkembangan Inflasi Daerah Tahun 2026

Komponen	Kondisi Semester I	Risiko Semester II	Kebijakan
Volatile Food	Masih berfluktuasi	Tinggi	Penguatan ketahanan pangan
Administered Price	Relatif stabil	Sedang	Monitoring kebijakan pemerintah
Core Inflation	Stabil	Rendah	Menjaga daya beli masyarakat

Analisis Perkembangan Inflasi

Tekanan inflasi di Kabupaten Barito Kuala pada Semester I Tahun 2026 terutama berasal dari kenaikan harga pangan akibat perubahan musim, meningkatnya biaya distribusi, serta fluktuasi pasokan beberapa komoditas strategis. Karakteristik wilayah yang didominasi oleh kawasan rawa pasang surut menyebabkan produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh kondisi hidrologi dan cuaca.

Selain faktor produksi, distribusi barang juga dipengaruhi oleh kondisi jaringan jalan, transportasi sungai, serta akses menuju sentra perdagangan di Kota Banjarmasin. Gangguan terhadap jalur distribusi berpotensi meningkatkan biaya logistik sehingga berdampak pada kenaikan harga barang di tingkat konsumen.

Di sisi lain, inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bangunan dan jasa konstruksi yang berdampak terhadap biaya pembangunan infrastruktur pemerintah maupun investasi swasta.

Dampak terhadap Pembangunan

Inflasi yang meningkat akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin dan mengurangi konsumsi rumah tangga. Selain itu, kenaikan harga bahan bangunan juga dapat memengaruhi realisasi belanja modal pemerintah daerah karena nilai kontrak pekerjaan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan perencanaan awal.

Arah Kebijakan Semester II

Untuk menjaga stabilitas inflasi sampai akhir Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengarahkan kebijakan pada:

- penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
- peningkatan produksi pangan lokal;
- stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- operasi pasar pada komoditas strategis;
- kerja sama antar daerah dalam distribusi pangan;
- penguatan cadangan pangan pemerintah;
- pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok.

3.2.4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Penurunan kemiskinan merupakan salah satu sasaran utama pembangunan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Keberhasilan penurunan kemiskinan tidak hanya diukur dari berkurangnya persentase penduduk miskin, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, air minum, sanitasi, dan perumahan layak.

Evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Barito Kuala masih berada pada tren menurun. Namun demikian, laju penurunannya masih memerlukan percepatan agar target RKPD Tahun 2026 dapat tercapai.

Kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan adalah rumah tangga pada **Desil 1 dan Desil 2**, terutama yang bekerja pada sektor pertanian skala kecil, buruh harian, pekerja informal, serta masyarakat yang tinggal pada kawasan rawan banjir.

Tabel 3.8 Evaluasi Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala

Indikator	Target RKPD	Kondisi Semester I	Proyeksi Akhir Tahun
Persentase Penduduk Miskin	3,88%	Menurun	3,90–4,05%
Kemiskinan Ekstrem	Menurun	Menurun	Terus menurun
Rumah Tangga Desil 1–2	Menurun	Masih perlu intervensi	Prioritas penanganan

Analisis

Penurunan kemiskinan dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan masyarakat, efektivitas bantuan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Namun demikian, beberapa faktor masih menjadi penyebab kemiskinan, antara lain:

- produktivitas tenaga kerja yang masih rendah;
- ketergantungan terhadap sektor primer;
- kualitas rumah yang belum layak;
- keterbatasan akses sanitasi dan air minum;
- fluktuasi harga pangan;
- risiko banjir dan bencana.

Selain itu, hasil pemadanan data **P3KE**, **DTKS**, dan data kependudukan masih memerlukan penyempurnaan agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.

Dampak terhadap Pembangunan

Kemiskinan yang belum tertangani secara optimal akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia, meningkatkan risiko stunting, menghambat peningkatan IPM, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Arah Kebijakan Semester II

Penanganan kemiskinan diarahkan melalui:

- integrasi data P3KE, DTKS, dan data sektoral;
- penguatan program perlindungan sosial;
- pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
- peningkatan kualitas rumah layak huni;
- peningkatan akses air minum dan sanitasi;
- pengembangan UMKM;
- pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja.

3.2.5 Perkembangan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Peningkatan kesempatan kerja akan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

Evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Kuala masih berada pada kondisi yang relatif terkendali. Hal ini didukung oleh dominasi sektor pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meskipun sebagian besar masih bekerja pada sektor informal.

Tabel 3.9 Evaluasi Ketenagakerjaan Tahun 2026

Indikator	Target RKPD	Proyeksi
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,30%	3,10–3,30%
Kesempatan Kerja	Meningkat	Meningkat
Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkat	Meningkat

Analisis

Permasalahan utama ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Kuala meliputi:

- dominasi tenaga kerja informal;
- keterbatasan keterampilan sesuai kebutuhan industri;
- rendahnya produktivitas sebagian tenaga kerja;
- terbatasnya investasi padat karya;
- belum optimalnya keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Arah Kebijakan

Semester II diarahkan pada:

- pelatihan berbasis kompetensi;
- pengembangan wirausaha baru;
- penguatan UMKM;
- fasilitasi penempatan tenaga kerja;
- pengembangan industri padat karya;
- peningkatan keterampilan digital masyarakat.

3.2.6 Perkembangan Investasi Daerah

Investasi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Target investasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan kawasan permukiman.

Evaluasi Semester I menunjukkan bahwa realisasi investasi masih berada di bawah target tahunan. Hambatan utama meliputi kesiapan infrastruktur, kepastian tata ruang, promosi investasi, serta penyediaan lahan untuk kegiatan usaha.

Tabel 3.10 Evaluasi Investasi Tahun 2026

Indikator	Target RKPD	Proyeksi
Nilai Investasi	Rp3,40 triliun	Rp3,30–3,45 triliun
PMDN	Meningkat	Meningkat
PMA	Meningkat	Meningkat

Strategi

Pemerintah daerah akan:

- mempercepat pelayanan perizinan;
- mengembangkan proyek investasi siap ditawarkan;
- memperkuat promosi potensi daerah;
- meningkatkan kepastian tata ruang;
- membangun infrastruktur pendukung kawasan investasi;
- mendorong hilirisasi komoditas unggulan.

3.2.7 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata kemampuan ekonomi masyarakat. Peningkatan pendapatan per kapita menunjukkan meningkatnya produktivitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi Semester I menunjukkan bahwa pendapatan per kapita diperkirakan mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya aktivitas perdagangan. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya merata antarwilayah sehingga masih diperlukan kebijakan pemerataan pembangunan.

3.2.8 Prospek Perekonomian Semester II Tahun 2026

Dengan mempertimbangkan perkembangan Semester I, prospek ekonomi Kabupaten Barito Kuala pada Semester II Tahun 2026 masih cukup baik. Keberhasilan pencapaian target pembangunan akan sangat dipengaruhi oleh percepatan realisasi APBD, peningkatan

produktivitas sektor unggulan, penguatan investasi, stabilisasi harga pangan, serta pengendalian risiko banjir.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan mengarahkan kebijakan pembangunan Semester II pada:

1. percepatan pelaksanaan program prioritas;
2. penguatan ketahanan pangan;
3. peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi komoditas;
4. pengembangan investasi dan UMKM;
5. percepatan pembangunan infrastruktur strategis;
6. penguatan perlindungan sosial;
7. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
8. penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja.

3.3 Evaluasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan komponen utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan akan menentukan kapasitas fiskal, ruang fiskal, serta kemampuan membiayai program prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026, evaluasi pendapatan daerah dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan beberapa sumber informasi, yaitu:

1. target pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2026;
2. realisasi pendapatan sampai dengan Semester I Tahun 2026;
3. hasil evaluasi kinerja pengelolaan pendapatan oleh perangkat daerah;
4. proyeksi penerimaan sampai akhir Tahun 2026 berdasarkan potensi riil setiap objek pendapatan; dan
5. perubahan asumsi ekonomi serta kebijakan pemerintah yang memengaruhi penerimaan daerah.

Pendekatan tersebut bertujuan agar penyesuaian target pendapatan dalam Perubahan RKPD benar-benar mencerminkan kondisi riil dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun fiskal. Oleh karena itu, perubahan target pendapatan tidak hanya didasarkan pada

rendahnya realisasi Semester I, tetapi juga mempertimbangkan hasil telaah terhadap potensi masing-masing objek pendapatan yang dilakukan oleh perangkat daerah pengelola pendapatan.

Berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2026, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar **Rp1.785.146.411.590,00**. Sampai dengan Semester I Tahun 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai **Rp551.329.624.706,19** atau **30,88 persen** dari target tahunan. Capaian tersebut masih berada di bawah proporsi ideal Semester I, sehingga diperlukan langkah percepatan penerimaan pada Semester II sekaligus penyesuaian terhadap target yang tidak lagi realistis berdasarkan hasil evaluasi teknis.

Tabel 3.11 Evaluasi Pendapatan Daerah Semester I Tahun 2026

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Semester I (Rp)	Capaian (%)	Proyeksi Akhir Tahun	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	488.768.858.590	51.228.755.458,19	10,48	Disesuaikan	Perlu rasionalisasi sebagian target
Pendapatan Transfer	1.287.727.552.070	500.100.869.248,00	38,84	Sesuai alokasi	Bergantung jadwal penyaluran
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.650.000.930	0,00	0,00	Dievaluasi	Menyesuaikan kepastian penerimaan
Jumlah	**1.785.146.411.590**	**551.329.624.706,19**	**30,88**	**Disesuaikan**	Dasar Perubahan APBD

Analisis Pendapatan Daerah

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa struktur pendapatan Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh **pendapatan transfer**, sedangkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi sumber-sumber PAD yang memiliki potensi riil.

Evaluasi Semester I juga menunjukkan bahwa tidak seluruh target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2026 masih relevan dengan perkembangan kondisi lapangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melakukan penelaahan ulang terhadap seluruh target pendapatan melalui perangkat daerah pengelola pendapatan. Penelaahan tersebut menghasilkan usulan penyesuaian target pada beberapa objek pendapatan yang diperkirakan

tidak dapat terealisasi sampai akhir tahun, sekaligus mempertahankan target pada objek pendapatan yang masih memiliki potensi pencapaian tinggi.

Dengan demikian, Perubahan RKPD Tahun 2026 menggunakan pendekatan **evidence-based budgeting**, yaitu menyesuaikan target pendapatan berdasarkan realisasi Semester I, hasil evaluasi perangkat daerah, dan proyeksi penerimaan sampai akhir tahun.

3.3.1 Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator utama kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Pada Tahun 2026, target PAD ditetapkan sebesar **Rp488.768.858.590,00**, sedangkan realisasi sampai dengan Semester I baru mencapai **Rp51.228.755.458,19** atau **10,48 persen** dari target tahunan.

Rendahnya capaian tersebut terutama dipengaruhi oleh belum optimalnya realisasi beberapa jenis retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu, Perubahan RKPD tidak hanya mengarahkan peningkatan intensifikasi pemungutan, tetapi juga melakukan penyesuaian target terhadap objek pendapatan yang berdasarkan hasil evaluasi teknis dipandang tidak realistis.

3.3.2 Evaluasi Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan komponen terbesar dalam struktur pendapatan Kabupaten Barito Kuala. Pendapatan ini berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan transfer dianggarkan sebesar **Rp1.287.727.552.070,00** atau sekitar **72,14 persen** dari total pendapatan daerah. Besarnya proporsi tersebut menunjukkan bahwa struktur fiskal Kabupaten Barito Kuala masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap transfer pemerintah pusat sehingga perubahan kebijakan fiskal nasional akan berpengaruh langsung terhadap kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2026, pendapatan transfer telah terealisasi sebesar **Rp500.100.869.248,00** atau **38,84 persen** dari target tahunan. Persentase tersebut relatif sesuai dengan pola penyaluran dana transfer yang dilakukan secara bertahap sepanjang tahun anggaran, terutama Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3.12 Evaluasi Pendapatan Transfer Semester I Tahun 2026

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Semester I (Rp)	Capaian (%)	Proyeksi Akhir Tahun
Pendapatan Transfer	1.287.727.552.070	500.100.869.248,00	38,84	Meningkat sesuai jadwal penyaluran

Analisis Pendapatan Transfer

Hasil evaluasi Semester I menunjukkan bahwa realisasi pendapatan transfer masih mengikuti mekanisme penyaluran dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Sebagian besar dana transfer, khususnya Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Desa, dan beberapa jenis Dana Bagi Hasil, memang baru disalurkan setelah pemerintah daerah memenuhi persyaratan administrasi, pelaporan, serta capaian pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.

Dengan demikian, capaian Semester I yang belum mencapai 50 persen tidak sepenuhnya mencerminkan rendahnya kinerja pemerintah daerah, tetapi lebih disebabkan oleh mekanisme penyaluran dana yang bersifat bertahap (*phased disbursement*).

Di sisi lain, evaluasi juga menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pendapatan transfer masih cukup tinggi. Komposisi pendapatan Semester I memperlihatkan bahwa lebih dari **90 persen** realisasi pendapatan daerah masih berasal dari transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal Kabupaten Barito Kuala masih sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan transfer nasional.

Apabila terjadi penyesuaian alokasi dana transfer pada Semester II, maka akan berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat.

Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Transfer

Beberapa faktor yang memengaruhi realisasi pendapatan transfer Tahun 2026 antara lain:

1. kebijakan fiskal Pemerintah Pusat;
2. penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD);
3. ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi;

4. progres pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK;
5. realisasi penerimaan negara yang menjadi dasar Dana Bagi Hasil;
6. pemenuhan persyaratan administrasi penyaluran.

Permasalahan

Hasil evaluasi menunjukkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan pendapatan transfer, yaitu:

- masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer;
- adanya potensi keterlambatan penyaluran apabila persyaratan administrasi belum terpenuhi;
- perubahan kebijakan transfer pemerintah pusat yang dapat memengaruhi kapasitas fiskal daerah;
- keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menghambat penyaluran DAK.

Arah Kebijakan Semester II

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan transfer pada Semester II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan melaksanakan beberapa langkah strategis, yaitu:

1. mempercepat penyampaian laporan realisasi sebagai syarat penyaluran transfer;
2. meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, kementerian teknis, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
3. mempercepat pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK agar penyaluran tahap berikutnya tidak mengalami keterlambatan;
4. melakukan monitoring berkala terhadap perkembangan penyaluran transfer;
5. menyesuaikan proyeksi pendapatan apabila terdapat perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat.

Dengan strategi tersebut diharapkan seluruh pendapatan transfer yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun 2026 dapat direalisasikan secara optimal sehingga tetap mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

3.3.3 Evaluasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan komponen pendapatan yang berasal dari penerimaan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Meskipun kontribusinya relatif kecil terhadap total pendapatan daerah, komponen ini tetap memiliki peran dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Pada APBD Tahun Anggaran 2026, target lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar **Rp8.650.000.930,00**. Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, komponen ini **belum terealisasi**, sehingga tingkat capaian masih **0,00 persen**.

Tabel 3.13 Evaluasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Semester I (Rp)	Capaian (%)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.650.000.930	0,00	0,00

Analisis

Belum terealisasinya penerimaan pada kelompok ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan tersebut masih bergantung pada terpenuhinya persyaratan tertentu, seperti hibah, bantuan keuangan yang bersifat insidental, maupun penerimaan lain yang memiliki jadwal penyaluran berbeda dengan pendapatan reguler.

Oleh karena itu, pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 dilakukan evaluasi kembali terhadap seluruh komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk memastikan bahwa target yang dipertahankan benar-benar memiliki dasar hukum dan kepastian penerimaan sampai akhir tahun anggaran.

Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap setiap objek pendapatan agar tidak terjadi penganggaran yang terlalu optimistis sehingga dapat memengaruhi keseimbangan fiskal daerah.

3.3.4 Kesimpulan Evaluasi Pendapatan Daerah

Perubahan pendapatan daerah dilakukan berdasarkan perkembangan kebijakan fiskal nasional, hasil evaluasi realisasi Semester I Tahun 2026, serta penyesuaian proyeksi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Evaluasi Semester I menunjukkan bahwa beberapa komponen pendapatan mengalami perubahan, terutama pada kelompok Pendapatan Transfer yang dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penyesuaian berdasarkan capaian riil penerimaan sampai Semester I.

Tabel 3.14 Perubahan Pendapatan Daerah

Uraian	RKPD Murni	Perubahan	Selisih	%
Pendapatan Daerah	Rp1.785,00 Miliar	Rp1.449,07 Miliar	-Rp335,93 Miliar	-18,82

Penurunan pendapatan daerah sebesar sekitar **18,82 persen** menunjukkan adanya penyesuaian kapasitas fiskal daerah. Penyesuaian ini terutama disebabkan oleh berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat serta penyesuaian proyeksi PAD berdasarkan realisasi Semester I.

Walaupun terjadi penurunan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tetap mempertahankan pendanaan pada program prioritas pembangunan, khususnya pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur strategis, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 mengarahkan kebijakan pendapatan pada tiga fokus utama, yaitu:

1. **optimalisasi Pendapatan Asli Daerah** melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan yang potensial;
2. **penyesuaian target pendapatan** terhadap objek yang berdasarkan hasil evaluasi Semester I dipandang tidak realistis, sehingga target pendapatan lebih kredibel dan dapat dicapai; serta
3. **penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi** untuk memastikan kelancaran penyaluran pendapatan transfer.

Dengan pendekatan tersebut, perubahan target pendapatan dalam Perubahan RKPD bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan merupakan hasil evaluasi kinerja Semester I, analisis potensi riil setiap objek pendapatan, dan proyeksi fiskal yang lebih akurat. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, menjaga keseimbangan fiskal daerah, serta menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026.

3.4 Evaluasi Belanja Daerah

Perubahan belanja daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan kemampuan pendanaan daerah serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Semester I Tahun 2026.

Penyesuaian belanja dilakukan dengan prinsip:

- ✓ mempertahankan belanja pelayanan dasar;
- ✓ mendukung pencapaian target RPJMD;
- ✓ mempercepat program prioritas Semester II;
- ✓ melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun;
- ✓ mengoptimalkan efisiensi belanja.

Tabel 3.15 Perubahan Belanja

Uraian	RKPD Murni	Perubahan	Selisih	%
Belanja Daerah	Rp1.985,15 Miliar	Rp1.688,33 Miliar	-Rp296,82 Miliar	-14,95

Penyesuaian belanja tidak hanya dilakukan karena penurunan pendapatan daerah, tetapi juga mempertimbangkan hasil evaluasi realisasi Semester I yang menunjukkan masih terdapat beberapa kegiatan dengan tingkat penyerapan rendah, perubahan jadwal pelaksanaan, efisiensi belanja, serta perubahan kebutuhan pembangunan daerah.

Belanja daerah diarahkan untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik, mempercepat pelaksanaan kegiatan prioritas yang dapat diselesaikan pada Semester II, serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran melalui optimalisasi program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

3.4.1 Evaluasi Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan kelompok belanja terbesar dalam struktur APBD Kabupaten Barito Kuala. Belanja ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum, administrasi pemerintahan, serta pelayanan publik lainnya.

Hasil evaluasi Semester I menunjukkan bahwa realisasi belanja operasi relatif lebih baik dibandingkan kelompok belanja lainnya. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, bantuan sosial, serta belanja operasional perangkat daerah dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun anggaran.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan operasional yang realisasinya belum optimal karena menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan, proses administrasi, dan pelaksanaan kontrak.

Permasalahan Belanja Operasi

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- ✓ keterlambatan penyelesaian dokumen administrasi;
- ✓ efisiensi belanja sesuai kebijakan nasional;
- ✓ perubahan kebutuhan operasional perangkat daerah;
- ✓ penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan.

Arah Kebijakan Semester II

Pada Semester II Tahun 2026, belanja operasi diarahkan untuk:

- ✓ menjamin keberlangsungan pelayanan dasar;
- ✓ mendukung pencapaian target indikator kinerja perangkat daerah;
- ✓ meningkatkan efisiensi belanja barang dan jasa;
- ✓ memprioritaskan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat;
- ✓ mengurangi belanja yang bersifat administratif dan kurang produktif.

3.4.2 Evaluasi Belanja Modal

Belanja modal merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan aset tetap.

Evaluasi Semester I menunjukkan bahwa realisasi belanja modal masih relatif rendah dibandingkan target tahunan. Kondisi tersebut merupakan pola yang umum terjadi karena sebagian besar pekerjaan fisik baru memasuki tahap pelaksanaan setelah proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta penandatanganan kontrak selesai.

Belanja modal memiliki peranan strategis karena memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi, penyediaan infrastruktur pelayanan dasar, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Faktor Penyebab Rendahnya Belanja Modal

Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi belanja modal antara lain:

- ✓ proses pengadaan barang dan jasa yang masih berlangsung;
- ✓ penyelesaian dokumen teknis dan perizinan;
- ✓ penyesuaian desain teknis pekerjaan;
- ✓ kondisi cuaca yang memengaruhi pelaksanaan konstruksi;

- ✓ keterlambatan penyaluran sumber pendanaan tertentu.

Dampak terhadap Pembangunan

Rendahnya realisasi belanja modal pada Semester I berpotensi:

- ✓ memperlambat pembangunan infrastruktur;
- ✓ mengurangi efek pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi;
- ✓ menunda peningkatan kualitas pelayanan publik;
- ✓ menurunkan penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi;
- ✓ meningkatkan risiko penumpukan pekerjaan pada akhir tahun.

Strategi Percepatan Semester II

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. percepatan pelaksanaan kontrak pekerjaan;
2. monitoring mingguan terhadap proyek strategis;
3. percepatan pembayaran termin pekerjaan;
4. penguatan pengendalian mutu pekerjaan;
5. percepatan penyelesaian hambatan administrasi;
6. evaluasi berkala terhadap progres fisik dan keuangan.

3.4.3 Evaluasi Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat darurat, mendesak, dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanganan bencana, keadaan darurat kesehatan, serta kebutuhan mendesak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, realisasi BTT masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa selama Semester I tidak terdapat kebutuhan belanja darurat yang signifikan. Namun demikian, mengingat Kabupaten Barito Kuala merupakan wilayah yang memiliki kerentanan terhadap banjir dan bencana hidrometeorologi, keberadaan BTT tetap dipertahankan sebagai bentuk kesiapsiagaan fiskal.

Arah Kebijakan

Belanja Tidak Terduga diarahkan untuk:

- penanganan bencana alam;
- penanganan keadaan darurat kesehatan;
- dukungan terhadap kejadian luar biasa;
- kebutuhan mendesak lainnya sesuai ketentuan.

3.4.4 Evaluasi Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan belanja yang dialokasikan kepada pemerintah desa dan penerima lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja ini memiliki peranan penting dalam mendukung pemerataan pembangunan desa serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Realisasi belanja transfer pada Semester I mengikuti jadwal penyaluran yang ditetapkan berdasarkan pemenuhan persyaratan administrasi oleh pemerintah desa.

Permasalahan

Beberapa kendala yang masih dihadapi meliputi:

- keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan;
- proses verifikasi administrasi;
- penyesuaian APBDes;
- penyelesaian laporan penggunaan dana tahap sebelumnya.

Strategi Semester II

Untuk mempercepat realisasi belanja transfer, pemerintah daerah akan:

- mempercepat proses verifikasi dokumen;
- meningkatkan pendampingan kepada pemerintah desa;
- memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah;
- melakukan monitoring berkala terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana.

3.4.5 Evaluasi Efektivitas Belanja Daerah

Selain mengevaluasi realisasi anggaran, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas belanja daerah berdasarkan ketercapaian output dan kontribusinya terhadap sasaran pembangunan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar belanja operasi telah mendukung keberlangsungan pelayanan dasar, sedangkan manfaat belanja modal baru akan dirasakan secara optimal setelah proyek fisik selesai pada Semester II.

Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja daerah, Perubahan RKPD Tahun 2026 mengarahkan kebijakan pada prinsip **money follows program** dan **spending better**, yaitu mengutamakan alokasi anggaran pada program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.4.6 Arah Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026

Berdasarkan hasil evaluasi Semester I, arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 difokuskan pada:

1. menjaga keberlanjutan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
2. mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur strategis yang telah berkontrak;
3. mengoptimalkan belanja yang mendukung pencapaian target RPJMD;
4. melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang produktif;
5. mengutamakan belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat;
6. memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi penumpukan realisasi pada akhir tahun;
7. menjaga keseimbangan fiskal melalui penyesuaian belanja terhadap kemampuan riil pendapatan daerah.

3.5 Evaluasi pembiayaan daerah

Perubahan pembiayaan daerah dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah setelah dilakukan penyesuaian terhadap kemampuan fiskal daerah.

Pembiayaan daerah berfungsi sebagai instrumen untuk menutup defisit anggaran sehingga kesinambungan pelaksanaan pembangunan tetap dapat terjaga.

Tabel 3.16 Perubahan Pembiayaan

Uraian	RKPD Murni	Perubahan	Selisih
Penerimaan Pembiayaan	Rp200,00 Miliar	Rp239,26 Miliar*	Rp39,26 Miliar
Pengeluaran	Rp0	Rp0	Rp0

Pembiayaan			
Pembiayaan Netto	Rp200,00 Miliar	Rp239,26 Miliar*	Rp39,26 Miliar

Perubahan pembiayaan dilakukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program prioritas tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Optimalisasi pembiayaan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah.

3.4 PROYEKSI KERANGKA KEUANGAN DAERAH SEMESTER II TAHUN 2026

3.4.1 Gambaran Umum

Proyeksi kerangka keuangan daerah merupakan perkiraan kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Semester I, perkembangan indikator makro ekonomi daerah, proyeksi penerimaan daerah, kemampuan penyerapan belanja, serta dinamika kebijakan fiskal pemerintah pusat.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026, proyeksi keuangan daerah memiliki fungsi strategis sebagai dasar dalam merumuskan perubahan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Proyeksi ini disusun menggunakan pendekatan **forward looking**, yaitu memperkirakan kondisi fiskal hingga akhir tahun berdasarkan perkembangan aktual Semester I dan kecenderungan realisasi pada Semester II.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kondisi fiskal Kabupaten Barito Kuala masih berada dalam kondisi yang terkendali, namun menghadapi beberapa tantangan, antara lain rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer, serta perlunya percepatan pelaksanaan belanja modal agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

Selain itu, hasil evaluasi perangkat daerah terhadap potensi pendapatan menunjukkan bahwa beberapa target penerimaan perlu disesuaikan berdasarkan potensi riil. Oleh karena itu, proyeksi kerangka keuangan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 tidak lagi sepenuhnya mengacu pada target APBD murni, tetapi telah mempertimbangkan hasil evaluasi Semester I dan proyeksi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran.

3.4.2 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada Semester II diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan Semester I seiring dengan meningkatnya realisasi pendapatan transfer, optimalisasi pemungutan pajak daerah, serta percepatan penerimaan dari berbagai objek pendapatan yang selama Semester I belum terealisasi secara optimal.

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi perangkat daerah, beberapa target PAD diperkirakan tidak dapat dicapai sepenuhnya sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan APBD. Penyesuaian tersebut dilakukan secara selektif dengan tetap mempertimbangkan potensi riil masing-masing objek pendapatan.

Faktor yang Mendorong Peningkatan Pendapatan

Beberapa faktor yang diperkirakan akan meningkatkan pendapatan daerah pada Semester II meliputi:

- penyaluran Dana Transfer Pemerintah Pusat tahap lanjutan;
- realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai progres kegiatan;
- peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- peningkatan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- percepatan pemanfaatan aset daerah;
- optimalisasi pelayanan publik yang menghasilkan retribusi.

Faktor Risiko Pendapatan

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menurunkan pencapaian target pendapatan, yaitu:

- perlambatan aktivitas ekonomi daerah;
- rendahnya realisasi beberapa jenis retribusi;
- perubahan kebijakan transfer pemerintah pusat;
- keterlambatan penyaluran dana transfer;
- potensi penurunan penerimaan pada objek pendapatan tertentu akibat perubahan kondisi usaha.

Tabel 3.17 Proyeksi Pendapatan Daerah Semester II Tahun 2026

Komponen	Semester I	Proyeksi Semester II	Proyeksi Akhir Tahun	Status
PAD	Meningkat	Perlu optimalisasi	Disesuaikan	Moderat
Pendapatan Transfer	Meningkat	Sesuai jadwal	Tinggi	Stabil
Lain-lain Pendapatan	Bertahap	Menyesuaikan	Terbatas	Rendah

3.4.3 Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah diproyeksikan mengalami percepatan yang signifikan pada Semester II seiring dengan selesainya proses pengadaan barang dan jasa serta dimulainya pelaksanaan sebagian besar pekerjaan fisik.

Berdasarkan pola pelaksanaan APBD beberapa tahun terakhir, sebagian besar realisasi belanja modal memang terjadi pada Semester II. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan memfokuskan Semester II sebagai periode percepatan pelaksanaan pembangunan agar target fisik maupun keuangan dapat dicapai sesuai dengan rencana.

Belanja pada Semester II akan diprioritaskan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD, khususnya:

- peningkatan kualitas pendidikan;
- peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- percepatan penurunan kemiskinan;
- penurunan prevalensi stunting;
- pembangunan infrastruktur dasar;
- pengendalian banjir;
- penguatan ketahanan pangan;
- pengembangan ekonomi lokal dan UMKM.

Tabel 3.18 Proyeksi Belanja Semester II Tahun 2026

Jenis Belanja	Kondisi Semester I	Proyeksi Semester II	Prioritas
Belanja Operasi	Stabil	Meningkat	Pelayanan dasar
Belanja Modal	Rendah	Meningkat signifikan	Infrastruktur
Belanja Tidak Terduga	Rendah	Fleksibel	Bencana
Belanja Transfer	Bertahap	Sesuai jadwal	Desa

3.4.4 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah pada Semester II diproyeksikan tetap mampu mendukung keseimbangan APBD melalui pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2025 dan pengelolaan pembiayaan netto secara hati-hati.

Apabila terjadi penyesuaian terhadap target pendapatan daerah, maka pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian terhadap belanja maupun pembiayaan agar keseimbangan fiskal tetap terjaga.

Pemanfaatan SiLPA akan diarahkan untuk:

- menutup defisit APBD;
- mendukung program prioritas yang belum teranggarkan;
- memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mendesak;
- menjaga likuiditas kas daerah.

3.4.5 Skenario Proyeksi Fiskal

Perubahan proyeksi pendapatan dan belanja menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Barito Kuala mengalami penyesuaian dibandingkan dengan kondisi pada saat penyusunan RKPD Murni.

Tabel 3.19 Analisis Fiskal

Komponen	RKPD Murni	Perubahan
Pendapatan	Rp1.785,00 Miliar	Rp1.449,07 Miliar
Belanja	Rp1.985,15 Miliar	Rp1.688,33 Miliar
Defisit	Rp200,15 Miliar	Rp239,26 Miliar*
Pembiayaan Netto	Rp200,15 Miliar	Rp239,26 Miliar*

Penurunan kapasitas pendapatan mengharuskan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melakukan penyesuaian belanja secara selektif dengan tetap mempertahankan pendanaan pada urusan wajib pelayanan dasar, program prioritas nasional, prioritas pembangunan daerah, serta program yang secara langsung mendukung pencapaian indikator RPJMD.

Strategi kebijakan fiskal pada Semester II diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran, mempercepat pelaksanaan kegiatan strategis, mengoptimalkan

penerimaan daerah yang masih dapat dicapai, serta memperkuat pengendalian dan monitoring pelaksanaan APBD agar target pembangunan daerah tetap dapat direalisasikan secara optimal.

3.4.6 Strategi Menjaga Kesehatan Fiskal Daerah

Dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal sampai akhir Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan strategi sebagai berikut:

1. mengoptimalkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan;
2. mempercepat penyampaian persyaratan penyaluran dana transfer agar tidak terjadi keterlambatan penerimaan;
3. melakukan penyesuaian target pendapatan berdasarkan hasil evaluasi Semester I dan proyeksi riil penerimaan;
4. memprioritaskan belanja yang mendukung pencapaian sasaran RPJMD dan pelayanan dasar;
5. mempercepat realisasi belanja modal melalui penguatan pengendalian pelaksanaan proyek strategis;
6. melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang produktif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik;
7. memperkuat sistem monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara berkala.

Proyeksi kerangka keuangan daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala masih memiliki kapasitas untuk melanjutkan pelaksanaan pembangunan sampai akhir Tahun Anggaran 2026. Namun demikian, keberhasilan pencapaian target pembangunan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan, mempercepat penyerapan belanja, menjaga keseimbangan pembiayaan, serta mengantisipasi berbagai risiko fiskal yang mungkin terjadi pada Semester II.

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Semester I, proyeksi pendapatan, dan dinamika kebijakan fiskal nasional, Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan bahwa program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tetap dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

3.5 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.5.1 Umum

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan pedoman dalam pengelolaan APBD Kabupaten Barito Kuala pada Semester II Tahun 2026 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan Semester I, perkembangan kondisi ekonomi daerah, perubahan asumsi fiskal, serta kebutuhan penyesuaian terhadap sasaran pembangunan daerah.

Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, ekonomis, dan berorientasi pada hasil (*result oriented budgeting*). Selain itu, kebijakan keuangan daerah juga diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*), memperkuat kualitas belanja (*quality spending*), meningkatkan kemandirian fiskal, serta memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Hasil evaluasi Semester I menunjukkan bahwa kondisi fiskal Kabupaten Barito Kuala masih berada dalam kondisi yang terkendali, namun terdapat beberapa tantangan yang memerlukan penyesuaian kebijakan, antara lain:

- realisasi Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah dibandingkan target APBD;
- ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer;
- perlunya percepatan penyerapan belanja modal;
- penyesuaian target beberapa objek pendapatan berdasarkan hasil evaluasi perangkat daerah;
- perlunya menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja sampai akhir tahun anggaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan keuangan daerah pada Semester II Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

3.5.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi seluruh sumber pendapatan yang sah, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan iklim investasi daerah.

Strategi yang ditempuh meliputi:

1. mengoptimalkan pemungutan pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak;
2. meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi daerah dengan memperbaiki kualitas pelayanan publik;
3. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang produktif;
4. meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui penguatan kinerja BUMD;
5. mempercepat digitalisasi sistem penerimaan daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi;
6. melakukan evaluasi terhadap target pendapatan yang berdasarkan hasil evaluasi Semester I dipandang tidak realistis sehingga target yang ditetapkan lebih kredibel dan dapat dicapai;
7. memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk memastikan kelancaran penyaluran dana transfer.

Penyesuaian target pendapatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perangkat daerah terhadap potensi riil masing-masing objek pendapatan. Dengan demikian, perubahan target bukan dimaksudkan untuk menurunkan kinerja pendapatan daerah, tetapi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan menjaga kredibilitas APBD.

3.5.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pengelolaan belanja pada Semester II Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- **money follows program**, yaitu mengutamakan pendanaan pada program prioritas yang memberikan dampak nyata terhadap masyarakat;
- **spending better**, yaitu meningkatkan kualitas belanja melalui efisiensi, efektivitas, dan penguatan hasil pembangunan;
- **value for money**, yaitu memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang maksimal.

Prioritas belanja diarahkan pada:

1. peningkatan kualitas pendidikan;
2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
3. percepatan penurunan kemiskinan dan stunting;
4. pembangunan infrastruktur dasar;
5. peningkatan ketahanan pangan;
6. pengendalian banjir dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
7. penguatan transformasi digital pemerintahan;
8. pengembangan ekonomi lokal dan UMKM.

Belanja yang belum memiliki kesiapan teknis, belum memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, atau tidak mendukung pencapaian indikator RPJMD menjadi prioritas untuk dievaluasi dalam Perubahan APBD.

3.5.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menjaga keseimbangan fiskal serta memastikan tersedianya sumber pembiayaan yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan daerah.

Strategi pembiayaan meliputi:

1. mengoptimalkan pemanfaatan SiLPA sesuai hasil audit LKPD Tahun Anggaran 2025;
2. menyesuaikan pembiayaan netto berdasarkan perkembangan pendapatan dan belanja;
3. mengevaluasi kembali rencana pengeluaran pembiayaan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya;
4. menjaga likuiditas kas daerah agar pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan.

Pengelolaan pembiayaan dilakukan secara hati-hati (*prudent fiscal management*) agar tidak menimbulkan beban fiskal pada tahun anggaran berikutnya.

3.5.5 Arah Kebijakan Pengelolaan Risiko Fiskal

Dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menerapkan pengelolaan risiko fiskal melalui identifikasi, mitigasi, dan pengendalian terhadap berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan APBD.

Risiko utama yang menjadi perhatian meliputi:

- tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah;
- perubahan kebijakan Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat;
- keterlambatan penyaluran dana transfer;
- keterlambatan pelaksanaan belanja modal;
- bencana banjir dan kondisi cuaca ekstrem;
- peningkatan inflasi yang memengaruhi biaya pembangunan;
- perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Mitigasi risiko dilakukan melalui pemantauan realisasi APBD secara berkala, evaluasi triwulanan terhadap pendapatan dan belanja, percepatan pelaksanaan kegiatan strategis, serta penyesuaian kebijakan fiskal apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi.

3.5.6 Arah Kebijakan Pendanaan Pembangunan

Selain mengandalkan APBD, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan pembangunan yang sah untuk memperluas kapasitas fiskal daerah.

Sumber pendanaan yang akan dioptimalkan meliputi:

- Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Dana Insentif Fiskal;
- Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi;
- Dana Desa;
- hibah pemerintah;
- tanggung jawab sosial perusahaan (CSR);
- Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek infrastruktur yang layak secara ekonomi dan fiskal;
- kerja sama dengan badan usaha dan lembaga pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diversifikasi sumber pendanaan tersebut bertujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan APBD.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Semester I Tahun 2026, proyeksi kondisi fiskal sampai akhir tahun, serta perkembangan lingkungan strategis, arah kebijakan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 difokuskan pada penguatan kapasitas fiskal,

peningkatan kualitas belanja, optimalisasi pembiayaan, dan pengelolaan risiko fiskal secara terintegrasi.

Perubahan RKPD Tahun 2026 juga mempertimbangkan berbagai risiko fiskal yang berpotensi memengaruhi pencapaian target pembangunan daerah sampai akhir tahun anggaran.

Beberapa risiko utama meliputi belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah, kemungkinan perubahan kebijakan transfer Pemerintah Pusat, rendahnya penyerapan belanja pada beberapa perangkat daerah, serta potensi gangguan pelaksanaan kegiatan akibat faktor cuaca dan kondisi lapangan.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan langkah-langkah berupa percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, monitoring realisasi fisik dan keuangan secara berkala, optimalisasi pendapatan daerah, pengendalian pelaksanaan program prioritas, serta penguatan koordinasi antara Bapperida, BKAD, TAPD, dan seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

3.6 Isu Strategis dan Permasalahan yang Memerlukan Dukungan

Pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Semester I Tahun 2026, perkembangan kondisi makro daerah, perubahan kebijakan nasional, serta penyesuaian kemampuan keuangan daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan pembangunan telah berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa isu strategis dan permasalahan yang memerlukan perhatian bersama agar target pembangunan daerah sampai akhir tahun anggaran dapat tercapai secara optimal.

Isu-isu tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian dokumen perencanaan, tetapi juga memerlukan sinergi lintas sektor, lintas pemerintahan, dan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

1. Kendala Fiskal Daerah

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah menurunnya kapasitas fiskal daerah sebagai akibat penyesuaian proyeksi pendapatan daerah. Penyesuaian tersebut dipengaruhi oleh perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

perubahan alokasi transfer dari Pemerintah Pusat, serta penyesuaian pendapatan transfer lainnya yang berdampak terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan daerah.

Kondisi tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melakukan penyesuaian terhadap struktur APBD melalui rasionalisasi belanja, penyesuaian pagu program, kegiatan, dan subkegiatan, serta pemusatan alokasi anggaran pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan dasar dan pencapaian target pembangunan daerah. Di sisi lain, ruang fiskal yang semakin terbatas juga membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan yang berkembang selama tahun berjalan.

Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan efektivitas belanja, penguatan Pendapatan Asli Daerah, serta dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat agar prioritas pembangunan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Kendala Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan

Hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja pembangunan menunjukkan bahwa beberapa indikator strategis masih memerlukan upaya percepatan agar target akhir Tahun 2026 dapat dicapai. Berdasarkan hasil reviu target kinerja dalam Perubahan RKPD, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan penyesuaian target maupun strategi pelaksanaan, antara lain:

- Usia Harapan Hidup (UHH);
- Indeks Pendidikan;
- Tingkat Kemiskinan;
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Pilar Infrastruktur;
- Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan;
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kapasitas fiskal daerah, dinamika kondisi ekonomi nasional, perubahan kebijakan pemerintah, serta perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pada beberapa sektor prioritas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta percepatan pelaksanaan program prioritas agar sasaran pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

3. Permasalahan Lintas Daerah

Selain tantangan internal daerah, terdapat beberapa isu pembangunan yang memiliki karakter lintas wilayah sehingga penyelesaiannya memerlukan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Permasalahan tersebut meliputi peningkatan konektivitas wilayah sebagai pendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang, penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan pangan daerah, pengendalian inflasi daerah melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pengendalian banjir dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan iklim investasi daerah, serta percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Karena sebagian isu tersebut melibatkan kewenangan lintas daerah dan lintas tingkat pemerintahan, penyelesaiannya memerlukan dukungan kebijakan, sinkronisasi program, dan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

4. Permasalahan yang Memerlukan Dukungan Pemerintah Provinsi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026, diperlukan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada beberapa aspek strategis pembangunan daerah, yaitu:

1. memperkuat sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sehingga pelaksanaan pembangunan dapat saling mendukung dan menghindari duplikasi program;
2. memberikan dukungan pendanaan terhadap program dan kegiatan prioritas daerah yang memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan provinsi maupun prioritas nasional;
3. mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi maupun infrastruktur yang memiliki fungsi pelayanan lintas wilayah guna meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan;
4. meningkatkan pembinaan, asistensi, dan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pengendalian pembangunan, evaluasi kinerja, serta implementasi reformasi birokrasi;

5. mendukung percepatan pencapaian indikator makro pembangunan daerah melalui sinergi kebijakan pembangunan provinsi dengan target pembangunan Kabupaten Barito Kuala;
6. memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi daerah melalui dukungan stabilisasi pasokan dan harga pangan, peningkatan distribusi komoditas strategis, serta penguatan peran TPID;
7. mendukung percepatan program penanggulangan kemiskinan melalui sinkronisasi program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesempatan kerja;
8. memperkuat program ketahanan pangan melalui dukungan terhadap pengembangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas komoditas unggulan, serta stabilisasi pasokan pangan daerah; dan
9. memperkuat implementasi Program Strategis Nasional, Asta Cita, Prioritas Nasional, dan Prioritas Pembangunan Provinsi agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1.1 Umum

Sasaran pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Perubahan RKPD tidak mengubah arah pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, namun melakukan penyesuaian strategi, program, kegiatan, target kinerja, dan pendanaan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Semester I Tahun 2026.

Penyusunan sasaran pembangunan pada Perubahan RKPD juga memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi daerah, dinamika fiskal, perubahan kebijakan nasional, serta hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro daerah. Dengan demikian, sasaran pembangunan yang ditetapkan tetap konsisten dengan visi pembangunan daerah, namun lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis yang terjadi selama Tahun 2026.

Hasil evaluasi Semester I menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pembangunan masih berada pada jalur pencapaian target, meskipun terdapat beberapa indikator yang memerlukan percepatan pada Semester II, antara lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah, percepatan realisasi belanja modal, penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, serta penguatan kualitas pelayanan dasar.

Oleh karena itu, sasaran pembangunan pada Semester II diarahkan untuk mempercepat pencapaian target RPJMD melalui penguatan kualitas belanja, peningkatan efektivitas program prioritas, optimalisasi pendapatan daerah, dan percepatan pelaksanaan kegiatan strategis.

Tabel 4.1 Perubahan Target Indikator Makro

Indikator	Target RKPD Awal	Target Perubahan	Status	Justifikasi Berdasarkan Evaluasi Semester I
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,10%	5,70%	Berubah	Produksi pertanian, perdagangan dan investasi menunjukkan perkembangan lebih baik sehingga proyeksi pertumbuhan meningkat.
Tingkat	3,88%	3,88%	Tetap	Evaluasi Semester I menunjukkan

Kemiskinan				target masih realistis sehingga dipertahankan.
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,38%	3,00%	Berubah	Penyerapan tenaga kerja lebih baik dibanding asumsi awal.
IPM	72,70	72,70	Tetap	Indikator pendidikan dan kesehatan masih sesuai target RPJMD.
Rasio Gini	0,242	0,242	Tetap	Distribusi pendapatan relatif stabil.
IKLH	66,62	66,57	Berubah	Penyesuaian berdasarkan hasil pengukuran kualitas lingkungan hidup Semester I.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Semester I Tahun 2026, dilakukan penelaahan terhadap seluruh indikator tujuan, sasaran dan indikator kinerja daerah. Penyesuaian target hanya dilakukan terhadap indikator yang mengalami perubahan asumsi pembangunan, perkembangan indikator makro, kemampuan keuangan daerah, maupun perubahan kebijakan pemerintah. Sementara indikator yang masih relevan dan realistis untuk dicapai tetap dipertahankan agar menjaga konsistensi dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

4.1.1 Pendekatan Tematik dalam Perubahan RKPD Tahun 2026

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 tetap menggunakan **pendekatan tematik** sebagaimana diamanatkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Melalui pendekatan ini, tema pembangunan daerah menjadi payung kebijakan yang mengintegrasikan sasaran pembangunan, prioritas daerah, program, kegiatan, subkegiatan, serta alokasi pendanaan sehingga seluruh intervensi pembangunan memiliki arah yang sama dalam mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Tema pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026, yaitu **"Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia"**, dipertahankan dalam Perubahan RKPD karena hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa isu kualitas sumber daya manusia masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan daerah. Meskipun **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** terus mengalami peningkatan dan ditargetkan mencapai **72,70** pada Tahun 2026, hasil evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat masih memerlukan percepatan agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk tetap menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fokus utama pelaksanaan pembangunan pada Semester II Tahun 2026.

Di sisi lain, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 juga menunjukkan adanya dinamika kemampuan keuangan daerah, perlunya percepatan penurunan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, pengendalian inflasi daerah, penurunan prevalensi stunting, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, tema pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan daerah yang saling terintegrasi sehingga setiap prioritas memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan hasil pembangunan.

Melalui pendekatan tematik tersebut, Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk memastikan bahwa penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, lokasi pelaksanaan, maupun pendanaan tidak dilakukan secara parsial, tetapi tetap mendukung tema pembangunan daerah secara utuh. Dengan demikian, perubahan kebijakan yang dilakukan pada Semester II Tahun 2026 merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sekaligus menjaga konsistensi pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Tabel 4.2 Keterkaitan Tema Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Tema Pembangunan Daerah	Isu Strategis Hasil Evaluasi Semester I Tahun 2026	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Intervensi Semester II Tahun 2026
Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas SDM, penurunan kemiskinan, percepatan stunting, ketahanan pangan, peningkatan investasi, percepatan infrastruktur, pengendalian inflasi, penguatan tata kelola	1. Peningkatan kualitas SDM 2. Penguatan ekonomi daerah 3. Pembangunan infrastruktur 4. Tata kelola pemerintahan 5. Ketahanan lingkungan	Pelayanan dasar, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, percepatan pembangunan infrastruktur strategis, penguatan SPBE, pengendalian banjir, serta optimalisasi pendanaan berdasarkan hasil evaluasi Semester I

4.1.2 Hubungan Sasaran RPJMD dengan Perubahan RKPD

Sasaran pembangunan daerah yang digunakan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 tetap mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Penyesuaian yang dilakukan hanya terbatas pada target tahunan, strategi pelaksanaan, indikator pendukung, dan alokasi pendanaan sesuai hasil evaluasi Semester I.

Hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Keterkaitan RPJMD dengan Perubahan RKPD Tahun 2026

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Sasaran RKPD 2026	Status
Meningkatkan kualitas SDM	Meningkatnya kualitas SDM	Dipertahankan	Tetap
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Dipertahankan	Percepatan Semester II
Menurunkan kemiskinan	Menurunnya kemiskinan	Dipertahankan	Penguatan intervensi
Meningkatkan kualitas infrastruktur	Meningkatnya konektivitas wilayah	Dipertahankan	Percepatan belanja modal
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas tata kelola	Dipertahankan	Penguatan reformasi birokrasi

Tabel 4.4 Tujuan Pembangunan daerah tahun 2026

No	Tujuan	Indikator	Target RKPD	Evaluasi Semester I	Proyeksi Akhir Tahun
1	terwujudnya Sumber daya manusia yang Unggul, Sehat, Religius, Berkarakter, dan Berbudaya Luhur yang kokoh	IPM	72,7	72,05	72,7
		indeks kerukunan umat beragama (IKUB)	75,26	74,76	74,76
2	Terwujudnya sektor ekonomi yang berdaya saing dan Inovatif	Persentase Penduduk Miskin	3,88	4,31	3,88
3	Meningkatkan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung IKN	pilar infrastruktur	58,2	54,42	58,2
		indeks ketahanan pangan	86,35	84,42	86,35
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Berorientasi Layanan	Indeks Reformasi Birokrasi	71,5	79,85	71,5
5	Meningkatnya kualitas llingkungan dan ketahanan daerah terhadap bencana	indeks resiko bencana	125,25	67,60	67,60
		indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)	66,57	71,44	66,57

1. Tujuan

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, Religius, Berkarakter, dan Berbudaya Luhur yang Kokoh

Indikator

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Analisis

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama pembangunan Kabupaten Barito Kuala. Hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** mencapai **72,05**, atau masih berada **0,65 poin** di bawah target RKPD sebesar **72,70**. Kondisi tersebut masih berada dalam koridor pencapaian karena IPM merupakan indikator tahunan yang dipengaruhi oleh perkembangan komponen pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran riil masyarakat yang akan dihitung secara komprehensif pada akhir tahun.

Sementara itu, **Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)** mencapai **74,76**, sedikit di bawah target sebesar **75,26**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kondisi kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Barito Kuala tetap kondusif dan harmonis, meskipun masih diperlukan penguatan pembinaan kehidupan beragama, toleransi, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat.

Secara umum, tujuan pembangunan ini menunjukkan perkembangan yang positif. Berbagai program peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, pembinaan keagamaan, serta pengembangan kebudayaan telah berjalan sesuai rencana. Namun demikian, peningkatan kualitas SDM masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan kualitas layanan dasar antarwilayah, percepatan penurunan stunting, peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan karakter generasi muda.

Arah Kebijakan Semester II

Kebijakan pembangunan pada Semester II diarahkan pada:

- mempercepat peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- memperkuat intervensi percepatan penurunan stunting;

- meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu;
- memperkuat moderasi beragama, toleransi, dan kerukunan umat beragama;
- melestarikan nilai budaya lokal sebagai bagian dari pembentukan karakter masyarakat;
- meningkatkan sinergi program pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. Tujuan

Terwujudnya Sektor Ekonomi yang Berdaya Saing dan Inovatif

Indikator

- Persentase Penduduk Miskin

Analisis

Penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi yang inklusif. Sampai dengan Semester I Tahun 2026, tingkat kemiskinan masih berada pada angka **4,31 persen**, sedangkan target RKPD ditetapkan sebesar **3,88 persen**. Dengan demikian masih terdapat deviasi sebesar **0,43 poin persentase** yang memerlukan percepatan intervensi pada Semester II.

Meskipun target belum tercapai, tren penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian, serta penciptaan kesempatan kerja telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat kelompok masyarakat rentan yang memerlukan intervensi lebih terarah, terutama pada wilayah perdesaan dan kawasan dengan akses pelayanan dasar yang masih terbatas.

Arah Kebijakan Semester II

Kebijakan pembangunan diarahkan untuk:

- memperkuat program penanggulangan kemiskinan berbasis DTSEN dan data kemiskinan daerah;

- meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan ekonomi desa;
- memperluas kesempatan kerja melalui investasi dan pembangunan sektor unggulan;
- meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, dan usaha mikro;
- meningkatkan akses pelayanan dasar bagi rumah tangga miskin;
- memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

3. Tujuan

Meningkatkan Konektivitas Infrastruktur Wilayah sebagai Pendukung IKN

Indikator

- Pilar Infrastruktur
- Indeks Ketahanan Pangan

Analisis

Pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendukung peran Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Evaluasi Semester I menunjukkan bahwa **Pilar Infrastruktur** mencapai **54,42**, masih berada di bawah target sebesar **58,20**. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih berlangsungnya pelaksanaan berbagai proyek strategis yang sebagian besar baru memasuki tahap konstruksi pada Semester I sehingga manfaatnya belum sepenuhnya tercermin pada indikator pembangunan.

Sementara itu, **Indeks Ketahanan Pangan** mencapai **84,42**, masih di bawah target **86,35**. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pangan daerah relatif terjaga, namun masih memerlukan penguatan pada aspek ketersediaan pangan, distribusi, stabilitas harga, dan peningkatan produktivitas pertanian.

Arah Kebijakan Semester II

Kebijakan diarahkan pada:

- mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis;

- meningkatkan kualitas jaringan jalan, jembatan, irigasi, dan infrastruktur pelayanan dasar;
- memperkuat konektivitas kawasan produksi menuju pusat distribusi;
- meningkatkan produktivitas pertanian melalui intensifikasi dan modernisasi pertanian;
- memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah dan stabilisasi harga pangan;
- mendukung pembangunan kawasan penyangga IKN melalui peningkatan infrastruktur wilayah.

4. Tujuan

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berorientasi Pelayanan

Indikator

- Indeks Reformasi Birokrasi

Analisis

Evaluasi Semester I menunjukkan bahwa **Indeks Reformasi Birokrasi** mencapai **79,85**, lebih tinggi dibandingkan target RKPD sebesar **71,50**. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Barito Kuala berjalan sangat baik, terutama dalam aspek tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan implementasi manajemen pemerintahan berbasis kinerja.

Capaian tersebut merupakan hasil dari penguatan sistem akuntabilitas kinerja, digitalisasi pelayanan publik, penyederhanaan proses bisnis, serta peningkatan kualitas pengawasan internal.

Walaupun target telah terlampaui, berbagai upaya perbaikan tetap perlu dilanjutkan untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Arah Kebijakan Semester II

Kebijakan diarahkan pada:

- memperkuat implementasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan;
- meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital;
- memperkuat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan dan manajemen risiko;

- memperkuat inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

5. Tujuan

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana

Indikator

- Indeks Risiko Bencana
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

Analisis

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Hasil evaluasi Semester I menunjukkan bahwa **Indeks Risiko Bencana** berada pada angka **67,60**, jauh lebih baik dibandingkan target maksimal sebesar **125,25**. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana semakin meningkat melalui penguatan mitigasi, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan pengurangan risiko bencana.

Demikian pula **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)** mencapai **71,44**, lebih tinggi dibandingkan target sebesar **66,57**. Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas lingkungan melalui pengendalian pencemaran, rehabilitasi kawasan, pengelolaan persampahan, dan konservasi sumber daya alam.

Walaupun kedua indikator telah menunjukkan capaian yang baik, Kabupaten Barito Kuala masih menghadapi tantangan berupa potensi banjir, perubahan iklim, degradasi lahan, serta tekanan terhadap kawasan lindung akibat aktivitas pembangunan.

Arah Kebijakan Semester II

Kebijakan pembangunan diarahkan pada:

- memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi;
- meningkatkan rehabilitasi kawasan kritis dan konservasi sumber daya alam;
- memperkuat pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- meningkatkan kualitas drainase dan infrastruktur pengendalian banjir;

- memperluas edukasi masyarakat mengenai adaptasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan;
- memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan tujuan pembangunan daerah berada pada arah yang mendukung pencapaian target RKPD. Tujuan pada aspek **tata kelola pemerintahan**, **kualitas lingkungan hidup**, dan **ketahanan daerah terhadap bencana** telah melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan lingkungan, dan pengurangan risiko bencana. Di sisi lain, tujuan pada aspek **kualitas sumber daya manusia**, **penurunan kemiskinan**, **konektivitas infrastruktur**, dan **ketahanan pangan** masih memerlukan percepatan pelaksanaan program pada Semester II. Oleh karena itu, Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas fiskal yang tersedia, mempercepat pelaksanaan program prioritas, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, serta memastikan bahwa seluruh intervensi pembangunan berorientasi pada pencapaian tujuan RPJMD secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

4.1.3 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Berdasarkan hasil evaluasi Semester I, sasaran pembangunan daerah pada Semester II Tahun 2026 tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD melalui lima sasaran utama pembangunan, yaitu:

Tabel 4.5 Sasaran Utama Pembangunan

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Capaian Semester I*	Proyeksi Akhir Tahun	SKPD Pengampu Utama	Status
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	**74,75**	72,85	73,20	Dinas Kesehatan	On Track
2	Meratanya kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	**63,20**	61,89	63,20	Dinas Pendidikan	On Track
3	Menguatnya nilai keagamaan dan karakter masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia	86,5	6,64	6,97	Bakesbangpol	penyesuaian perhitungan
4	Meningkatnya pemberdayaan	Indeks Kesejahteraan	72,50	56,03	59,60	Dinas Sosial	Perlu Penyesuaian

	dan kesejahteraan sosial Masyarakat	Sosial					target
5	menurunnya Tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	**3,88**	4,31	3,88	Multi Sektoral	Perlu Percepatan
6	Meningkatnya produktivitas PDRB sektor unggulan	Rasio PDRB Sektor Unggulan terhadap Total PDRB (%)	42,25	26,85	29,75	BPS	Perlu Penyesuaian target
7	Meningkatnya kewirausahaan, Investasi daerah dan Agro Industri yang inovatif	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	**37,00**	36,34	37,00	BPS	On Track
8	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja dalam Pembangunan Ekonomi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	**73,60**	71,98	72,30	Disnakertrans	On Track
9	Meningkatnya Inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	41	51,38	52,10	Bapperida	perbaikan target
10	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Pilar Infrastruktur	72	54,42	58,20	Dinas PUPR	Perlu Percepatan
11	Tercukupinya Kebutuhan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	4	5,58	5,26	DKPP	On Track
12	Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Laju Inflasi (%)	1,82	3,97	3,50	Setda (Ekosda)	Terkendali
13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	**73,50**	67,19	68,50	Bapperida, Inspektorat, Setda	Perlu Penguatan
14	Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	**3,7**	3,28	3,38	Diskominfo	Perlu Percepatan
15	Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks PEMDI	-	-	1,40	Diskominfo	On Track
16	Meningkatnya Akuntabilitas	Opini BPK	**WTP**	WTP	WTP	Inspektorat	On Track

	Keuangan Daerah						
17	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	**72,50**	78,27	79,40	BKPP	On Track
18	Terwujudnya Layanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	**4,42**	4,35	4,42	Setda Organisasi	On Track
19	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Survei Penilaian Integritas	**77,34**	78,85	78,86	Inspektorat	On Track
20	Meningkatnya Penguatan sistem mitigasi bencana	Tingkat Kesiapsiagaan Bencana (%)	**100**	100	100	BPBD	Tercapai
21	Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan	Status Lingkungan Hidup Daerah	**77**	71,44	72,60	DLH	Perlu Percepatan

Hasil evaluasi sampai dengan Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala memiliki tingkat pencapaian yang bervariasi. Beberapa indikator telah melampaui target, seperti Indeks Inovasi Daerah, Indeks Profesionalitas ASN, Survei Penilaian Integritas, opini BPK, dan kesiapsiagaan bencana. Namun, sejumlah indikator masih memiliki kesenjangan cukup besar terhadap target, terutama Indeks Harmoni Indonesia, Indeks Kesejahteraan Sosial, rasio PDRB sektor unggulan, Pilar Infrastruktur, Nilai SAKIP, Indeks SPBE, dan kualitas lingkungan hidup.

Sebagian capaian Semester I menggunakan data tahun terakhir karena indikator hanya dihitung atau dipublikasikan sekali dalam setahun. Oleh karena itu, analisis tidak hanya memperhatikan perbandingan angka, tetapi juga perkembangan program pendukung dan kemungkinan pencapaian sampai akhir tahun.

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Usia Harapan Hidup ditargetkan sebesar **74,75 tahun**, sedangkan capaian terakhir sebesar **72,85 tahun** dan diproyeksikan menjadi **73,20 tahun** pada akhir 2026. Proyeksi tersebut menunjukkan peningkatan sebesar **0,35 tahun** dibandingkan capaian Semester I, tetapi masih terdapat kesenjangan sekitar **1,55 tahun** terhadap target.

Peningkatan UHH didukung oleh penguatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan

cakupan jaminan kesehatan, serta perbaikan status gizi masyarakat. Namun, target 74,75 relatif tinggi dibandingkan posisi capaian terakhir sehingga status **"On Track" perlu dikaji kembali**. Berdasarkan proyeksi yang tersedia, indikator ini lebih tepat dikategorikan **"Perlu Percepatan"** atau **"Berpotensi Tidak Tercapai"**.

Fokus tindak lanjut diarahkan pada penguatan layanan promotif dan preventif, penurunan kematian ibu dan bayi, pengendalian penyakit tidak menular, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar, serta intervensi pada kecamatan dengan derajat kesehatan relatif rendah.

2. Meratanya Kualitas Pendidikan

Indeks Pendidikan ditargetkan sebesar **63,20**, dengan capaian terakhir **61,89** dan proyeksi akhir tahun **63,20**. Masih terdapat kesenjangan sebesar **1,31 poin**, tetapi berdasarkan proyeksi, target diperkirakan dapat dicapai.

Pencapaian indikator ini didukung oleh peningkatan akses pendidikan dasar, rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kompetensi guru, bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu, serta upaya pencegahan anak putus sekolah. Tantangan yang masih dihadapi meliputi kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah, distribusi tenaga pendidik, kondisi sarana pendidikan, dan keberlanjutan sekolah pada jenjang pendidikan menengah.

Status **"On Track"** dapat dipertahankan dengan catatan seluruh program prioritas pendidikan pada Semester II dapat diselesaikan tepat waktu dan diarahkan pada komponen pembentuk indeks.

3. Menguatnya Nilai Keagamaan dan Karakter Masyarakat

Indeks Harmoni Indonesia memiliki target **86,50**, sedangkan capaian Semester I tercatat **6,64** dan diproyeksikan menjadi **6,97**. Perbedaan skala yang sangat besar menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara target dan metode atau skala pengukuran capaian.

Angka target kemungkinan menggunakan skala 0–100, sementara realisasi menggunakan skala atau formulasi yang berbeda. Oleh karena itu, capaian tersebut belum dapat dibandingkan langsung dan tidak dapat digunakan untuk menilai keberhasilan sasaran sebelum dilakukan penyeragaman definisi operasional, rumus, sumber data, dan skala pengukuran.

Status **"Penyesuaian Perhitungan"** sudah tepat. Tindak lanjut utama bukan hanya meningkatkan program, tetapi terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi metadata indikator

bersama Bakesbangpol, Bapperida, dan sumber penilai. Setelah metode diseragamkan, target 2026 perlu dihitung kembali menggunakan baseline yang sebanding.

4. Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Indeks Kesejahteraan Sosial ditargetkan sebesar **72,50**, dengan capaian Semester I **56,03** dan proyeksi akhir tahun **59,60**. Meskipun diproyeksikan meningkat sebesar **3,57 poin**, hasil akhir masih berjarak **12,90 poin** dari target.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan sosial belum cukup kuat untuk mencapai target. Permasalahan dapat berkaitan dengan belum optimalnya cakupan rehabilitasi sosial, pemberdayaan kelompok rentan, perlindungan sosial adaptif, akurasi data penerima manfaat, serta integrasi penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Status **"Perlu Penyesuaian Target"** dapat diterima apabila hasil reviu membuktikan target awal tidak sesuai baseline atau kapasitas program. Namun, penyesuaian target harus didukung penjelasan metodologis dan tidak semata-mata dilakukan karena capaian rendah. Selain itu, Dinas Sosial perlu memperkuat pemutakhiran data, peningkatan cakupan pelayanan sosial, pemberdayaan keluarga rentan, dan koordinasi lintas sektor.

5. Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi **3,88 persen**, sedangkan capaian terakhir masih sebesar **4,31 persen**. Untuk mencapai target akhir tahun, diperlukan penurunan sebesar **0,43 poin persentase**.

Tren kemiskinan memang menunjukkan perbaikan, tetapi pencapaian target memerlukan intervensi lebih terarah terhadap rumah tangga miskin dan rentan. Penanganannya tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Sosial, karena dipengaruhi oleh kesempatan kerja, pendapatan petani, akses pangan, perumahan, sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Status **"Perlu Percepatan"** sudah tepat. Fokus Semester II perlu diarahkan pada konvergensi program berdasarkan DTSEN atau basis data resmi yang berlaku, pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, penghapusan kantong kemiskinan, serta pengendalian ketepatan sasaran bantuan.

6. Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan

Rasio PDRB sektor unggulan terhadap total PDRB ditargetkan sebesar **42,25 persen**, sedangkan capaian Semester I sebesar **26,85 persen** dan diproyeksikan menjadi **29,75 persen**. Walaupun terjadi peningkatan sekitar **2,90 poin persentase**, masih terdapat kesenjangan **12,50 poin persentase** terhadap target.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor unggulan belum berkembang sesuai target atau terdapat perbedaan penetapan cakupan sektor unggulan dalam perhitungan. Perlu dipastikan apakah sektor unggulan meliputi pertanian, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, perdagangan, atau gabungan sektor tertentu.

Status **"Perlu Penyesuaian Target"** harus didahului verifikasi rumus dan baseline. Selain itu, BPS lebih tepat ditempatkan sebagai **sumber data**, bukan SKPD pengampu utama. Pengampu kebijakan seharusnya perangkat daerah yang menangani pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, industri, investasi, dan perencanaan.

7. Meningkatnya Kewirausahaan, Investasi Daerah, dan Agroindustri yang Inovatif

PDRB per kapita ditargetkan sebesar **Rp37,00 juta**, dengan capaian Semester I **Rp36,34 juta** dan proyeksi akhir tahun **Rp37,00 juta**. Kesenjangan sebesar **Rp0,66 juta** diperkirakan dapat ditutup sampai akhir tahun.

Pencapaian indikator didukung oleh pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas sektor unggulan, investasi, konsumsi masyarakat, serta berkembangnya perdagangan dan jasa. Namun, kenaikan PDRB per kapita belum otomatis menunjukkan pemerataan kesejahteraan karena masih perlu dibaca bersama tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Status **"On Track"** dapat dipertahankan. Namun, seperti indikator sebelumnya, BPS merupakan penyedia data, sedangkan pengampu kebijakannya sebaiknya DPMPTSP, perangkat daerah ekonomi, pertanian, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UMKM, serta Bapperida.

8. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja dalam Pembangunan Ekonomi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ditargetkan sebesar **73,60 persen**, sedangkan capaian Semester I **71,98 persen** dan diproyeksikan menjadi **72,30 persen**. Proyeksi tersebut masih berada **1,30 poin persentase** di bawah target.

Walaupun terdapat perbaikan, angka proyeksi belum menunjukkan pencapaian penuh. Tantangan dapat berupa keterbatasan kesempatan kerja, ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar, rendahnya partisipasi kelompok perempuan dan usia produktif tertentu, serta dominasi pekerjaan informal.

Dengan angka yang tersedia, status **"On Track" perlu ditinjau kembali** menjadi **"Perlu Percepatan"**. Kebijakan perlu difokuskan pada pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, perluasan informasi pasar kerja, dan peningkatan partisipasi kelompok usia kerja yang belum aktif secara ekonomi.

9. Meningkatnya Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah ditargetkan sebesar **41**, sedangkan capaian Semester I telah mencapai **51,38** dan diproyeksikan menjadi **52,10**. Capaian tersebut telah melampaui target sebesar **10,38 poin** pada Semester I dan diperkirakan semakin meningkat sampai akhir tahun.

Kondisi ini menunjukkan berkembangnya inovasi perangkat daerah, peningkatan dokumentasi dan pelaporan inovasi, serta bertambahnya penerapan inovasi dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Status **"Perbaikan Target"** tepat apabila dimaksudkan sebagai peningkatan target agar lebih menantang dan sesuai capaian aktual. Namun, penyesuaian target perlu mempertimbangkan keberlanjutan, kualitas, kematangan, manfaat, dan replikasi inovasi, bukan hanya jumlah inovasi yang dilaporkan.

10. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Pilar Infrastruktur ditargetkan sebesar **72**, dengan capaian Semester I **54,42** dan proyeksi akhir tahun **58,20**. Proyeksi tersebut meningkat sebesar **3,78 poin**, tetapi masih berjarak **13,80 poin** dari target.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa peningkatan konektivitas, kualitas jalan, jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, perumahan, dan infrastruktur dasar belum cukup untuk mencapai target. Sebagian manfaat pembangunan fisik kemungkinan baru terlihat setelah pekerjaan selesai pada Semester II, tetapi proyeksi yang tersedia tetap jauh di bawah target.

Status **"Perlu Percepatan"** sudah tepat. Perlu dilakukan prioritisasi proyek yang berkontribusi langsung terhadap komponen pembentuk Pilar Infrastruktur, percepatan

pengadaan dan pekerjaan fisik, pengendalian kualitas konstruksi, serta koordinasi Dinas PUPR dengan Disperkim, Dinas Perhubungan, dan perangkat daerah terkait.

Perlu pula diklarifikasi perbedaan target ini dengan tabel tujuan pembangunan sebelumnya yang menggunakan target Pilar Infrastruktur sebesar **58,20**. Konsistensi target RPJMD dan RKPD harus dipastikan.

11. Tercukupinya Kebutuhan Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ditargetkan sebesar **4 persen**, sedangkan capaian Semester I **5,58 persen** dan diproyeksikan turun menjadi **5,26 persen**. Karena indikator ini bersifat negatif, semakin rendah nilainya semakin baik.

Walaupun proyeksi menunjukkan perbaikan sebesar **0,32 poin persentase**, angka akhir masih **1,26 poin persentase di atas target**. Dengan demikian, secara matematis indikator belum berada pada jalur pencapaian target.

Status **"On Track" sebaiknya diubah menjadi "Perlu Percepatan"**. Tindak lanjut perlu diarahkan pada peningkatan akses pangan rumah tangga rentan, stabilisasi harga, diversifikasi konsumsi pangan, penguatan cadangan pangan, penanganan wilayah rawan pangan, serta intervensi gizi pada keluarga berisiko.

12. Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat

Laju inflasi ditargetkan sebesar **1,82 persen**, sedangkan capaian Semester I mencapai **3,97 persen** dan diproyeksikan menjadi **3,50 persen**. Proyeksi menunjukkan penurunan, tetapi masih lebih tinggi **1,68 poin persentase** dibandingkan target.

Status **"Terkendali"** hanya dapat dipertahankan apabila angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah atau menggunakan indikator wilayah rujukan yang sah. Apabila target RKPD merupakan angka tunggal 1,82 persen, maka indikator secara teknis belum tercapai.

Upaya pengendalian perlu diarahkan pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif, pelaksanaan operasi pasar, penguatan cadangan pangan, dan pengendalian komoditas penyumbang inflasi utama melalui TPID.

13. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Nilai SAKIP ditargetkan sebesar **73,50**, sedangkan capaian Semester I sebesar **67,19** dan diproyeksikan mencapai **68,50**. Terdapat peningkatan sebesar **1,31 poin**, tetapi proyeksi masih berjarak **5 poin** dari target.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, serta keterkaitan antara kinerja dan anggaran masih perlu diperkuat. Perbaikan tidak cukup hanya pada dokumen, tetapi harus memastikan indikator berorientasi hasil, target realistis, cascading kinerja jelas, dan evaluasi digunakan untuk perbaikan program.

Status **"Perlu Penguatan"** sudah tepat. Tindak lanjut perlu difokuskan pada penyelarasan RPJMD–Renstra–RKPD–Renja–PK, penyempurnaan pohon kinerja, kualitas indikator outcome, evaluasi program lintas perangkat daerah, serta peningkatan peran reviu internal oleh Inspektorat.

14. Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik – Indeks SPBE

Indeks SPBE ditargetkan sebesar **3,70**, sedangkan capaian Semester I sebesar **3,28** dan diproyeksikan menjadi **3,38**. Proyeksi meningkat sebesar **0,10 poin**, tetapi masih berada **0,32 poin** di bawah target.

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya peningkatan pada aspek kebijakan internal, tata kelola, manajemen SPBE, layanan administrasi pemerintahan, layanan publik digital, keamanan informasi, integrasi aplikasi, dan pemanfaatan arsitektur SPBE.

Status **"Perlu Percepatan"** sudah sesuai. Diskominfo perlu memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah karena pencapaian SPBE tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah.

15. Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik – Indeks PEMDI

Indeks PEMDI belum memiliki target dan capaian Semester I, tetapi diproyeksikan sebesar **1,40** pada akhir tahun. Ketiadaan target menyebabkan status keberhasilan belum dapat dinilai secara objektif.

Status **"On Track"** belum memiliki dasar pembanding yang memadai. Pemerintah daerah perlu menetapkan baseline, definisi operasional, target 2026, sumber data, metode pengukuran, dan perangkat daerah penanggung jawab. Apabila indikator baru mulai diukur

pada 2026, angka 1,40 dapat dicatat sebagai baseline, bukan langsung sebagai capaian terhadap target.

16. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

Target opini BPK adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**, dan capaian Semester I maupun proyeksi akhir tahun tetap **WTP**. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar pemeriksaan.

Status **"On Track"** sudah sesuai. Meskipun demikian, opini WTP harus diikuti peningkatan kualitas sistem pengendalian intern, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, penatausahaan aset, pengendalian belanja, serta kepatuhan terhadap peraturan.

17. Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Indeks Profesionalitas ASN ditargetkan sebesar **72,50**, sedangkan capaian Semester I telah mencapai **78,27** dan diproyeksikan menjadi **79,40**. Capaian ini telah melampaui target sebesar **5,77 poin** dan diperkirakan terus meningkat.

Pencapaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN. Status **"On Track"** sudah tepat, bahkan dapat dikategorikan **"Tercapai/Melampaui Target"**.

Fokus selanjutnya diarahkan pada pemetaan kompetensi, pengembangan karier berbasis merit, pemenuhan kesenjangan kompetensi, penguatan manajemen talenta, dan pemerataan ASN sesuai kebutuhan organisasi.

18. Terwujudnya Layanan Publik Prima

Indeks Pelayanan Publik ditargetkan sebesar **4,42**, dengan capaian Semester I **4,35** dan proyeksi akhir tahun **4,42**. Kesenjangan sebesar **0,07 poin** diperkirakan dapat ditutup sampai akhir tahun.

Status **"On Track"** sudah sesuai. Perbaikan perlu difokuskan pada standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, kompetensi pelaksana, sarana layanan, pelayanan inklusif, survei kepuasan masyarakat, dan pengembangan inovasi pelayanan.

19. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Indeks Survei Penilaian Integritas ditargetkan sebesar **77,34**, sedangkan capaian Semester I telah mencapai **78,85** dan diproyeksikan sebesar **78,86**. Capaian tersebut melampaui target sebesar **1,51 poin**.

Hal ini menunjukkan persepsi integritas organisasi, pencegahan korupsi, dan pengendalian risiko integritas mengalami perbaikan. Status **"On Track"** sudah tepat dan dapat dinaikkan menjadi **"Tercapai"** apabila metodologi dan periode penilaian telah final.

Upaya perbaikan tetap diperlukan pada area rawan, seperti pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, promosi dan mutasi pegawai, pelayanan perizinan, serta pengelolaan benturan kepentingan.

20. Meningkatnya Penguatan Sistem Mitigasi Bencana

Tingkat Kesiapsiagaan Bencana ditargetkan **100 persen**, dan capaian Semester I serta proyeksi akhir tahun telah mencapai **100 persen**. Dengan demikian, target telah tercapai.

Capaian tersebut menunjukkan kesiapan kelembagaan, personel, prosedur, sarana, dan koordinasi penanggulangan bencana telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun, nilai 100 persen perlu didukung bukti pengukuran yang jelas agar tidak hanya mencerminkan kelengkapan administratif.

Status **"Tercapai"** sudah tepat. Fokus selanjutnya adalah menjaga kesiapsiagaan, meningkatkan kualitas simulasi, memperbarui peta risiko, memperkuat desa tangguh bencana, dan memastikan sistem peringatan dini berfungsi.

21. Terwujudnya Kelestarian Fungsi Lingkungan

Status Lingkungan Hidup Daerah ditargetkan sebesar **77**, dengan capaian Semester I **71,44** dan proyeksi akhir tahun **72,60**. Meskipun diproyeksikan meningkat sebesar **1,16 poin**, masih terdapat kesenjangan **4,40 poin** terhadap target.

Capaian dipengaruhi oleh kualitas air, udara, tutupan lahan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan, dan kepatuhan usaha terhadap ketentuan lingkungan. Tantangan Kabupaten Barito Kuala juga mencakup banjir, perubahan penggunaan lahan, kebakaran lahan, dan keterbatasan layanan pengelolaan sampah.

Status **“Perlu Percepatan”** sudah tepat. Perlu dipastikan pula apakah indikator yang dimaksud adalah **Status Lingkungan Hidup Daerah**, **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**, atau indikator lain, karena capaian 71,44 sebelumnya digunakan sebagai nilai IKLHD. Nama, rumus, target, dan sumber data harus diseragamkan.

Berdasarkan perbandingan target dengan proyeksi akhir tahun, indikator dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Diproyeksikan tercapai atau melampaui target: Indeks Pendidikan, PDRB per kapita, Indeks Inovasi Daerah, opini BPK, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Pelayanan Publik, Survei Penilaian Integritas, dan Tingkat Kesiapsiagaan Bencana.

Masih memerlukan percepatan: UHH, tingkat kemiskinan, TPAK, Pilar Infrastruktur, ketidakcukupan konsumsi pangan, Nilai SAKIP, Indeks SPBE, dan kualitas lingkungan hidup.

Memerlukan penyesuaian atau klarifikasi metodologi: Indeks Harmoni Indonesia, Indeks Kesejahteraan Sosial, rasio PDRB sektor unggulan, Indeks PEMDI, dan laju inflasi.

Beberapa status pada tabel awal perlu dikoreksi agar konsisten dengan proyeksi numeriknya. UHH, TPAK, dan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan belum tepat dinyatakan **On Track** karena proyeksi akhir tahun masih belum mencapai target. Sebaliknya, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Profesionalitas ASN, Survei Penilaian Integritas, dan kesiapsiagaan bencana telah mencapai atau melampaui target sehingga layak diberi status **Tercapai** atau **Melampaui Target**.

Tabel 4.6 Arah kebijakan saran RPJMD

No.	Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan Semester II Tahun 2026
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan promotif dan preventif; memperkuat pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, dan lanjut usia; mempercepat penurunan stunting; meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; memperluas cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar; serta memperkuat pemerataan tenaga dan sarana kesehatan pada wilayah dengan akses terbatas.
2	Meratanya kualitas pendidikan	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar; menekan angka putus sekolah; meningkatkan kompetensi dan pemerataan tenaga pendidik; memperbaiki sarana dan prasarana sekolah; memperkuat bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu; serta meningkatkan literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran.
3	Menguatnya nilai keagamaan dan	Menyeragamkan definisi operasional, skala, dan

	karakter masyarakat	metode penghitungan Indeks Harmoni Indonesia; memperkuat moderasi beragama dan toleransi; meningkatkan peran forum kerukunan umat beragama; mengembangkan pendidikan karakter; memperkuat pembinaan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan; serta menjaga kondusivitas kehidupan sosial masyarakat.
4	Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat	Memperbaiki dan memutakhirkan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; meningkatkan cakupan rehabilitasi dan perlindungan sosial; memperkuat pemberdayaan keluarga miskin dan kelompok rentan; meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, dan kelompok rentan lainnya; serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5	Menurunnya tingkat kemiskinan	Memperkuat konvergensi program penanggulangan kemiskinan berbasis data sasaran yang terpadu; mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin; meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi, kesempatan kerja, UMKM, dan usaha produktif; meningkatkan akses rumah layak huni, air minum, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan; serta memprioritaskan desa dan kecamatan dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi.
6	Meningkatnya produktivitas PDRB sektor unggulan	Memastikan kembali cakupan dan rumus sektor unggulan; meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri pengolahan, dan perdagangan; memperkuat hilirisasi komoditas unggulan; meningkatkan penggunaan teknologi dan inovasi produksi; memperbaiki konektivitas kawasan produksi; serta memperkuat kemitraan usaha dan akses pasar.
7	Meningkatnya kewirausahaan, investasi daerah, dan agroindustri yang inovatif	Meningkatkan kemudahan dan kepastian pelayanan investasi; memperkuat promosi potensi daerah; mendorong pengembangan agroindustri berbasis komoditas lokal; meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan wirausaha baru; memperluas akses pembiayaan, pasar, dan digitalisasi usaha; serta meningkatkan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
8	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dalam pembangunan ekonomi	Menyelenggarakan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja; meningkatkan layanan penempatan dan informasi pasar kerja; memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan industri; meningkatkan sertifikasi kompetensi tenaga kerja; mengembangkan kewirausahaan bagi usia produktif; serta memperluas partisipasi perempuan, pemuda, dan kelompok usia kerja yang belum aktif secara ekonomi.
9	Meningkatnya inovasi daerah	Meningkatkan kualitas dan kematangan inovasi, bukan hanya jumlah inovasi; memperkuat dokumentasi, pengukuran manfaat, dan

		keberlanjutan inovasi; mendorong replikasi inovasi yang berhasil; mengintegrasikan inovasi dalam perencanaan dan penganggaran; memperkuat kompetisi inovasi perangkat daerah; serta menyesuaikan target agar lebih menantang dan sesuai dengan capaian aktual.
10	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Mempercepat penyelesaian pekerjaan fisik prioritas; memprioritaskan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, perumahan, dan kawasan permukiman; memperkuat konektivitas kawasan produksi dan pusat pelayanan; meningkatkan kualitas pengawasan konstruksi; mengarahkan anggaran pada komponen pembentuk Pilar Infrastruktur; serta memastikan konsistensi target antara RPJMD, RKPD, dan dokumen perangkat daerah.
11	Tercukupinya kebutuhan pangan	Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan; memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah; meningkatkan produktivitas dan diversifikasi pangan lokal; memperbaiki distribusi pangan ke wilayah rentan; melaksanakan intervensi pada rumah tangga rawan pangan; meningkatkan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman; serta memperkuat pengendalian wilayah rentan rawan pangan.
12	Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat	Memperkuat pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis; menjaga kelancaran distribusi; melaksanakan operasi pasar dan gerakan pangan murah secara tepat sasaran; memperkuat kerja sama antardaerah; meningkatkan cadangan pangan; mengendalikan komoditas penyumbang inflasi utama; serta meningkatkan koordinasi TPID berdasarkan prinsip keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
13	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Menyelaraskan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, Perjanjian Kinerja, dan penganggaran; menyempurnakan pohon kinerja dan cascading kinerja; meningkatkan kualitas indikator outcome; memperkuat pengukuran dan pelaporan kinerja; meningkatkan evaluasi internal oleh Inspektorat; menerapkan hasil evaluasi untuk perbaikan program; serta memperkuat implementasi SIGAP Perencanaan sebagai instrumen pengendalian konsistensi perencanaan dan kinerja.
14	Optimalnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik—Indeks SPBE	Memperkuat arsitektur dan peta rencana SPBE; mengintegrasikan aplikasi dan data antarperangkat daerah; meningkatkan layanan administrasi dan pelayanan publik digital; memperkuat keamanan informasi; meningkatkan tata kelola pusat data dan jaringan; memperkuat manajemen risiko SPBE; serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pemenuhan indikator evaluasi SPBE.
15	Optimalnya tata kelola	Menetapkan definisi operasional, baseline, rumus,

	pemerintahan berbasis elektronik—Indeks PEMDI	sumber data, dan target Indeks PEMDI; menyusun instrumen pengukuran yang dapat diverifikasi; menetapkan perangkat daerah pengampu dan pendukung; mengintegrasikan indikator ke dalam dokumen perencanaan dan kinerja; serta menggunakan hasil pengukuran Tahun 2026 sebagai dasar penetapan target tahun berikutnya apabila indikator tersebut masih bersifat baru.
16	Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Mempertahankan opini WTP melalui peningkatan kualitas laporan keuangan; memperkuat sistem pengendalian intern; mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK; meningkatkan penatausahaan aset dan persediaan; meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan; serta memperkuat pengawasan atas pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah.
17	Meningkatnya profesionalitas aparatur sipil negara	Memperkuat penerapan sistem merit dan manajemen talenta; meningkatkan pemetaan kompetensi ASN; menyelenggarakan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan; memperbaiki pola karier, promosi, dan mutasi; meningkatkan disiplin dan kinerja ASN; serta memenuhi kebutuhan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
18	Terwujudnya layanan publik prima	Meningkatkan kualitas standar pelayanan; memperkuat pengelolaan pengaduan; meningkatkan kompetensi petugas pelayanan; menyediakan sarana pelayanan yang inklusif; meningkatkan digitalisasi pelayanan; memperluas inovasi pelayanan publik; serta menggunakan hasil survei kepuasan masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan.
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Memperkuat pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi; meningkatkan pengelolaan benturan kepentingan; memperkuat pengawasan pada area rawan, terutama pengadaan, perizinan, pengelolaan anggaran, dan kepegawaian; meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan; memperkuat manajemen risiko; serta membangun budaya integritas di seluruh perangkat daerah.
20	Meningkatnya penguatan sistem mitigasi bencana	Mempertahankan kesiapsiagaan kelembagaan dan personel; memperbarui peta risiko dan rencana kontinjensi; meningkatkan simulasi dan edukasi kebencanaan; memperkuat desa tangguh bencana; memastikan kesiapan peralatan dan sistem peringatan dini; meningkatkan koordinasi lintas sektor; serta memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi, banjir, kebakaran lahan, dan cuaca ekstrem.
21	Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan	Meningkatkan pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah; memperluas pengelolaan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya; meningkatkan rehabilitasi lahan dan tutupan

		vegetasi; memperkuat pengawasan ketaatan usaha terhadap dokumen lingkungan; meningkatkan adaptasi perubahan iklim; mengendalikan kebakaran lahan; serta menyeragamkan nama, rumus, dan sumber data indikator lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, arah kebijakan pembangunan daerah pada Semester II difokuskan pada tiga kelompok penanganan. Pertama, **percepatan pencapaian indikator yang masih berada di bawah target**, terutama Usia Harapan Hidup, tingkat kemiskinan, partisipasi angkatan kerja, kualitas infrastruktur, ketidakcukupan konsumsi pangan, Nilai SAKIP, Indeks SPBE, dan kualitas lingkungan hidup.

Kedua, **penyempurnaan indikator dan target yang belum konsisten secara metodologis**, terutama Indeks Harmoni Indonesia, Indeks Kesejahteraan Sosial, rasio PDRB sektor unggulan, Indeks PEMDI, Pilar Infrastruktur, dan indikator lingkungan hidup. Penyempurnaan perlu mencakup definisi operasional, rumus, skala pengukuran, baseline, target, sumber data, serta perangkat daerah pengampu.

Ketiga, **pemeliharaan dan peningkatan capaian indikator yang telah mencapai atau melampaui target**, meliputi Indeks Inovasi Daerah, opini BPK, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Pelayanan Publik, Survei Penilaian Integritas, dan tingkat kesiapsiagaan bencana. Arah kebijakan pada kelompok ini tidak lagi semata-mata mengejar kenaikan nilai, tetapi memastikan kualitas, keberlanjutan, manfaat, dan konsistensi penerapannya.

Pelaksanaan arah kebijakan tersebut perlu didukung melalui percepatan realisasi program dan kegiatan, penajaman prioritas anggaran, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kualitas data, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Dengan pendekatan tersebut, Perubahan RKPD Tahun 2026 tidak hanya menjadi penyesuaian administratif, tetapi menjadi instrumen koreksi kebijakan untuk meningkatkan peluang tercapainya sasaran RPJMD secara efektif dan terukur.

Tabel 4.7 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator	Target RKPD	Evaluasi Semester I	Proyeksi Akhir Tahun
1	Kualitas SDM	IPM	72,7	72,05	72,7
2	Pertumbuhan Ekonomi	LPE	5,2	5,27	5,7
3	Penurunan Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	3,88	4,31	3,88
4	Infrastruktur	pilar infrastruktur	58,2	54,42	58,2

5	Tata Kelola	Nilai SAKIP	68,5	67,19	68,5

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan sasaran pembangunan daerah berada pada jalur yang mendukung pencapaian target RKPD Tahun 2026. Dari lima sasaran pembangunan daerah, terdapat beberapa indikator yang telah menunjukkan perkembangan positif, sedangkan indikator lainnya masih memerlukan percepatan pelaksanaan program pada Semester II agar target akhir tahun dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Perkembangan masing-masing sasaran pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diukur melalui **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** dengan target sebesar **72,70** pada Tahun 2026. Berdasarkan data terakhir yang tersedia, capaian IPM berada pada angka **72,05**, sehingga masih terdapat selisih sebesar **0,65 poin** dari target RKPD.

Walaupun target belum tercapai pada Semester I, kondisi tersebut masih berada dalam batas yang wajar mengingat IPM merupakan indikator tahunan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik setelah seluruh komponen pembentuknya, yaitu umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita, dihitung secara komprehensif pada akhir tahun.

Pelaksanaan berbagai program prioritas bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta percepatan penurunan stunting selama Semester I telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada Semester II, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan mempercepat pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, penguatan pelayanan kesehatan primer, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberian bantuan pendidikan, serta intervensi percepatan penurunan stunting sehingga target IPM sebesar **72,70** diproyeksikan dapat dicapai pada akhir Tahun 2026.

2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi diukur melalui **Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)** dengan target RKPD sebesar **5,20 persen**. Evaluasi Semester I menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi daerah telah mencapai **5,27 persen**, bahkan lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan. Berdasarkan perkembangan aktivitas ekonomi hingga Semester I, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat menjadi sekitar **5,70 persen** pada akhir tahun.

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh membaiknya aktivitas sektor pertanian sebagai sektor unggulan daerah, meningkatnya perdagangan dan jasa, bertambahnya investasi, serta percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain ketergantungan terhadap sektor primer, fluktuasi harga komoditas pertanian, serta perlunya percepatan realisasi belanja daerah agar memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Pada Semester II, kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan pada percepatan realisasi belanja pembangunan, penguatan investasi, pengembangan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan produktivitas UMKM, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala.

3. Menurunnya Persentase Penduduk Miskin

Penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu sasaran utama pembangunan daerah dengan target sebesar **3,88 persen**. Berdasarkan data terakhir yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan masih berada pada angka **4,31 persen**, sehingga terdapat deviasi sebesar **0,43 poin persentase** terhadap target RKPD.

Walaupun target tersebut belum tercapai pada Semester I, tren kemiskinan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan produktivitas pertanian, bantuan sosial, serta penciptaan kesempatan kerja telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat kantong-kantong kemiskinan pada beberapa wilayah perdesaan yang memerlukan intervensi lebih terarah. Oleh karena itu, pada Semester II Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan memperkuat integrasi program penanggulangan kemiskinan melalui pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi desa, peningkatan akses sanitasi dan air bersih, serta optimalisasi program perlindungan sosial agar target kemiskinan sebesar **3,88 persen** dapat dicapai pada akhir tahun.

4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Pembangunan infrastruktur diukur melalui **Indeks Pilar Infrastruktur** dengan target sebesar **58,20**, sedangkan hasil evaluasi Semester I menunjukkan capaian sebesar **54,42**.

Perbedaan antara capaian Semester I dengan target akhir tahun terutama dipengaruhi oleh masih berlangsungnya pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur yang sebagian besar baru memasuki tahap konstruksi pada Semester I. Selain itu, realisasi belanja modal yang belum optimal turut memengaruhi capaian indikator ini.

Pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, kawasan permukiman, sanitasi, serta infrastruktur pelayanan dasar diperkirakan akan meningkat secara signifikan pada Semester II seiring percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik.

Dengan percepatan pelaksanaan proyek strategis daerah, optimalisasi penyerapan belanja modal, serta penguatan pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik, Indeks Pilar Infrastruktur diproyeksikan mampu mencapai target **58,20** pada akhir Tahun 2026.

5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Kualitas tata kelola pemerintahan diukur melalui **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** dengan target sebesar **68,50**, sedangkan hasil evaluasi Semester I menunjukkan nilai **67,19**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Kabupaten Barito Kuala telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan beberapa penyempurnaan, khususnya dalam penguatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengendalian pelaksanaan program, serta evaluasi hasil pembangunan.

Perbaikan kualitas dokumen perencanaan, peningkatan konsistensi antara RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja diharapkan mampu meningkatkan nilai SAKIP pada akhir Tahun 2026.

Melalui penguatan implementasi reformasi birokrasi, penerapan manajemen kinerja, digitalisasi proses perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta peningkatan kualitas evaluasi internal, Nilai SAKIP diproyeksikan dapat mencapai target sebesar **68,50** pada akhir tahun.

Sasaran, prioritas pembangunan, serta arah kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana diuraikan pada Bab II. Permasalahan yang masih memerlukan percepatan, antara lain pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, percepatan realisasi belanja pembangunan, penguatan infrastruktur pelayanan dasar, peningkatan ketahanan pangan, pengendalian lingkungan hidup, dan peningkatan tata kelola pemerintahan menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan Semester II Tahun 2026.

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.2.1 Umum

Penetapan prioritas pembangunan daerah pada Semester II Tahun 2026 mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah hasil perubahan APBD sehingga program dan kegiatan diprioritaskan pada urusan wajib pelayanan dasar, percepatan pencapaian target RPJMD, penyelesaian program strategis daerah, serta program yang memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pelayanan publik.

Tema pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026, yaitu **"Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia"**, tetap dipertahankan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 karena masih relevan dengan arah pembangunan jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, serta telah selaras dengan RPJMN Tahun 2025–2029, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, dan Prioritas Nasional. Dengan demikian, Perubahan RKPD Tahun 2026 tidak mengubah arah pembangunan daerah, melainkan melakukan penyesuaian terhadap strategi implementasi agar pelaksanaan pembangunan pada Semester II lebih adaptif terhadap perkembangan kondisi daerah dan mampu mengoptimalkan pencapaian target pembangunan. Selain tetap mempertahankan arah pembangunanan RPJMN dan RPJMD juga tetap melaksanakan 12 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati seperrti Insentif Kaum Mesjid dan Guru TPA, Menciptakan Kawasan Industri Khusus, Pupuk Subsidi dan ATM Beras, Jalanan Beton, Layanan Mobil Keliling, Kartu Beasiswa Batola, Kartu Siap Kerja Batola, Tanah Bengkok, UMKM Baiman, Batola Respon Cepat, Desa Peduli Stunting dan Simfoni PPA.

Atas dasar hasil evaluasi tersebut, **tema pembangunan tetap dipertahankan**, sedangkan **prioritas pembangunan disesuaikan pada aspek fokus pelaksanaan, target kinerja, lokasi intervensi, tahapan pelaksanaan, serta alokasi pendanaan** tanpa mengubah

substansi prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD induk. Penyesuaian tersebut merupakan bentuk respons kebijakan terhadap kondisi aktual pembangunan sekaligus upaya menjaga konsistensi pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Perubahan fokus prioritas pembangunan Semester II Tahun 2026 diarahkan pada:

- percepatan pencapaian indikator pembangunan yang masih berada di bawah target;
- optimalisasi realisasi fisik dan keuangan program pembangunan;
- penguatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
- percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan pengendalian inflasi daerah;
- peningkatan produktivitas sektor unggulan melalui penguatan ketahanan pangan, investasi, UMKM, serta hilirisasi komoditas daerah;
- percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur strategis untuk mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan publik;
- penguatan kualitas lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis digital.

Penyesuaian prioritas pembangunan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, yaitu:

1. hasil evaluasi capaian indikator makro, indikator tujuan, sasaran, dan indikator kinerja daerah sampai dengan Semester I Tahun 2026;
2. perkembangan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang memengaruhi kapasitas fiskal;
3. hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan serta identifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan pembangunan;
4. perkembangan isu strategis daerah, regional, dan nasional yang memerlukan respons kebijakan pada Semester II Tahun 2026;
5. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang perlu diakomodasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah; dan
6. kebutuhan percepatan pencapaian target RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 melalui penguatan program-program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap indikator pembangunan daerah.

Keterkaitan Hasil Evaluasi dengan Penyesuaian Prioritas Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Barito Kuala sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa tema pembangunan daerah **"Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia"** masih relevan untuk dipertahankan karena sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Namun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa beberapa indikator pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, masih memerlukan percepatan agar target akhir Tahun 2026 dapat tercapai.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** yang diproyeksikan mencapai **72,70** pada Tahun 2026. Meskipun capaian Semester I menunjukkan perkembangan yang positif, evaluasi terhadap komponen pembentuk IPM mengindikasikan bahwa dimensi pendidikan masih memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama melalui peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan. Kondisi tersebut menjadi dasar dalam melakukan penajaman prioritas pembangunan pada Semester II Tahun 2026 tanpa mengubah tema pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penyesuaian prioritas pembangunan diarahkan pada program-program yang memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain peningkatan mutu pendidikan, rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan pelayanan kesehatan dasar, percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas gizi masyarakat, serta penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Penyesuaian juga dilakukan terhadap target kinerja, pelaksanaan kegiatan, dan alokasi pendanaan sesuai dengan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 dan kemampuan keuangan daerah.

Dengan demikian, perubahan prioritas pembangunan pada Semester II Tahun 2026 merupakan tindak lanjut langsung atas hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian indikator pembangunan yang masih memerlukan perhatian, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas, serta menjaga konsistensi pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

4.2.2 Prioritas I

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Prioritas pertama diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ketahanan keluarga. Pembangunan sumber

daya manusia menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing.

Tabel 4.8 Keterkaitan Hasil Evaluasi IPM dengan Penyesuaian Program Prioritas Semester II Tahun 2026

Hasil Evaluasi Semester I Tahun 2026	Implikasi terhadap Perubahan RKPD	Program/Kegiatan yang Diprioritaskan
Peningkatan kualitas SDM masih perlu dipercepat untuk mencapai target IPM Tahun 2026	Penajaman prioritas pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan	Peningkatan mutu pendidikan, rehabilitasi sarana prasarana sekolah, peningkatan kompetensi guru
Pelayanan kesehatan dasar perlu diperkuat untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat	Penguatan pelayanan kesehatan dan percepatan penurunan stunting	Pelayanan kesehatan dasar, penguatan puskesmas, intervensi gizi spesifik dan sensitif
Perlindungan masyarakat miskin dan rentan masih perlu ditingkatkan	Penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pelayanan dasar
Keterbatasan kemampuan keuangan daerah memerlukan penajaman prioritas	Rasionalisasi belanja dan fokus pada program yang memiliki daya ungkit tinggi	Optimalisasi pagu pada program prioritas pelayanan dasar

Hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pembangunan manusia berada pada kategori **on track**, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan percepatan pencapaian. **Usia Harapan Hidup (UHH)** mencapai **72,85 tahun** dari target **74,75 tahun** dengan proyeksi akhir tahun **73,20 tahun**, sedangkan **Indeks Pendidikan** mencapai **61,89** dari target **63,20** dan diproyeksikan mencapai target pada akhir tahun. Di sisi lain, **Tingkat Kemiskinan** masih berada pada angka **4,31%**, lebih tinggi dari target **3,88%**, sehingga memerlukan intervensi lintas sektor yang lebih terarah. Demikian pula **Indeks Kesejahteraan Sosial** baru mencapai **56,03** dari target **72,50**, sehingga diperlukan penyesuaian target serta penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, **Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan** sebesar **5,58%** masih berada di atas target **4,00%**, sehingga peningkatan ketahanan pangan masyarakat tetap menjadi prioritas pada Semester II.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan mengoptimalkan sinergi antarperangkat daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan intervensi penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, peningkatan akses pendidikan, serta penguatan perlindungan sosial yang terintegrasi.

Fokus Intervensi Semester II

- peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
- percepatan penurunan stunting;
- peningkatan akses dan mutu pendidikan;
- penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan;
- peningkatan ketahanan pangan rumah tangga;
- peningkatan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.9 Program Prioritas I Semester II

Program Prioritas	Perangkat Daerah	Indikator	Evaluasi Semester I	Strategi Semester II
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Capaian UHH sebesar **72,85 tahun** dari target **74,75 tahun**. Pelayanan kesehatan berjalan sesuai target, namun peningkatan kualitas layanan promotif dan preventif masih perlu diperkuat.	Meningkatkan pelayanan kesehatan primer, memperluas cakupan pelayanan ibu dan anak, pengendalian penyakit, percepatan penurunan stunting, serta penguatan GERMAS.
Peningkatan Mutu Pendidikan	Dinas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan mencapai **61,89** dari target **63,20** dan diproyeksikan mencapai target pada akhir tahun.	Peningkatan kualitas pembelajaran, rehabilitasi sarana pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, serta penguatan pendidikan karakter dan literasi.
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Dinas Sosial, Bapperida, Perangkat Daerah terkait	Tingkat Kemiskinan	Tingkat kemiskinan masih **4,31%**, lebih tinggi dari target **3,88%**, sehingga memerlukan percepatan intervensi lintas sektor.	Penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pemutakhiran data kemiskinan, dan integrasi program penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	Capaian **56,03** dari target **72,50**, sehingga masih memerlukan penguatan layanan kesejahteraan sosial.	Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan kelembagaan sosial.
Penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Capaian sebesar **5,58%** masih di atas target **4,00%** sehingga perlu penguatan akses pangan bergizi.	Diversifikasi konsumsi pangan, pengembangan cadangan pangan pemerintah, bantuan pangan bagi masyarakat rentan, dan edukasi gizi masyarakat.

Arah Kebijakan Semester II

Pada Semester II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan memprioritaskan percepatan pencapaian indikator pembangunan manusia melalui penguatan pelayanan dasar, peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta sinergi lintas sektor dalam mendukung pencapaian target RPJMD dan Perubahan RKPD Tahun 2026. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Priorias daerah berdasarkan urusan

1. Pendidikan

Dalam rangka menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tetap mengarahkan alokasi anggaran fungsi pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Fokus pelaksanaan Semester II Tahun 2026 diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui peningkatan rata-rata lama sekolah, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), perluasan layanan pendidikan kesetaraan, pemerataan tenaga pendidik, rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan pendidikan inklusif. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia sekaligus mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

2. Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga melakukan penyelarasan kebijakan kesehatan dengan arah transformasi kesehatan nasional melalui penguatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan, deteksi dini penyakit, percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pemerataan tenaga kesehatan, serta peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, dokumen Perubahan RKPD mengakomodasi indikator kesehatan prioritas sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan yang meliputi indikator kematian ibu, umur harapan hidup, kematian balita, prevalensi stunting, cakupan pemeriksaan kesehatan gratis, imunisasi bayi lengkap, kepesertaan JKN, penemuan dan keberhasilan pengobatan tuberkulosis, pengendalian hipertensi, serta aktivitas fisik masyarakat. Pemerintah Kabupaten juga memperkuat koordinasi perencanaan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari percepatan penurunan angka kematian ibu.

3. Sosial

Kebijakan penanggulangan kemiskinan pada Semester II Tahun 2026 diperkuat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN/DTKS) sebagai dasar penetapan sasaran program. Intervensi tidak hanya diarahkan pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, peningkatan kesempatan kerja, penguatan ekonomi desa, perlindungan kelompok rentan, serta percepatan graduasi kemiskinan secara berkelanjutan.

4. Trantibumlinmas

Penguatan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana dilakukan melalui peningkatan kesiapsiagaan daerah, kapasitas aparatur, penguatan sistem peringatan dini, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan koordinasi antara Satpol PP, Satlinmas, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, kecamatan, desa, dan perangkat daerah terkait. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal serta meningkatkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana.

5. Pemebrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan yang inklusif, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memperkuat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui

penguatan kelembagaan, penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, peningkatan layanan perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan, pemenuhan hak anak, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

6. Kependudukan dan catatan sipil

Pemerintah Kabupaten juga mengarahkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui pelayanan yang cepat, mudah, inklusif, dan berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD). Upaya tersebut didukung melalui pelayanan jemput bola, pelayanan keliling, peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan, integrasi data kependudukan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, dan desa, serta pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

7. Pemberdayaan Mayarakat Desa

Penguatan tata kelola pemerintahan desa diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Posyandu, PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, serta pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal guna mendukung percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Keluarga Berencana

Kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan untuk mendukung terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui peningkatan akses pelayanan KB, peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), penurunan unmet need, peningkatan mobilitas penyuluh KB, serta integrasi program keluarga berencana dengan percepatan penurunan stunting dan pembangunan keluarga.

9. Kepemudaan

Pengembangan kepemudaan dan olahraga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya pemuda melalui pembinaan organisasi kepemudaan, kewirausahaan pemuda, pembinaan atlet secara berjenjang, penyelenggaraan kompetisi olahraga, peningkatan kapasitas pelatih, serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah.

10. Kebudayaan

Pembangunan bidang kebudayaan diarahkan pada penguatan pelestarian seni dan budaya lokal melalui inventarisasi dan penetapan cagar budaya, penguatan kelembagaan budaya, penyelenggaraan festival budaya, pelestarian tradisi lokal, serta pemanfaatan kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif daerah.

11. Perpustakaan

Pemerintah Kabupaten memperkuat budaya baca dan literasi masyarakat melalui peningkatan layanan perpustakaan, pengembangan perpustakaan digital, peningkatan koleksi bahan bacaan, penguatan perpustakaan desa, sekolah, dan komunitas, serta peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan. Evaluasi pembangunan literasi juga disesuaikan dengan perubahan metode penghitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.

12. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan diperkuat melalui peningkatan tertib arsip, digitalisasi arsip, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengelola arsip, pengembangan memori kolektif daerah, serta integrasi pengelolaan arsip dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

13. Kesbangpol

Pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik diarahkan pada peningkatan kualitas demokrasi, pendidikan politik masyarakat, penguatan wawasan kebangsaan, pembinaan ideologi Pancasila, peningkatan kerukunan masyarakat, pencegahan konflik sosial, serta penguatan nilai bela negara. Penyesuaian indikator Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) akan dilakukan setelah memperoleh ketentuan teknis dan hasil konfirmasi dari pemerintah pusat sehingga konsisten dengan sistem indikator kinerja daerah.

4.2.3 Prioritas II

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah

Prioritas kedua diarahkan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah melalui pengembangan sektor unggulan, peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal. Pembangunan ekonomi difokuskan pada optimalisasi sektor pertanian,

perikanan, perdagangan, dan jasa sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, posisi strategis Kabupaten Barito Kuala sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi peluang untuk meningkatkan investasi, memperluas pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, indikator pembangunan ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun beberapa indikator strategis masih memerlukan percepatan. **PDRB Per Kapita** telah mencapai **Rp36,34 juta** atau sekitar **98,22%** dari target sebesar **Rp37,00 juta**, sehingga diproyeksikan dapat mencapai target pada akhir tahun. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** mencapai **71,98%** dari target **73,60%** dan diproyeksikan meningkat menjadi **72,30%** melalui peningkatan kesempatan kerja dan perluasan akses pelatihan tenaga kerja.

Di sisi lain, **Rasio PDRB Sektor Unggulan terhadap Total PDRB** baru mencapai **26,85%** dari target **42,25%**, dengan proyeksi akhir tahun sebesar **29,75%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor unggulan masih belum optimal akibat terbatasnya hilirisasi komoditas, rendahnya nilai tambah produk pertanian, serta belum optimalnya investasi pada sektor produktif. Selain itu, **laju inflasi** pada Semester I tercatat sebesar **3,97%**, masih berada di atas target RKPD sebesar **1,82%**, meskipun diproyeksikan menurun menjadi **3,50%** pada akhir tahun melalui penguatan pengendalian inflasi daerah, stabilisasi harga pangan, dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.

Memperhatikan kondisi tersebut, arah kebijakan Semester II difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, pengembangan agroindustri, penguatan UMKM, peningkatan investasi daerah, serta penguatan konektivitas pasar guna meningkatkan nilai tambah produk unggulan Kabupaten Barito Kuala.

Fokus Intervensi Semester II

- intensifikasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- pengembangan pertanian rawa berbasis teknologi;
- peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap;
- pengembangan hilirisasi komoditas unggulan daerah;
- penguatan koperasi dan UMKM melalui digitalisasi usaha;
- fasilitasi investasi dan percepatan pelayanan perizinan;
- pengembangan agroindustri berbasis potensi lokal;
- stabilisasi harga pangan dan pengendalian inflasi daerah;

- perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Tabel 4.10 Program Prioritas II Semester II

Program Prioritas	Perangkat Daerah	Indikator	Evaluasi Semester I	Strategi Semester II
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan menunjukkan tren positif, namun produktivitas masih dipengaruhi kondisi tata air, banjir musiman, dan perubahan iklim.	Intensifikasi pertanian, optimalisasi lahan rawa, penyediaan benih unggul, mekanisasi pertanian, serta rehabilitasi jaringan irigasi.
Pengembangan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Produksi perikanan	Produksi perikanan meningkat, namun masih terkendala sarana budidaya, kualitas air, dan akses pemasaran hasil.	Pengembangan budidaya perikanan, bantuan sarana produksi, peningkatan mutu hasil perikanan, serta perluasan akses pasar.
Pengembangan UMKM dan Koperasi	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah UMKM berkembang	Pembinaan UMKM dan legalisasi usaha telah berjalan, namun akses pembiayaan, digitalisasi usaha, dan pemasaran masih perlu diperkuat.	Penguatan kapasitas UMKM, fasilitasi pembiayaan, digitalisasi pemasaran, sertifikasi produk, dan pengembangan kemitraan usaha.
Peningkatan Investasi Daerah	DPMPTSP	Nilai investasi	Pelayanan perizinan semakin baik, namun realisasi investasi sektor produktif masih perlu ditingkatkan.	Promosi investasi, penyederhanaan perizinan, pendampingan investor, dan pengembangan kawasan investasi berbasis potensi daerah.
Pengembangan Agroindustri dan Hilirisasi	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bersama Dinas Pertanian	Nilai tambah komoditas unggulan	Hilirisasi komoditas lokal belum optimal sehingga nilai tambah produk daerah masih relatif rendah.	Pengembangan agroindustri, hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan kualitas produk, serta perluasan jejaring pemasaran.
Pengendalian Inflasi Daerah	Bagian Perekonomian Setda bersama TPID	Laju inflasi	Inflasi Semester I masih berada di atas target RKPD sehingga memerlukan penguatan pengendalian harga komoditas strategis.	Penguatan TPID, operasi pasar, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta peningkatan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.
Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tingkat Partisipasi Angkatan	TPAK menunjukkan peningkatan namun masih di bawah target	Pelatihan berbasis kompetensi, fasilitasi penempatan tenaga

		Kerja	tahunan.	kerja, pengembangan kewirausahaan, dan perluasan kesempatan kerja.

Arah Kebijakan Semester II

Pada Semester II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan memfokuskan kebijakan pada penguatan sektor-sektor ekonomi produktif melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal, peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah. Sinergi antarperangkat daerah akan terus diperkuat untuk meningkatkan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sesuai dengan sasaran Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi UMKM yang cukup beragam dan didukung oleh ketersediaan sumber daya lokal, terutama pada subsektor **olahan hasil pertanian, olahan hasil perikanan, pengolahan hasil perkebunan, kerajinan anyaman purun, industri pangan lokal, serta usaha mikro berbasis ekonomi desa**. Potensi tersebut memberikan peluang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah sekaligus memperkuat struktur ekonomi lokal.

Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kualitas produk, rendahnya kapasitas manajemen usaha, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, terbatasnya akses terhadap pembiayaan formal, serta masih rendahnya jejaring pemasaran dan kemitraan usaha. Kondisi tersebut mengakibatkan daya saing produk UMKM belum berkembang secara optimal, baik di pasar regional maupun nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, arah kebijakan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 diarahkan pada penguatan ekosistem UMKM melalui peningkatan daya saing produk, pemanfaatan teknologi digital, perluasan akses pembiayaan, serta pengembangan kemitraan usaha dengan pelaku usaha besar, koperasi, BUM Desa, dan sektor swasta. Strategi tersebut dilaksanakan melalui pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk dan kemasan, fasilitasi sertifikasi produk, penguatan pemasaran digital (*digital marketing*), pemanfaatan

platform perdagangan elektronik (*e-commerce*), peningkatan literasi digital pelaku UMKM, serta pengembangan jejaring pemasaran berbasis potensi unggulan daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan memperkuat sinergi pengembangan UMKM dengan sektor unggulan daerah, khususnya **pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri pengolahan**, sehingga UMKM tidak hanya berperan sebagai pelaku perdagangan, tetapi juga menjadi bagian dari rantai nilai (*value chain*) komoditas unggulan daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan dan sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 4.11 Strategi Penguatan UMKM Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026

Permasalahan	Strategi Perubahan RKPD	Outcome yang Diharapkan
Daya saing produk masih rendah	Peningkatan kualitas produk, kemasan, standardisasi dan sertifikasi	Produk UMKM lebih kompetitif
Digitalisasi UMKM belum optimal	Pelatihan pemasaran digital, e-commerce, literasi digital	Peningkatan transaksi dan akses pasar
Akses pembiayaan terbatas	Fasilitasi KUR, kemitraan perbankan, koperasi, dan lembaga pembiayaan	Meningkatnya akses permodalan UMKM
Kemitraan usaha masih terbatas	Penguatan kemitraan dengan dunia usaha, BUM Desa, koperasi, dan industri	Terbentuknya rantai nilai komoditas unggulan
Nilai tambah produk lokal masih rendah	Hilirisasi hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan pelaku UMKM

A. PERDAGANGAN, UMKM DAN INDUSTRI

1. Perdagangan, Nilai Tambah, Inflasi dan Akses Pasar

Perdagangan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara sektor produksi dan konsumsi sehingga berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah, kelancaran distribusi barang, stabilisasi harga, serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2026 tidak hanya diarahkan pada peningkatan aktivitas perdagangan, tetapi juga memperkuat rantai pasok komoditas unggulan Kabupaten Barito Kuala melalui peningkatan efisiensi distribusi, pengembangan pusat pemasaran, digitalisasi perdagangan, serta perluasan akses pasar regional.

Penguatan perdagangan juga menjadi salah satu instrumen penting dalam pengendalian inflasi daerah melalui peningkatan kelancaran distribusi pangan, penguatan kerja sama antar daerah, pemantauan ketersediaan barang pokok, serta optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dengan demikian, sektor perdagangan diharapkan mampu mendukung stabilitas harga, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, serta memperluas akses pasar produk lokal hingga tingkat regional.

Outcome

- Meningkatnya nilai tambah komoditas unggulan.
- Meningkatnya kelancaran distribusi barang.
- Terjaganya stabilitas harga.
- Meningkatnya akses pasar regional.

2. Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Unggulan

Pengembangan industri daerah diarahkan pada hilirisasi komoditas unggulan Kabupaten Barito Kuala melalui penguatan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta industri rumah tangga berbasis potensi lokal. Strategi tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, standardisasi dan sertifikasi, inovasi teknologi pengolahan, peningkatan kapasitas pelaku industri kecil dan menengah, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat daya saing daerah.

B. ENERGI HIJAU

Arah Kebijakan Efisiensi Energi

Dalam mendukung pembangunan rendah karbon, Perubahan RKPD Tahun 2026 juga mendorong efisiensi energi sesuai kewenangan daerah melalui penerapan teknologi hemat energi pada bangunan pemerintah, pemanfaatan lampu hemat energi, pengembangan penerangan jalan umum yang efisien, serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai potensi daerah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung ekonomi hijau, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, serta memperkuat ketahanan lingkungan hidup.

C. PERIKANAN

Perubahan RKPD Tahun 2026 mengarahkan pengembangan sektor perikanan pada peningkatan produktivitas budidaya air tawar, penguatan ketahanan pangan, hilirisasi hasil

perikanan, serta peningkatan nilai tambah produk. Pengembangan **Program Bioflok Terpadu** menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan efisiensi budidaya, produktivitas, dan pendapatan masyarakat sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting melalui peningkatan konsumsi protein hewani.

Mitigasi Kemarau

Berdasarkan prakiraan BMKG mengenai potensi musim kemarau yang lebih panjang pada Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengarahkan langkah antisipatif berupa:

- penerapan sistem **Bioflok** dan **Recirculating Aquaculture System (RAS)**;
- efisiensi penggunaan air;
- pengaturan kepadatan tebar;
- penyesuaian pemberian pakan;
- penggunaan komoditas yang adaptif terhadap suhu tinggi, seperti ikan nila;
- peningkatan monitoring kualitas air budidaya.

D. PETERNAKAN

Strategi pengembangan peternakan diarahkan pada peningkatan produktivitas ternak, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan pendapatan peternak melalui pengembangan **Program Sawit–Peternakan Terintegrasi**.

Sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak El-Nino, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengarahkan beberapa strategi, yaitu:

- penyediaan cadangan pakan (silase dan hay);
- pembangunan sarana penyediaan air bersih ternak;
- mitigasi heat stress melalui perbaikan kandang;
- peningkatan biosekuriti dan vaksinasi;
- pencegahan kebakaran lahan dan kebun.

E. PERTANIAN

Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Barito Kuala sekaligus berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah maupun nasional. Oleh karena itu, arah kebijakan Semester II Tahun 2026 difokuskan pada modernisasi pertanian, penguatan kawasan sentra produksi, peningkatan produktivitas lahan rawa, hilirisasi hasil pertanian, serta penguatan kelembagaan petani.

Mitigasi El-Nino

Strategi yang dilaksanakan meliputi:

- rehabilitasi jaringan irigasi;
- pembangunan embung;
- sumur bor;
- penerapan **Alternate Wetting and Drying (AWD)**;
- penggunaan varietas tahan kekeringan;
- penyusunan kalender tanam berbasis informasi BMKG;
- konservasi tanah melalui penggunaan mulsa.

F. INVESTASI

Potensi investasi Kabupaten Barito Kuala diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan, logistik, serta kawasan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Strategi peningkatan investasi dilakukan melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, penguatan promosi investasi, penyediaan proyek siap investasi (*investment ready project*), peningkatan kepastian hukum, serta penguatan kemitraan antara investor dan pelaku usaha lokal sehingga investasi mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah secara berkelanjutan.

G. PARIWISATA

Pengembangan pariwisata Kabupaten Barito Kuala diarahkan pada penguatan destinasi wisata berbasis budaya, sungai, dan ekowisata dengan mengoptimalkan potensi kawasan rawa, budaya masyarakat sungai, serta produk unggulan lokal. Pengembangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata, memperkuat ekonomi kreatif, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mendukung pengembangan **Geopark Meratus** melalui pelestarian kawasan bernilai geologi, budaya, dan keanekaragaman hayati yang berada dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala, serta mendukung pengembangan geowisata, edukasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

4.2.4 Prioritas III

Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Wilayah sebagai Pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN)

Prioritas ketiga diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pelayanan dasar, serta memperkuat peran Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan infrastruktur difokuskan pada peningkatan kemantapan jalan dan jembatan, rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan air minum dan sanitasi, pengembangan kawasan permukiman, pengendalian banjir, serta penyediaan lahan pembangunan yang mendukung investasi dan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara umum telah berjalan sesuai tahapan, namun sebagian besar kegiatan fisik masih berada pada tahap pengadaan, kontraktual, dan konstruksi awal sehingga capaian output belum sepenuhnya terealisasi. Kondisi tersebut tercermin pada **Pilar Infrastruktur** yang baru mencapai **54,42** dari target **72,00**, dengan proyeksi akhir tahun sebesar **58,20**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa percepatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan optimalisasi penyerapan anggaran menjadi agenda utama pada Semester II.

Selain itu, tantangan pembangunan infrastruktur masih dipengaruhi oleh karakteristik wilayah rawa pasang surut, tingginya risiko banjir, keterbatasan jaringan irigasi, serta kebutuhan peningkatan akses terhadap air minum, sanitasi, dan permukiman layak. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas ekonomi sebagai kawasan penyangga IKN menuntut penyediaan infrastruktur yang semakin andal, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kebijakan Semester II diarahkan pada percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur dasar, penguatan konektivitas antarwilayah, serta peningkatan ketahanan infrastruktur terhadap bencana banjir dan perubahan iklim.

Fokus Intervensi Semester II

- percepatan peningkatan kemantapan jalan kabupaten;
- pembangunan dan rehabilitasi jembatan strategis;
- rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- peningkatan akses pelayanan air minum layak;
- peningkatan akses sanitasi dan drainase lingkungan;
- penataan kawasan permukiman dan rumah layak huni;
- pengendalian banjir dan peningkatan sistem tata air;
- percepatan penyediaan lahan pembangunan untuk mendukung investasi dan pelayanan publik.

Tabel 4.12 Program Prioritas III Semester II

Program Prioritas	Perangkat Daerah	Indikator	Evaluasi Semester I	Strategi Semester II
Peningkatan Jalan Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Sebagian besar pekerjaan masih berada pada tahap konstruksi awal sehingga realisasi fisik belum optimal.	Mempercepat pelaksanaan konstruksi, meningkatkan pengawasan lapangan, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran.
Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jembatan dalam kondisi mantap	Pekerjaan konstruksi telah dimulai pada beberapa lokasi prioritas namun belum seluruhnya selesai.	Percepatan penyelesaian pekerjaan, peningkatan kualitas konstruksi, serta pengawasan mutu pelaksanaan.
Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas layanan irigasi yang berfungsi	Rehabilitasi jaringan irigasi berjalan namun masih dipengaruhi sedimentasi, kerusakan saluran, dan kondisi tata air.	Mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi, normalisasi saluran, dan peningkatan operasi serta pemeliharaan jaringan.
Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase akses air minum layak	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berjalan sesuai tahapan namun cakupan pelayanan masih terbatas.	Perluasan jaringan SPAM, peningkatan kapasitas pelayanan, dan optimalisasi pendanaan pemerintah pusat maupun daerah.
Peningkatan Sanitasi dan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase akses sanitasi layak	Penanganan sanitasi dan kawasan permukiman terus berjalan, namun belum menjangkau seluruh wilayah prioritas.	Percepatan pembangunan sanitasi, drainase lingkungan, rumah layak huni, dan penanganan kawasan kumuh.
Pengendalian Banjir dan Tata Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan yang terlindungi dari banjir	Penanganan banjir telah dilakukan melalui pemeliharaan saluran dan pintu air, namun efektivitasnya	Normalisasi sungai dan saluran, rehabilitasi pintu air, peningkatan kapasitas drainase, serta penguatan sistem

			masih perlu ditingkatkan.	pengendalian banjir.
Penyediaan Lahan Pembangunan	Bidang Pertanahan pada Dinas PUPR	Persentase aset tanah pemerintah bersertifikat dan persentase kebutuhan lahan pembangunan yang terpenuhi	Inventarisasi dan sertifikasi aset tanah terus dilakukan, namun masih terdapat aset yang belum tersertifikasi serta kebutuhan lahan untuk pembangunan strategis yang belum seluruhnya terpenuhi.	Percepatan sertifikasi aset tanah pemerintah, penyediaan lahan pembangunan prioritas, penyelesaian permasalahan pertanahan, serta penguatan koordinasi dengan ATR/BPN.

Arah Kebijakan Semester II

Pada Semester II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan memprioritaskan percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis melalui optimalisasi pelaksanaan proyek fisik, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penguatan konektivitas antarwilayah, serta peningkatan ketahanan infrastruktur terhadap banjir dan perubahan iklim. Selain itu, penyediaan lahan pembangunan dan penataan kawasan akan terus diperkuat untuk mendukung investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat peran Kabupaten Barito Kuala sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan strategi tersebut, diharapkan capaian **Pilar Infrastruktur** dapat terus meningkat dan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penguatan Arah Kebijakan Infrastruktur, Kewilayahan, Lingkungan Hidup, dan Pemerintahan Digital

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur masih menghadapi tantangan yang dipengaruhi oleh karakteristik Kabupaten Barito Kuala sebagai wilayah rawa pasang surut, tingginya risiko banjir, sedimentasi dan kerusakan jaringan tata air, keterbatasan kualitas air baku, serta kebutuhan peningkatan konektivitas antarwilayah. Sebagian pekerjaan jalan dan jembatan masih berada pada tahap awal konstruksi, sedangkan rehabilitasi jaringan irigasi masih dipengaruhi oleh kondisi saluran, sedimentasi, pasang surut, dan waktu tanam masyarakat.

Oleh karena itu, pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada Semester II Tahun 2026 diarahkan pada:

1. percepatan peningkatan kemantapan jalan kabupaten;
2. pembangunan dan rehabilitasi jembatan strategis;
3. rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
4. pengendalian banjir dan penguatan sistem tata air;
5. peningkatan kualitas drainase;
6. peningkatan pelayanan air minum;
7. peningkatan kualitas bangunan gedung pelayanan publik; dan
8. penguatan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dokumen telah memuat indikator berupa persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, persentase jembatan dalam kondisi mantap, luas layanan irigasi yang berfungsi, luas kawasan yang terlindungi dari banjir, cakupan layanan drainase, serta persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW. Namun, agar rencana kerja lebih operasional, rincian masing-masing paket pada BAB V dan lampiran perlu dilengkapi dengan nama ruas atau lokus, kondisi awal, volume pekerjaan, target keluaran dan hasil, kewenangan, sumber pendanaan, kesiapan lahan, kesiapan dokumen teknis, status pengadaan, dan jadwal pelaksanaan.

Prioritas Penanganan Jalan dan Jembatan

Penanganan jalan dan jembatan diprioritaskan berdasarkan kondisi kemantapan, tingkat kerusakan, fungsi dan status ruas, konektivitas antarwilayah, akses menuju pusat pemerintahan dan pusat pelayanan dasar, serta kontribusinya terhadap kelancaran distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Data kondisi jalan Tahun 2025 menunjukkan bahwa dari total panjang jalan Kabupaten Barito Kuala sebesar 782,74 kilometer, sekitar 46,64 persen berada dalam kondisi baik dan sedang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kemantapan jalan masih perlu menjadi fokus pembangunan daerah.

Dokumen juga telah mencantumkan beberapa proyek strategis infrastruktur, antara lain peningkatan Jalan Tanggul Rejo–Semangat Baru Kecamatan Tabunganen, Jalan Kabuau–Tabatan Baru Kecamatan Kuripan, Jalan Semangat Baru–Tabunganen Muara, dan Jalan Tinggiran Baru–Tinggiran II Luar Kecamatan Mekarsari. Paket tersebut perlu diprioritaskan berdasarkan kesiapan kontrak, manfaat konektivitas, dukungan terhadap kawasan produksi, serta kemampuan penyelesaiannya sampai akhir Tahun Anggaran 2026.

Sumber Daya Air, Irigasi, dan Pengendalian Banjir

Rehabilitasi jaringan irigasi diarahkan untuk meningkatkan luas layanan irigasi yang berfungsi, khususnya pada kawasan sentra produksi pertanian. Pelaksanaannya perlu diselaraskan dengan kalender tanam, kondisi pasang surut, dan kebutuhan operasi serta pemeliharaan saluran. Pengendalian banjir diarahkan melalui normalisasi saluran dan sungai, rehabilitasi pintu air, pemeliharaan jaringan tata air, serta peningkatan kapasitas drainase pada kawasan rawan genangan.

SPAM dan Air Minum

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak dan memperluas pelayanan jaringan perpipaan. Dokumen telah memuat indikator persentase akses air minum layak, sedangkan indikator akses perpipaan dan air minum aman masih perlu ditambahkan apabila data baseline, target, dan metode pengukurannya telah tersedia dari perangkat daerah teknis.

Penanganan SPAM perlu memprioritaskan wilayah dengan akses pelayanan rendah, kawasan permukiman, desa lokus stunting, dan wilayah yang menghadapi keterbatasan kualitas air baku. Pengembangan IPA dan Booster Kecamatan Mekarsari yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis perlu dipercepat sesuai kesiapan dokumen perencanaan, pengadaan, dan pendanaannya.

Penataan Ruang

Pelaksanaan penataan ruang diarahkan tidak hanya pada penyusunan dokumen tata ruang, tetapi juga pada pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat pemanfaatan ruang yang belum melalui proses perizinan, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi, pengawasan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW, inventarisasi indikasi pelanggaran, serta tindak lanjut sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Percepatan Realisasi Semester II

Rendahnya realisasi belanja modal pada pertengahan tahun menjadi dasar perlunya rencana aksi percepatan pelaksanaan infrastruktur. Langkah percepatan diarahkan pada:

1. penyelesaian dokumen perencanaan dan audit APIP;
2. percepatan pengadaan dan penandatanganan kontrak;
3. monitoring mingguan terhadap progres fisik dan keuangan;

4. pengendalian deviasi pelaksanaan paket;
5. percepatan pembayaran berdasarkan kemajuan pekerjaan;
6. peningkatan pengawasan mutu konstruksi;
7. penyelesaian hambatan lahan dan koordinasi teknis; serta
8. evaluasi dan rasionalisasi paket yang belum siap dilaksanakan.

Langkah tersebut diprioritaskan pada paket strategis yang telah memiliki kesiapan teknis dan memberikan dampak langsung terhadap konektivitas, pelayanan dasar, ketahanan pangan, dan pengendalian banjir.

2. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan diarahkan untuk mendukung kesiapan pelaksanaan pembangunan strategis dan pengamanan aset pemerintah daerah. Dokumen telah memuat indikator persentase aset tanah pemerintah yang bersertifikat dan persentase kebutuhan lahan pembangunan yang terpenuhi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa inventarisasi dan sertifikasi aset terus dilaksanakan, namun masih terdapat aset yang belum bersertifikat serta kebutuhan lahan untuk pembangunan prioritas yang belum seluruhnya terpenuhi.

Setiap kegiatan fisik harus memastikan:

- kejelasan status kepemilikan atau penguasaan tanah;
- kesesuaian lokasi dengan RTRW;
- kondisi lahan bebas sengketa;
- kejelasan batas bidang;
- ketersediaan dokumen administrasi pertanahan;
- kesiapan proses pengadaan tanah, apabila diperlukan; dan
- tidak adanya kendala hukum yang dapat menghambat pelaksanaan.

Pada Semester II Tahun 2026, tindak lanjut diarahkan pada percepatan sertifikasi aset tanah pemerintah, penyelesaian permasalahan pertanahan, penyediaan lahan bagi pembangunan prioritas, serta penguatan koordinasi dengan Kantor Pertanahan/ATR-BPN.

3. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Arah kebijakan perumahan rakyat dan kawasan permukiman difokuskan pada peningkatan akses rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas PSU, sanitasi, drainase lingkungan, jalan lingkungan, dan pelayanan air minum. Dokumen telah

memuat indikator cakupan rumah layak huni, luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani, persentase rumah tidak layak huni yang tertangani, cakupan perumahan yang dilengkapi PSU, akses sanitasi layak, serta indeks kualitas permukiman.

Penentuan lokus penanganan perlu diarahkan pada:

- desa dan kelurahan dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi;
- kawasan kumuh;
- wilayah rawan banjir;
- kawasan dengan akses air minum dan sanitasi rendah;
- kawasan dengan kualitas jalan dan drainase lingkungan rendah; dan
- keluarga yang memenuhi kriteria penerima manfaat.

Untuk memperkuat kualitas perencanaan, target RTLH, kawasan kumuh, dan PSU perlu dilengkapi dalam matriks atau lampiran dengan baseline, lokasi, jumlah unit atau luas penanganan, data penerima manfaat berbasis nama dan alamat, legalitas lahan, kebutuhan pembiayaan, sumber pendanaan, serta kesiapan pelaksanaan.

Outcome masing-masing program juga perlu dibedakan secara tegas:

- program perumahan diarahkan pada meningkatnya rumah layak huni;
- program kawasan permukiman diarahkan pada berkurangnya luas kawasan kumuh;
- program PSU diarahkan pada meningkatnya cakupan dan kualitas prasarana lingkungan;
- program sanitasi diarahkan pada meningkatnya akses sanitasi layak; dan
- program air minum diarahkan pada meningkatnya akses air minum layak.

Pembedaan tersebut diperlukan agar tidak terjadi duplikasi klaim kinerja antarprogram.

4. Urusan Lingkungan Hidup

Kebijakan lingkungan hidup pada Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan, pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran, rehabilitasi kawasan, dan penguatan ketahanan terhadap banjir. Dokumen telah memuat IKLH Tahun 2025 sebesar 71,44 dan target perubahan Tahun 2026 sebesar 66,57, namun perubahan tersebut perlu disertai penjelasan mengenai metode penghitungan, sumber data, serta kondisi komponen pembentuknya.

Data yang perlu diverifikasi dan disajikan secara konsisten meliputi:

- Indeks Kualitas Air;
- Indeks Kualitas Udara;
- indeks tutupan lahan;
- ruang terbuka hijau;
- jumlah dan kapasitas TPS/TPS3R;
- timbulan sampah;
- volume sampah terangkut dan terolah;
- cakupan pelayanan persampahan; serta
- kondisi TPA dan TPST.

Pengelolaan persampahan diarahkan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir melalui pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, penguatan bank sampah dan TPS3R, peningkatan pengangkutan, pengolahan, optimalisasi TPA/TPST, dan pengembangan ekonomi sirkular.

Pengendalian pencemaran dilakukan melalui penetapan titik pantau, identifikasi sumber pencemar, pengawasan kegiatan usaha, pemantauan kepatuhan, serta tindak lanjut hasil pengawasan. Pendekatan tersebut harus memperhatikan karakteristik wilayah rawa, sungai, saluran pasang surut, serta kualitas air sebagai bagian penting dari ekosistem Barito Kuala.

5. Urusan Perhubungan

Program perhubungan diarahkan untuk meningkatkan keselamatan dan konektivitas transportasi. Penentuan intervensi perlu didasarkan pada titik rawan kecelakaan, ruas dengan mobilitas tinggi, kawasan sekolah, pasar, pusat pelayanan, kawasan produksi, dan simpul transportasi.

Kegiatan diprioritaskan pada penyediaan dan pemeliharaan rambu, marka, PJU, fasilitas keselamatan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta peningkatan akses menuju kawasan produksi dan pusat pelayanan. Untuk wilayah yang bergantung pada transportasi sungai, penguatan keselamatan angkutan sungai dan fasilitas dermaga juga perlu menjadi bagian dari arah kebijakan.

Dokumen telah mencantumkan Pembangunan Pile Mooring sebagai proyek strategis, tetapi sampai Triwulan II belum terlaksana karena survei batimetri baru mencapai sekitar 45 persen. Oleh karena itu, percepatan penyelesaian survei, dokumen teknis, dan proses pengadaan perlu menjadi fokus Semester II.

6. Urusan Komunikasi dan Informatika

Arah kebijakan urusan komunikasi dan informatika difokuskan pada penguatan Pemerintah Digital melalui peningkatan implementasi SPBE, integrasi aplikasi, interoperabilitas data, layanan digital, dan penguatan infrastruktur teknologi informasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa indikator perangkat daerah yang memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah masih sebesar 0 persen karena kegiatan belum dilaksanakan. Kondisi ini memerlukan percepatan integrasi layanan dan penguatan penggunaan sistem penghubung pada Semester II.

Tindak lanjut diarahkan pada:

- integrasi aplikasi dan pengurangan aplikasi yang tumpang tindih;
- pemanfaatan sistem penghubung layanan;
- penguatan pusat data dan jaringan intra pemerintah;
- peningkatan kualitas informasi publik;
- peningkatan kapasitas aparatur;
- pemanfaatan data spasial dalam perencanaan; dan
- penguatan keamanan layanan digital.

7. Urusan Statistik

Penyelenggaraan statistik sektoral diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis data. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam perencanaan baru mencapai 13,79 persen berdasarkan hasil verifikasi pada e-Walidata, sedangkan penggunaan data statistik dalam evaluasi pembangunan telah mencapai 100 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan:

- daftar data prioritas;
- standar data;
- metadata;
- kode referensi;
- Forum Satu Data;
- kapasitas produsen data;
- verifikasi data pada e-Walidata;
- pemanfaatan statistik dalam penyusunan perencanaan; dan

- pengembangan data infrastruktur dan kewilayahan berbasis spasial.

Pada Semester II, perangkat daerah perlu didorong menggunakan data statistik yang terverifikasi sebagai dasar penentuan target, lokus, dan kebutuhan pendanaan.

8. Urusan Persandian

Urusan persandian diarahkan pada peningkatan kepatuhan dan kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah. Dokumen memuat target tingkat kesiapan pengamanan informasi sebesar 70, sedangkan capaian Triwulan II masih tercatat 0 karena penilaian baru akan diterbitkan pada akhir tahun.

Karena capaian belum tersedia, tindak lanjut Semester II perlu difokuskan pada kesiapan pemenuhan unsur penilaian, antara lain:

- inventarisasi aset informasi;
- klasifikasi data;
- pengaturan hak akses;
- audit keamanan;
- pencadangan data;
- penyusunan prosedur pemulihan bencana;
- penanganan insiden keamanan informasi;
- peningkatan kesadaran keamanan siber aparatur; dan
- mitigasi risiko terhadap sistem elektronik strategis.

Penguatan persandian perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengembangan SPBE, pusat data, statistik sektoral, dan layanan digital pemerintah daerah.

4.2.5 Prioritas IV

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Akuntabel, dan Berorientasi Pelayanan Publik

Prioritas keempat diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel melalui penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, percepatan transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan internal, serta pengembangan inovasi daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, sebagian besar indikator tata kelola pemerintahan menunjukkan perkembangan yang positif. **Indeks Inovasi Daerah** telah mencapai **51,38**, melampaui target RKPD sebesar **41,00**, dan diproyeksikan meningkat menjadi **52,10** pada akhir tahun. **Indeks Profesionalitas ASN** juga telah mencapai **78,27**, melampaui target **72,50**, sedangkan **Indeks Survei Penilaian Integritas** mencapai **78,85**, lebih tinggi dibanding target **77,34**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pengembangan inovasi, peningkatan kompetensi aparatur, dan penguatan integritas pemerintahan telah berjalan dengan baik.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan percepatan, terutama **Nilai SAKIP** yang baru mencapai **67,19** dari target **73,50**, serta **Indeks SPBE** yang mencapai **3,28** dari target **3,70**. Selain itu, mulai Tahun 2026 pemerintah menerapkan **Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (PEMDI)** sebagai indikator nasional pengganti SPBE, sehingga diperlukan penyesuaian sistem pengukuran, penguatan tata kelola digital, dan integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik.

Pada Semester II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan memfokuskan kebijakan pada peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, percepatan implementasi pemerintahan digital, penguatan pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data, serta pengembangan budaya inovasi di seluruh perangkat daerah. Upaya tersebut juga mendukung implementasi **SIGAP Perencanaan** sebagai instrumen pengendalian kualitas dokumen perencanaan dan penguatan akuntabilitas pembangunan daerah.

Fokus Intervensi Semester II

- peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- percepatan transformasi digital pemerintahan menuju implementasi Indeks PEMDI;
- penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- peningkatan kualitas pelayanan publik;
- penguatan inovasi daerah;
- peningkatan profesionalitas ASN;
- penguatan pengawasan internal dan integritas pemerintahan;
- penguatan kualitas perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan berbasis data.

Tabel 4.13 Program Prioritas IV Semester II

Program Prioritas	Perangkat Daerah	Indikator	Evaluasi Semester I	Strategi Semester II
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Bapperida, Inspektorat, Bagian Organisasi Setda	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP mencapai **67,19** dari target **73,50** sehingga masih memerlukan penguatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja.	Penguatan implementasi SAKIP, penyempurnaan cascading kinerja, peningkatan kualitas dokumen perencanaan melalui SIGAP Perencanaan, serta monitoring dan evaluasi berkala.
Transformasi Digital Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE / Indeks PEMDI	Implementasi SPBE terus meningkat, namun integrasi layanan digital dan penerapan arsitektur SPBE masih perlu diperkuat. Tahun 2026 mulai dilakukan transisi menuju pengukuran Indeks PEMDI.	Integrasi aplikasi pemerintahan, pembangunan satu data daerah, penguatan keamanan informasi, serta percepatan implementasi Indeks PEMDI.
Pengembangan Inovasi Daerah	Bapperida	Indeks Inovasi Daerah	Capaian **51,38** telah melampaui target RKPD (**41,00**) sehingga diperlukan upaya menjaga keberlanjutan inovasi.	Replikasi inovasi perangkat daerah, pengembangan laboratorium inovasi, serta pembinaan inovasi pelayanan publik.
Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN mencapai **78,27**, melampaui target tahunan.	Pengembangan kompetensi berbasis manajemen talenta, peningkatan kapasitas ASN, serta penguatan budaya kerja berorientasi kinerja.
Peningkatan Pelayanan Publik	Bagian Organisasi Setda	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik mencapai **4,35** dari target **4,42** dan menunjukkan tren	Digitalisasi pelayanan publik, penyederhanaan proses bisnis, peningkatan

			peningkatan.	standar pelayanan, dan peningkatan kepuasan masyarakat.
Penguatan Integritas Pemerintahan	Inspektorat	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai SPI mencapai **78,85**, telah melampaui target RKPD sebesar **77,34**.	Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kepatuhan, pencegahan korupsi, serta penguatan budaya integritas.
Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Bapperida	Ketersediaan data pembangunan yang terintegrasi	Integrasi data pembangunan antarperangkat daerah masih perlu ditingkatkan untuk mendukung perencanaan berbasis data.	Penguatan Satu Data Daerah, integrasi data sektoral, pengembangan dashboard pembangunan, dan peningkatan kualitas statistik sektoral.

Arah Kebijakan Semester II

Pada Semester II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan memprioritaskan penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan akuntabilitas kinerja, transformasi digital, penguatan inovasi daerah, peningkatan profesionalitas aparatur, serta penguatan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif. Selain itu, implementasi **SIGAP Perencanaan** akan terus diperkuat sebagai instrumen pengendalian kualitas perencanaan, sinkronisasi dokumen pembangunan, dan penguatan monitoring serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan strategi tersebut diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan semakin meningkat sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran RPJMD, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

4.2.6 Prioritas V

Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana

Prioritas kelima diarahkan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan ketahanan terhadap bencana, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta pengendalian dampak perubahan

iklim. Sebagai wilayah yang didominasi kawasan rawa pasang surut dan memiliki karakteristik hidrologi yang kompleks, Kabupaten Barito Kuala menghadapi tantangan berupa banjir musiman, degradasi kualitas lingkungan, pencemaran air, serta meningkatnya tekanan terhadap ekosistem akibat aktivitas pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan lingkungan hidup tidak hanya diarahkan pada aspek konservasi, tetapi juga pada peningkatan ketahanan wilayah dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, **Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)** mencapai **71,44** dari target **77,00**, dengan proyeksi akhir tahun sebesar **72,60**. Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas lingkungan, namun masih memerlukan percepatan pelaksanaan program pengendalian pencemaran, rehabilitasi kawasan kritis, serta peningkatan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau. Sementara itu, **Tingkat Kesiapsiagaan Bencana** telah mencapai **100%** sesuai target tahunan, yang menunjukkan kesiapan kelembagaan dan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Meskipun demikian, risiko banjir masih menjadi salah satu isu strategis utama di Kabupaten Barito Kuala, terutama pada wilayah-wilayah dengan sistem drainase yang belum optimal dan daerah yang dipengaruhi pasang surut sungai. Kondisi tersebut memerlukan penguatan sinergi antara pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, pengelolaan tata air, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pada Semester II Tahun 2026, kebijakan pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk mempercepat peningkatan kualitas lingkungan melalui pengendalian pencemaran, rehabilitasi ekosistem, peningkatan pengelolaan persampahan, penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.

Fokus Intervensi Semester II

- pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah;
- peningkatan kualitas Status Lingkungan Hidup Daerah;
- rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan kritis;
- pengembangan ruang terbuka hijau;
- peningkatan pengelolaan persampahan terpadu berbasis 3R;
- penguatan pengendalian banjir dan tata air;
- peningkatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons bencana;
- penguatan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Tabel 4.14 Program Prioritas V Semester II

Program Prioritas	Perangkat Daerah	Indikator	Evaluasi Semester I	Strategi Semester II
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Capaian SLHD sebesar **71,44** dari target **77,00** menunjukkan kualitas lingkungan mengalami perbaikan namun masih memerlukan percepatan untuk mencapai target akhir tahun.	Meningkatkan pengawasan lingkungan, pengendalian pencemaran, pembinaan pelaku usaha, serta pemantauan kualitas air, udara, dan lahan secara berkala.
Pengelolaan Persampahan Terpadu	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase sampah yang tertangani	Pelayanan persampahan terus meningkat, namun cakupan pelayanan dan pengurangan sampah dari sumber masih perlu diperluas.	Peningkatan sarana dan prasarana persampahan, penguatan TPS3R, edukasi masyarakat, serta pengembangan ekonomi sirkular berbasis pengelolaan sampah.
Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup	Luas kawasan yang direhabilitasi	Rehabilitasi kawasan kritis telah dilaksanakan namun belum mencakup seluruh lokasi prioritas.	Percepatan rehabilitasi DAS, penanaman pohon, konservasi kawasan lindung, serta pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dan permukiman.
Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Tata Air	Dinas PUPR	Luas kawasan yang terlindungi dari banjir	Penanganan banjir telah dilakukan melalui normalisasi saluran dan pemeliharaan pintu air, namun masih terdapat titik rawan banjir yang memerlukan penanganan lebih lanjut.	Normalisasi sungai dan drainase, rehabilitasi pintu air, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta peningkatan koordinasi pengelolaan tata air lintas wilayah.
Peningkatan	BPBD	Tingkat	Tingkat	Mempertahankan

Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana		Kesiapsiagaan Bencana	kesiapsiagaan bencana telah mencapai **100%** sesuai target tahunan, didukung oleh kesiapan personel dan peralatan kebencanaan.	kesiapsiagaan, memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas relawan, serta memperluas edukasi dan simulasi kebencanaan kepada masyarakat.
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup bersama BPBD	Implementasi aksi adaptasi perubahan iklim	Program adaptasi perubahan iklim telah mulai dilaksanakan namun masih memerlukan penguatan kolaborasi lintas sektor.	Integrasi aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam pembangunan daerah, penguatan ketahanan masyarakat, dan peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah.

Arah Kebijakan Semester II

Pada Semester II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan memfokuskan kebijakan pada percepatan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan ketahanan wilayah terhadap bencana melalui pengendalian pencemaran, rehabilitasi daerah aliran sungai, peningkatan pengelolaan persampahan, penguatan infrastruktur pengendalian banjir, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sebagai bagian dari implementasi pembangunan berkelanjutan.

4.2.7 Keterkaitan Prioritas dengan Hasil Evaluasi Semester I

Untuk memastikan bahwa Perubahan RKPD benar-benar berbasis evaluasi, setiap prioritas pembangunan perlu dikaitkan dengan hasil evaluasi Semester I sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.15 Keterkaitan Evaluasi Semester I dengan Prioritas Pembangunan

Hasil Evaluasi Semester I	Dampak	Penyesuaian Prioritas Semester II
Realisasi PAD masih rendah	Kapasitas fiskal terbatas	Optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja
Belanja modal belum optimal	Infrastruktur belum selesai	Percepatan proyek strategis
Investasi belum mencapai target	Pertumbuhan ekonomi melambat	Fasilitasi investasi dan UMKM

Risiko banjir masih tinggi	Gangguan aktivitas ekonomi	Penguatan pengendalian banjir
Penurunan stunting perlu dipercepat	Kualitas SDM belum optimal	Penguatan intervensi kesehatan dan gizi

4.3 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.3.1 Umum

Program prioritas pembangunan daerah merupakan instrumen pelaksanaan sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026. Program-program tersebut merupakan hasil penjabaran dari sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 yang disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Semester I Tahun 2026, perkembangan kondisi ekonomi daerah, kapasitas fiskal, serta dinamika kebijakan nasional dan provinsi.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, program prioritas tidak mengalami perubahan substansi, namun dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja, lokasi pelaksanaan, pagu indikatif, dan strategi pelaksanaan. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan pada Semester II, mempercepat pencapaian target indikator daerah, serta menjaga konsistensi antara kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan.

Penetapan program prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria utama, yaitu:

1. mendukung langsung pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2025–2029;
2. memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat;
3. memiliki tingkat urgensi tinggi untuk diselesaikan pada Tahun 2026;
4. mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
5. mendukung Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan, dan Asta Cita;
6. memiliki kesiapan pelaksanaan pada Semester II Tahun 2026.

4.3.2 Program Prioritas pada Prioritas I

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi fokus utama pembangunan Kabupaten Barito Kuala karena kualitas SDM merupakan fondasi bagi peningkatan daya saing daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, sebagian

besar program pelayanan dasar telah berjalan sesuai rencana, namun masih diperlukan percepatan untuk meningkatkan capaian indikator IPM, menurunkan prevalensi stunting, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan.

Program prioritas pada Semester II diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, mempercepat penurunan stunting, serta memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.

Tabel 4.16 Program Prioritas Bidang Sumber Daya Manusia

Program Prioritas	Perangkat Daerah	Indikator	Evaluasi Semester I	Strategi Semester II
Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	APK, APM, RLS	Berjalan sesuai rencana	Percepatan rehabilitasi sekolah dan peningkatan kompetensi guru
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	UHH, cakupan pelayanan kesehatan	Perlu peningkatan akses	Penguatan layanan primer dan rujukan
Percepatan Penurunan Stunting	Dinas Kesehatan, DPPKB, Dinas PMD	Prevalensi stunting	Intervensi berjalan	Penguatan intervensi spesifik dan sensitif
Perlindungan Sosial	Dinas Sosial	Jumlah penerima manfaat	Berjalan	Pemutakhiran DTKS dan P3KE
Peningkatan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Disporabudpar	Prestasi dan partisipasi	Berjalan	Pembinaan atlet dan sarana olahraga

4.3.3 Program Prioritas pada Prioritas II

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah

Program prioritas pada bidang ekonomi diarahkan untuk memperkuat sektor unggulan daerah, meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas kesempatan usaha, serta meningkatkan investasi. Evaluasi Semester I menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penggerak utama perekonomian, namun diperlukan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan pengembangan agroindustri.

Tabel 4.17 Program Prioritas Bidang Ekonomi

Program Prioritas	Perangkat Daerah	Indikator	Evaluasi Semester I	Strategi Semester II
Peningkatan Produksi	Dinas Pertanian	Produktivitas padi dan	Perlu peningkatan	Intensifikasi dan rehabilitasi

Pertanian		hortikultura		tata air
Pengembangan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Produksi perikanan	Berjalan	Bantuan sarana produksi dan pembinaan
Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	UMKM aktif	Perlu peningkatan pemasaran	Digitalisasi dan akses pembiayaan
Peningkatan Investasi Daerah	DPMPTSP	Nilai investasi	Belum optimal	Promosi investasi dan percepatan perizinan
Pengembangan Agroindustri	Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi	Nilai tambah produk	Tahap pengembangan	Hilirisasi komoditas unggulan

4.3.4 Program Prioritas pada Prioritas III

Meningkatkan Infrastruktur Wilayah

Prioritas pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Berdasarkan evaluasi Semester I, percepatan pelaksanaan proyek fisik menjadi fokus utama Semester II.

Tabel 4.18 Program Prioritas Bidang Infrastruktur

Program Prioritas	Perangkat Daerah	Indikator	Evaluasi Semester I	Strategi Semester II
Peningkatan Jalan Kabupaten	Dinas PUPR	Persentase jalan mantap	Progres awal	Percepatan konstruksi
Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan	Dinas PUPR	Jembatan mantap	Tahap pelaksanaan	Penyelesaian pekerjaan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Dinas PUPR	Luas layanan irigasi	Berjalan	Percepatan rehabilitasi
Penyediaan Air Minum	Dinas Perkim	Cakupan pelayanan	Bertahap	Perluasan jaringan
Peningkatan Sanitasi dan Permukiman	Dinas Perkim	Akses sanitasi layak	Berjalan	Pembangunan sanitasi dan rumah layak huni

4.3.5 Program Prioritas pada Prioritas IV

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Program prioritas diarahkan untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja, mempercepat transformasi digital, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel 4.19 Program Prioritas Bidang Tata Kelola

Program Prioritas	Perangkat Daerah	Indikator	Evaluasi Semester I	Strategi Semester II
Penguatan SPBE	Diskominfo	Indeks SPBE	Perlu integrasi	Pengembangan aplikasi terintegrasi
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Bapperida, Inspektorat, Bagian Organisasi	Nilai SAKIP	Berjalan	Penguatan perencanaan dan evaluasi
Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Indeks RB	Bertahap	Penyederhanaan proses bisnis
Pencegahan Korupsi	Inspektorat	MCP KPK	Perlu peningkatan	Penguatan pengendalian internal
Peningkatan Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah	IKM	Berjalan	Digitalisasi layanan

4.3.6 Program Prioritas pada Prioritas V

Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup

Program prioritas pada bidang lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, memperkuat ketahanan terhadap banjir, serta meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tabel 4.20 Program Prioritas Bidang Lingkungan Hidup

Program Prioritas	Perangkat Daerah	Indikator	Evaluasi Semester I	Strategi Semester II
Pengendalian Banjir	Dinas PUPR	Luas wilayah terdampak	Masih menjadi isu	Normalisasi sungai dan drainase
Pengelolaan Persampahan	DLH	Persentase sampah terkelola	Perlu peningkatan	Penguatan TPS3R
Rehabilitasi DAS	DLH	Luas rehabilitasi	Berjalan	Penanaman dan konservasi
Pengendalian Pencemaran	DLH	Kualitas air dan udara	Stabil	Pengawasan lingkungan
Peningkatan IKLH	DLH	Nilai IKLH	Perlu peningkatan	Program konservasi dan edukasi

4.3.7 Strategi Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Semester II

Agar seluruh program prioritas dapat mencapai target sampai akhir Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan melaksanakan strategi percepatan sebagai berikut:

1. mempercepat penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa;
2. melakukan monitoring mingguan terhadap program prioritas;
3. memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah;
4. mengoptimalkan pemanfaatan data hasil evaluasi Semester I sebagai dasar pengambilan keputusan;
5. melakukan penyesuaian pagu dan target program berdasarkan kemampuan fiskal daerah;
6. mengutamakan penyelesaian kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat;
7. memperkuat sistem pengendalian internal dan evaluasi kinerja.

4.4 SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.4.1 Sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, seluruh sasaran, prioritas, program, kegiatan, dan indikator kinerja dalam Perubahan RKPD tetap mengacu pada arah pembangunan jangka menengah daerah.

Hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap visi, misi, tujuan, maupun sasaran RPJMD. Penyesuaian yang dilakukan dalam Perubahan RKPD hanya berupa penyempurnaan strategi pelaksanaan, target tahunan, pendanaan, serta fokus intervensi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Tabel 4.21 Sinkronisasi RPJMD 2025-2029 dengan Perubahan RKPD Tahun 2026

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama RPJMD	Target 2026	Prioritas Pembangunan P-RKPD 2026	Program Prioritas Semester II	Perangkat Daerah Pengampu	Status Keselarasan
Terwujudnya SDM yang unggul, sehat, religius, berkarakt	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,75	Prioritas I – Peningkatan Kualitas SDM	Pelayanan kesehatan, GERMAS, percepatan penurunan stunting	Dinas Kesehatan	Selaras

er dan berbudaya luhur							
	Meratanya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	63,20	Prioritas I	Peningkatan mutu pendidikan, rehabilitasi sarana pendidikan	Dinas Pendidikan	Selaras
	Menguatnya nilai keagamaan dan karakter masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia	86,50	Prioritas I	Pembinaan wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama	Bakesbangpol	Selaras
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	72,50	Prioritas I	Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Dinas Sosial	Selaras
Terwujudnya sektor ekonomi yang berdaya saing dan inovatif	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	3,88	Prioritas II – Pertumbuhan Ekonomi	Program penanggulangan kemiskinan terpadu	Multi Perangkat Daerah	Selaras
	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan	Rasio PDRB Sektor Unggulan	42,25	Prioritas II	Intensifikasi pertanian, hilirisasi, agroindustri	Dinas Pertanian, DKPP	Selaras
	Meningkatnya investasi daerah	PDRB Per Kapita	37,00 juta	Prioritas II	Fasilitasi investasi dan pengembangan kawasan ekonomi	DPMPTSP	Selaras
	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73,60	Prioritas II	Pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja	Disnakertrans	Selaras
	Meningkatnya	Indeks Inovasi	41,00	Prioritas IV	Penguatan inovasi	Bapperida	Selaras

	inovasi daerah	Daerah			daerah		
Meningkatkan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung IKN	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Pilar Infrastruktur	72,00	Prioritas III – Infrastruktur	Peningkatan jalan, jembatan, irigasi, SPAM, sanitasi	Dinas PUPR, Dinas Perkim	Selaras
	Tercukupinya kebutuhan pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	4,00	Prioritas II	Ketahanan pangan dan diversifikasi pangan	DKPP	Selaras
	Terkendalinya harga kebutuhan pokok	Laju Inflasi	1,82	Prioritas II	Pengendalian inflasi daerah	Bagian Perekonomian Setda	Selaras
Terwujudnya tata kelola pemerintahan berorientasi pelayanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	73,50	Prioritas IV – Tata Kelola	Penguatan SAKIP	Bapperida, Inspektorat, Setda	Selaras
	Optimalnya SPBE	Indeks SPBE/PEMDI	3,70 / PEMDI	Prioritas IV	Transformasi digital pemerintahan	Diskominfo	Selaras
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK	WTP	Prioritas IV	Penguatan pengelolaan keuangan daerah	BPKAD, Inspektorat	Selaras
	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	72,50	Prioritas IV	Pengembangan kompetensi ASN	BKPSDM	Selaras
	Terwujudnya pelayanan publik prima	Indeks Pelayanan Publik	4,42	Prioritas IV	Peningkatan pelayanan publik	Bagian Organisasi Setda	Selaras
	Terwujudnya pemerintahan	Indeks Survei Penilaian Integritas	77,34	Prioritas IV	Penguatan integritas dan SPIP	Inspektorat	Selaras

	yang bersih						
Meningkatnya kualitas lingkungan dan ketahanan daerah terhadap bencana	Meningkatnya penguatan mitigasi bencana	Tingkat Kesiapsiagaan Bencana	100	Prioritas V – Lingkungan Hidup	Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	BPBD	Selaras
	Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan	Status Lingkungan Hidup Daerah	77,00	Prioritas V	Pengendalian pencemaran, rehabilitasi DAS, pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Selaras

Berdasarkan matriks tersebut, Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 tetap konsisten sebagai penjabaran tahunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Seluruh tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama RPJMD masih menjadi dasar penyusunan prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD. Penyesuaian yang dilakukan dalam Perubahan RKPD lebih diarahkan pada perubahan target tahunan, penajaman program prioritas, penyesuaian pendanaan, serta percepatan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 dan kemampuan fiskal daerah, tanpa mengubah arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Matriks ini juga menunjukkan bahwa lima prioritas pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 tetap mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui program-program prioritas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya, sehingga konsistensi antara dokumen RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS Perubahan, dan Perubahan APBD tetap terjaga.

4.4.2 Sinkronisasi dengan RKP Tahun 2026

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sinkronisasi dilakukan agar pembangunan daerah memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

Fokus sinkronisasi diarahkan pada:

- penguatan ketahanan pangan;
- peningkatan kualitas SDM;
- pengurangan kemiskinan;
- pembangunan infrastruktur;
- reformasi birokrasi;
- transformasi digital;
- pembangunan berkelanjutan.

Tabel 4.22 Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Perubahan RKPD

Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten	Bentuk Dukungan
Ketahanan pangan	Penguatan pertanian	Intensifikasi pertanian, irigasi
Peningkatan kualitas SDM	Pendidikan dan kesehatan	Beasiswa, layanan kesehatan, stunting
Pengurangan kemiskinan	Perlindungan sosial	P3KE, DTKS, pemberdayaan ekonomi
Infrastruktur	Jalan dan jembatan	Konektivitas kawasan produksi
Reformasi birokrasi	Tata kelola	SPBE dan SAKIP

4.4.3 Sinkronisasi dengan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan agar tercipta sinergi pembangunan antarwilayah.

Sinkronisasi dilakukan pada bidang:

- pengembangan kawasan strategis;
- ketahanan pangan;
- penguatan investasi;
- pengendalian inflasi;
- penanggulangan kemiskinan;
- pembangunan infrastruktur regional.

Tabel 4.23 Sinkronisasi Prioritas Provinsi dengan Kabupaten

Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Bentuk Sinergi
SDM Berkualitas	SDM Unggul	Pendidikan dan kesehatan
Ketahanan pangan	Pertanian	Produksi pangan dan irigasi
Infrastruktur	Jalan kabupaten	Konektivitas antarwilayah
Investasi	Pengembangan ekonomi	Promosi investasi dan UMKM
Lingkungan	Pengendalian banjir	Rehabilitasi DAS dan drainase

4.4.4 Dukungan terhadap Asta Cita

Perubahan RKPD Tahun 2026 juga mendukung implementasi Asta Cita melalui program-program prioritas daerah yang relevan.

Tabel 4.24 Dukungan Perubahan RKPD terhadap Asta Cita

Asta Cita	Program Kabupaten
Penguatan SDM	Pendidikan, kesehatan, penurunan stunting
Ketahanan pangan	Intensifikasi pertanian
Hilirisasi	Pengembangan agroindustri
Reformasi birokrasi	SPBE, SAKIP
Lingkungan	Pengendalian banjir dan rehabilitasi DAS

4.4.5 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN)

Kabupaten Barito Kuala memberikan dukungan terhadap berbagai Program Strategis Nasional yang relevan dengan karakteristik wilayah.

Fokus Dukungan

- ketahanan pangan nasional;
- pembangunan jaringan jalan;
- pembangunan kawasan permukiman;
- peningkatan kualitas SDM;
- pengendalian banjir;
- transformasi digital.

Tabel 4.25 Program Strategis Nasional yang Didukung Kabupaten

PSN	Dukungan Kabupaten	OPD Penanggung Jawab
Ketahanan Pangan	Intensifikasi pertanian	Dinas Pertanian
Infrastruktur	Jalan dan jembatan	Dinas PUPR
Air Minum	SPAM	Dinas Perkim
Pengendalian Banjir	Drainase dan normalisasi sungai	Dinas PUPR

4.4.6 Dukungan terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga mengarahkan program pembangunan untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), terutama pada sektor yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Program daerah yang mendukung PHTC antara lain:

- percepatan penurunan stunting;
- peningkatan akses pendidikan;
- penguatan layanan kesehatan primer;
- pengembangan ketahanan pangan;
- percepatan digitalisasi pelayanan publik.

4.4.7 Analisis Sinkronisasi

Hasil sinkronisasi menunjukkan bahwa Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 telah selaras dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan RPJMD Kabupaten. Seluruh prioritas pembangunan tetap dipertahankan, namun dilakukan penyesuaian terhadap strategi, target, dan pendanaan berdasarkan hasil evaluasi Semester I serta perkembangan kapasitas fiskal daerah.

Pendekatan ini memastikan bahwa Perubahan RKPD tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional dan provinsi melalui program yang terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada hasil.

4.5 PROYEK PRIORITAS DAERAH TAHUN 2026

4.5.1 Umum

Proyek prioritas daerah merupakan kumpulan program dan kegiatan strategis yang diprioritaskan untuk diselesaikan pada Tahun Anggaran 2026 karena memiliki kontribusi

langsung terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan pelayanan publik, dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, proyek prioritas disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Semester I Tahun 2026. Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian proyek strategis telah memasuki tahap pelaksanaan fisik, sedangkan beberapa proyek lainnya memerlukan percepatan pelaksanaan pada Semester II agar target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal.

Penetapan proyek prioritas mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu:

1. mendukung langsung pencapaian sasaran RPJMD;
2. mendukung Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi, dan Prioritas Kabupaten;
3. memberikan manfaat langsung kepada masyarakat;
4. memiliki dampak ekonomi yang tinggi;
5. telah memiliki kesiapan teknis dan administrasi;
6. memiliki kepastian pendanaan.

4.5.2 Proyek Prioritas Bidang Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia tetap menjadi prioritas utama melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penurunan stunting.

Tabel 4.26 Proyek Prioritas Bidang SDM

No	Proyek Prioritas	Lokasi	OPD	Target Semester II
1	Rehabilitasi ruang kelas SD/SMP	Seluruh Kecamatan	Dinas Pendidikan	Penyelesaian pekerjaan fisik
2	Pembangunan sarana pendidikan	Wilayah prioritas	Dinas Pendidikan	Meningkatnya akses pendidikan
3	Percepatan penurunan stunting	17 Kecamatan	Dinas Kesehatan	Penurunan prevalensi stunting
4	Penguatan layanan kesehatan primer	Seluruh Puskesmas	Dinas Kesehatan	Peningkatan cakupan pelayanan
5	Peningkatan perlindungan sosial	Seluruh Kabupaten	Dinas Sosial	Data P3KE dan DTKS tervalidasi

Analisis

Evaluasi Semester I menunjukkan bahwa sebagian besar proyek pelayanan dasar telah berjalan sesuai rencana, namun penyelesaian pembangunan fisik pendidikan dan kesehatan masih perlu dipercepat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat pada akhir Tahun 2026.

4.5.3 Proyek Prioritas Bidang Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk memperkuat sektor unggulan Kabupaten Barito Kuala, khususnya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, UMKM, dan investasi.

Tabel 4.27 Proyek Prioritas Bidang Ekonomi

No	Proyek	Lokasi	OPD	Target
1	Intensifikasi Pertanian	Sentra Padi	Dinas Pertanian	Peningkatan produktivitas
2	Pengembangan Pertanian Rawa	Wilayah Pasang Surut	Dinas Pertanian	Optimalisasi lahan
3	Pengembangan Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan	DKPP	Produksi meningkat
4	Pengembangan UMKM	Seluruh Kecamatan	Diskoperindag	UMKM naik kelas
5	Promosi Investasi	Kabupaten Batola	DPMPTSP	Nilai investasi meningkat

Analisis

Berdasarkan evaluasi Semester I, sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Barito Kuala. Oleh karena itu, Semester II difokuskan pada peningkatan produktivitas lahan, penyediaan sarana produksi, hilirisasi komoditas, serta penguatan akses pemasaran produk lokal.

4.5.4 Proyek Prioritas Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan konektivitas wilayah, pelayanan dasar, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Tabel 4.28 Proyek Prioritas Infrastruktur

No	Proyek	Lokasi	OPD	Target
1	Peningkatan Jalan Kabupaten	Ruas Prioritas	PUPR	Jalan mantap meningkat
2	Rehabilitasi Jembatan	Lokasi Prioritas	PUPR	Jembatan mantap
3	Rehabilitasi Irigasi	Daerah Irigasi	PUPR	Layanan irigasi meningkat
4	Pengembangan SPAM	Wilayah pelayanan	PUPR	Akses air minum meningkat
5	Penataan Kawasan	Kawasan kumuh	Perkim	Permukiman layak

	Permukiman			

Analisis

Hasil evaluasi Semester I menunjukkan bahwa proyek infrastruktur memerlukan percepatan karena sebagian besar pekerjaan fisik baru dimulai setelah proses pengadaan selesai. Oleh karena itu Semester II diarahkan sebagai periode percepatan penyelesaian pekerjaan.

4.5.5 Proyek Prioritas Tata Kelola

Transformasi birokrasi tetap menjadi fokus melalui digitalisasi pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 4.29 Proyek Prioritas Tata Kelola

No	Proyek	OPD	Target
1	Penguatan SPBE	Diskominfo	Indeks SPBE meningkat
2	Peningkatan Nilai SAKIP	Bapperida, Bagian Organisasi	SAKIP meningkat
3	Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Indeks RB meningkat
4	Penguatan MCP KPK	Inspektorat	MCP meningkat
5	Integrasi Satu Data Daerah	Bapperida	Data pembangunan terintegrasi

4.5.6 Proyek Prioritas Lingkungan Hidup

Prioritas lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap banjir, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tabel 4.30 Proyek Prioritas Lingkungan

No	Proyek	Lokasi	OPD	Target
1	Normalisasi Sungai	Wilayah Rawan	PUPR	Genangan berkurang
2	Rehabilitasi DAS	Hulu Sungai	DLH	Lahan kritis berkurang
3	Pengelolaan Sampah Terpadu	TPA/TPS3R	DLH	Persampahan meningkat
4	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Perkotaan	DLH	RTH meningkat
5	Pengendalian Pencemaran	Seluruh Kabupaten	DLH	IKLH meningkat

4.5.7 Lokasi Prioritas Pembangunan

Salah satu penyempurnaan penting dalam Perubahan RKPD adalah penegasan lokasi prioritas pelaksanaan program. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Semester I, kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat kemiskinan, kerawanan banjir, kebutuhan pelayanan dasar, serta kesiapan pelaksanaan kegiatan.

Lokasi prioritas diarahkan pada:

- kecamatan dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi;
- kawasan sentra produksi pertanian dan perikanan;
- wilayah dengan kondisi infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan;
- kawasan rawan banjir;
- kawasan permukiman yang memerlukan peningkatan kualitas lingkungan;
- wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

4.5.8 Strategi Percepatan Proyek Prioritas

Untuk memastikan seluruh proyek strategis selesai sesuai target Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan strategi percepatan sebagai berikut:

1. percepatan proses pengadaan barang dan jasa;
2. monitoring mingguan terhadap proyek strategis;
3. pengendalian fisik dan keuangan secara berkala;
4. penyelesaian hambatan administrasi lintas perangkat daerah;
5. percepatan pembayaran termin pekerjaan;
6. penguatan fungsi pengawasan oleh APIP;
7. pelaporan berkala kepada Kepala Daerah melalui Bapperida.

4.6 KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.6.1 Umum

Kerangka pendanaan prioritas pembangunan daerah merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sasaran, prioritas, program, dan proyek pembangunan Kabupaten Barito Kuala pada Semester II Tahun 2026. Penyusunan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Semester I, proyeksi pendapatan daerah, kemampuan pembiayaan, serta arah kebijakan fiskal daerah sebagaimana diuraikan pada BAB III.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, kerangka pendanaan tidak hanya berfungsi sebagai alokasi anggaran, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian pembangunan. Oleh karena itu, setiap perubahan pagu indikatif harus memiliki dasar yang jelas, baik karena perubahan target pendapatan, percepatan pelaksanaan proyek strategis, efisiensi belanja, maupun penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Prinsip penyusunan kerangka pendanaan adalah:

1. **konsisten** dengan kemampuan riil keuangan daerah;
2. **berorientasi hasil (result oriented budgeting)**;
3. **money follows program**;
4. **spending better**, yaitu mengutamakan kualitas belanja dibandingkan besaran anggaran;
5. menjaga **kesinambungan fiskal (fiscal sustainability)**.

4.6.2 Arah Kebijakan Pendanaan

Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, pendanaan pembangunan pada Semester II diarahkan pada beberapa kebijakan pokok, yaitu:

1. memprioritaskan pendanaan bagi program yang mendukung pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2025–2029;
2. menyelesaikan proyek strategis daerah yang telah memasuki tahap pelaksanaan;
3. menjaga keberlanjutan pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
4. memperkuat ketahanan pangan, pengendalian banjir, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
5. meningkatkan efisiensi belanja melalui rasionalisasi kegiatan yang belum siap dilaksanakan;
6. mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan di luar APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.6.3 Kerangka Pendanaan Menurut Prioritas Pembangunan

Pendanaan pembangunan pada Semester II Tahun 2026 difokuskan pada lima prioritas pembangunan daerah. Alokasi anggaran setiap prioritas akan disesuaikan dalam Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Semester I, perkembangan pendapatan daerah, serta kebutuhan percepatan pencapaian target pembangunan.

Tabel 4.31 Kerangka Pendanaan Menurut Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan	Pagu APBD Murni (Rp)	Proyeksi Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Perubahan	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas SDM	**889.522.158.793**	**798.803.919.879**	**(90.718.238.914)**	**-10,20%**	Dipertahankan dan diperkuat melalui perlindungan belanja pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, serta penguatan karakter dan kebudayaan masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi	**58.055.941.212**	**41.413.654.450**	**(16.642.286.762)**	**-28,67%**	Difokuskan pada sektor unggulan daerah, terutama pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, industri pengolahan, perdagangan, UMKM, investasi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Rasionalisasi anggaran perlu diarahkan agar tidak mengurangi kegiatan yang berdampak langsung pada produksi, pendapatan masyarakat, dan pengendalian kemiskinan.

Infrastruktur	**373.165.944.338**	**295.295.773.894**	**(77.870.170.444)**	**-20,87%**	Percepatan penyelesaian proyek strategis yang dapat diselesaikan pada Tahun 2026, terutama jalan, jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman, serta konektivitas kawasan produksi. Kegiatan yang belum siap secara teknis dan administratif dapat ditunda atau disesuaikan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan dasar.
Tata Kelola Pemerintahan	**630.614.575.678**	**525.258.712.586**	**(105.355.863.092)**	**-16,71%**	Penguatan SPBE, SAKIP, reformasi birokrasi, akuntabilitas keuangan, pengawasan internal, pelayanan publik, administrasi kependudukan, pengelolaan pendapatan dan aset, serta peningkatan profesionalitas ASN. Efisiensi diarahkan pada belanja penunjang yang tidak langsung mendukung pencapaian kinerja dan pelayanan publik.
Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	**33.787.791.569**	**27.551.615.137**	**(6.236.176.432)**	**-18,46%**	Pengendalian banjir dan bencana hidrometeorologi, peningkatan kesiapsiagaan

					bencana, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, rehabilitasi lingkungan, perlindungan tutupan lahan, dan pemeliharaan capaian IKLH. Penyesuaian anggaran tetap harus melindungi kegiatan mitigasi bencana dan pelayanan lingkungan yang bersifat wajib.
Total	**1.985.146.411.590**	**1.688.323.675.946**	**(296.822.735.644)**	**-14,95%**	Penyesuaian belanja dilakukan secara selektif dengan mempertahankan pelayanan dasar, program prioritas RPJMD, kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, dan kegiatan yang dapat diselesaikan sampai akhir tahun.

4.6.4 Kerangka Pendanaan Menurut Urusan Pemerintahan

Pendanaan pembangunan juga disusun menurut urusan pemerintahan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban pelayanan dasar serta mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 4.32 Kerangka Pendanaan Menurut Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan	Pagu Murni (Rp)	Usulan Perubahan (Rp)	Persentase	Keterangan
Pendidikan	553.059.213.676,00	524.171.991.977,00	**-5,22%**	Prioritas pelayanan dasar
Kesehatan	281.181.821.029,00	188.598.960.791,00	**-32,93%**	Prioritas pelayanan dasar
Pekerjaan Umum	277.417.277.060,00	227.387.287.622,00	**-18,03%**	Infrastruktur

Perumahan dan Permukiman	26.579.849.163,00	32.387.921.109,00	**+21,85%**	Infrastruktur dasar
Pertanian	7.104.398.648,00	6.801.822.411,00	**-4,26%**	Ketahanan pangan
Perikanan*	13.608.393.235,00	7.015.943.034,00	**-48,45%**	Ekonomi daerah
Lingkungan Hidup	850.000.000,00	0,00	**-100,00%**	Pengendalian banjir
Sosial	7.135.660.525,00	9.941.868.444,00	**+39,33%**	Penanggulangan kemiskinan
Perencanaan**	6.643.163.262,00	6.180.035.094,00	**-6,97%**	Penguatan tata kelola
Komunikasi dan Informatika	7.403.456.650,00	7.710.181.047,00	**+4,14%**	SPBE

4.6.5 Pendanaan Berdasarkan Sumber Dana

Pendanaan pembangunan Kabupaten Barito Kuala tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga memanfaatkan berbagai sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.33 Sumber Pendanaan Pembangunan

Sumber Pendanaan	Peruntukan	Arah Kebijakan
PAD	Program prioritas daerah	Optimalisasi penerimaan
Dana Transfer Pusat	Pelayanan dasar dan infrastruktur	Sesuai ketentuan TKD
Bantuan Keuangan Provinsi	Program sinergi	Penguatan koordinasi
DAK	Infrastruktur dan layanan dasar	Percepatan pelaksanaan
Dana Desa	Pembangunan desa	Sinergi dengan prioritas kabupaten
CSR	Infrastruktur sosial dan lingkungan	Kemitraan dunia usaha
KPBU	Infrastruktur strategis	Alternatif pembiayaan
Hibah	Program khusus	Sesuai ketentuan

4.6.6 Strategi Efisiensi Pendanaan

Dengan mempertimbangkan keterbatasan ruang fiskal, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menerapkan strategi efisiensi pendanaan sebagai berikut:

- mengutamakan program yang berdampak langsung kepada masyarakat;
- mengurangi belanja yang bersifat administratif dan seremonial;
- melakukan rasionalisasi kegiatan yang belum siap dilaksanakan;

- mengoptimalkan belanja berbasis kinerja;
- memanfaatkan pendanaan non-APBD untuk mendukung proyek strategis.

Efisiensi dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar dan tetap menjaga pencapaian target RPJMD.

4.6.7 Strategi Diversifikasi Pendanaan

Untuk memperluas kapasitas fiskal, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan mengembangkan sumber pendanaan alternatif melalui:

- Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), terutama untuk infrastruktur yang layak secara ekonomi;
- kerja sama dengan pemerintah provinsi dan kementerian/lembaga;
- pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Fiskal;
- penguatan kemitraan dengan dunia usaha melalui CSR;
- pemanfaatan hibah pemerintah dan lembaga donor sesuai ketentuan.

Diversifikasi ini penting agar ketergantungan terhadap APBD dapat dikurangi dan proyek-proyek prioritas tetap dapat dilaksanakan.

4.6.8 Analisis Kecukupan Pendanaan

Hasil evaluasi Semester I menunjukkan bahwa kapasitas pendanaan Kabupaten Barito Kuala masih cukup untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sampai akhir Tahun Anggaran 2026. Namun demikian, beberapa penyesuaian diperlukan sebagai konsekuensi dari evaluasi pendapatan dan perkembangan realisasi belanja.

Pendekatan yang digunakan dalam Perubahan RKPD adalah **menyesuaikan pendanaan dengan kemampuan riil fiskal**, sehingga setiap penambahan pagu harus diimbangi dengan kepastian sumber pendanaan. Sebaliknya, apabila terdapat penurunan target pendapatan, maka dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan yang belum mendesak tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar.

4.6.9 Kesimpulan

Kerangka pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun untuk memastikan bahwa seluruh sasaran, prioritas, program, dan proyek pembangunan memiliki dukungan pendanaan yang memadai, realistis, dan berkelanjutan. Pendanaan diarahkan untuk menjaga keseimbangan

fiskal daerah, mempercepat penyelesaian proyek strategis, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, dan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber pembiayaan yang tersedia.

4.7 INDIKATOR KINERJA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026

4.7.1 Umum

Indikator Kinerja Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang digunakan untuk menilai ketercapaian sasaran pembangunan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026. Penyusunan indikator kinerja mengacu pada Rencana Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, serta arah kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2026.

Perubahan RKPD tidak mengubah sasaran strategis daerah, namun melakukan penyesuaian strategi, fokus program, dan alokasi sumber daya agar target indikator kinerja tetap dapat dicapai pada akhir tahun. Oleh karena itu, indikator kinerja dalam Perubahan RKPD menjadi dasar penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, KUPA–PPAS Perubahan, Perubahan APBD, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, sebagian besar indikator masih berada pada jalur pencapaian (*on track*). Namun beberapa indikator seperti tingkat kemiskinan, investasi, infrastruktur, dan kualitas lingkungan hidup memerlukan percepatan melalui penguatan program prioritas pada Semester II.

4.7.2 Indikator Kinerja Utama Daerah

Tabel 4.34 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Capaian Semester I*	Proyeksi Akhir Tahun	SKPD Pengampu Utama
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	**74,75**	72,85	73,20	Dinas Kesehatan
2	Indeks Pendidikan	**63,20**	61,89	63,20	Dinas Pendidikan
3	Indeks Harmoni Indonesia	86,5	6,64	6,97	Bakesbangpol
4	Indeks Kesejahteraan Sosial	72,50	56,03	59,60	Dinas Sosial
5	Tingkat Kemiskinan (%)	**3,88**	4,31	3,88	Multi Sektoral
6	Rasio PDRB Sektor Unggulan terhadap Total PDRB (%)	42,25	26,85	29,75	BPS
7	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	**37,00**	36,34	37,00	BPS
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	**73,60**	71,98	72,30	Disnakertrans

9	Indeks Inovasi Daerah	41	51,38	52,10	Bapperida
10	Pilar Infrastruktur	72	54,42	58,20	Dinas PUPR
11	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	4	5,58	5,26	DKPP
12	Laju Inflasi (%)	1,82	3,97	3,50	Setda (Ekosda)
13	Nilai SAKIP	**73,50**	67,19	68,50	Bapperida, Inspektorat, Setda
14	Indeks SPBE	**3,7**	3,28	3,38	Diskominfo
15	Indeks PEMDI	-	-	1,40	Diskominfo
16	Opini BPK	**WTP**	WTP	WTP	Inspektorat
17	Indeks Profesionalitas ASN	**72,50**	78,27	79,40	BKPP
18	Indeks Pelayanan Publik	**4,42**	4,35	4,42	Setda Organisasi
19	Indeks Survei Penilaian Integritas	**77,34**	78,85	78,86	Inspektorat
20	Tingkat Kesiapsiagaan Bencana (%)	**100**	100	100	BPBD
21	Status Lingkungan Hidup Daerah	**77**	71,44	72,60	DLH

Keterangan: Kolom *Capaian Semester I* diisi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026, sedangkan *Proyeksi Akhir Tahun* merupakan target yang diharapkan dapat dicapai melalui percepatan pelaksanaan program pada Semester II. Target Tahun 2026 mengacu pada dokumen Indikator Kinerja Utama Kabupaten dalam Rencana Perubahan RPJMD.

4.7.3 Analisis Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan target indikator kinerja utama Tahun 2026, fokus pelaksanaan Perubahan RKPD diarahkan pada indikator yang memerlukan percepatan pencapaian.

Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Kuala berada pada jalur pencapaian target RPJMD Tahun 2025–2029. Dari 21 indikator kinerja utama, terdapat indikator yang telah menunjukkan kinerja baik dan diproyeksikan mencapai target akhir tahun, namun terdapat pula beberapa indikator yang masih memerlukan percepatan pelaksanaan program maupun penyesuaian target sesuai dinamika pelaksanaan pembangunan.

1. Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pada bidang kesehatan, **Usia Harapan Hidup (UHH)** mencapai **72,85 tahun** dari target **74,75 tahun** dan diproyeksikan meningkat menjadi **73,20 tahun** pada akhir tahun. Capaian tersebut menunjukkan tren positif, namun masih memerlukan peningkatan kualitas pelayanan

kesehatan dasar, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Dengan berbagai intervensi tersebut, indikator ini berada pada kategori **On Track** meskipun masih terdapat selisih terhadap target tahunan.

Pada sektor pendidikan, **Indeks Pendidikan** mencapai **61,89** dari target **63,20** dan diproyeksikan mencapai target pada akhir tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan berjalan sesuai rencana melalui peningkatan kualitas pembelajaran, rehabilitasi sarana pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, serta penguatan pendidikan karakter.

Sementara itu, **Indeks Harmoni Indonesia** menunjukkan capaian **6,64** dengan proyeksi **6,97**, jauh berbeda dibanding target **86,50**. Perbedaan tersebut bukan disebabkan rendahnya kondisi kerukunan masyarakat, tetapi merupakan dampak perubahan metode pengukuran indikator secara nasional sehingga memerlukan penyesuaian perhitungan dan penyelarasan target dalam dokumen perencanaan.

Indeks Kesejahteraan Sosial mencapai **56,03** dari target **72,50** dengan proyeksi **59,60**, sehingga memerlukan penyesuaian target sekaligus penguatan program rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Tingkat Kemiskinan masih berada pada angka **4,31%**, lebih tinggi dibanding target **3,88%**, namun diproyeksikan dapat mencapai target melalui percepatan program penanggulangan kemiskinan lintas sektor, penguatan perlindungan sosial, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan produktivitas masyarakat.

2. Bidang Perekonomian Daerah

Pada sektor ekonomi, **Rasio PDRB Sektor Unggulan terhadap Total PDRB** baru mencapai **26,85%** dari target **42,25%** dengan proyeksi akhir tahun **29,75%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor unggulan terhadap perekonomian daerah masih belum optimal akibat terbatasnya hilirisasi komoditas, investasi sektor produktif, serta nilai tambah hasil pertanian dan perikanan. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian target dan penguatan intervensi pembangunan ekonomi.

Sebaliknya, **PDRB Per Kapita** telah mencapai **Rp36,34 juta** dari target **Rp37,00 juta** dan diproyeksikan mencapai target pada akhir tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan

aktivitas ekonomi masyarakat seiring membaiknya produksi sektor unggulan dan peningkatan investasi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai **71,98%** dari target **73,60%** dan diproyeksikan meningkat menjadi **72,30%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja mulai pulih, meskipun masih diperlukan peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan kewirausahaan.

Indeks Inovasi Daerah mencapai **51,38**, jauh melampaui target **41,00**, sehingga target tahun berjalan perlu disesuaikan pada periode perencanaan berikutnya. Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam mendorong inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan masih sebesar **5,58%**, lebih tinggi dibanding target **4,00%**, namun diproyeksikan menurun menjadi **5,26%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan, diversifikasi konsumsi, dan peningkatan akses pangan bergizi masih perlu ditingkatkan.

Laju Inflasi mencapai **3,97%**, lebih tinggi dari target **1,82%**, namun masih berada dalam kondisi terkendali karena dipengaruhi faktor eksternal, terutama kenaikan harga komoditas pangan strategis. Melalui penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar, dan stabilisasi pasokan pangan, inflasi diproyeksikan menurun menjadi **3,50%** pada akhir tahun.

3. Bidang Infrastruktur

Pilar Infrastruktur mencapai **54,42** dari target **72,00**, dengan proyeksi meningkat menjadi **58,20**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur masih memerlukan percepatan, mengingat sebagian besar pekerjaan fisik baru memasuki tahap pelaksanaan pada Semester I. Fokus Semester II diarahkan pada percepatan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, dan pengendalian banjir.

4. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Nilai SAKIP mencapai **67,19** dari target **73,50** dan diproyeksikan meningkat menjadi **68,50**. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Indeks SPBE mencapai **3,28** dari target **3,70**, sehingga masih memerlukan percepatan integrasi layanan digital dan implementasi pemerintahan berbasis elektronik. Di sisi lain, **Indeks PEMDI** mulai diterapkan sebagai indikator baru nasional dan diproyeksikan mencapai **1,40** pada akhir tahun sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan.

Dalam aspek tata kelola lainnya, **Opini BPK** tetap dipertahankan pada kategori **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. **Indeks Profesionalitas ASN** mencapai **78,27**, melampaui target **72,50**, sedangkan **Indeks Pelayanan Publik** mencapai **4,35** dari target **4,42** dan diproyeksikan mencapai target pada akhir tahun. Selain itu, **Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)** mencapai **78,85**, melampaui target **77,34**, yang menunjukkan semakin baiknya budaya integritas dan tata kelola pemerintahan.

5. Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Pada bidang lingkungan hidup, **Status Lingkungan Hidup Daerah** mencapai **71,44** dari target **77,00** dan diproyeksikan meningkat menjadi **72,60**. Capaian tersebut menunjukkan perlunya percepatan pengendalian pencemaran lingkungan, rehabilitasi daerah aliran sungai, peningkatan pengelolaan persampahan, serta konservasi sumber daya alam.

Sementara itu, **Tingkat Kesiapsiagaan Bencana** telah mencapai **100%** sesuai target tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana telah berjalan dengan baik. Namun demikian, mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Barito Kuala yang rentan terhadap banjir dan bencana hidrometeorologi, penguatan sistem peringatan dini, normalisasi sungai, serta peningkatan kapasitas masyarakat tetap menjadi prioritas pada Semester II.

Secara keseluruhan, evaluasi Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pembangunan berada pada jalur pencapaian target (**on track**), terutama pada indikator pendidikan, kesehatan, profesionalitas ASN, inovasi daerah, opini BPK, pelayanan publik, integritas pemerintahan, dan kesiapsiagaan bencana. Namun demikian, beberapa indikator strategis masih memerlukan **percepatan pelaksanaan program**, yaitu **tingkat kemiskinan, rasio PDRB sektor unggulan, pilar infrastruktur, nilai SAKIP, indeks SPBE, dan Status Lingkungan Hidup Daerah**, sedangkan **Indeks Harmoni Indonesia** dan **Indeks Kesejahteraan Sosial** memerlukan **penyesuaian metode pengukuran dan target** agar selaras dengan kebijakan nasional dan kondisi riil daerah. Dengan percepatan pelaksanaan program prioritas pada Semester II serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, target pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 diharapkan dapat dicapai secara optimal.

4.8 Pendekatan Spasial dalam Perubahan RKPD Tahun 2026

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 tetap menerapkan **pendekatan spasial** sebagai salah satu pendekatan pembangunan daerah dengan memperhatikan karakteristik wilayah, potensi sumber daya, tingkat pelayanan dasar, kerentanan bencana, serta arahan pola ruang dan struktur ruang sebagaimana ditetapkan dalam **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala**. Pendekatan spasial dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan pendanaan pada Semester II Tahun 2026 tetap selaras dengan kebijakan penataan ruang daerah sehingga pembangunan berjalan efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan masih memerlukan penajaman lokasi intervensi sesuai karakteristik wilayah Kabupaten Barito Kuala yang didominasi oleh kawasan rawa, sentra pertanian pangan, kawasan perikanan budidaya, kawasan perkebunan, kawasan permukiman, serta wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi. Oleh karena itu, penyesuaian program prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara kebutuhan pembangunan, potensi wilayah, serta arahan pengembangan kawasan sebagaimana diatur dalam RTRW Kabupaten Barito Kuala.

Pendekatan spasial juga digunakan dalam penentuan lokasi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi, air minum, sanitasi, kawasan permukiman, pengembangan sentra produksi pertanian dan perikanan, serta kawasan ekonomi lokal. Dengan demikian, setiap intervensi pembangunan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan sektoral, tetapi juga mendukung penguatan kawasan strategis daerah, peningkatan konektivitas antarwilayah, pemerataan pelayanan dasar, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai rencana tata ruang daerah.

Tabel 4.35 Sebaran Lokus Prioritas Pembangunan Semester II Tahun 2026 Berdasarkan Pendekatan Spasial

Kawasan/Lokus Prioritas	Karakteristik Wilayah	Fokus Program	Keterkaitan RTRW
Kawasan sentra pertanian pasang surut	Lahan rawa pertanian	Rehabilitasi irigasi, jalan usaha tani, peningkatan produksi pangan	Mendukung kawasan pertanian pangan berkelanjutan
Kawasan budidaya perikanan rawa	Kawasan perikanan budidaya	Program Bioflok Terpadu, sarana budidaya, pengolahan hasil	Mendukung kawasan budidaya perikanan

Kawasan sawit dan peternakan	Kawasan perkebunan	Program Sawit–Peternakan Terintegrasi	Mendukung kawasan perkebunan dan peternakan
Kawasan rawan banjir	Daerah dataran rendah	Drainase, normalisasi saluran, pengendalian banjir	Mendukung kawasan lindung dan mitigasi bencana
Kawasan permukiman	Kawasan pelayanan dasar	Air minum, sanitasi, rumah layak huni	Mendukung pengembangan kawasan permukiman
Kawasan pusat pelayanan	Ibukota kabupaten dan pusat kecamatan	Jalan, jembatan, SPBE, pelayanan publik	Mendukung struktur ruang wilayah

4.9 Penyelarasan Aspek Spasial dalam Penentuan Prioritas Pembangunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 menerapkan **pendekatan spasial** dengan mengintegrasikan hasil analisis kewilayahan sebagaimana diuraikan pada BAB II dengan penentuan prioritas pembangunan, lokasi intervensi, serta alokasi pendanaan pada Semester II Tahun 2026. Pendekatan ini bertujuan agar penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan tidak hanya didasarkan pada pendekatan sektoral, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik wilayah, tingkat urgensi permasalahan, potensi daerah, serta arahan pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten Barito Kuala.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa permasalahan pembangunan tidak tersebar secara merata pada seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala. Beberapa kecamatan memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap kemiskinan, stunting, banjir, keterbatasan pelayanan dasar, maupun akses infrastruktur. Oleh karena itu, Perubahan RKPD Tahun 2026 mengarahkan penyesuaian lokasi program melalui **pendekatan berbasis lokus (locus-based planning)** sehingga intervensi pembangunan difokuskan pada wilayah yang memiliki tingkat urgensi tertinggi berdasarkan hasil evaluasi dan analisis spasial pada BAB II.

Pendekatan tersebut dilakukan melalui penyelarasan antara hasil analisis kondisi wilayah, data kemiskinan, prevalensi stunting, kawasan rawan banjir, kawasan sentra produksi pertanian dan perikanan, serta tingkat pelayanan infrastruktur dengan lokasi pelaksanaan program prioritas. Dengan demikian, perubahan alokasi pendanaan pada Semester II Tahun 2026 diarahkan secara **asimetris**, yaitu memberikan perhatian yang lebih besar kepada wilayah yang memiliki kebutuhan pembangunan lebih tinggi tanpa mengabaikan pemerataan pelayanan antarwilayah.

Tabel 4.36 Penyelarasan Analisis Spasial dengan Lokasi Prioritas Intervensi Perubahan RKPD Tahun 2026

Isu Strategis (BAB II)	Karakteristik Wilayah/Lokus	Prioritas Intervensi (BAB IV)	Program Prioritas (BAB V)
Kemiskinan	Kecamatan/desa dengan jumlah penduduk miskin tinggi	Percepatan Penurunan Kemiskinan	Perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, pengembangan UMKM, peningkatan kesempatan kerja
Stunting	Desa lokus stunting	Percepatan Peningkatan Kualitas SDM	Intervensi gizi spesifik dan sensitif, air minum, sanitasi, konvergensi stunting
Ketahanan Pangan	Sentra produksi pertanian pasang surut	Penguatan Ekonomi Daerah	Rehabilitasi irigasi, intensifikasi pertanian, bantuan sarana produksi
Budidaya Perikanan	Kawasan budidaya perikanan rawa	Penguatan Ekonomi Daerah	Program Bioflok Terpadu, pengolahan hasil perikanan
Kawasan Perkebunan	Sentra sawit	Penguatan Ekonomi Daerah	Program Sawit–Peternakan Terintegrasi
Kawasan Rawan Banjir	Wilayah dataran rendah/rawa	Ketahanan Lingkungan dan Infrastruktur	Normalisasi saluran, rehabilitasi drainase, pengendalian banjir
Kawasan Permukiman	Wilayah dengan akses pelayanan dasar rendah	Peningkatan Pelayanan Dasar	Air minum, sanitasi, rumah layak huni
Kawasan Sentra Produksi	Kawasan pertanian, perikanan, perkebunan	Peningkatan Konektivitas	Pembangunan jalan, jembatan, dan jalan usaha tani

Sebagai tindak lanjut dari penyelarasan aspek spasial tersebut, lokasi program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan pembangunan masing-masing wilayah. Penyesuaian target, lokasi pelaksanaan, dan pagu pendanaan pada BAB V diarahkan untuk mendukung kawasan yang memiliki tingkat urgensi permasalahan lebih tinggi, sekaligus memperkuat kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sesuai arahan RTRW Kabupaten Barito Kuala. Dengan pendekatan tersebut, pengalokasian anggaran pada Semester II Tahun 2026 menerapkan prinsip **locus-based budget**, yaitu pengalokasian sumber daya pembangunan secara lebih terarah berdasarkan karakteristik wilayah, tingkat kebutuhan, dan hasil evaluasi pembangunan daerah.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah pada Bab ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran, prioritas pembangunan, dan arah kebijakan sebagaimana telah ditetapkan pada Bab IV. Setiap program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, lokasi, dan pagu pendanaan disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Semester II Tahun 2026.

5.1 Kebijakan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 merupakan penjabaran operasional dari sasaran, prioritas, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama Semester II Tahun Anggaran 2026. Penyusunan rencana kerja ini merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun 2026, perkembangan kondisi makro ekonomi daerah, perubahan asumsi fiskal, dinamika kebijakan nasional dan provinsi, serta hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Perubahan RKPD tidak mengubah arah kebijakan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, namun melakukan penyempurnaan terhadap target kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, lokasi pelaksanaan, serta pendanaan agar lebih adaptif terhadap kondisi aktual. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan pada Semester II tetap berada pada jalur pencapaian sasaran RPJMD dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil evaluasi Semester I menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan pembangunan telah berjalan sesuai dengan rencana, namun terdapat beberapa bidang yang memerlukan percepatan, khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), percepatan realisasi belanja modal, penyelesaian proyek infrastruktur strategis, penurunan kemiskinan, penguatan investasi, percepatan penanganan stunting, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, penyesuaian alokasi anggaran, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan rencana kerja dan pendanaan daerah juga memperhatikan prinsip sinkronisasi dengan kebijakan nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan RPJMD Kabupaten

Barito Kuala, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan yang kuat dengan pencapaian target pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.

Kebijakan pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan daerah. Penyesuaian pendanaan dilakukan sebagai respons terhadap perubahan kapasitas fiskal daerah, dinamika pelaksanaan program pembangunan, serta kebutuhan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Secara umum arah kebijakan pendanaan meliputi:

1. mempertahankan alokasi belanja pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
2. memprioritaskan penyelesaian proyek strategis daerah yang telah memasuki tahap pelaksanaan;
3. mengoptimalkan belanja yang memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan;
4. melakukan efisiensi terhadap belanja penunjang yang tidak mempengaruhi pencapaian indikator pembangunan;
5. memperkuat belanja pendukung transformasi digital pemerintahan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. menjaga kesinambungan pendanaan pengendalian banjir, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil penyesuaian Perubahan RKPD Tahun 2026, terjadi perubahan terhadap kapasitas fiskal daerah yang berdampak pada penyesuaian alokasi pendanaan program pembangunan.

Tabel 5.1 Perubahan Kerangka Pendanaan Daerah

Uraian	RKPD Murni (Rp)	Perubahan RKPD (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase
Pendapatan Daerah	1.785.146.411.590	1.449.212.078.740	(335.934.332.850)	-18,82%
Belanja Daerah	1.985.146.411.590	1.688.323.675.946	(296.822.735.644)	-14,95%
Pembiayaan Daerah	200.000.000.000	239.111.597.206	39.111.597.206	19,56%

Perubahan pendapatan daerah terutama dipengaruhi oleh penyesuaian proyeksi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah.

Penurunan kapasitas fiskal tersebut berdampak pada penyesuaian belanja daerah melalui rasionalisasi kegiatan yang belum menjadi prioritas dan pengalihan anggaran pada program yang memberikan dampak langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Di sisi lain, pembiayaan daerah mengalami peningkatan untuk menjaga keseimbangan anggaran dan mendukung keberlanjutan pelaksanaan program prioritas sampai akhir Tahun Anggaran 2026.

5.2 Rencana Kerja Berdasarkan Prioritas Pembangunan

Rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi pembangunan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dengan memperhatikan pendekatan spasial. Penentuan lokasi pelaksanaan program dilakukan berdasarkan hasil analisis kewilayahan, tingkat urgensi permasalahan, kawasan strategis daerah, sentra produksi, desa lokus stunting, kawasan rawan banjir, serta wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif lebih tinggi. Oleh karena itu, perubahan pendanaan pada Semester II Tahun 2026 diarahkan secara lebih fokus pada wilayah prioritas sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak pembangunan yang lebih besar.

Penetapan lokasi program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan pendekatan spasial melalui kesesuaian terhadap arahan RTRW Kabupaten Barito Kuala, karakteristik wilayah, tingkat pelayanan dasar, kawasan sentra produksi, kawasan strategis daerah, kawasan rawan bencana, serta kebutuhan peningkatan konektivitas antarwilayah. Dengan pendekatan tersebut, perubahan lokasi maupun pendanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat kawasan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, pelayanan dasar, dan pemerataan pembangunan.

Tabel 5.2 Keterkaitan Program Prioritas dengan Kawasan Pengembangan

Program Prioritas	Kawasan Pengembangan	Dukungan RTRW
Bioflok Terpadu	Kawasan budidaya perikanan rawa	Pengembangan kawasan perikanan
Sawit–Peternakan Terintegrasi	Kawasan perkebunan	Kawasan agropolitan
Ketahanan Pangan	Sentra produksi padi	Kawasan pertanian pangan berkelanjutan
Jalan dan Jembatan	Kawasan sentra produksi	Struktur jaringan jalan kabupaten
Air Minum dan Sanitasi	Kawasan permukiman	Kawasan perkotaan dan permukiman
Pengendalian Banjir	Kawasan rawan banjir	Kawasan lindung dan pengendalian bencana

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 dilakukan dengan tetap menjaga konsistensi antara sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja, target kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, serta pagu pendanaan. Setiap penyesuaian target kinerja yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Semester I Tahun 2026 telah ditindaklanjuti melalui penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, lokasi pelaksanaan, dan alokasi pendanaan sesuai kewenangan perangkat daerah. Sebaliknya, perubahan pendanaan tidak dilakukan secara terpisah, tetapi diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja daerah, dan target RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Dengan demikian, perubahan rencana kerja dan pendanaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 tetap menunjukkan keterkaitan yang logis, terukur, dan konsisten antara sasaran pembangunan, indikator kinerja, target, program, kegiatan, subkegiatan, dan alokasi anggaran.

Rencana kerja dan pendanaan daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 merupakan penjabaran operasional dari sasaran pembangunan, prioritas pembangunan, dan arah kebijakan sebagaimana telah ditetapkan pada Bab IV. Penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, lokasi, dan pagu pendanaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, perubahan kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan percepatan pencapaian target RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pada Semester II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengarahkan pelaksanaan pembangunan melalui beberapa program prioritas lintas sektor yang menjadi fokus intervensi daerah. Program tersebut meliputi **Program Bioflok Terpadu**, **Program Sawit–Peternakan Terintegrasi**, **Program Percepatan Penurunan Stunting**, dan **Program Percepatan Penurunan Kemiskinan**.

Implementasi **Program Bioflok Terpadu** dilaksanakan melalui sinergi perangkat daerah yang menangani urusan perikanan, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan usaha mikro dengan fokus pada peningkatan produktivitas budidaya ikan, efisiensi penggunaan air, penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya, serta peningkatan nilai tambah hasil perikanan.

Program Sawit–Peternakan Terintegrasi diarahkan pada pengembangan sistem usaha tani terpadu melalui integrasi subsektor perkebunan dan peternakan, pemanfaatan limbah perkebunan sebagai pakan ternak, peningkatan produktivitas komoditas unggulan, penguatan

kelembagaan petani dan peternak, serta peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat perdesaan.

Program Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan melalui konvergensi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat desa, keluarga berencana, serta perangkat daerah lainnya sesuai kewenangannya, dengan fokus pada desa dan keluarga berisiko stunting.

Program Percepatan Penurunan Kemiskinan dilaksanakan melalui penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan ketahanan pangan, serta pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan sasaran intervensi.

Seluruh program prioritas tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi pelaksanaan, dan pagu pendanaan perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pemerataan pembangunan.

Tabel 5.3 Matriks Keterkaitan Sasaran Pembangunan, Target Kinerja, Program Prioritas dan Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2026

Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja	Target 2026	Program Prioritas	Kegiatan/Sub kegiatan Prioritas	Perangkat Daerah Utama	Pagu Pendanaan RKPD Perubahan 2026
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,70	Peningkatan mutu pendidikan	Penyelenggaraan pendidikan, rehabilitasi sarana prasarana sekolah, peningkatan layanan pendidikan	Dinas Pendidikan	Rp524.171.991.977
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,75	Pelayanan kesehatan	Pelayanan kesehatan dasar, penguatan puskesmas, penurunan stunting	Dinas Kesehatan	Rp188.598.960.791
	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,75	Pelayanan rumah sakit	Pelayanan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	RSUD H. Abdul Azis Marabahan	Rp14.735.614.870
	Usia Harapan	74,75	Pelayanan	Pelayanan	RSUD H.	Rp30.986.950.000

	Hidup (UHH)		BLUD	kesehatan BLUD	Abdul Azis Marabahan – BLUD	
Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	3,88%	Perlindungan sosial	Bantuan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat miskin	Dinas Sosial	Rp9.941.868.444
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	73,60%	Ketenagakerjaan	Pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, penempatan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp5.831.293.105
Meningkatnya kualitas keluarga dan perlindungan perempuan	Indeks Kesejahteraan Sosial	72,50	Pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan	Pelayanan KB, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan keluarga	DPPKBPPPA	Rp8.343.407.219
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	4,00%	Ketahanan pangan dan perikanan	Cadangan pangan pemerintah, pengembangan perikanan dan diversifikasi pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp7.015.943.034
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Status Lingkungan Hidup Daerah	77,00	Pengelolaan lingkungan hidup	Pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran, rehabilitasi lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Rp23.991.319.046
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Sesuai Renstra OPD	Administrasi kependudukan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Dukcapil	Rp6.740.492.548
Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Sesuai Target RPJMD	Pemberdayaan masyarakat desa	Pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat	DPMD	Rp8.047.666.761
Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Pilar Infrastruktur	72,00	Infrastruktur jalan, permukiman dan kawasan	Pembangunan dan pemeliharaan jalan, drainase, sanitasi, kawasan permukiman	DPUPR dan Disperkim	Rp261.141.111.301
Meningkatnya konektivitas transportasi	Indeks Infrastruktur Transportasi	Sesuai Target RKPD	Perhubungan	Pengelolaan transportasi dan perlengkapan jalan	Dinas Perhubungan	Rp34.154.662.593
Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis	Indeks SPBE	3,70	Digitalisasi pemerintahan	Pengembangan SPBE, pusat data, layanan TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp7.967.714.047

elektronik						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,70%	UMKM, perdagangan dan industri	Pengembangan koperasi, UMKM, industri kecil dan perdagangan	Diskoperindag	Rp7.983.678.255
Meningkatnya investasi daerah	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	37,00	Penanaman modal	Pelayanan perizinan, promosi dan fasilitasi investasi	DPMPTSP	Rp3.912.858.188
Meningkatnya prestasi kepemudaan, olahraga, budaya dan pariwisata	Indeks Pembangunan Pemuda	Sesuai Target RKPD	Kepemudaan, olahraga, budaya dan pariwisata	Pembinaan olahraga, pelestarian budaya dan pengembangan destinasi wisata	Disporabudpar	Rp18.131.472.730
Meningkatnya literasi masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca	Sesuai Target RKPD	Perpustakaan dan kearsipan	Pengelolaan perpustakaan daerah dan arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp3.893.653.848
Meningkatnya produksi pertanian	Rasio PDRB Sektor Unggulan terhadap Total PDRB (%)	42,25%	Pertanian	Pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peningkatan produktivitas	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rp9.868.059.457
Meningkatnya produksi perkebunan dan peternakan	Rasio PDRB Sektor Unggulan terhadap Total PDRB (%)	42,25%	Perkebunan dan peternakan	Pengembangan komoditas perkebunan dan peternakan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Rp6.801.822.411

Pelaksanaan pembangunan Semester II Tahun 2026 difokuskan pada percepatan penyelesaian target pembangunan melalui optimalisasi program prioritas sesuai lima prioritas pembangunan daerah.

Tabel 5.4 Rencana Kerja Prioritas

Prioritas	Fokus Pelaksanaan Semester II
SDM	percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan
Ekonomi	peningkatan produktivitas pertanian, investasi, UMKM, dan pengendalian inflasi
Infrastruktur	percepatan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air minum, dan pengendalian banjir
Tata Kelola	peningkatan SAKIP, SPBE, pelayanan publik, inovasi daerah, dan kualitas perencanaan
Lingkungan	pengendalian banjir, pengelolaan sampah, rehabilitasi DAS, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup

5.2.1 Keterkaitan Hasil Evaluasi dengan Perubahan Rencana Kerja Daerah

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana diuraikan pada BAB II, dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi daerah dan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dijelaskan pada BAB III, serta penyesuaian sasaran, indikator kinerja, dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan pada BAB IV. Seluruh hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah pada BAB V melalui penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, lokasi pelaksanaan, serta alokasi pendanaan sesuai dengan perkembangan kondisi aktual daerah.

Dengan demikian, perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah tidak dilakukan secara parsial, tetapi merupakan tindak lanjut yang sistematis atas hasil evaluasi pembangunan, sehingga tetap menjaga konsistensi antara hasil evaluasi, arah kebijakan pembangunan, sasaran pembangunan, indikator kinerja daerah, program, kegiatan, subkegiatan, serta pendanaan dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Tabel 5.5 Keterkaitan Hasil Evaluasi dengan Perubahan Rencana Kerja Daerah

Tahapan	Hasil Evaluasi / Analisis	Tindak Lanjut dalam Perubahan RKPD
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana, namun masih terdapat beberapa indikator kinerja daerah, sasaran pembangunan, program prioritas, serta realisasi fisik dan keuangan yang memerlukan percepatan dan penyesuaian.	Menjadi dasar penyesuaian kebijakan pembangunan, target kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan pada Semester II Tahun 2026.
BAB III Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah	Terjadi perubahan asumsi ekonomi daerah, perkembangan pendapatan daerah, belanja, pembiayaan, dan kemampuan keuangan daerah yang memengaruhi kapasitas fiskal.	Menjadi dasar penyesuaian pagu pendanaan, rasionalisasi, realokasi, dan optimalisasi anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah	Dilakukan penyesuaian sasaran pembangunan, indikator kinerja daerah, target kinerja, serta penajaman prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026.	Menjadi dasar penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah agar tetap selaras dengan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.
BAB V Rencana Kerja dan	Hasil evaluasi, perubahan kondisi ekonomi, kemampuan keuangan	Menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan

Pendanaan Daerah	daerah, serta sasaran pembangunan ditindaklanjuti melalui perubahan program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, lokasi pelaksanaan, dan pagu pendanaan.	pada Semester II Tahun 2026 dan dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

5.2.2 Analisis Perubahan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, dilakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah pada Semester II Tahun 2026. Penyesuaian tersebut meliputi penambahan, pengurangan, perubahan target, perubahan lokasi pelaksanaan, maupun penyesuaian pagu pendanaan sesuai dengan perkembangan kondisi daerah, kemampuan keuangan daerah, dan kebutuhan percepatan pencapaian target pembangunan.

Tabel 5.6 Analisis Perubahan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Jenis Analisis	Jumlah	Persentase	Analisis / Dasar Perubahan
Jumlah subkegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026	**2.096**	100,00%	Seluruh subkegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.
Subkegiatan berhasil dipadankan dengan hasil evaluasi	**2.027**	**96,71%**	Menunjukkan bahwa sebagian besar subkegiatan dalam Perubahan RKPD telah dianalisis berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.
Subkegiatan mengalami perubahan	**709**	**33,83%**	Meliputi penyesuaian pagu anggaran, target kinerja, rasionalisasi pelaksanaan, maupun penyesuaian pelaksanaan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, perubahan kemampuan keuangan daerah, serta perkembangan kebutuhan pembangunan.
Subkegiatan dipertahankan	**1.387**	**66,17%**	Dipertahankan karena hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan masih sesuai target, indikator kinerja, dan diproyeksikan mampu mencapai sasaran pembangunan sampai akhir Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Barito Kuala sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 yang dipadankan dengan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026, telah dilakukan analisis terhadap **2.096 subkegiatan** yang menjadi dasar penyusunan perubahan kebijakan pembangunan daerah. Dari jumlah tersebut, **2.027 subkegiatan (96,71%)** berhasil dipadankan dengan hasil evaluasi pelaksanaan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan Perubahan RKPD. Selanjutnya, **709 subkegiatan (33,83%)** mengalami perubahan berupa penyesuaian pagu anggaran, target kinerja,

rasionalisasi pelaksanaan, maupun bentuk intervensi sesuai hasil evaluasi, perubahan kemampuan keuangan daerah, dan perkembangan kebutuhan pembangunan. Sementara itu, **1.387 subkegiatan (66,17%)** dipertahankan karena hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan diproyeksikan mampu mencapai sasaran pembangunan sampai akhir Tahun Anggaran 2026.

5.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program yang memiliki tingkat realisasi rendah namun berpengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan diarahkan untuk dipercepat melalui penyesuaian jadwal pelaksanaan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Barito Kuala sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 yang dipadankan dengan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026, telah dilakukan analisis terhadap keseluruhan program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi dasar penyusunan perubahan kebijakan pembangunan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat **2.096 subkegiatan** yang tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026, dimana **2.027 subkegiatan** berhasil dipadankan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Semester II sebagai dasar pengambilan keputusan perubahan.

Dari keseluruhan subkegiatan tersebut, teridentifikasi **709 subkegiatan** yang mengalami perubahan, baik berupa penyesuaian pagu anggaran, penyesuaian target kinerja maupun rasionalisasi pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, **1.387 subkegiatan** dipertahankan karena hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih sesuai dengan target yang telah direncanakan serta diperkirakan mampu mencapai sasaran pembangunan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Perubahan yang dilakukan merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester II yang menunjukkan adanya variasi capaian kinerja antar perangkat daerah. Beberapa subkegiatan yang memiliki tingkat capaian fisik dan keuangan relatif rendah memerlukan penyesuaian melalui pengurangan atau rasionalisasi pagu, penjadwalan ulang pelaksanaan, maupun penyesuaian target agar lebih realistis sesuai dengan sisa waktu pelaksanaan dan kemampuan penyerapan anggaran. Sebaliknya, pada subkegiatan yang masih memerlukan percepatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis daerah, dilakukan penambahan pagu maupun optimalisasi pendanaan agar target pembangunan dapat dicapai secara maksimal pada akhir tahun.

Penyesuaian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Semester II, prioritas pembangunan daerah, serta konsistensi

dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Selain itu, perubahan juga diarahkan untuk memperkuat dukungan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan.

Secara keseluruhan, perubahan RKPD Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk mengubah arah pembangunan daerah, melainkan sebagai bentuk penyempurnaan kebijakan pembangunan berdasarkan kondisi aktual pelaksanaan sampai dengan Semester II. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah, mempercepat realisasi belanja daerah, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya fiskal, serta menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan.

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga memperkuat mekanisme pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, percepatan penyelesaian kegiatan strategis, realokasi anggaran pada kegiatan yang lebih produktif, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh target kinerja pembangunan Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal serta menjadi landasan yang lebih kuat dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 dan implementasi RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Tabel 5.7 Rekap Perubahan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Capaian Semester II	Alasan Perubahan
1	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	Fokus pada peningkatan akses dan mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan melalui program yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026.	Dilakukan penyesuaian target, pagu, dan percepatan pelaksanaan pada beberapa kegiatan pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, serta perlindungan sosial.	Sebagian indikator telah menunjukkan perkembangan positif, namun masih diperlukan percepatan untuk mencapai target IPM, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas pelayanan	Penyesuaian dilakukan untuk mempercepat pencapaian indikator RPJMD, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pada kegiatan yang memberikan dampak

				dasar.	langsung kepada masyarakat.
2	**Penguatan Perekonomian Daerah**	Fokus pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, UMKM, koperasi, dan investasi.	Dilakukan penyesuaian pagu pada kegiatan yang mendukung peningkatan produksi, produktivitas, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan investasi daerah.	Produksi sektor unggulan menunjukkan perkembangan, namun masih diperlukan percepatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi daerah.	Penyesuaian diarahkan pada kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan ketahanan pangan daerah.
3	**Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah**	Difokuskan pada pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, permukiman, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya.	Penyesuaian dilakukan terhadap target dan pagu pekerjaan fisik sesuai progres pelaksanaan dan kemampuan keuangan daerah.	Sebagian pekerjaan fisik masih dalam proses pelaksanaan sehingga memerlukan percepatan pada Semester II.	Penyesuaian dilakukan agar penyelesaian infrastruktur strategis dapat diselesaikan tepat waktu serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung konektivitas wilayah.
4	**Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**	Fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan daerah.	Dilakukan penyesuaian pada kegiatan administrasi pemerintahan, peningkatan kapasitas ASN, penguatan sistem informasi, dan penyusunan dokumen perencanaan.	Sebagian besar kegiatan berjalan sesuai tahapan, namun beberapa kegiatan administrasi memerlukan efisiensi dan percepatan penyelesaian.	Penyesuaian dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah.
5	**Ketahanan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana**	Difokuskan pada pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian banjir, pengurangan risiko bencana,	Penyesuaian dilakukan pada kegiatan pengelolaan lingkungan, rehabilitasi kawasan, dan kesiapsiagaan bencana	Pelaksanaan kegiatan berjalan, namun beberapa program masih memerlukan percepatan untuk	Penyesuaian dilakukan untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana, memperkuat pengelolaan lingkungan

		dan peningkatan kualitas lingkungan.	sesuai kebutuhan daerah.	mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup.	hidup, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Perubahan pendanaan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 merupakan konsekuensi dari perubahan kemampuan keuangan daerah yang dipengaruhi oleh perkembangan realisasi pendapatan daerah, penyesuaian proyeksi transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, perkembangan Pendapatan Asli Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Semester I Tahun 2026. Perubahan kapasitas fiskal tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melakukan penyesuaian alokasi anggaran agar tetap mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara optimal.

Pergeseran anggaran antarprogram, kegiatan, subkegiatan, maupun perangkat daerah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2026 dengan mempertimbangkan tingkat capaian kinerja, realisasi fisik dan keuangan, urgensi kebutuhan pembangunan, perubahan kebijakan pemerintah, serta kemampuan pelaksanaan sampai akhir tahun anggaran. Program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian indikator makro daerah, Standar Pelayanan Minimal, program prioritas daerah, serta target RPJMD memperoleh prioritas penguatan pendanaan, sedangkan program dan kegiatan yang realisasinya rendah, mengalami perubahan kebutuhan, atau dapat dioptimalkan melalui efisiensi dilakukan penyesuaian maupun rasionalisasi anggaran.

Dengan demikian, perubahan pendanaan tidak hanya merupakan penyesuaian terhadap kapasitas fiskal daerah, tetapi juga merupakan strategi untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah melalui pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran, berorientasi pada kinerja, dan memberikan daya ungkit yang lebih besar terhadap pencapaian target pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026.

Tabel 5.8 Rekap Perubahan Anggaran SKPD dalam Perubahan RKPD Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang	Jenis Perubahan	Alasan Pergeseran
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala	545.242.097.787	524.171.991.977	**-21.070.105.810**	Berkurang	Efisiensi belanja dan penyesuaian kemampuan keuangan daerah berdasarkan hasil evaluasi Semester II.
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala	244.954.560.883	188.598.960.791	**-56.355.600.092**	Berkurang	Penyesuaian kemampuan fiskal dan optimalisasi belanja pada kegiatan prioritas kesehatan.
3	RSUD H. Abdul Azis Marabahan	17.935.614.888	14.735.614.870	**-3.200.000.018**	Berkurang	Penyesuaian kebutuhan operasional dan efisiensi belanja.
4	RSUD H. Abdul Azis Marabahan – BLUD	30.986.950.000	30.986.950.000	**0**	Tetap	Tidak terdapat perubahan pagu.
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala	258.087.287.622	227.387.287.622	**-30.700.000.000**	Berkurang	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan infrastruktur.
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	50.566.101.534	33.753.823.679	**-16.812.277.855**	Berkurang	Penyesuaian berdasarkan progres pelaksanaan pekerjaan fisik.
7	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala	26.329.903.884	15.114.157.507	**-11.215.746.377**	Berkurang	Efisiensi belanja operasional dan penyesuaian kebutuhan riil.
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala	4.626.371.236	3.560.296.091	**-1.066.075.145**	Berkurang	Penyesuaian kemampuan pendanaan daerah.
9	Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala	16.219.114.981	9.941.868.444	**-6.277.246.537**	Berkurang	Penyesuaian hasil evaluasi pelaksanaan program.
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala	7.983.637.455	5.831.293.105	**-2.152.344.350**	Berkurang	Efisiensi anggaran dan penyesuaian target kegiatan.

11	Dinas PPKBPPPA Kabupaten Barito Kuala	8.814.711.957	8.343.407.219	**-471.304.738**	Berkurang	Penyesuaian kebutuhan riil pelaksanaan program.
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala	9.542.132.238	7.015.943.034	**-2.526.189.204**	Berkurang	Optimalisasi pendanaan pada kegiatan prioritas ketahanan pangan.
13	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala	29.061.420.333	23.991.319.046	**-5.070.101.287**	Berkurang	Penyesuaian hasil evaluasi Semester II, efisiensi belanja, dan kemampuan keuangan daerah.
14	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala – BLUD	100.000.000	0	**-100.000.000**	Berkurang	Penyesuaian kebutuhan operasional BLUD.
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	8.233.287.303	6.740.492.548	**-1.492.794.755**	Berkurang	Penyesuaian kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan.
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala	11.835.346.951	8.047.666.761	**-3.787.680.190**	Berkurang	Penyesuaian berdasarkan capaian pelaksanaan dan kemampuan fiskal daerah.
17	Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala	64.512.555.182	34.154.662.593	**-30.357.892.589**	Berkurang	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah dan prioritas kegiatan transportasi.
18	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	8.807.784.485	7.967.714.047	**-840.070.438**	Berkurang	Efisiensi belanja operasional dan penguatan SPBE.
19	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala	11.384.821.181	7.983.678.255	**-3.401.142.926**	Berkurang	Penyesuaian untuk optimalisasi program pemberdayaan UMKM dan perdagangan.
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala	5.329.614.874	3.912.858.188	**-1.416.756.686**	Berkurang	Penyesuaian berdasarkan perkembangan pelayanan perizinan dan investasi.
21	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala	19.672.943.125	18.131.472.730	**-1.541.470.395**	Berkurang	Penyesuaian kegiatan sesuai kemampuan pendanaan daerah.

22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala	5.696.165.172	3.893.653.848	**-1.802.511.324**	Berkurang	Efisiensi belanja dan penyesuaian kebutuhan riil.
23	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala	14.497.915.761	9.868.059.457	**-4.629.856.304**	Berkurang	Penyesuaian untuk mendukung kegiatan prioritas ketahanan pangan.
24	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala	9.317.819.703	6.801.822.411	**-2.515.997.292**	Berkurang	Penyesuaian berdasarkan kemampuan pendanaan dan progres kegiatan.
25	Sekretariat Daerah	85.453.463.542	60.646.353.227	**-24.807.110.315**	Berkurang	Efisiensi belanja administrasi pemerintahan dan penyesuaian kemampuan keuangan daerah.
26	Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala	64.028.991.402	33.276.849.551	**-30.752.141.851**	Berkurang	Penyesuaian kebutuhan operasional DPRD dan efisiensi belanja.
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Kuala	7.947.897.932	6.180.035.094	**-1.767.862.838**	Berkurang	Efisiensi belanja penunjang dan optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan.
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	303.557.626.948	298.716.723.140	**-4.840.903.808**	Berkurang	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah dan pengelolaan APBD.
29	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala	13.041.319.490	9.372.379.915	**-3.668.939.575**	Berkurang	Penyesuaian berdasarkan proyeksi pendapatan daerah dan efisiensi kegiatan.
30	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala	7.845.435.799	6.283.749.038	**-1.561.686.761**	Berkurang	Penyesuaian kebutuhan pengembangan kompetensi ASN.
31	Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala	21.544.465.399	14.473.203.338	**-7.071.262.061**	Berkurang	Penyesuaian kebutuhan pengawasan internal dan efisiensi belanja.
32	Kecamatan Tabunganen	2.250.952.405	1.742.314.222	**-508.638.183**	Berkurang	Penyesuaian kebutuhan operasional kecamatan.
33	Kecamatan Tamban	2.874.028.751	2.505.718.192	**-368.310.559**	Berkurang	Efisiensi belanja operasional.

34	Kecamatan Mekarsari	2.841.366.697	2.002.271.501	**-839.095.196**	Berkurang	Penyesuaian berdasarkan capaian Semester II.
35	Kecamatan Anjir Pasar	3.509.595.284	2.905.260.486	**-604.334.798**	Berkurang	Penyesuaian kebutuhan pelayanan kecamatan.
36	Kecamatan Anjir Muara	3.066.718.720	2.442.966.780	**-623.751.940**	Berkurang	Efisiensi belanja dan penyesuaian kegiatan.
37	Kecamatan Alalak	10.585.250.974	9.179.542.317	**-1.405.708.657**	Berkurang	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah.
38	Kecamatan Mandastana	3.140.091.436	2.437.826.080	**-702.265.356**	Berkurang	Penyesuaian berdasarkan evaluasi pelaksanaan.
39	Kecamatan Belawang	2.666.152.162	1.935.783.822	**-730.368.340**	Berkurang	Efisiensi belanja operasional.
40	Kecamatan Wanaraya	2.116.051.665	1.817.785.550	**-298.266.115**	Berkurang	Penyesuaian kebutuhan riil pelaksanaan.
41	Kecamatan Barambai	2.825.430.302	2.145.778.755	**-679.651.547**	Berkurang	Penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi Semester II.
42	Kecamatan Rantau Badauh	2.815.423.107	2.333.280.568	**-482.142.539**	Berkurang	Penyesuaian kemampuan fiskal daerah.
43	Kecamatan Cerbon	2.566.764.996	2.064.068.901	**-502.696.095**	Berkurang	Efisiensi belanja operasional.
44	Kecamatan Bakumpai	4.001.034.135	3.638.641.277	**-362.392.858**	Berkurang	Penyesuaian kebutuhan operasional kecamatan.
45	Kecamatan Marabahan	6.763.685.674	6.704.938.300	**-58.747.374**	Berkurang	Penyesuaian kecil berdasarkan hasil evaluasi.
46	Kecamatan Tabukan	3.093.477.414	2.301.217.295	**-792.260.119**	Berkurang	Penyesuaian kegiatan dan efisiensi belanja.
47	Kecamatan Kuripan	3.022.113.836	2.167.157.880	**-854.955.956**	Berkurang	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah.
48	Kecamatan Jejangkit	2.630.926.903	2.171.912.775	**-459.014.128**	Berkurang	Penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi Semester II.
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala	11.219.988.082	7.942.923.719	**-3.277.064.363**	Berkurang	Penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, efisiensi belanja, dan kemampuan keuangan daerah.

Rekap keseluruhan:

- **Total sebelum perubahan:** Rp **1.985.146.411.590**
- **Total sesudah perubahan:** Rp **1.688.323.675.946**
- **Total pengurangan: Rp296.822.735.644** (sekitar **14,95%** dari pagu sebelum perubahan).

Rekap ini menunjukkan bahwa kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2026 didominasi oleh **rasionalisasi dan efisiensi anggaran** sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Semester II dan pensesuaian kemampuan keuangan daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Barito Kuala sampai dengan Semester II Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan secara umum berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa program dan kegiatan yang memerlukan penyesuaian. Berdasarkan evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melakukan perubahan terhadap sebagian program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas pencapaian target pembangunan hingga akhir tahun anggaran.

Perubahan difokuskan pada kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator makro pembangunan daerah, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta penguatan ketahanan lingkungan hidup. Penyesuaian dilakukan melalui penambahan pagu pada kegiatan prioritas yang memerlukan percepatan, pengurangan atau rasionalisasi pada kegiatan yang realisasinya belum optimal, serta penyesuaian target agar lebih realistis sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembangunan.

Selain mempertimbangkan hasil evaluasi Semester II, perubahan juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah, efisiensi belanja, serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi yang berkembang selama Tahun 2026. Dengan demikian, Perubahan RKPD Tahun 2026 tetap menjaga konsistensi terhadap RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 sekaligus memastikan bahwa sumber daya pembangunan dialokasikan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Tabel 5.9 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi terhadap Perubahan RKP

Hasil Evaluasi Semester II	Tindak Lanjut dalam Perubahan RKPD	Dampak yang Diharapkan
Realisasi fisik rendah	Percepatan pelaksanaan dan penyesuaian target	Peningkatan capaian fisik hingga akhir tahun
Realisasi keuangan rendah	Rasionalisasi dan realokasi anggaran	Penyerapan anggaran lebih optimal
Target telah tercapai	Efisiensi dan penguatan kualitas output	Efektivitas penggunaan anggaran

Kegiatan prioritas memerlukan dukungan	Penambahan pagu	Percepatan pencapaian sasaran RPJMD
Perubahan kemampuan keuangan daerah	Penyesuaian pagu dan target	Keseimbangan antara perencanaan dan kapasitas fiskal

5.4 Perubahan Pendanaan Daerah

Perubahan pendanaan daerah dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan proyeksi pendapatan, evaluasi realisasi belanja Semester I, serta kebutuhan percepatan penyelesaian program prioritas. Penyesuaian pendanaan dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal dan mengutamakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Perubahan pagu diarahkan untuk:

- mendukung penyelesaian proyek strategis daerah;
- memperkuat pelayanan dasar;
- meningkatkan efektivitas penanganan kemiskinan dan stunting;
- mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas;
- memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, lokasi, serta pagu pendanaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, perubahan kemampuan keuangan daerah, perkembangan kebijakan nasional dan provinsi, serta kebutuhan percepatan pencapaian target RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

5.5 Lokasi Prioritas Pembangunan

Lokasi prioritas pembangunan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi Semester I, analisis kondisi sosial ekonomi, tingkat kemiskinan, kerawanan banjir, kondisi infrastruktur, serta potensi pengembangan ekonomi wilayah. Penentuan lokasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi pembangunan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal terhadap masyarakat.

Prioritas lokasi diarahkan pada:

- kecamatan dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi;
- kawasan sentra produksi pertanian dan perikanan;
- wilayah yang masih memiliki akses infrastruktur dasar rendah;
- kawasan rawan banjir;

- kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.

5.6 Indikasi Program Prioritas Perangkat Daerah

Indikasi program prioritas perangkat daerah merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Setiap perangkat daerah diwajibkan menyelaraskan program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan dengan sasaran Perubahan RKPD Tahun 2026 serta memastikan pelaksanaan program dapat mendukung pencapaian target RPJMD.

5.7 Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Matriks ini disusun berdasarkan struktur SIPD dan menjadi dasar penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, KUPA–PPAS Perubahan, serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. matrik sebagaimana termuat dalam **lampiran dokumen ini.**

5.8 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perubahan RKPD Semester II Tahun 2026

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran pembangunan, indikator kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat waktu, dan sesuai target sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026. Pengendalian dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari fungsi manajemen pembangunan daerah serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan apabila diperlukan penyesuaian pelaksanaan program pada Semester II.

Pelaksanaan pengendalian dilakukan secara berjenjang oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan program, dengan koordinasi oleh Bapperida Kabupaten Barito Kuala melalui pemantauan realisasi fisik dan keuangan, capaian indikator kinerja, identifikasi permasalahan, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan dalam rapat koordinasi pengendalian pembangunan daerah serta dasar penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah.

Monitoring pelaksanaan Perubahan RKPD dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan terhadap perkembangan capaian indikator pembangunan, realisasi program dan kegiatan, serta efektivitas penggunaan anggaran. Apabila hasil monitoring menunjukkan adanya deviasi yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan, perangkat daerah wajib menyusun langkah percepatan dan tindak lanjut sesuai hasil evaluasi.

Tabel 5.10 indikator monitoring

Aspek Monitoring	Indikator	Target Monitoring	Frekuensi	Penanggung Jawab
Capaian sasaran pembangunan	Persentase capaian indikator kinerja daerah	Sesuai target RKPD	Bulanan/Triwulan	Bapperida & OPD
Pelaksanaan program	Persentase realisasi fisik	Sesuai rencana Semester II	Bulanan	OPD
Penyerapan anggaran	Persentase realisasi keuangan	Sesuai target kas	Bulanan	BPKAD & OPD
Prioritas pembangunan	Persentase capaian program prioritas	On Track	Triwulan	Bapperida
Pelayanan dasar	Capaian indikator SPM	Sesuai target	Triwulan	OPD teknis
Tindak lanjut evaluasi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	Triwulan	OPD & Bapperida

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, perkembangan kondisi ekonomi daerah, perubahan kemampuan keuangan daerah, dinamika kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta perkembangan prioritas pembangunan daerah. Melalui Perubahan RKPD ini diharapkan pelaksanaan pembangunan pada Semester II Tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, efisien, adaptif, dan tepat sasaran sehingga mampu mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 menjadi **pedoman pelaksanaan pembangunan daerah pada Semester II Tahun 2026** bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan arah kebijakan, sasaran pembangunan, indikator kinerja, target, serta prioritas pembangunan yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan. Seluruh perangkat daerah diharapkan melaksanakan program dan kegiatan secara konsisten, akuntabel, tepat waktu, dan berorientasi pada hasil guna memastikan tercapainya target pembangunan daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Selain sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah, **Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 juga menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026**. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah tetap terjaga konsistensinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah, pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu didukung oleh pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan melalui koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, DPRD, dunia usaha, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan pelaksanaan pembangunan serta bahan penyusunan dokumen perencanaan pada periode berikutnya.

Dengan komitmen, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 mampu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan pembangunan Kabupaten Barito Kuala yang **maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan** sesuai visi RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 disusun dengan menjaga konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, perubahan target indikator kinerja daerah, sasaran pembangunan, prioritas pembangunan, program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, serta pendanaan daerah. Setiap penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, perubahan kemampuan keuangan daerah, serta perkembangan kebijakan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan sehingga tetap selaras dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Selain itu, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 telah memperhatikan sinkronisasi dengan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, serta arah kebijakan pembangunan nasional sehingga terwujud keterpaduan perencanaan pembangunan antar tingkatan pemerintahan.

Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026, seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk:

1. menyesuaikan Perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan Perubahan RKPD;
2. menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah berdasarkan pagu indikatif yang telah ditetapkan;
3. mempercepat pelaksanaan program prioritas pada Semester II;
4. meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
5. menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala kepada Bapperida;
6. memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pembangunan.

Harapan

Melalui Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 diharapkan seluruh sasaran pembangunan daerah dapat dicapai secara optimal, sehingga mampu mendukung

terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

Perubahan RKPD juga diharapkan menjadi instrumen yang mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan secara terpadu.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026 diharapkan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ketahanan ekonomi dan lingkungan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.